



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG



RPJMD

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen perencanaan strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dasar hukum penyusunan RPJMD diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD disusun untuk jangka waktu lima tahun, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, Pasal 263 dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, dan wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Peraturan Daerah.

Sebagai pedoman utama pembangunan daerah, RPJMD memiliki peran penting dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, serta menjamin keterpaduan antarsektor dan antarlevel pemerintahan. Dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur, RPJMD menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan secara sistematis untuk menilai capaian, efektivitas kebijakan, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Dalam implementasinya, penyusunan RPJMD juga mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik, sehingga memperkuat legitimasi serta rasa memiliki terhadap arah dan hasil pembangunan.

Lebih dari itu, RPJMD mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sinergi lintas sektor dan lintas pelaku pembangunan guna mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan strategis yang menjembatani kepentingan lokal dengan agenda pembangunan nasional dan global.

Ketentuan normatif penyusunan RPJMD diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara teknis tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan



ini memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, termasuk RPJMD, agar selaras dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk periode perencanaan 2025–2029, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menegaskan pentingnya keselarasan substansi antara RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta keterpaduan terhadap arah kebijakan nasional.

Lebih lanjut, selain sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 juga harus disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini meliputi harmonisasi kinerja, kesesuaian periode perencanaan, serta integrasi terhadap 17 Program Prioritas Nasional dan 8 Proyek Quick Wins (Hasil Terbaik Cepat) yang menjadi fokus pemerintah pusat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka menengah.

Konteks lokal penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 ditandai dengan terpilihnya pasangan Hendri Arnis dan Alex Saputra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Keduanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan 2025–2030. Sesuai dengan Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penerjemahan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD, yang dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 juga merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024. Dalam konteks ini, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen arah pembangunan menengah daerah, tetapi juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.



Dengan kerangka regulatif yang kuat, keselarasan terhadap kebijakan nasional, dan berlandaskan visi kepala daerah terpilih, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD harus dilakukan dengan pendekatan yang rasional, operasional, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan pendekatan teknokratis yang mengedepankan manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini akan memastikan bahwa RPJMD yang disusun dapat dioperasionalkan dengan baik dan menciptakan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu:

1. **Pendekatan Politik**, pendekatan ini memandang pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan program pembangunan, di mana rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah. Dalam konteks ini, rencana pembangunan menjadi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Daerah selama masa kampanye ke dalam RPJMD. Proses ini juga melibatkan pembahasan di DPRD yang merujuk pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas, dengan tujuan memperoleh persetujuan bersama. Lebih lanjut, Pasal 68 ayat (3) juga mengatur bahwa penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat dilakukan 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.
2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan teknokratik dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Pendekatan ini menekankan pada aspek teknis dan ilmiah dalam menyusun program pembangunan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data dan analisis yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

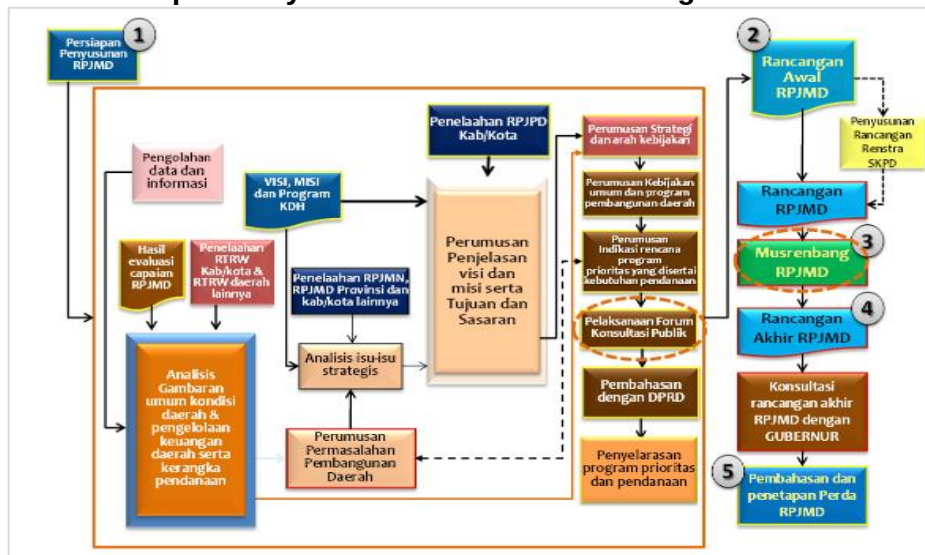


3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), pakar, dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, serta pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat luas, menciptakan rasa memiliki terhadap program-program yang ada, serta menjamin keberlanjutan dan relevansi kebijakan yang diterapkan.
4. **Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up**, pendekatan ini dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan, di mana kebijakan dan program pembangunan disusun secara bertahap dari pusat ke daerah (top-down) atau sebaliknya, dari bawah ke atas (bottom-up). Proses perencanaan ini kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang menggabungkan hasil dari kedua pendekatan tersebut, dengan tujuan memastikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
5. **Pendekatan Holistik-Tematik**, pendekatan holistik-tematik memandang pembangunan sebagai suatu kesatuan yang utuh (holistik) sambil tetap berfokus pada tema-tema prioritas (tematik). Pendekatan ini mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan, termasuk potensi, tantangan, dan masalah yang saling berkaitan. Ciri utama dari pendekatan ini adalah pandangan yang menyeluruh, penekanan pada tema-tema prioritas, penanganan yang terpadu, serta perhatian terhadap keterkaitan antar elemen pembangunan. Implementasi pendekatan ini dilakukan melalui analisis yang komprehensif, identifikasi tema-tema prioritas, pengembangan strategi yang terintegrasi, dan penyusunan program yang saling mendukung.
6. **Pendekatan Integratif**, pendekatan integratif adalah metode perencanaan yang menggabungkan berbagai kewenangan dalam satu proses terpadu dengan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan berbagai program dari perangkat daerah yang berbeda namun memiliki tujuan serupa, sehingga memfasilitasi koordinasi antar-sektor dan lintas-program. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari tumpang tindih program, dan menciptakan sinergi antar program pembangunan yang ada.
7. **Pendekatan Spasial**, pendekatan spasial adalah metode perencanaan yang mempertimbangkan dimensi keruangan atau kewilayahan dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Pendekatan ini sangat penting dalam memastikan bahwa

pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau sektoral, tetapi juga pada penyebaran dan distribusi geografis yang merata. Pendekatan spasial memanfaatkan data geo-spasial untuk menentukan lokasi pembangunan, mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Penerapan pendekatan ini erat kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang memberikan kejelasan lokasi dan memudahkan proses monitoring serta evaluasi pembangunan.

Selanjutnya Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat



Gambar di atas menggambarkan alur dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis, mulai dari persiapan hingga penetapan Perda RPJMD. Berikut tahapan penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD :
 - a. Tahap awal dimulai dengan pembentukan Tim Penyusunan RPJMD yang terdiri dari tim koordinasi yang beranggotakan seluruh kepala Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang dan tim teknis yang bertugas untuk penyusunan dan penulisan dokumen.
 - b. Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra PD yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025
 - c. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang relevan, termasuk hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya, penelaahan RTRW, RPJMN, dan dokumen perencanaan



lainnya.

- d. Analisis dilakukan terhadap kondisi umum daerah, pengelolaan keuangan, serta kerangka pendanaan, guna mendapatkan gambaran menyeluruh situasi daerah. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah terpilih.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD :
 - a. Berdasarkan analisis dan rumusan masalah, disusun rancangan awal RPJMD yang memuat data dan informasi, penjelasan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, program prioritas daerah
 - b. Pada tahap ini juga dilakukan penelaahan terhadap RPJPD Kota Padang Panjang Tahap 1 Tahun 2025-2045 sebagai acuan.
 - c. Rancangan awal ini menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
 - d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Maret 2025.
 - e. Penyempurnaan Ranwal RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik, kemudian Ranwal RPJMD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama.
 - f. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD pada tanggal 14 April 2025
 - g. Perbaikan hasil Pembahasan dengan DPR, kemudian disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk di konsultasikan guna memperoleh masukan dan memastikan keselarasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025.
3. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 :
 - a. Rancangan Awal hasil konsultasi dengan provinsi disempurnakan menjadi Rancangan RPJMD kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan dari berbagai pemangku kepentingan. Musrenbang ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.
 - b. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
 - c. Penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang.
4. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD :
 - a. Rancangan RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil



- musrenbang akan menjadi Rancangan Akhir RPJMD
- b. Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan tanggal 19 Mei 2025.
 - c. Rancangan akhir ini dilakukan Harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 2025, guna mendapatkan Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah agar dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.
 - d. Penyempurnaan Rancangan Akhir berdasarkan hasil harmonisasi.
5. Penetapan Perda RPJMD :
- a. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
 - b. Pembahasan bersama Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
 - c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
 - d. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi.
 - e. Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029, setelah pelaksanaan evaluasi maka Pemerintah Kota melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.
 - f. Penetapan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

- a. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 - f. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
 - g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan



- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - p. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - q. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 - r. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
 - s. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
 - t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - u. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

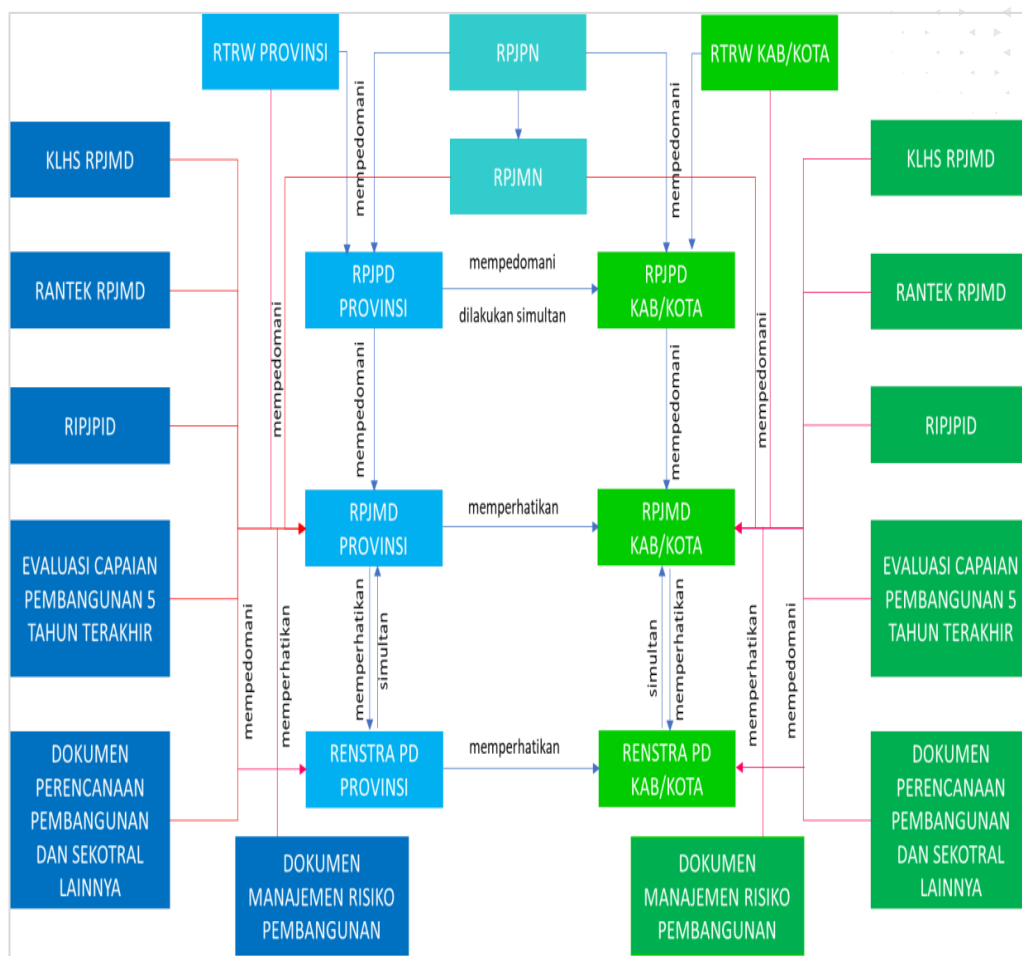


- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- cc. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
- ee. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- ff. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Sektoral Lainnya



A. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Padang Panjang adalah dokumen perencanaan yang merencanakan pembangunan daerah dalam jangka waktu panjang, yaitu 20 Tahun. RPJMD Tahun 2025-2029, merupakan pentahapan pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045 dengan tema pentahapan yaitu **“Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah”**. RPJMD merinci langkah-langkah pembangunan yang lebih spesifik dan terukur selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam RPJPD. Artinya, RPJMD harus menjadi implementasi jangka menengah dari RPJPD, dengan tetap memperhatikan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Rumusan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1
Penyelarasan Visi, Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045
dengan Visi, Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029



Visi RPJPD 2025 - 2045	Visi RPJMD 2025 - 2029
PADANG PANJANG AGAMIS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH
Misi RPJPD 2025 - 2045	Misi RPJMD 2025 - 2029
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi	Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal
Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif
Misi 4 : Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	
Misi 5 : Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan
Misi 7 : Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
Misi 8 : Mewujudkan Kesisambungan Pembangunan Daerah	

B. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi

Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang mempedomani RPJMN 2025-2029 dengan dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 20205-2029, Penyusunan RPJMD harus sejalan dan menyelaraskan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dengan program-program nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, memastikan pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu delapan prioritas pembangunan jangka menengah. Pembangunan antara pusat dan daerah harus terkoordinasi untuk

mencapai keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Hubungan secara substansi yang ada dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Padang Panjang terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Padang Panjang di bawah ini :

Tabel 1. 2
Penyelerasan Antara RPJMD Kota Padang Panjang dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi

RPJMN Tahun 2025 - 2045	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029	RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029
Visi	Visi	Visi
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045	SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN	PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH
Asta Cita	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Misi 3 : Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal
Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Misi 7 : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan		

RPJMN Tahun 2025 - 2045	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029	RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029
pemberantasan kemiskinan		
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba		
Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.	Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat
Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan

C. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Tahun 2012-2032

RTRW merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Mengutip Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan RPJMD harus pula memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai penetapan pola dan struktur tata ruang, penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah, agar arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. .

Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin bahwa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup



secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian dan mengamankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

D. Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten/Kota

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan KLHS sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan syarat substantif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum RPJMD dapat ditetapkan secara sah.

KLHS berperan sebagai dasar ilmiah dan pertimbangan strategis dalam merumuskan substansi RPJMD. Dokumen ini menyediakan informasi terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan, capaian indikator TPB, serta isu strategis pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi KLHS diintegrasikan ke dalam perumusan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga indikator kinerja daerah. Dengan demikian, KLHS memastikan bahwa seluruh elemen dalam RPJMD berpijak pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, integrasi KLHS menjadi landasan untuk merancang arah pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis. Penyusunan KLHS dan RPJMD dilakukan secara simultan agar analisis keberlanjutan dapat langsung diadopsi dalam penyusunan program dan kegiatan. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengharuskan RPJMD memuat hasil integrasi dokumen KLHS dan analisis pembangunan berkelanjutan.

Dengan berpedoman pada KLHS, RPJMD diharapkan mampu menjamin bahwa pembangunan di Kota Padang Panjang berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. KLHS berkontribusi dalam meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pembangunan, serta mendukung pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah. Hal ini menjadikan RPJMD sebagai dokumen strategis yang tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim, risiko bencana, dan ketimpangan sosial.

E. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rencana Sektor



RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional sektoral. Renstra PD berfungsi sebagai penjabaran teknis RPJMD dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Setiap perangkat daerah menyusun Renstra PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hubungan ini memastikan bahwa program dan kegiatan sektoral yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah tetap terarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam implementasinya, RPJMD juga diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan RKPD diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Padang Panjang dalam kurun waktu dari tahun 2025-2029. RPJMD juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.

Tujuan dari Penyusunan RPJMD, yaitu:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045;
4. Untuk menjamin konsistensi dan sinergi antara prioritas pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga RPJMD dapat menerjemahkan dan mengadaptasi prioritas nasional sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;



5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029; dan
6. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Padang Panjang periode 2025-2029.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Dasar hukum penyusunan;
- 1.3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- 1.4. Maksud dan tujuan; dan
- 1.5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Aspek geografi dan demografi;
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah;
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum;
- 2.5. Standar Pelayanan Minimal;
- 2.6. Kerjasama Daerah;
- 2.7. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD provinsi di kabupaten/kota;
- 2.8. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda;
- 2.9. Gambaran Keuangan Daerah; dan



- 2.10. Permasalahan Dan Isu Strategis
 - 2.10.1. Permasalahan pembangunan daerah
 - 2.10.2. Isu strategis daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3.1.1. Visi dan Misi; dan
 - 3.1.2. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- 3.2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - 3.2.1. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - 3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1. Subbab Program Perangkat Daerah
 - 4.1.1. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - 4.1.2. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 4.2.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - 4.2.2. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografis

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha, mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang

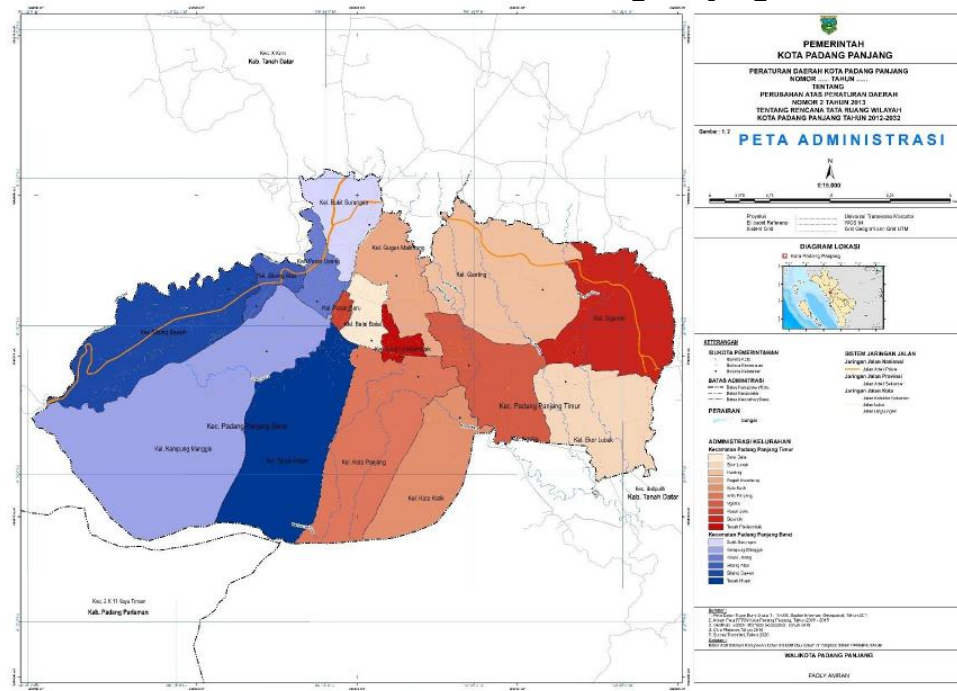
Wilayah	Luas	
	Ha	%
Kecamatan Padang Panjang Barat	1.151,20	48,86
1.1 Balai Balai	37,56	1,59%
1.2 Bukit Surungan	79,72	3,38%
1.3 Kampung Manggis	489,1	20,76%
1.4 Pasar Baru	8,59	0,36%
1.5 Pasar Usang	42,49	1,80%
1.6 Silaing Atas	30,03	1,27%
1.7 Silaing Bawah	212,14	9,00%
1.8 Tanah Hitam	251,59	10,68%
Kecamatan Padang Panjang Timur	1.204,80	51,14
1.9 Ekor Lubuk	157,25	6,67%
1.10 Ganting	242,75	10,30%
1.11 Guguk Malintang	95,76	4,06%
1.12 Koto Katik	138,95	5,90%
1.13 Koto Panjang	229,58	9,74%
1.14 Ngalau	135,41	5,75%
1.15 Sigando	185,61	7,88%
1.16 Tanah Paklambiak	19,46	0,83%
Padang Panjang	2.300	100

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Secara administrasi Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

Gambar 2.1
Peta Administratif Kota Padang Panjang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

2. Kondisi Geografis dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 32'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 30'$ Bujur Timur (BPS), atau terletak pada $0^{\circ}26'48,30''$ Lintang Selatan sampai dengan $0^{\circ}29'31,94''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}20'$ sampai dengan $100^{\circ}27'$ Bujur Timur (Revisi RTRW). Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Kota Padang Panjang memainkan peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Sumatera Barat. Dalam bidang perdagangan, Pasar Pusat Padang Panjang telah berkembang menjadi simpul ekonomi yang



melayani kebutuhan tidak hanya masyarakat kota, tetapi juga daerah sekitarnya seperti Batipuh, X Koto, dan Kayu Tanam. Aktivitas distribusi barang dan jasa dari pasar ini menciptakan efek multiplikatif terhadap ekonomi mikro kawasan, memperkuat keterkaitan antarwilayah melalui rantai pasok lokal dan regional.

Di sektor pendidikan, Padang Panjang dikenal sebagai ‘Kota Pelajar’ yang menampung berbagai institusi pendidikan formal dan keagamaan terkemuka. Keberadaan pesantren, sekolah umum, madrasah, hingga perguruan tinggi menarik ribuan siswa dari kabupaten/kota lain di Sumatera Barat maupun luar provinsi. Kota ini tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menciptakan ekosistem penunjang seperti asrama, rumah indekos, pusat literasi, dan komunitas belajar yang memberi dampak ekonomi dan sosial kepada masyarakat lokal maupun daerah tetangga.

Dalam sektor pariwisata, potensi Padang Panjang semakin diakui berkat pengelolaan destinasi berbasis budaya, alam, dan sejarah. Kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar, seperti Tanah Datar dan Agam, membuka peluang pengembangan kawasan wisata terpadu berbasis lintas wilayah. Aset seperti Minang Fantasi, Museum Dokumentasi Islam, dan destinasi berbasis desa wisata menjadi daya tarik unggulan. Peran kota sebagai pintu gerbang wisatawan yang menuju kawasan dataran tinggi Sumatera Barat memperkuat posisinya sebagai simpul pariwisata regional.

Dari sisi konektivitas, posisi geografis Padang Panjang sangat strategis karena berada di jalur utama penghubung Kota Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Aksesibilitas yang tinggi ini menjadikan Padang Panjang sebagai titik transit penting dalam sistem logistik, distribusi barang, dan pergerakan orang antarwilayah. Fasilitas transportasi yang terus berkembang, seperti terminal regional dan rencana integrasi angkutan, memperkuat daya dukung kota sebagai pusat distribusi.

Kontribusi lain yang tak kalah penting adalah dalam aspek pembangunan wilayah dan layanan dasar. Melalui program pengembangan desa wisata dan edukasi pertanian, kota ini turut menjaga kelestarian lahan dan memperkuat ketahanan pangan regional. Di sisi lain, kemajuan layanan kesehatan—dengan hadirnya rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan modern—serta meningkatnya aktivitas sosial dan pelayanan kesejahteraan, menjadikan Padang Panjang sebagai pusat layanan publik yang menjangkau masyarakat hingga ke luar batas administrasi kota.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotik, udara dan sinar surya atau matahari, mineral, bentang alam (*landscape*), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Adapun lingkungan hidup adalah



sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang sedang dan akan dilakukan di Sumatera Barat hendaknya mempertimbangkan faktor lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pembangunan di daerah ini hendaknya selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan dimanfaatkannya sumber daya alam itu secara efisien, maka makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan dan kesejahteraan rakyat daerah ini dalam jangka panjang.

1. Sumber Daya Air

Sumber daya air yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur.

a. Daerah Aliran Sungai

Secara regional (konteks Provinsi), Kota Padang Panjang termasuk dalam 2 wilayah sungai (WS) yaitu WS Akuaman pada bagian barat dan WS Indragiri pada bagian timur.

- WS Akuaman pada bagian barat : WS akuaman terdiri dari beberapa aliran, salah satu diantaranya yang berada di wilayah Kota Padang Panjang yaitu aliran Sungai Andok.
- WS Indragiri pada bagian timur

Adapun secara lokal, Kota Padang Panjang terbagi atas 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) meliputi:

- DAS Batang Anai berlokasi di bagian barat: seluas $\pm 380,80$ Ha
- DAS Sungai Andok berlokasi dibagian tengah (barat): seluas $\pm 931,46$ Ha
- DAS Batang Rupit berlokasi dibagian tengah (timur): seluas $\pm 939,47$ Ha
- DAS Batang Sikakeh berlokasi di bagian timur: seluas $\pm 721,81$ Ha

Terdapat 7 sungai di Kota Padang Panjang dengan total panjang 24,99 Km dan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur. Kondisi sungai di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Sungai di Kota Padang Panjang

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Batang Sibunian	2,91	1,711	1,313	0,301	0,230	0,046
2	Batang Sikakeh	4,33	3,961	3,367	0,306	0,297	0,104
3	Sungai Talang	5,12	5,094	2,433	0,309	0,858	0,037
4	Batang Sitabak	1,74	3,667	3,777	0,367	0,611	0,117
5	Batang Aia Bakarek-karek	3,63	3,073	2,507	0,299	0,684	0,062



No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
6	Parik Rumpang	3,64	2,584	1,470	0,278	0,604	0,035
7	Sungai Andok	3,62	11,567	8,600	0,533	2,776	0,833

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Wilayah Sungai (WS) Indragiri terbagi atas 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) sebagai berikut

- **DAS Batang Anai :**
Batang Anai (di bagian wilayah Indragiri Akuaman), merupakan sungai strategis dengan total panjang 52 km. Hulu sungai terdapat buangan air PLTA Singkarak dan muaranya berdekatan dengan Bandara Internasional Minangkabau dan berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tanah dan Kabupaten Pariaman. Bagian Barat Wilayah Kota Padang Panjang termasuk ke dalam DAS ini, melewati daerah perbukitan, pertanian dan pemukiman di beberapa titik. DAS batang anai ini dimanfaatkan untuk irigasi serta wisata alam oleh kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah ini. Bagian hilir dari DAS ini
- **DAS Sungai Andok :**
Aliran sungai andok menerima beberapa anak aliran yang mengalir pada wilayah Barat Kota Padang Panjang seperti Batang Air Putih, Batang Air Bakarek-karek dan Parit Rumpang, sebagai berikut.
 - Batang Air Putih. Sebagian besar daerah aliran sungai ini merupakan wilayah hutan dan perbukitan dengan kontur yang terjal. Tingkat kontaminasi yang masuk ke aliran ini relative lebih kecil.
 - Batang Air Bakarek-karek. Hulunya berasal dari wilayah Sungai Talang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang merupakan lahan pertanian yang cukup luas. Aliran sungai ini mengalir pada wilayah pusat kota yang merupakan kawasan padat penduduk, sehingga aliran ini menerima bahan buangan yang cukup banyak dari berbagai aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sehingga potensi terkontaminasi dengan bahan pencemar cukup tinggi pada aliran sungai ini.
 - Parit Rumpang. Aliran sungai ini bersumber dari suatu aliran yang berasal dari Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, mengalir di pusat Kota Padang Panjang mulai dari bagian timur Terminal Bus Regional Bukit Surungan ke arah Kelurahan Pasar Usang dan hilirnya bertemu dengan Batang Bakarek-karek di Kelurahan Kampung Manggis.
- **DAS Batang Rupit**
DAS ini berada di wilayah tengah Kota Padang Panjang. Sungai utama yang berada pada DAS ini antara lain Sungai Talang, Batang Sitabak



dan Sungai Sibunian, disamping itu ada juga anak-anak aliran sungai yang termasuk ke dalam DAS ini.

- Sungai Talang. Bagian hulu berasal dari wilayah Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Bantaran sungai berbentuk tebing terjal dengan aliran yang cukup panjang melewati beberapa Kelurahan di Kota Padang Panjang. Pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas air sungai ini berasal dari bahan buangan aktivitas pertanian yang cukup luas di sepanjang DAS, disamping itu kontaminan yang cukup besar juga diterima aliran air kotor yang berasal dari aktivitas manusia di sepanjang wilayah yang dilalui.
- Batang Sibunian. Aliran sungai ini berhulu di Kabupaten Tanah Datar, mengalir ke wilayah Kota Padang Panjang mulai dari Bukit Kandung, Kelurahan Ganting sampai ke hilirnya di wilayah Batu Tagak di Kelurahan Ekor Lubuk. Batang air ini merupakan aliran irigasi yang mengairi cukup luas lahan pertanian dan perikanan. Disamping itu juga menerima limpasan air dari sawah. Badan air ini juga menerima limbah cair yang berasal dari pemukiman penduduk dan usaha/kegiatan yang ada di sepanjang sungai.
- Batang Sitabak mempunyai banyak anak aliran seperti aliran dari mata air bulaan, mata air pancuran karang, serta limpasan air pertanian dan irigasi. Aliran sungai ini juga menerima aliran limbah dari pemukiman penduduk.
- DAS Batang Sikakeh :
Aliran Batang Air Sikakeh dari hulu berasal dari pengairan irigasi pertanian di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, masuk ke Kota Padang Panjang di Kelurahan Sigando melalui Batang Air Solok Batuang Atas, Solok Batuang Atas, Solok Batuang Bawah dan dua aliran irigasi di Batang Arau. Bagian hilir anak-anak sungai ini berada di wilayah Guguk Kuliling Kelurahan Ekor Lubuk dan seterusnya mengalir ke arah Batipuh.

b. Air Tanah

Sumber air tanah yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai

sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur. Berdasarkan peta hidrogeologi yang disusun oleh Sukrisno (1985) keterdapatn air tanah dan produktivitas akuifer wilayah Kota Padang Panjang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Setempat Akuifer Produktif : Akuifer terdiri dari bahan pasir, tidak menerus, agak tebal dan keterusan sedang hingga tinggi. Muka air tanah tidak tertekan umumnya terdapat pada kedalaman lebih dari 5 meter di bawah permukaan tanah setempat. Secara administrasi termasuk Kelurahan Ganting, Sigando,



Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk yang meliputi areal seluas 1.433,31 Ha.

2. Produktivitas Akuifer Kecil : Aliran air tanah pada akuifer ini melalui celahan atau rekahan bermacam batupasir atau ruang antar butir dari pelapukan batuan tersebut. Meskipun secara umum produktivitasnya kecil, namun pada daerah lembah atau zona pelapukan yang tebal masih dapat diharapkan sumber air tanah yang cukup berarti. Di daerah lembah umumnya mempunyai muka air tanah dangkal. Di Wilayah Kota Padang Panjang, akuifer kecil terdapat di bagian Barat dan tengah. Secara administrasi akuifer ini berada di wilayah Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis yang meliputi areal seluas 1.303,56 Ha.
3. Daerah Air Tanah Langka : Tersebar di Elevasi tinggi dan batuan padu. Di Wilayah Kota Padang Panjang terdapat dibagian Selatan. Secara administrasi termasuk dalam Kelurahan Tanah Hitam yang meliputi areal seluas 236,67 Ha.

Tabel 2.3
Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang

No.	Klasifikasi Air Tanah	Luas (Ha)	Persen	Sebaran (Kelurahan)
1	Setempat Akuifer Produktif	1.107,32	47%	Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk.
2	Produktivitas Akuifer Kecil	1.036,64	44%	Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis
3	Daerah Air Tanah Langka	188,48	8%	Kelurahan Tanah Hitam
Jumlah		2.356,01		

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

c. Mata Air

Berdasarkan data dari Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang terdapat beberapa sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Tirta, yaitu:

- a) Kandang di Tabek : Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi pada ketinggian 960 dpl dibangun pada tahun 1913 dengan konstruksi bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 30 l/dt.

Lubuk Mata Kucing : Ada 2 sumber mata air pada lokasi ini yaitu sumber pompa dan gravitasi. (1) Sumber pompa berlokasi di Kelurahan Pasar Usang dengan elevasi 764 dpl. Sumber pompa dibangun pada tahun 1989 dengan konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 120 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 90 l/dt. (2) Sedangkan sumber



gravitasi pada tahun 2018 telah resmi diberi nama Zona Air Minum Prima (ZAMP) oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Air Minum (BPPSPAM) karena telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu kualitas, kuantitas dan kontinuitas pendistribusian air minum. Kapasitas terpasang berkisar 10 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 8 l/dt.

- b) Sungai Andok Pompa : Dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, dengan Kapasitas terpasang berkisar 30 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 15 l/dt. Sumber air ini digunakan sebagai cadangan ketika sumber air lainnya mengalami penurunan produksi.
- c) Tungku Sadah : Sumber mata air ini dibangun tahun 1997, berlokasi di Kawasan hutan tungku saadah dengan konstruksi permanen dan kapasitas terpasang 25 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 20 l/dt.
- d) Tungku sadah (kandang kudo) : Sumber ini merupakan sumber tungku sadah 2 dengan kapasitas terpasang 15 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 10 l/dt.
- e) Sawah Liek : Sumber mata air dibangun tahun 2005 berlokasi di Kawasan hutan sawah liek dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar 10 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 8 l/dt.
- f) Koto katiak : Sumber ini dibangun pada tahun 2010 terletak pada elevasi 860 mdl. Kapasitas terpasang sebesar 4 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 1 l/dt.

Selain itu, juga terdapat sumber mata air potensial yang dimanfaatkan sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang

No	Sumber Air	Dikelola / dimanfaatkan oleh	Potensi air (m ³ /hari)	Lokasi
1	Sumur MCK RT, 09 Kelurahan Bukit Surungan	100 jiwa	12	Kelurahan Bukit Surungan
2	Sumur Al Birr	50 jiwa	6	Kelurahan Bukit Surungan
3	Bula'an Dakek	50 jiwa	6	Kelurahan Kampung Manggis
4	Sumur MCK Amanah	150 jiwa	18	Kelurahan Kampung Manggis
5	Bula'an	1300 jiwa	156	Kelurahan Sigando
6	Mata Air Timbarau	500 jiwa	60	Kelurahan Sigando
7	Sumur MCK Sampang Labuah	50 jiwa	6	Kelurahan Sigando
8	Mata Air Lubuak Gadang	500 jiwa	60	Kelurahan Ekor Lubuk
9	Mata Air Lubuak Masjid	1000 jiwa	120	Kelurahan Ekor Lubuk
10	Pincuran Gucci	100 jiwa	12	Kelurahan Ganting
11	Pincurang Guang Koto	100 jiwa	12	Kelurahan Ngalau
12	Mato Aia Sago	50 jiwa	6	Kelurahan Ngalau
13	Bula'an	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Panjang
14	Pincuran Basi	100 jiwa	12	Kelurahan Koto Panjang
15	Mato Aia Surau Anduang	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Panjang



No	Sumber Air	Dikelola / dimanfaatkan oleh	Potensi air (m ³ /hari)	Lokasi
16	Pincuran Kalimpariak	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Katik
17	Pincuran Tarian	50 jiwa	6	Kelurahan Guguk Malintang

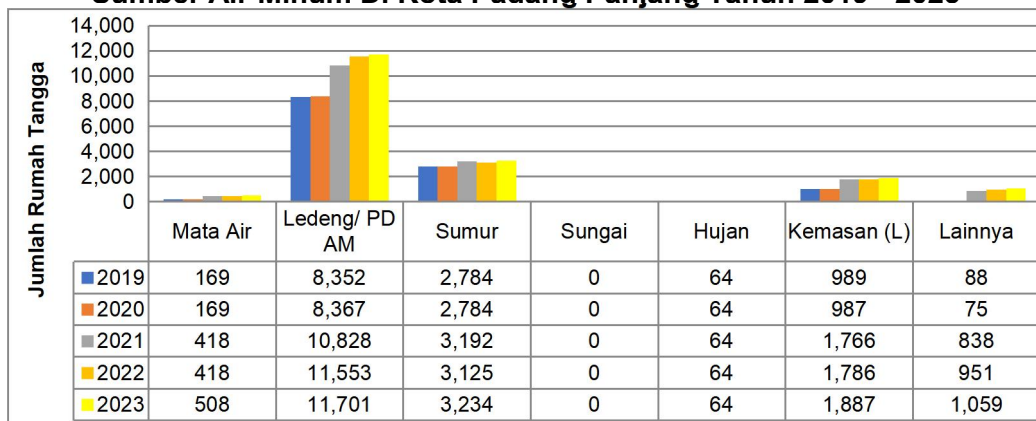
Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk dimanfaatkan, yaitu:

1. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
2. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
3. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
4. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang adalah dari PDAM. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga memanfaatkan air sumur dan mata air untuk memenuhi kebutuhannya di Kota Padang Panjang. Jumlah pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023



Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024

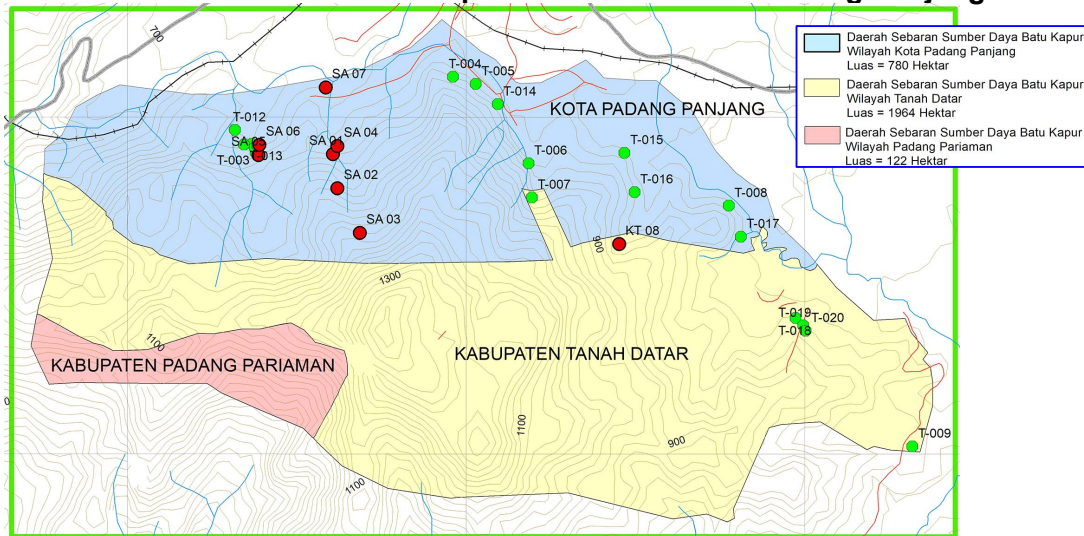
2. Sumber Daya Tambang

Dari Hasil survey diketahui bahwa Kota Padang Panjang memiliki potensi batu kapur (Batu gamping) berbatasan dengan jalur Bukit Barisan. Sebaran batu gamping di wilayah administrasi kota Padang Panjang terletak pada sisi Selatan di sepanjang Bukit Tui secara geologi termasuk Batu gamping. Sebaran batu gamping ini menerus hingga ke Kabupaten Tanah Datar. Sehingga secara administratif sebaran sumber daya batu gamping ini berada pada dua daerah, yaitu: Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan berdasarkan status lahan menurut status kawasan hutan, daerah ini berada pada Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Lindung (HL). Dari hasil perhitungan dengan metode garis kontur pada daerah batasan perhitungan sumber daya seluas 818 Ha, maka didapatkan sumber daya batu gamping sejumlah

6.144.663.609 ton ($\rho = 2,4 \text{ ton/m}^3$) Sumber daya ini ditutupi oleh tanah penutup dengan volume 10.298.870 m³ (P3E Sumatra, 2021).

Potensi Tambang di Kota Padang Panjang berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral bukan logam yang berupa batu kapur. Kawasan tambang eksisting berlokasi di Bukit Tui (bagian selatan Kota Padang Panjang) yang termasuk dalam Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Tanah Hitam. Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3 Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Potensi Tambang Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Potensi Ekosistem Karst Padang Panjang

Lokasi	Eksokarst	Endokarst	Geologi
Kelurahan Kampung Manggis	Bukit Karst	- Gua karst batu Batirai - Aliran air bawah tanah - Speleotem (Flowstone, Colum, Curtain, Gordyn, stalaktit, Stalakmit) - Biota Gua Karst (landak Gua, Serangga semut, Burung seriti, pacet Siamang)	Formasi batu gamping Hablur/ mengkristal, Pre tersier dengan ciri karst membentuk punggung tajam berwarna putih ampai abu-abu dan kelabu gelap/kotor. Umumnya pejal dan berongga beberapa tempat terdapat kekar ada yang berlapis berumur Perm. Sama juga dengan Formasi batu gamping hablur yang berada 7 kilometer sebelah utara danau singkarak mengandung fosil Schwgerina. SP yang disterminasikan oleh darwin Kadar direktorat geologi 8 Desember 1972



Lokasi	Eksokarst	Endokarst	Geologi
			menunjukkan umur Perm (sama dgn kamang, barat, singkarak,)

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

3. Potensi Keanekaragaman Hayati

Kota Padang Panjang didominasi daerah dengan topografi bergelombang dan curam. Hal ini disebabkan karena secara geografis wilayah kota {adang Panjang terdapat pada daerah perbukitan, dikelilingi oleh tiga buah gunung (G. Marapi, G. Singgalang dan G. Tandikek), serta wilayah bukit kapur (Bukit Tui) yang menyatu dengan Bukit Barisan. Selain itu, wilayah ini juga dialiri sungai Batang Anai dan sungai lainnya yang memiliki karakteristik sungai daerah hulu yang cenderung mempunyai aliran air yang deras sehingga membentuk cekungan pada daerah perbukitan yang dilaluinya.

Secara garis besar bentuk-bentuk ekosistem yang bisa dijumpai di wilayah Padang Panjang adalah :

- Ekosistem hutan perbukitan Kota Padang Panjang dikelilingi oleh hutan perbukitan. Ekosistem hutan perbukitan bisa dijumpai di daerah Kelurahan Koto Katik, Koto Panjang, Tanah Hitam, Kampung Manggis dan Silaing Bawah. Hutan perbukitan tersebut masih menyatu dengan hutan yang ada di sekitarnya seperti hutan di kawasan Cagar Alam Lembah Anai, maupun daerah berhutan lainnya di sepanjang aliran Batang Anai dan perbukitan Bukit Barisan. Kondisi ini menjadikan ekosistem perbukitan yang ada di Kota Padang Panjang masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan hutan perbukitan ini menjadi daerah tangkapan air yang akan mensuplai kebutuhan air pertanian pada wilayah yang ada di sekitarnya.
- Ekosistem Bukit Kapur. Kota Padang Panjang dikenal sebagai penghasil batu kapur yang cukup baik. Daerah bukit kapur pada daerah Bukit Tui sudah menjadi daerah eksploitasi bukit kapur sejak zaman dahulu. Secara alami bukit kapur dikelompokkan sebagai kawasan Karst yang merupakan salah satu tipe ekosistem yang rentan mengalami kepunahan karena adanya eksploitasi berlebihan. Padahal pembentukan kawasan karst yang terkadang ditandai juga dengan keberadaan goa dengan batuan stalaktit dan stalagnit yang indah membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan karena keunikannya pada beberapa tempat menjadi daya tarik wisata.
- Ekosistem kebun dan perladangan. Ekosistem kebun dan perladangan merupakan ekosistem buatan karena campur tangan manusia yang intensif dalam membentuk dan mengelolanya. Kebun



dan perladangan cukup luas di Padang Panjang dan sebagian besar terletak pada wilayah pinggiran. Sebagian besar ditanami dengan tanaman perkebunan seperti karet dan kulit manis. Pada bahagian lain masih dijumpai sisa-sisa tumbuhan asli yang ada di sana seperti beringin (*Ficus benjamina*)

- d. Ekosistem pekarangan. Kawasan pemukiman atau peruntukan perumahan di wilayah Kota Padang Panjang mempunyai luas lebih kurang 581,80 Ha (RTRW 2012-2032). Angka ini lebih luas dibandingkan luas pemukiman dan pekarangan dalam Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2011 yang hanya mencatat luas pemukiman dan bangunan seluas 334 Ha. Ekosistem pekarangan yang dijumpai ada yang bersifat semi alami dengan tumbuhan yang ditanam masih bercampur dengan tumbuhan liar dan tanaman tumbuh langsung di tanah, namun juga ada yang sudah sangat artifisial dengan tanaman ditanam di dalam pot sementara lahan pekarangan sudah ditutupi dengan semen
- e. Ekosistem sawah. Pada data RTRW Padang Panjang Tahun 2012-2032, luas areal persawahan tercatat seluas 556,06 Ha. Luas ini jauh berkurang dibandingkan luas areal persawahan pada tahun 2011 yang mencapai 690 Ha. Pengurangan luas ini sangat terkait dengan bertambahnya areal terbangun seperti pemukiman.
- f. Ekosistem sungai. Sama halnya seperti pekarangan, daerah aliran sungai di Kota Padang panjang ada yang masih sangat alami (seperti aliran Sungai Batang Anai), namun juga ada daerah bantaran sungai yang telah dimodifikasi dengan semen. Walaupun secara estetika penataan daerah sempadan sungai dengan batuan memberikan hasil yang baik, namun secara alami juga ikut mempengaruhi aliran sungai sehingga bisa mempercepat aliran air yang nantinya mengakibatkan hal yang lebih serius. Terdapat empat daerah aliran sungai yang ada di Kota Padang Panjang dengan aliran yang relatif masih sangat baik. Pada beberapa bagian terdapat aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai ikan larangan, namun pada beberapa bagian juga dijumpai sungai yang sangat tercemar dengan adanya sampah pada aliran sungai.
- g. Ekosistem kolam. Kolam merupakan ekosistem buatan yang didominasi oleh air. Sumber air bisa berupa aliran air dari sungai maupun air resapan dari daerah sekitarnya. Pada wilayah Kota Padang Panjang masih bisa dijumpai kolam-kolam sederhana dengan pinggiran kolam masih berupa tanah dan ditumbuhi oleh gulma tanaman seperti eceng gondok (*Eichornia crassipes*), maupun kolam



yang telah ditata dengan pinggirannya dari semen. Sebagian besar kolam ditujukan untuk budidaya ikan seperti ikan mas (*Cyprinus carpio*) dan mujair (*Tylapia mozambica*)

4. Penggunaan Lahan

Kota Padang Panjang memiliki bentang alam yang bervariasi. Kota Padang Panjang dikelilingi oleh bukit di sebelah selatan timur dan barat dengan penggunaan lahan non terbangun, sedangkan kawasan terbangun berlokasi di bagian tengah, cenderung memiliki bentang alam yang datar. Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang yang terbesar untuk lahan pertanian dengan luas 1.350 Ha atau 58,70 persen. Adapun rincian penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.6
Luas Lahan Kota Padang Panjang Menurut Jenis Penggunaannya

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
I. Lahan Pertanian	1350	58,70
a. Sawah/ <i>Wetland</i>	484*	24,00
b. Tegal/ Kebun/ <i>Garden</i>	264	11,48
c. Ladang/ humat/ <i>Farm Land/ Bareland</i>	95	4,13
d. Hutan Rakyat/ <i>Woods Forest</i>	213	9,26
e. Kolam/ Tebet/ Empang/ <i>Water Pond/ Fish Pond</i>	87	3,78
f. Sementara Tidak Diusahakan/ <i>Not Cultivated Land</i>	139	6,04
II. Lahan Bukan Pertanian/ <i>Non Agriculture Land</i>	950	41,30
Padang Panjang	2300	100

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025,

*ATR BPN

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain:

1) Pusat pelayanan kota meliputi:

- Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
- Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.



- 2) Sub pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi:
 - Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
 - Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
 - Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
 - Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
 - Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.
- 3) Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Ekor Lubuk;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

Berdasarkan analisa RTRW Kota Padang Panjang, potensi pengembangan perkotaan di wilayah Kota Padang Panjang secara ideal tidak terlalu besar, hanya meliputi $\pm 31,09$ persen dari luas wilayah Kota Padang Panjang (daya dukung tinggi dan sedang). Namun dengan adanya rekayasa teknologi bangunan dan infrastruktur, maka masalah keterbatasan daya dukung fisik ini bisa diatasi, sehingga potensi pengembangan perkotaan Kota Padang Panjang cukup besar.

C. Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

Konsep jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh *millenium assessment* pada Tahun 2005. Di mana jasa ekosistem didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga secara total terdapat 20 klasifikasi jasa ekosistem (De Groot, 2002), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)			
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi di antaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material	Serat (<i>fiber</i>) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan karbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta <i>bio-chemical</i> .
4	Bahan bakar	Penyediaan kayu	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik



Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
	(fuel)	bakar dan bahan bakar dari fosil	yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari biomassa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan ataupun penutup lahan.
5	Sumber daya genetik	Pembibitan hewan, tanaman dan bioteknologi (bahan obat dan biokimia)	Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumber daya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, di mana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumber daya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumber daya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)			
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon	Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air	Siklus hidrologi (<i>hydrology cycle</i>), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (<i>evaporasi</i>), pendinginan massa udara (<i>kondensasi</i>), hujan (<i>presipitasi</i>), dan pengaliran (<i>flow</i>). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami	Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu



Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
			bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar	Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (<i>self purification</i>) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah	Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (<i>aerob</i>) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara	Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara. sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>) adalah proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit	Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.
Fungsi Budaya (Cultural)			
1	Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, “kampung halaman” yang punya nilai sentimental	Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan



Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
			geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.
2	Rekreasi & <i>ecotourism</i>	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata	Ekosistem menyediakan fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan <i>ecotourism</i> .
3	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual	Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)			
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah	Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah.
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian	Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/ pemindahan energi dan hara di dalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfer, geosfer dan hidrosfer. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfer yaitu proses fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies	Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbon dioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbon dioksida untuk pembuatan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk



Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
			beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.
4	Biodiversitas	Perlindungan plasma nutfah	Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Ada 4 Profil jasa dalam penentuan DDDTLH yaitu:

1. Profil Jasa Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem seperti:

- Jasa penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk dimanfaatkan.
- Jasa penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).
- Jasa penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar.
- Jasa penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.

Rata-rata DDDTLH jasa penyediaan Kota Padang Panjang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi mencapai 52,57% dari luas wilayah. Hampir semua jenis jasa penyediaan berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi kecuali jasa penyediaan bahan bakar DDDTLH jasa penyediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan

No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1	Pangan	38,95%	41,16%	19,89%
2	Air Bersih	75,20%	4,91%	19,89%
3	Serat	52,58%	27,53%	19,89%



No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
4	Bahan Bakar	44,28%	8,00%	47,71%
5	Sumber Daya Genetik	51,86%	4,33%	43,81%
	Rata-rata	52,57%	17,19%	30,24%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

2. Profil Jasa Pengaturan

DDDTLH untuk jasa pengaturan di Kota Padang Panjang rata-rata juga berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Semua jenis jasa berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, kecuali jasa penguraian limbah dan jasa penyerbukan alami yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pengaturan

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Iklim	52,00%	0,29%	47,71%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	75,69%	2,16%	22,15%
3	Perlindungan Bencana	75,69%	0,52%	23,80%
4	Pemurnian Air	67,47%	25,46%	7,08%
5	Penguraian Limbah	29,08%	32,31%	38,61%
6	Kualitas Udara	52,29%	47,71%	0,00%
7	Penyerbukan Alami	55,27%	0,41%	44,32%
8	Pengendalian Hama	36,75%	15,03%	48,22%
	Rata-rata	55,53%	15,49%	28,99%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

3. Profil Jasa Budaya

Jasa budaya di Kota Padang Panjang pada umumnya mempunyai kategori rendah dan sangat rendah dengan rata-rata 64,22%, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Budaya

No	Nama Jasa Budaya	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Tempat Tinggal	17,15%	2,47%	80,38%
2	Ekoturisme	43,90%	0,44%	55,67%
3	Estetika (Alam)	37,47%	5,91%	56,62%
	Rata-rata	32,84%	2,94%	64,22%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029



4. Profil Jasa Pendukung

Jasa pendukung mempunyai kategori sangat tinggi dan tinggi di Kota Padang Panjang. Rata-rata untuk kategori tersebut adalah 56,96% dari luas wilayah Kota Padang Panjang.

Tabel 2.11
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung

No	Nama Jasa Pendukung	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pembentukan Tanah	71,22%	21,49%	7,30%
2	Siklus Hara	47,86%	44,84%	7,30%
3	Produksi Primer	71,51%	21,71%	6,78%
4	Biodiversitas	37,26%	14,86%	47,88%
Rata-rata		56,96%	25,72%	17,31%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Daya dukung dan daya tampung yang digunakan mengacu kepada peta dan data daya dukung dan daya tampung (DDDT) air nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) melalui Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Wilayah kajian dibagi menjadi 2 kelas yaitu DDDT air belum terlampaui dan sudah terlampaui.

Berdasarkan metode yang ditetapkan oleh Kepmen tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyusun DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2022 dengan skala peta yang sesuai dengan Kota Padang Panjang sebagai kota kecil. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.3. Berdasarkan analisis tersebut, secara umum daya dukung dan daya tampung air di Kota Padang Panjang sudah berada pada status terlampaui. Dari 16 kelurahan di Kota Padang Panjang, terdapat 10 kelurahan yang sudah terlampaui daya dukung dan daya tampung airnya. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan upaya-upaya konservasi air di Kota Padang Panjang. Berikut gambaran daya tampung air di Kota Padang Panjang :

Tabel 2.12
Profil DDDT Air Kota Padang Panjang

Kelurahan	Penduduk By Grid	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Lahan (m3/Tahun)	Total Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Ambang Air	Status Ambang Air	Status Air
Kel. Balai	6.212	266.614,31	4.969.600,00	17.112,21	4.986.712,21	4.720.097,90	332	-5.880	Terlampaui
Kel. Bukit Surungan	2.621	904.004,59	2.096.800,00	530.767,64	2.627.567,64	1.723.563,04	1.131	-1.490	Terlampaui
Kel. Ekor Lubuk	2.672	2.280.986,94	2.137.600,00	3.591.123,10	5.728.723,10	3.447.736,16	2.856	184	Belum Terlampaui
Kel. Ganting	3.305	3.182.433,89	2.644.000,00	4.106.251,82	6.750.251,82	3.567.817,	3.983	678	Belum Terlampaui

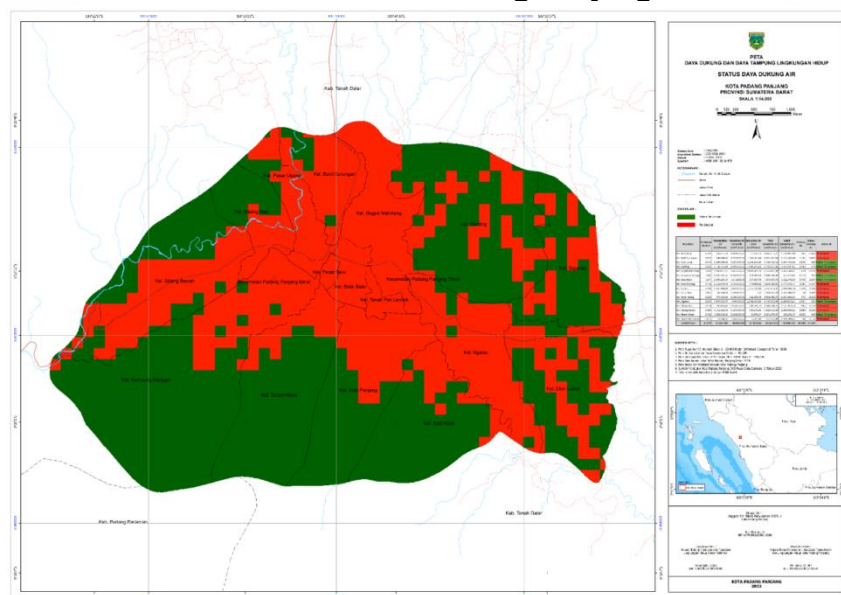


**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Kelurahan	Penduduk By Grid	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Lahan (m3/Tahun)	Total Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Ambang Air	Status Ambang Air	Status Air
						93			
Kel. Guguk Malintang	7.084	1.336.017,53	5.667.200,00	1.036.604,39	6.703.804,39	5.367.786,85	1.670	-5.414	Terlampai
Kel. Kampung Manggis	7.666	6.392.367,52	6.132.800,00	511.940,98	6.644.740,98	252.373,45	8.016	350	Belum Terlampai
Kel. Koto Katik	1.271	2.996.284,34	1.016.800,00	557.107,78	1.573.907,78	1.422.376,56	3.758	2.487	Belum Terlampai
Kel. Koto Panjang	4.712	2.632.040,49	3.769.600,00	440.088,92	4.209.688,92	1.577.648,43	3.285	-1.427	Terlampai
Kel. Ngalau	3.286	1.582.908,81	2.628.800,00	2.453.513,01	5.082.313,01	3.499.404,20	1.978	-1.308	Terlampai
Kel. Pasar Baru	1.667	46.198,70	1.333.600,00	7,29	1.333.607,29	1.287.408,59	58	-1.609	Terlampai
Kel. Pasar Usang	3.925	778.585,86	3.140.000,00	322.482,78	3.462.482,78	2.683.896,93	973	-2.952	Terlampai
Kel. Sigando	2.055	1.856.627,67	1.644.000,00	2.502.666,90	4.146.666,90	2.290.039,23	2.321	266	Belum Terlampai
Kel. Silaing Atas	2.574	795.846,83	2.059.200,00	289.598,21	2.348.798,21	1.552.951,38	995	-1.579	Terlampai
Kel. Silaing Bawah	6.445	3.111.428,38	5.156.000,00	364.272,60	5.520.272,60	2.408.844,22	3.889	-2.556	Terlampai
Kel. Tanah Hitam	3.710	3.369.639,55	2.968.000,00	33.070,37	3.001.070,37	368.569,17	4.205	495	Belum Terlampai
Kel. Tanah Pak Lambik	1.870	110.598,16	1.496.000,00	6.207,99	1.502.207,99	1.391.609,83	138	-1.732	Terlampai
Kota Padang Panjang	61.075	31.642.584	48.860.000	16.762.816	65.622.816	33.980.232	39.588	21.487	Terlampai

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**Gambar 2.4
DDDT Air Kota Padang Panjang**



Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, 2025



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Kota Padang Panjang, seperti banyak kota di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakatnya yang terus berkembang. Dalam rangka untuk merencanakan infrastruktur air yang efisien dan berkelanjutan, pemahaman yang jelas tentang proyeksi kebutuhan air di masa depan menjadi sangat penting.

Tabel 2.13
Proyeksi DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Kelurahan	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	2025		2026		2027		2028		2029		Status Air
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	
1	Kel. Silaing Bawah	266.614	6.844	5.475.200	6.978	5.582.400	7.111	5.688.800	7.244	5.795.200	7.378	5.902.400	Terlampaui
2	Kel. Silaing Atas	904.005	2.624	2.099.200	2.641	2.112.800	2.657	2.125.600	2.673	2.138.400	2.689	2.151.200	Terlampaui
3	Kel. Pasar Usang	2.280.987	3.881	3.104.800	3.867	3.093.600	3.852	3.081.600	3.837	3.069.600	3.823	3.058.400	Terlampaui
4	Kel. Kampung Manggis	3.182.434	8.081	6.464.800	8.219	6.575.200	8.357	6.685.600	8.495	6.796.000	8.633	6.906.400	Terlampaui
5	Kel. Tanah Hitam	1.336.018	3.752	3.001.600	3.765	3.012.000	3.778	3.022.400	3.792	3.033.600	3.805	3.044.000	Terlampaui
6	Kel. Pasar Baru	6.392.368	1.696	1.356.800	1.706	1.364.800	1.716	1.372.800	1.725	1.380.000	1.735	1.388.000	Belum Terlampaui
7	Kel. Bukit Surungan	2.996.284	2.672	2.137.600	2.688	2.150.400	2.703	2.162.400	2.718	2.174.400	2.734	2.187.200	Belum Terlampaui
8	Kel. Balai-balai	2.632.040	6.336	5.068.800	6.377	5.101.600	6.418	5.134.400	6.459	5.167.200	6.500	5.200.000	Terlampaui
9	Kel. Koto Panjang	1.582.909	4.886	3.908.800	4.945	3.956.000	5.004	4.003.200	5.062	4.049.600	5.121	4.096.800	Terlampaui
10	Kel. Koto Katik	46.199	1.367	1.093.600	1.398	1.118.400	1.429	1.143.200	1.460	1.168.000	1.491	1.192.800	Terlampaui
11	Kel. Ngilau	778.586	3.511	2.808.800	3.588	2.870.400	3.664	2.931.200	3.741	2.992.800	3.817	3.053.600	Terlampaui
12	Kel. Ekor Lubuk	1.856.628	2.713	2.170.400	2.730	2.184.000	2.748	2.198.400	2.765	2.212.000	2.782	2.225.600	Terlampaui
13	Kel. Sigando	795.847	2.177	1.741.600	2.217	1.773.600	2.257	1.805.600	2.297	1.837.600	2.337	1.869.600	Terlampaui
14	Kel. Ganting	3.111.428	3.562	2.849.600	3.649	2.919.200	3.737	2.989.600	3.824	3.059.200	3.912	3.129.600	Belum Terlampaui
15	Kel. Guguk Malintang	3.369.640	7.385	5.908.000	7.483	5.986.400	7.582	6.065.600	7.680	6.144.000	7.779	6.223.200	Terlampaui
16	Kel. Tanah Pak Lambik	110.598	1.880	1.504.000	1.883	1.506.400	1.886	1.508.800	1.889	1.511.200	1.892	1.513.600	Terlampaui
Jumlah Total		31.642.584	63.367	50.693.600	64.134	51.307.200	64.899	51.919.200	65.661	52.528.800	66.428	53.142.400	

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025 – 2029, 2025

Tabel 2.12 yang disajikan di atas bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang proyeksi kebutuhan air di Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun mendatang. Analisis proyeksi ini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi kebijakan pengelolaan air di masa depan, termasuk alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan langkah-langkah konservasi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan bahwa tabel ini akan menjadi alat yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam upaya untuk menjaga ketersediaan air yang memadai bagi penduduk Kota Padang Panjang.

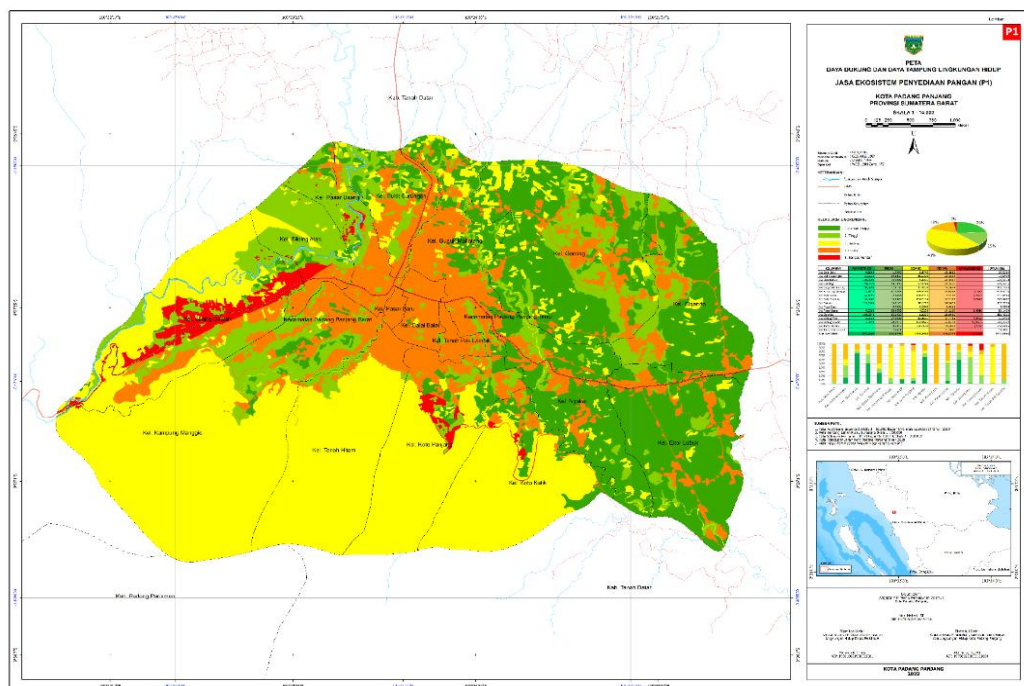
Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi populasinya secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis proyeksi luas sawah dilindungi (LSD) dan perkiraan produksi padi berdasarkan data produktivitasnya, diprediksikan daya dukung pangan (beras) Kota Padang Panjang tidak akan mencukupi kebutuhan konsumsi beras hingga Tahun 2045, seperti terlihat pada Tabel 2.13. Proyeksi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi padi di Kota Padang Panjang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi beras. Penurunan luas lahan pertanian yang disebabkan oleh urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim dan degradasi tanah juga berperan dalam menurunkan produktivitas lahan sawah.

Tabel 2.14
Analisis Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten
di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Selisih Estimasi Produksi LSD dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)					
		2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kab. Kepulauan Mentawai	-5,926.16	-6,667.49	-7,235.83	-7,839.87	-8,482.13	-9,165.29
2	Kab. Pesisir Selatan	54,853.10	20,391.73	7,472.22	-5,728.73	-19,234.18	-33,069.09
3	Kab. Solok	73,761.13	40,983.68	34,257.27	27,424.81	20,480.15	13,416.84
4	Kab. Sijunjung	13,186.35	1,243.17	-1,557.23	-4,473.19	-7,513.63	-10,688.14
5	Kab. Tanah Datar	69,818.14	41,159.09	40,806.12	40,390.23	39,908.53	39,358.01
6	Kab. Padang Pariaman	45,137.95	18,564.20	10,116.37	1,590.59	-7,016.86	-15,709.83
7	Kab. Agam	39,055.09	11,370.90	5,542.81	-541.27	-6,900.94	-13,557.28
8	Kab. Lima Puluh Kota	39,222.18	20,905.60	17,390.87	13,808.20	10,154.40	6,426.13
9	Kab. Pasaman	60,414.68	34,084.88	26,664.89	19,060.62	11,256.23	3,234.55
10	Kab. Solok Selatan	14,832.59	6,440.50	5,014.93	3,359.08	1,445.01	-758.56
11	Kab. Dharmasraya	9,979.64	-1,219.79	-5,579.85	-10,097.98	-14,788.55	-19,667.21
12	Kab. Pasaman Barat	-4,017.48	-29,616.79	-39,050.43	-42,381.97	-45,997.74	-49,921.99
13	Kota Padang	-43,618.21	-54,178.03	-59,094.20	-64,140.89	-69,323.63	-74,648.19
14	Kota Solok	2,435.08	-2,334.17	-3,911.99	-5,565.19	-7,302.05	-9,131.76
15	Kota Sawahlunto	1,714.26	-746.48	-1,405.52	-2,089.42	-2,799.86	-3,538.67
16	Kota Padang Panjang	-972.72	-2,329.99	-2,960.14	-3,630.52	-4,344.84	-5,107.16
17	Kota Bukittinggi	-6,930.97	-8,019.64	-8,455.53	-8,907.53	-9,376.29	-9,862.49
18	Kota Payakumbuh	5,043.71	1,219.04	346.35	-622.60	-1,696.55	-2,885.01
19	Kota Pariaman	2,270.54	-1,655.56	-3,731.72	-5,871.72	-8,081.31	-10,366.75
	Sumatera Barat	370,258.91	89,867.78	15,407.88	-54,695.92	-126,941.23	-201,470.56

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Gambar 2.5
Daya Dukung Pangan Kota Padang Panjang



Sumber : DDDTLH Kota Padang Panjang, Tahun 2022



D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Di Kota Padang Panjang, skor IKP cukup bervariasi dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Gambar 2.6
Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

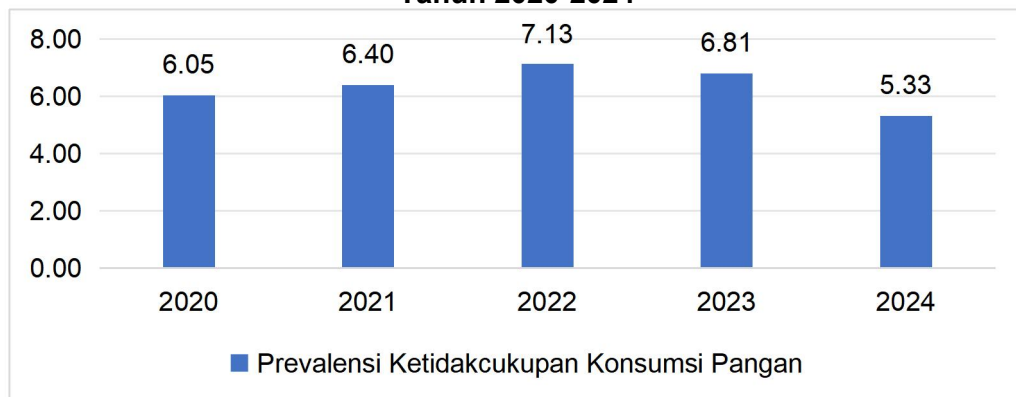
Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 82,32, namun mengalami penurunan menjadi 79,58 pada 2021, yang dipengaruhi oleh



dampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 mencatat sedikit peningkatan menjadi 79,82, menunjukkan upaya pemulihan yang masih terbatas. Pada 2023, indeks melonjak signifikan ke 89,58, mengindikasikan perbaikan besar dalam ketahanan pangan. Namun, pada 2024 indeks kembali turun ke 87,05, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu isu krusial dalam ketahanan pangan adalah Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, yaitu indikator yang menunjukkan persentase populasi di suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat kerawanan pangan serta mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Semakin tinggi angka prevalensi ini, semakin besar risiko ketidacukupan konsumsi pangan, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nilai Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

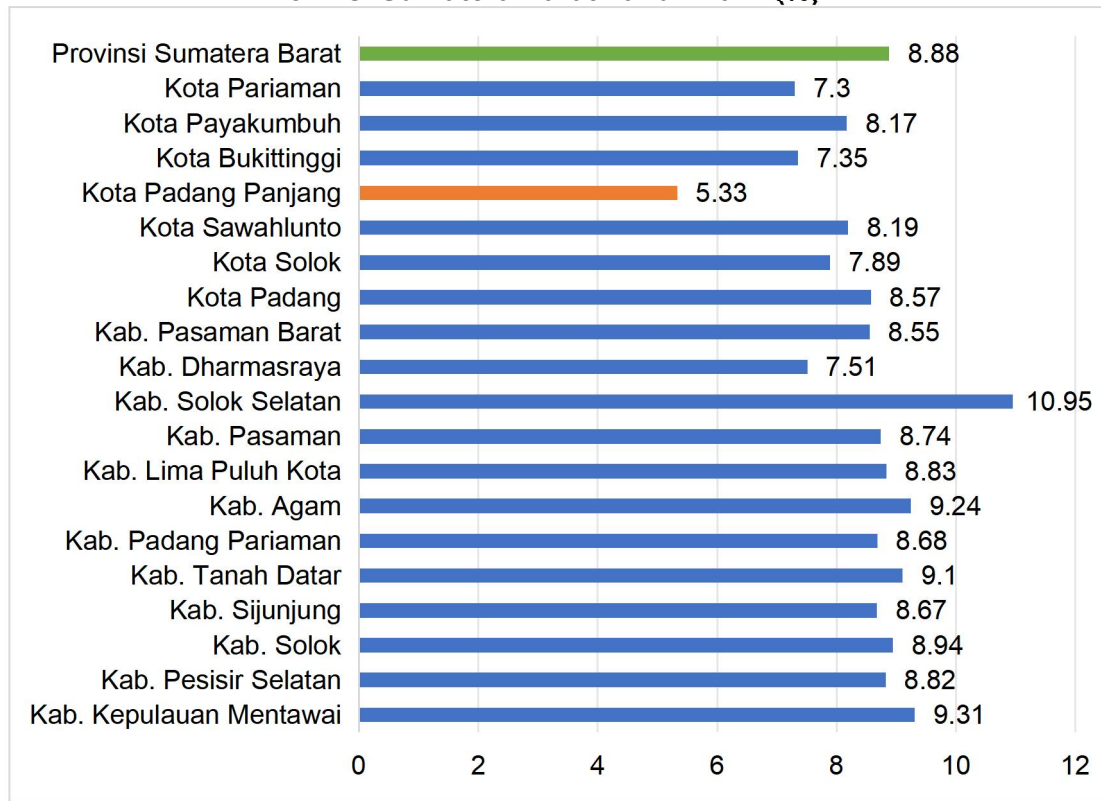
Gambar 2.7
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan grafik di atas, dalam lima tahun terakhir, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kota Padang Panjang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 6,05, kemudian meningkat menjadi 6,40 pada tahun 2021 dan terus naik hingga 7,13 di tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan kondisi yang kurang baik, karena semakin tinggi angka prevalensi, semakin banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi harian mereka. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut mulai menurun menjadi 6,81, dan di tahun 2024 mencapai 5,33, yang menunjukkan perbaikan dalam akses dan ketersediaan pangan. Penurunan ini merupakan perkembangan positif, karena mengindikasikan bahwa lebih banyak masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan gizi hariannya.

Gambar 2.8
Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan data Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang mencatat angka 5,33, yang merupakan nilai terendah dibandingkan daerah lain di provinsi ini. Angka ini menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian di Kota Padang Panjang lebih kecil dibandingkan wilayah lain, yang mengindikasikan kondisi ketahanan pangan yang lebih baik.

2. Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup, andal, berkelanjutan, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan ketahanan energi tinggi cenderung memiliki konsumsi listrik per kapita yang lebih tinggi karena energi tersedia secara cukup dan terjangkau untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

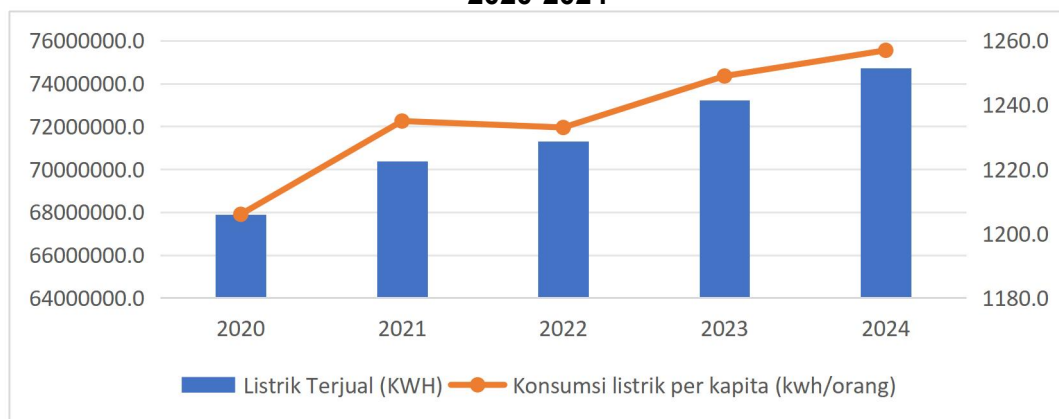
Konsumsi listrik per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Listrik Terjual (KWH)	Kwh	67.896.622	70.370.661	71.312.900	73.218.899	74.732.075
Jumlah penduduk	jiwa	56.311	56.971	57.850	58.627	59.453
Konsumsi listrik per kapita (kwh/orang)	Rp.	1.206	1.235	1.233	1.249	1.257

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Gambar 2.9 Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang, 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan data di atas konsumsi listrik per kapita di Padang Panjang menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita tercatat 1.206 kWh per orang, seiring dengan peningkatan jumlah listrik terjual dan pertumbuhan penduduk, angka ini naik menjadi 1.235 kWh per orang di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan konsumsi per kapita menjadi 1.233 kWh per orang, meskipun jumlah listrik terjual dan populasi meningkat. Hal ini bisa mengindikasikan adanya faktor efisiensi penggunaan listrik atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Tren kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024, dengan konsumsi listrik per kapita masing-masing 1.249 kWh dan 1.257 kWh per orang. Meskipun fluktuatif, secara keseluruhan konsumsi listrik per kapita dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 51 kWh, menunjukkan adanya peningkatan akses dan ketergantungan masyarakat terhadap energi listrik.

3. Ketahanan Air



Berdasarkan data dari Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang terdapat beberapa sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Tirta, yaitu:

- a) Kandang di Tabek : Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi pada ketinggian 960 dpl dibangun pada tahun 1913 dengan konstruksi bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 30 l/dt.
- b) Lubuk Mata Kucing : Ada 2 sumber mata air pada lokasi ini yaitu sumber pompa dan gravitasi. Sumber ini berlokasi di Kelurahan Pasar Usang dengan elevasi 764 dpl. Sumber pompa dibangun pada tahun 1989 dengan konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 120 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 90 l/dt.

Sedangkan sumber gravitasi pada tahun 2018 telah resmi diberi nama Zona Air Minum Prima (ZAMP) oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Air Minum (BPPSPAM) karena telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu kualitas, kuantitas dan kontinuitas pendistribusian air minum. Kapasitas terpasang berkisar 10 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 8 l/dt.

- c) Sungai Andok Pompa : Dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, dengan Kapasitas terpasang berkisar 30 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 15 l/dt. Sumber air ini digunakan sebagai cadangan ketika sumber air lainnya mengalami penurunan produksi.
- d) Tungku Sadah : Sumber mata air ini dibangun tahun 1997, berlokasi di Kawasan hutan tungku saadah dengan konstruksi permanen dan kapasitas terpasang 25 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 20 l/dt.
- e) Tungku sadah (kandang kudo) : Sumber ini merupakan sumber tungku sadah 2 dengan kapasitas terpasang 15 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 10 l/dt.
- f) Sawah Liek : Sumber mata air dibangun tahun 2005 berlokasi di Kawasan hutan sawah liek dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar 10 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 8 l/dt.
- g) Koto katiak : Sumber ini dibangun pada tahun 2010 terletak pada elevasi 860 mdl. Kapasitas terpasang sebesar 4 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 1 l/dt.

Selain itu, juga terdapat sumber mata air potensial yang dimanfaatkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang

No	Sumber Air	Dikelola / dimanfaatkan oleh	Potensi air (m ³ /hari)	Lokasi
1	Sumur MCK RT, 09 Kelurahan Bukit Surungan	100 jiwa	12	Kelurahan Bukit Surungan



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Sumber Air	Dikelola / dimanfaatkan oleh	Potensi air (m ³ /hari)	Lokasi
2	Sumur Al Birr	50 jiwa	6	Kelurahan Bukit Surungan
3	Bula'an Dakek	50 jiwa	6	Kelurahan Manggis
4	Sumur Amanah MCK	150 jiwa	18	Kelurahan Manggis
5	Bula'an	1300 jiwa	156	Kelurahan Sigando
6	Mata Air Timbarau	500 jiwa	60	Kelurahan Sigando
7	Sumur MCK Sampang Labuah	50 jiwa	6	Kelurahan Sigando
8	Mata Air Lubuak Gadang	500 jiwa	60	Kelurahan Ekor Lubuk
9	Mata Air Lubuak Masjid	1000 jiwa	120	Kelurahan Ekor Lubuk
10	Pincuran Gucci	100 jiwa	12	Kelurahan Ganting
11	Pincurang Guang Koto	100 jiwa	12	Kelurahan Ngalau
12	Mato Aia Sago	50 jiwa	6	Kelurahan Ngalau
13	Bula'an	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Panjang
14	Pincuran Basi	100 jiwa	12	Kelurahan Koto Panjang
15	Mato Aia Surau Anduang	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Panjang
16	Pincuran Kalimpariak	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Katik
17	Pincuran Tarian	50 jiwa	6	Kelurahan Guguk Malintang

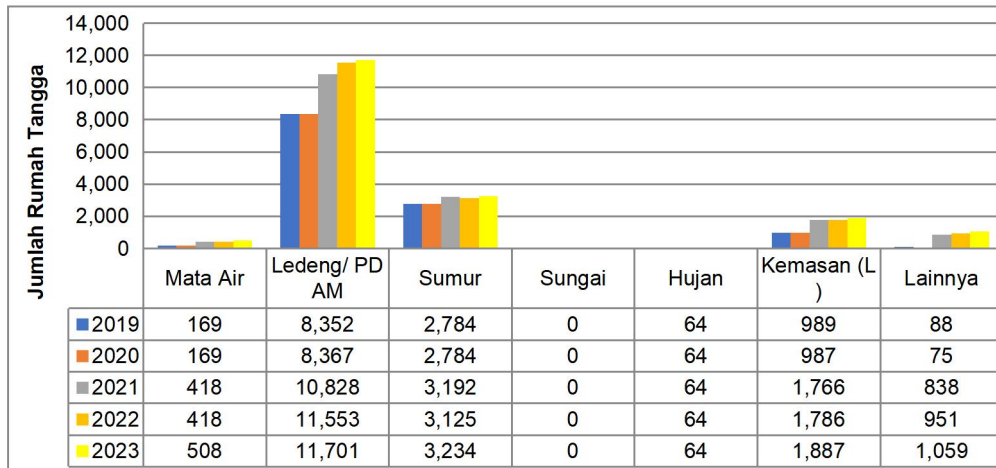
Sumber : DIKPLHD Kota Padang Panjang Tahun 2023

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk dimanfaatkan, yaitu:

5. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
6. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
7. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
8. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang adalah dari PDAM. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga memanfaatkan air sumur dan mata air untuk memenuhi kebutuhannya di Kota Padang Panjang. Jumlah pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.10
Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023



Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024

4. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum jaringan Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria : Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Capaian Akses air minum Jaringan perpipaan Kota Padang Panjang bersumber dari PDAM dan jaringan perpipaan yang dikelola oleh masyarakat melalui program animas dengan cakupan layanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Capaian Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Uraian	Persen Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk yang dilayani air minum perpipaan	45.935	48.360	51.704	53.186	59.272
Jumlah penduduk	56.311	56.971	57.850	58.627	59.453
Persentase Pelayanan Air Minum	81,57%	84,89%	89,38%	90,72%	99,70%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang menggunakan air minum perpipaan selalu meningkat dari tahun ke tahun (81,16% pada Tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 90,72% pada Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus meningkatkan



cakupan pelayanan air minum melalui program sambungan rumah air minum gratis setiap tahun.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

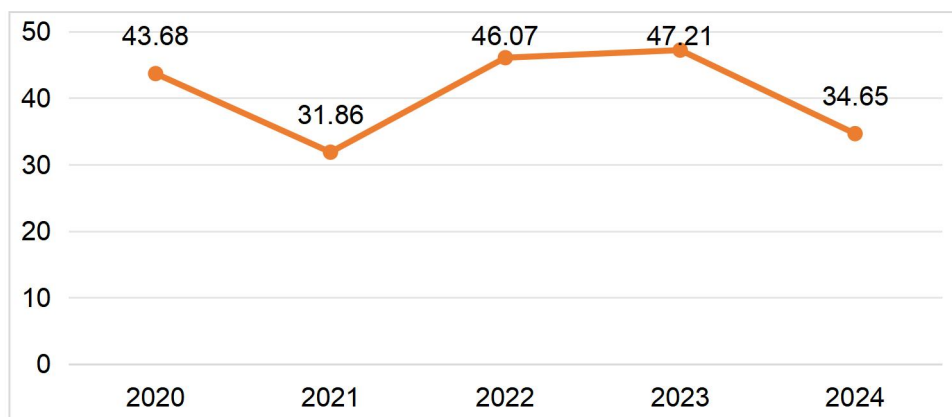
Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang bisa memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik ditandai dengan suasana yang bisa membuat orang merasa nyaman tinggal di tempatnya sendiri. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Kualitas Air Laut.

Kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu:

1. Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Perhitungan IKA mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA mengacu kepada 8 (delapan) parameter air, yaitu TSS, pH, DO, COD, BOD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coli. Capaian IKA Kota Padang Panjang dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.11 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024





Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

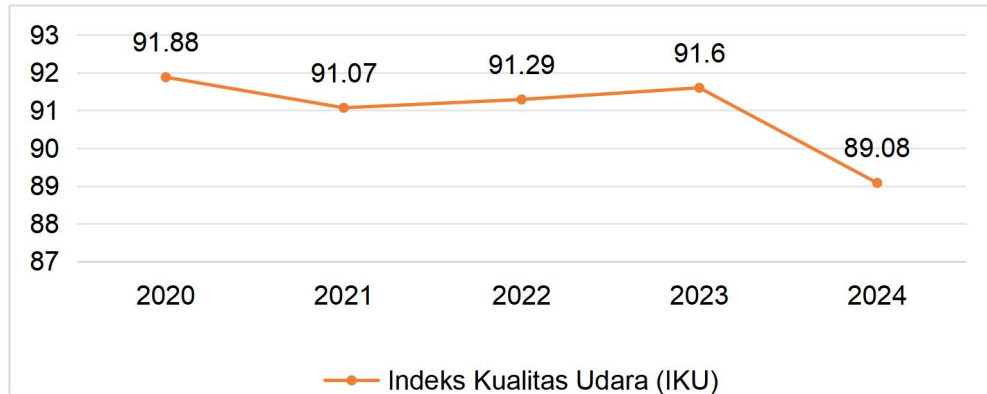
Dari gambar di atas dapat dilihat pada nilai IKA Kota Padang Panjang sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung berfluktuasi, Pada Tahun 2021, nilai IKA mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir yaitu 31,86. Namun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan nilai IKA menjadi 46,07 dan Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 47,21, namun tahun 2024 kembali turun menjadi 34,65 penurunan ini disebabkan secara geografis seluruh ruas sungai yang berada di Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai Kota Padang Panjang yang berada pada batas daerah tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air. Hal ini dibuktikan dengan sudah tercemarnya sungai di Kota Padang Panjang dari hulu. Faktor lain yang menyebabkan turunnya capaian IKA adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter fecal coli hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi IKA Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 yang secara umum telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan atau mempunyai kategori kurang.

2. Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung terhadap udara ambien pada wilayah yang mewakili jalan utama, area pemukiman, area perkantoran dan area industri. Pengukuran dilakukan dengan metode passive sampler pada 4 (empat) titik di Kota Padang Panjang dengan frekuensi pemantauan 2 kali setahun yang masing-masing frekuensi terdiri dari 14 hari. Metode passive sampler ini dilakukan untuk 2 parameter yaitu SOX dan NOX. Hasil pengukuran dengan metode passive sampler ini dijadikan sebagai data dasar perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang.

Adapun hasil dari pengukuran kualitas udara di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: *sumbar.bps.go.id*, 2025

Dari gambar di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang selalu berada di atas angka 91 untuk periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang mengkategorikan rentang indeks kualitas udara, Kota Padang Panjang berada dalam kategori "Sangat Baik" selama periode tersebut. Namun tahun 2024 turun menjadi 89,08 dengan kategori "Baik", penurunan ini disebabkan oleh erupsi gunung merapi sepanjang tahun 2024 .

Mobilisasi kendaraan bermotor dan aktivitas rumah tangga merupakan sumber tekanan terhadap penurunan kualitas udara. Kegiatan transportasi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi yang menurunkan kualitas udara, di samping itu Kota Padang Panjang juga merupakan jalur perlintasan antar kota. Dengan demikian, kota ini menerima tekanan dalam hal peningkatan pencemaran udara oleh emisi gas kendaraan.

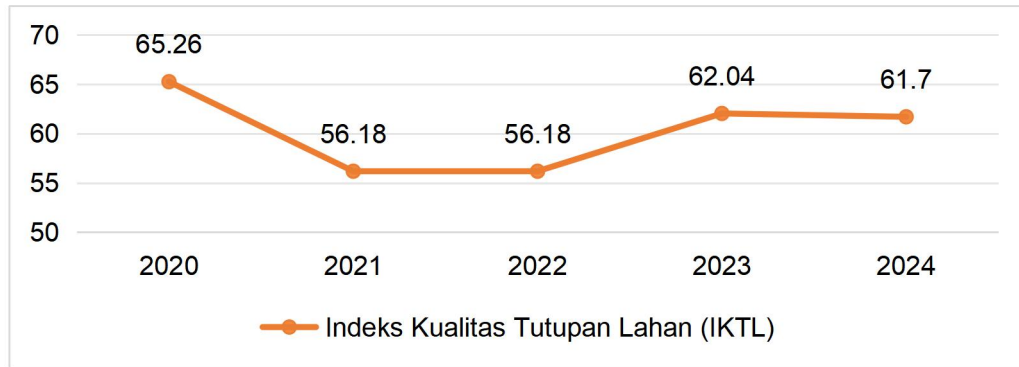
Jenis kendaraan di Kota Padang Panjang didominasi oleh kendaraan penumpang, pribadi dan kendaraan roda dua. Pada jam-jam tertentu dan pada ruas jalan tertentu di Kota Padang Panjang terjadi kepadatan lalu lintas yang berakibat penggunaan bahan bakar menjadi meningkat dan menghasilkan emisi dari sisa pembakaran kendaraan bermotor tersebut.

3. Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sedangkan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Karena di Kota Padang Panjang tidak terdapat lahan gambut maka penentuan nilai IKL didasarkan kepada nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pengukuran IKTL dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara terhadap lokasi kawasan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Data perhitungan IKTL pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024

didapatkan dari perhitungan yang dikeluarkan oleh KLHK, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.13
Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

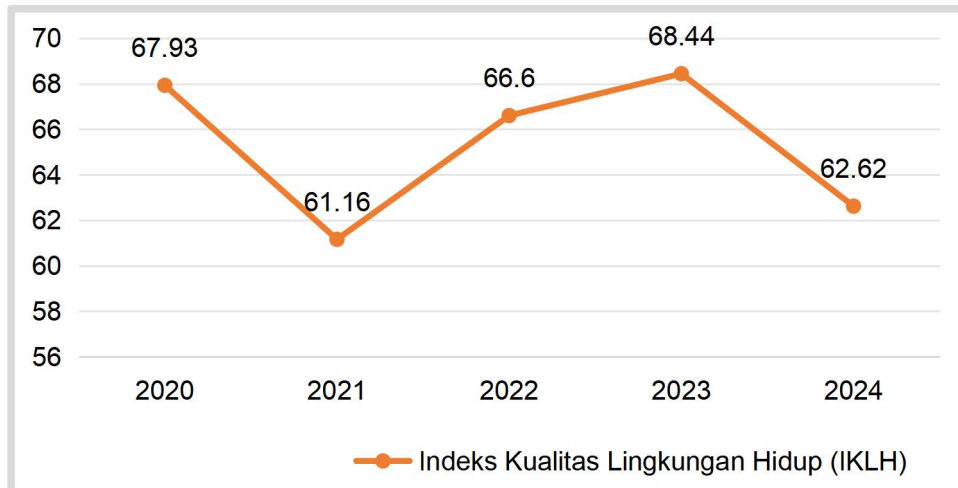


Sumber: *Sumbar.bps.go.id*, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKTL berada pada angka tertinggi, yaitu 65,26, yang mencerminkan kondisi tutupan lahan yang relatif baik. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 56,18, dan angka ini bertahan pada tahun 2022, menunjukkan adanya degradasi kualitas tutupan lahan yang belum berhasil diatasi dalam dua tahun berturut-turut. Memasuki tahun 2023, IKTL mengalami perbaikan dengan peningkatan nilai menjadi 62,04, yang menunjukkan upaya pemulihan kualitas lingkungan mulai menunjukkan hasil. Tren positif ini sedikit menurun di tahun 2024 dengan angka IKTL tercatat sebesar 61,70, namun masih lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa titik RTH yang dideliniasi tidak dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sementara waktu sanggah itu mengkonfirmasi hal tersebut sudah berakhir. Meskipun terjadi penurunan, secara keseluruhan nilai rata-rata IKTL masih berada pada kategori “sedang”, yang mencerminkan bahwa pengelolaan tutupan lahan di Kota Padang Panjang masih membutuhkan perhatian lebih agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas tutupan lahan di masa depan.

Berdasarkan tiga Komponen penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, dapat dilihat nilai IKLH kota Padang Panjang pada gambar berikut:

Gambar 2.14
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKLH berada pada angka 67,93, menunjukkan kualitas lingkungan yang cukup baik. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 61,16, yang mengindikasikan adanya penurunan kondisi lingkungan, kemungkinan akibat peningkatan pencemaran atau penurunan kualitas elemen lingkungan lainnya. Kondisi mulai membaik pada tahun 2022, di mana IKLH naik menjadi 66,60, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 68,44—bahkan lebih tinggi dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai memberikan hasil yang positif. Namun, pada tahun 2024, IKLH kembali menurun cukup tajam menjadi 62,62, yang menunjukkan bahwa tantangan terhadap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup masih perlu terus direspons secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan nilai IKLH dihitung dari rumus yang didapatkan dari perhitungan IKA, IKU dan IKTL karena nilai IKA, IKU dan IKTL mengalami penurunan sehingga menyebabkan nilai IKLH juga mengalami penurunan.

4. Persampahan

Dalam upaya penanganan sampah, Kota Padang Panjang ditunjang oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sistem pengangkutan sampah di Kota Padang Panjang menggunakan sistem wadah angkut (*Hauled Container System*, HCS) dan sistem wadah tinggal (*Stationary Container System*, SCS). Sistem HCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS berupa kontainer menggunakan alat angkut *armroll truck*, sedangkan sistem SCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS bak bata dan bak kayu menggunakan *dump truck*. Kapasitas alat angkut *dump truck* dan *armroll truck* masing-masing 8 m³ dan 6 m³, dengan jumlah *dump truck* sebanyak 8 unit dan *armroll truck* sebanyak 2 unit.



Upaya pengurangan sampah yang sudah ada di Kota Padang Panjang adalah sistem bank sampah dan pengomposan di TPA Sungai Andok. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, saat ini terdapat 7 unit bank sampah yang tersebar di wilayah Kota Padang Panjang. Beberapa aspek pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dsb; daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Tabel 2.18

Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun	% Sampah Terolah	Timbunan Sampah (ton/hari)
	Timbunan Per Kapita Rumah Tangga + Timbunan Per Kapita Non Rumah Tangga	SIPSN
2020	13,21%	46,63
2021	10,95%	48,00
2022	17,47%	48,95
2023	10,12%	49,25
2024	17,07%	50,18

Sumber : SIPSN, diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam persentase sampah yang berhasil diolah di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2020, dari total timbunan sampah sebesar 46,63 ton/hari, sekitar 13,21% berhasil diolah. Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan, dengan 10,95% sampah terolah dari total 48,00 ton/hari.

Tren positif terjadi pada tahun 2022, di mana persentase sampah terolah meningkat signifikan menjadi 17,47% dari timbunan harian sebesar 48,95 ton. Namun, capaian ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023 kembali menurun ke 10,12%, meskipun timbunan sampah meningkat menjadi 49,25 ton/hari. Pada tahun 2024, pengolahan sampah kembali menunjukkan perbaikan dengan 17,07% sampah berhasil diolah dari total timbunan yang mencapai 50,18 ton/hari—angka timbunan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun volume sampah terus meningkat,



upaya pengolahan sampah masih menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan sistem dan kebijakan yang berkelanjutan.

2) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diasumsikan sebagai persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola dengan progres Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.19
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
2020	13.586	258	1,90%
2021	14.018	301	2,19%
2022	14.295	1307	9,14%
2023	14.383	1375	9,56%
2024	14.810	1427	9,64%

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.19, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam proporsi rumah tangga di Kota Padang Panjang yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan ini naik dari 258 pada tahun 2020 menjadi 1.427 pada tahun 2024. Seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga secara keseluruhan, proporsi rumah tangga yang terlayani juga meningkat dari 1,90% menjadi 9,64%. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan yang cukup tajam, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah masih berada di bawah 10% pada tahun 2024. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah yang optimal.

3) Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kota Padang Panjang berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Jarak dari pusat kota $\pm$ 2 km. TPA ini sudah beroperasi mulai dari tahun 1988 dan melayani sampah dari dua kecamatan di Kota Padang Panjang. Adapun sistem pembuangan berupa controlled



landfill dengan penutupan sampah dengan tanah dilakukan 3-6 hari, yang sebelumnya dilakukan pemerataan dan pemadatan sampah dengan alat berat. Tanah penutup didapatkan dengan membelinya. Menurut hasil pencatatan oleh pengelola TPA, sampah masuk ke TPA sekitar 113-119 m³/hari atau 40 ton/hari. TPA Sungai Andok belum dilengkapi dengan jembatan timbang, sehingga hasil perhitungan timbulan yang masuk hanya dilakukan secara visual dari truk yang masuk, sehingga tidak efektif. Luas lahan TPA sekitar 4,8 Ha dan diperkirakan penuh pada Tahun 2024.

Penanganan limbah B3 berdasarkan data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Panjang Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang sebanyak 3 (tiga) usaha dan/atau kegiatan. Izin yang dikeluarkan berupa izin penyimpanan limbah B3 sebanyak 2 (dua) usaha dan/atau kegiatan yaitu RSUD Kota Padang Panjang dan RSI Ibnu Sina, sedangkan 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan lagi berupa izin pengangkutan Limbah B3 yaitu PT Kapur Sirih. Jumlah limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan yang berizin berkisar 20 ton/tahun. Limbah B3 dari kegiatan tersebut diolah oleh pihak ketiga.

A. Air Limbah Domestik

Air limbah domestik berasal dari rumah tangga yang mencakup limbah dari kamar mandi, dapur, toilet, dan cucian. Air limbah ini mengandung zat organik, mikroorganisme patogen, bahan kimia, dan polutan lainnya yang dapat mencemari air tanah dan permukaan jika tidak dikelola dengan baik. Cakupan pengelolaan air limbah domestik ini dapat diukur dengan menghitung jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman.

Akses terhadap sanitasi yang aman penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Capaian sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Capaian Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024



No	Capaian Akses Sanitasi	2022	2023	2024
1	Akses Aman	12,49%	13,08%	13,13%
2	Akses Layak	73,69%	76,02%	76,07%
	Akses Layak Sendiri	67,19%	69,52%	69,57%
	Akses Layak Bersama	6,50%	6,50%	6,50%
3	Akses Belum Layak	13,82%	10,90%	10,80%
4	BABS Tertutup	0,00%	0,00%	0,00%
5	BABS	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	100,00%	100,00%	100,00%
	Akses Layak + Aman	86,18%	89,10%	89,20%

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Dari tabel di atas terlihat terjadi kenaikan jumlah sanitasi aman dari 12,49% di tahun 2022 dan menjadi 13,13% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pembangunan sarana prasarana sanitasi berupa IPAL dan jamban individu serta terus melakukan pemecuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi yang aman.

Salah satu elemen kunci dari sanitasi aman adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT adalah fasilitas penting untuk mengolah lumpur tinja dari septic tank agar aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lumpur yang tidak diolah dengan benar berpotensi mencemari tanah, air, dan menyebabkan penyebaran penyakit. Tanpa fasilitas ini, proses sanitasi hanya berhenti pada tingkat rumah tangga dan tidak menjamin bahwa limbah manusia benar-benar ditangani dengan aman.

Data dan informasi mengenai kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang ada di Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.21 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi SPALD-S	IPLT	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SPALD-S			
1	Nama IPLT	IPLT Sei Andok	
2	Status aset	Dalam Proses Serah Terima	
3	Kapasitas IPLT	m ³ /hari	6
4	Tahun Pembangunan	2009	
5	Tahun Rehabilitasi	-	
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	Padang Panjang Timur dan Padang Panjang barat	



7	Wilayah layanan terdekat	km	0,5
8	Wilayah layanan terjauh	km	10
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grit chamber - Gravity Thickener - Kolam anaerob-kolam aerasi-unit desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan rusak	
3	Kualitas Effluen	Sudah dilakukan uji kualitas effluen	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Aspal	

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 2.22 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	16,67%
Kapasitas penggunaan truk	50,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	66,67%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	10,46%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	6,97%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Pemukiman	83%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa kapasitas penggunaan IPLT sampai saat ini baru mencapai 16,67 % dengan kata lain masih banyak kapasitas yang dapat ditampung oleh IPLT. IPLT Sungai Andok saat ini berfungsi walaupun terdapat kerusakan di terhadap pipa penghubung antara bak 1 dan bak berikutnya. Kapasitas IPLT terhadap rumah tangga yang saat ini baru 6,97% dan ditargetkan dapat mencapai 80 % tahun 2025 nanti.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Resiliensi Bencana

Resiliensi Bencana merujuk pada kemampuan suatu komunitas, sistem, atau individu untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana secara efektif. Resiliensi bencana mencakup berbagai aspek, mulai dari



kemampuan untuk mencegah kerusakan, menanggulangi kerugian, hingga mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah rentan terhadap bencana dan kemampuan wilayah tersebut untuk mengelola risiko yang ada, yang kemudian menjadi dasar untuk mengukur dan memperkuat resiliensi terhadap bencana.

Berdasarkan analisis indeks risiko bencana (IRB) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, menggambarkan bahwa dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya Provinsi Sumatra Barat, IRB Kota Padang Panjang tergolong pada kelas sedang dengan nilai IRB 113,20. Nilai IRB Kota Padang Panjang belum mengalami perubahan sejak tahun 2015.

Tabel 2.23
Indeks Risiko Bencana Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
1	Agam	193.52	204.32	204.32	157.51	205.29	Tinggi
2	Pasaman	202.50	204.50	204.50	174.46	178.00	Tinggi
3	Pasaman Barat	202.50	204.50	204.50	203.20	168.70	Tinggi
4	Kepulauan Mentawai	197.20	197.20	197.20	153.48	162.12	Tinggi
5	Solok	137.20	137.60	137.60	137.20	137.20	Sedang
6	Padang Pariaman	160.00	146.81	146.81	140.89	130.46	Tinggi
7	Kota Padang	191.00	166.99	166.99	138.90	130.21	Tinggi
8	Kota Bukittinggi	131.31	137.60	137.60	130.00	130.00	Sedang
9	Kota Pariaman	160.00	146.81	146.81	122.37	126.01	Tinggi
10	Tanah Datar	115.82	121.93	121.93	125.20	125.20	Sedang
11	Dharmasraya	137.69	137.60	137.60	125.02	119.21	Sedang
12	Lima Puluh Kota	113.61	113.61	113.61	119.20	119.00	Sedang
13	Pesisir Selatan	169.42	152.96	152.96	120.89	118.05	Tinggi
14	Kota Padang Panjang	113.00	113.10	113.10	113.20	113.20	Sedang
15	Kota Solok	115.82	121.93	121.93	95.42	111.99	Sedang
16	Solok Selatan	130.22	137.60	137.60	113.30	107.63	Sedang
17	Sijunjung	107.20	107.40	107.40	107.20	105.64	Sedang
18	Kota Payakumbuh	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	Sedang
19	Kota Sawahlunto	107.20	107.47	107.47	79.80	84.94	Sedang

Sumber: Inarisk, 2025

a) Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi di Kota Padang Panjang terdiri dari dua yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena Kota Padang Panjang dilalui oleh sesar Bukit Jarat dan berdekatan dengan sesar besar sumatera (zona patahan aktif). Adapun gempa vulkanik terjadi karena di sebelah utara Kota Padang Panjang terdapat gunung Marapi yang masih aktif.

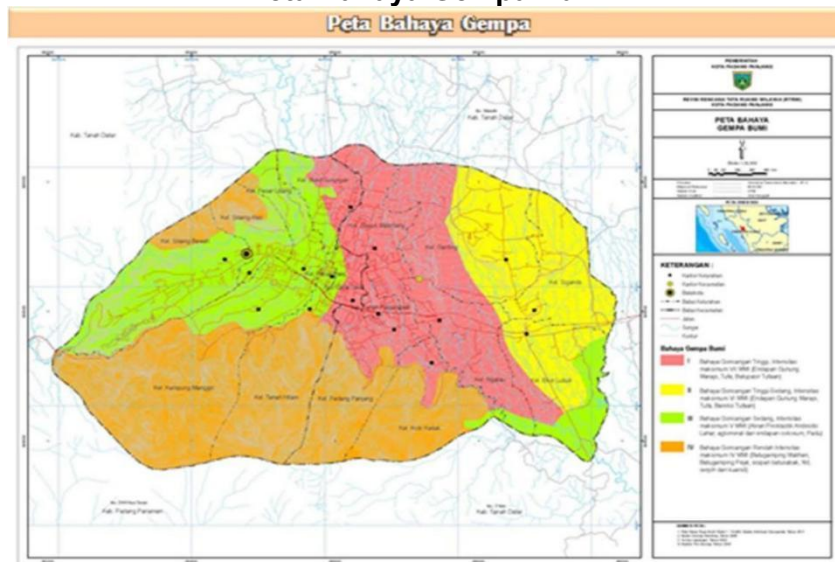
Gempa tektonik paling besar yang pernah terjadi adalah gempa tahun 1926 yang secara masif menghancurkan sebagian besar kawasan terbangun dan infrastruktur. Bahkan kejadian ini telah menjadi hikayat atau tambo yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Padang Panjang khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat umumnya. Bencana gempa tektonik yang tercatat terakhir dan cukup besar dampaknya adalah pada tanggal 6 Maret 2007 dengan skala 6,2 skala richter. Musibah ini memakan korban 215 orang luka – luka, meninggal dunia 4 orang, merusak Rumah Penduduk dan Fasilitas Umum sebesar 6.424 buah. Pada tahun 2007 tersebut jumlah gempa yang tercatat sebanyak 1.556 kali (jarak 0 – 100 Km dari stasiun BMKG Lubuk

Mata Kucing). Hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka terdapat lima zona kerentanan gempa bumi, yaitu :

- Zona I (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sangat tinggi) seluas $\pm$ 281,19 Ha terdapat pada Kelurahan Silaing Bawah, Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik.
- Zona IA (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi tinggi) seluas $\pm$ 320,02 Ha terdapat pada Kelurahan Sigando dan Ekor Lubuk.
- Zona IB (Kerentanan risiko bahaya akan gempa bumi tinggi – sedang) seluas $\pm$ 87,21 Ha terdapat pada Kelurahan Guguk Malintang, Ganting, Sigando Ngalau.
- Zona II (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang) seluas $\pm$ 368,90 Ha terdapat Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.
- Zona III (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang – rendah) seluas $\pm$ 1.916,22 Ha terdapat pada hampir setiap kelurahan.

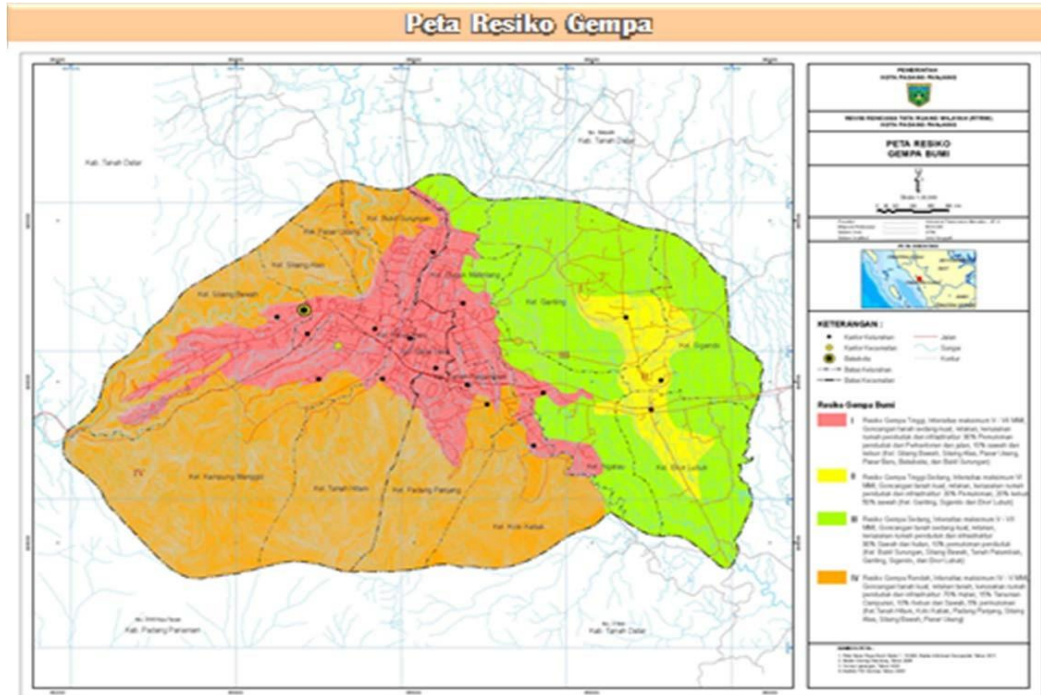
Untuk lebih jelas mengenai zona kerentanan bahaya gempa bumi di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.15
Peta Bahaya Gempa Bumi**



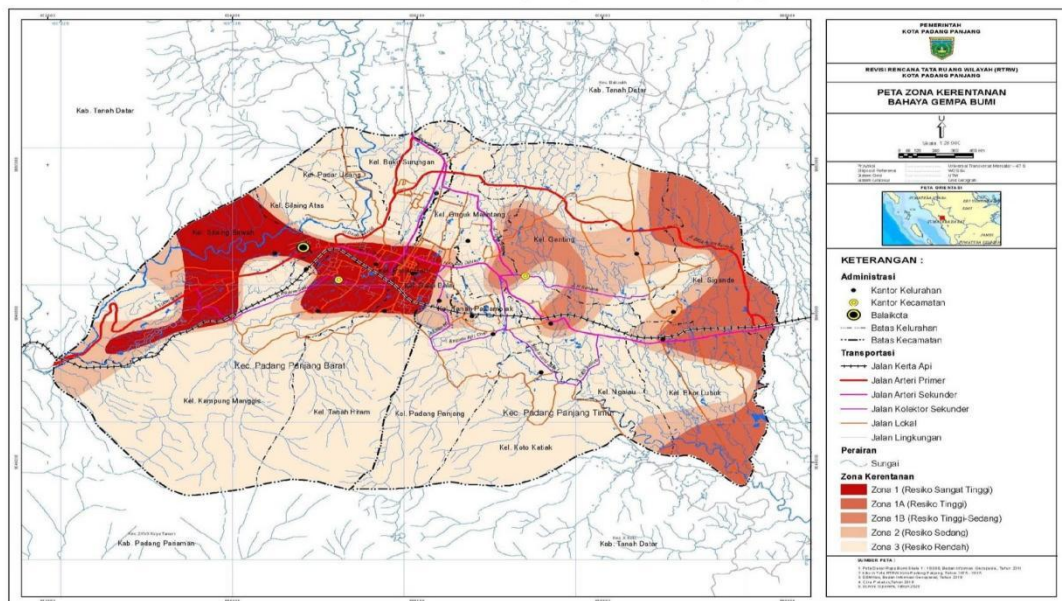
Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

**Gambar 2.16
Peta risiko Gempa Bumi**



Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Gambar 2.17
Peta Zona Kerentanan Bahaya Gempa Bumi



Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

b) Bencana Letusan Gunung Api

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Kemudian hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka bencana yang



disebabkan oleh letusan Gunung Marapi adalah berupa aliran Masa Marapi I dan Aliran Masa Marapi II serta Jatuhan Masa Marapi. Secara umum potensi letusan gunung api di Kota Padang Panjang tergolong rendah, Adapun dampak yang dirasakan di Kota Padang Panjang adalah abu vulkanik dari letusan gunung api tersebut. Beberapa wilayah di Kota Padang Panjang termasuk ke dalam KRB I, Adapun daerah tersebut adalah :

1. Kelurahan Ganting
2. Kelurahan Sigando

c) Gerakan Longsor (Gerakan Tanah)

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah sebagai berikut:

1. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam.
2. Lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.
3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.
4. Batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.
5. Jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.



6. Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.
7. Adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah.
8. Adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah.

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan $> 40\%$. Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur berupa fasilitas jalan bahkan merusak perumahan penduduk serta menimbulkan korban nyawa. Secara tak langsung bencana longsor juga disebabkan kegiatan manusia atau tidak sepenuhnya akibat proses alam. Seperti bencana longsor yang pernah terjadi di Bukit Tui sebagai akibat kegiatan penambangan batu kapur dan bencana longsor lainnya sebagai akibat kegiatan pertanian pada lahan berkemiringan $> 40\%$ dan kegiatan perambahan hutan pada hulu sungai. Secara umum bencana longsor di Kota Padang Panjang terjadi pada daerah bukit atau gunung dengan kemiringan $> 40\%$ dan pada daerah sepanjang lembah sungai.

Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 (dua) potensi gerakan tanah yaitu potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Adapun daerah yang berpotensi tanah longsor di Kota Padang Panjang adalah:

1. Koto Panjang
2. Koto Katik
3. Tanah hitam
4. Silaing Bawah
5. Kampung Manggis
6. Sigando
7. Ganting



Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko longsor antara lain : melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap wilayah yang rawan longsor, reboisasi dan penanaman vegetasi, konstruksi terasering dan dinding penahan, perbaikan infrastruktur drainase, pengawasan dan peringatan dini, penataan dan pembatasan penggunaan lahan serta evaluasi dan pemeliharaan rutin terhadap struktur penahan tanah dan drainase.

d) Banjir

Pada umumnya, banjir di Kota Padang Panjang dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi, letak geografis wilayah, kondisi topografi Kota Padang Panjang yang bergelombang, serta cuaca ekstrem seiring dengan adanya perubahan iklim sehingga menjadikan bertambahnya dataran banjir di Kota Padang Panjang. Banjir juga diperparah oleh tumpukan air yang mengalir dari Kecamatan X Koto dan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar yang letaknya berbatasan dengan Kota Padang Panjang.

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; pemukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Terjadinya banjir juga tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya banjir antara lain:

1. Riol atau saluran pembuangan air kotor. Kota Padang Panjang sering mengalami banjir karena tidak terawatnya saluran air, terutama saluran pembuangan air kotor.
2. Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan besar dalam banjir karena sungai merupakan tempat mengalirnya air dari air hujan. Kegiatan masyarakat yang tinggal di hulu sungai sering menyebabkan terjadinya *blocking* mata air, sehingga ketika terjadi kenaikan debit air akibat curah hujan yang tinggi, air tidak mengalir mengikuti aliran dan arus sungai melainkan menuju kawasan kota dan pemukiman warga sehingga terjadi banjir.
3. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin hari kian menurun.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, semua kelurahan di Kota Padang Panjang tidak ada yang mempunyai IKA



dan IKS dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Dari 16 kelurahan, 14 diantaranya mempunyai kategori sedang dan 2 kelurahan termasuk pada kategori sangat rendah. Berikut data dan peta IKA dan IKS Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Data Kerentanan Kota Padang Panjang

No	Nama Kelurahan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
1	Silaing Bawah	0,5405	0,2725	1	1	1
2	Silaing Atas	0,5566	0,3645	3	3	3
3	Pasar Usang	0,6156	0,3635	1	1	1
4	Kampung Manggis	0,5088	0,2800	3	3	3
5	Tanah Hitam	0,4991	0,3790	3	3	3
6	Pasar Baru	0,5317	0,4960	3	3	3
7	Bukit Surungan	0,5636	0,4769	3	3	3
8	Balai-Balai	0,6470	0,4072	3	3	3
9	Koto Panjang	0,5148	0,4480	3	3	3
10	Koto Katik	0,4868	0,4347	3	3	3
11	Ngalau	0,4223	0,5144	3	3	3
12	Ekor Lubuk	0,4457	0,5248	3	3	3
13	Sigando	0,5369	0,5090	3	3	3
14	Ganting	0,5206	0,5969	3	3	3
15	Guguk Malintang	0,4702	0,3780	3	3	3
16	Tanah Pak Lambik	0,3958	0,4631	3	3	3

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Keterangan : IKS : Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas

IKA : Indeks Kapasitas Adaptif

Kategori Kerentanan :

- 1 : Tidak Rentan
- 2 : Agak Rentan
- 3 : Cukup Rentan
- 4 : Rentan
- 5 : Sangat Rentan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi kerentanan wilayah di Kota Padang Panjang menunjukkan tingkat kerentanan yang relatif cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari aspek banjir maupun kekeringan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang berada pada rentang 0,3958 hingga 0,6470. Nilai tertinggi terdapat di Kelurahan Balai-Balai (0,6470), menandakan kapasitas adaptif yang relatif lebih baik dibandingkan kelurahan lainnya.



Sementara itu, nilai IKA terendah ditemukan di Kelurahan Tanah Pak Lambik (0,3958), yang menunjukkan kapasitas adaptif yang masih perlu ditingkatkan. Secara umum, sebagian besar kelurahan memiliki nilai IKA di kisaran 0,4–0,6, menandakan kapasitas adaptif masyarakat dan wilayah masih dalam kategori rendah hingga sedang.

Dari aspek Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS), rentang nilai berkisar antara 0,2725 hingga 0,5900. Nilai IKS terendah terdapat di Kelurahan Silaiang Bawah (0,2725), sementara nilai tertinggi ada di Kelurahan Sigando (0,5900). Tingginya nilai IKS di beberapa wilayah menunjukkan adanya tekanan tinggi terhadap keterpaparan bahaya dan sensitivitas yang tinggi dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat.

Berdasarkan hasil penghitungan kerentanan, sebagian besar kelurahan di Kota Padang Panjang, yaitu 13 dari 16 kelurahan (81%), masuk ke dalam kelas kerentanan 3 (cukup rentan). Sementara itu, hanya 3 kelurahan (19%) yang masuk dalam kategori kerentanan sangat rendah (kelas 1), yaitu Kelurahan Silaiang Bawah, Pasar Usang, dan Pasar Baru.

Pada aspek risiko banjir dan risiko kekeringan, pola yang serupa juga ditemukan. Sebagian besar kelurahan masuk ke dalam kategori cukup rentan (kelas 3) baik terhadap banjir maupun kekeringan. Hanya 3 kelurahan, yaitu Silaiang Bawah, Silaiang Atas, dan Pasar Usang, yang masuk kategori tidak rentan (kelas 1) untuk kedua jenis risiko tersebut.

Berdasarkan data dokumen Padang Panjang Dalam Angka 2025, terkait rekapitulasi kejadian bencana di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.25
Data Kejadian Bencana di Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir	-	-	-	3	12
2	Gempa Bumi	-	-	-	-	-
3	Tanah Longsor	1	2	-	8	7
4	Jumlah	1	2	-	11	19

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Secara umum potensi banjir di Kota Padang Panjang tergolong rendah, namun di beberapa lokasi tertentu sering terjadi banjir. Adapun daerah yang sering terjadi banjir :

1. Kelurahan Balai-Balai
2. Kelurahan Pasar Baru
3. Kelurahan Pasar usang

Disamping potensi banjir tersebut, Kota Padang Panjang juga berisiko terhadap potensi banjir bandang. Banjir bandang biasanya terjadi akibat



sempitnya alur di hulu sungai. Penyebab lainnya adalah hujan lebat. Di Kota Padang Panjang, terjadi banjir bandang pada Mei 2024. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh aliran dari Gunung Marapi dan aliran dari sekitar Gunung Singgalang yang menyatu dan masuk ke Kota Padang Panjang. Dapat disimpulkan bahwa banjir bandang yang terjadi di Kota Padang Panjang bukan muncul dari Kota Padang Panjang sendiri, melainkan merupakan gabungan dari peristiwa yang terjadi di wilayah administrasi lain. Adapun daerah yang terdampak akibat kejadian tersebut adalah :

1. Kelurahan Pasar Usang
2. Kelurahan Silaing Atas
3. Kelurahan Silaing Bawah

Untuk mitigasi ancaman banjir bandang tersebut, saat ini Kota Padang Panjang hanya memiliki satu peringatan dini, yaitu peringatan dini untuk bencana banjir bandang dan lahar dingin. Sistem Kerja dari Peringatan Dini atau *early warning system* (EWS) tersebut adalah dengan memasang sensor pada hulu sungai yang bertempat di wilayah Tanah Datar yaitu itu Nagari Aia Angek untuk hulu Sungai dari Gunung Marapi dan di Nagari Pandai Sikek untuk hulu Sungai dari Gunung Singgalang. Alat sensor tersebut dapat mendeteksi curah hujan dan ketinggian air Sungai, juga dilengkapi dengan kamera 360 yang mana data tersebut dikirimkan ke server yang bertempat di Kantor BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang sehingga dapat di pantau selama 24 jam. Selanjutnya Sirine di pasang di daerah yang berpotensi terdampak Banjir Bandang dan Lahar Dingin yaitu di Kelurahan Silaing Atas, Kelurahan Silaing Bawah dan Kelurahan Pasar Usang. Jika pada alat terdeteksi adanya peningkatan curah hujan dan ketinggian air, maka anggota Pusdalops akan memencet tombol peringatan dini yang diteruskan ke Masyarakat melalui sirene.

Kota Padang Panjang dengan berbagai potensi bencana telah memiliki relawan kebencanaan di setiap kelurahan dan dilakukan pembinaan oleh BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang yang dinamakan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kelurahan. Pada Tahun 2024 terdata 160 anggota KSB Kelurahan, yang mana masing-masing kelurahan memiliki 10 orang Anggota KSB Kelurahan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang adalah:

1. Melakukan Sosialisasi terkait kebencanaan seperti: Pentingnya Relawan Bencana, jenis bencana dan mitigasinya , daerah-daerah rawan bencana dan lainnya
2. Melakukan Pelatihan kebencanaan seperti: Komunikasi Radio, Survival, Pertolongan Pertama, manajemen posko dan lainnya
3. Perpanjangan tangan kegiatan kebencanaan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan pembinaan terhadap KSB Kelurahan dilakukan setiap tahun



dengan harapan dari pembinaan yang dilakukan tersebut setiap kelurahan dapat melakukan penanggulangan bencana secara mandiri di daerahnya masing-masing sehingga membentuk Kelurahan Tangguh Bencana. Selain KSB Kelurahan, di Kota Padang Panjang juga terdapat PMI, Tagana, Orari Potensi SAR dan organisasi kebencanaan lainnya.

e) Perubahan Iklim

Secara klimatologi, Kota Padang Panjang terletak pada kawasan pegunungan (Gunung Marapi, Singgalang dan Tandikat), sehingga udaranya sejuk dan mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering disebut sebagai kota hujan. Selama periode 2020–2024, kondisi klimatologi di Padang Panjang menunjukkan tren perubahan yang cukup mencolok, baik dari segi suhu maupun curah hujan. Suhu rata-rata tahunan secara bertahap meningkat dari 22,7°C pada 2020 menjadi 23,0°C pada 2024, bersamaan dengan peningkatan suhu maksimum dari 27,5°C menjadi 29,8°C. Peningkatan suhu ini disertai fluktuasi kelembaban udara, di mana kelembaban rata-rata menurun pada 2022 hingga 89,0% dan kembali meningkat menjadi 90,2% pada 2024. Namun, kelembaban maksimum menunjukkan penurunan signifikan dari 98,5% (2020) menjadi hanya 81,5% (2024), yang dapat mengindikasikan penurunan intensitas hujan atau kejenuhan udara. Sementara itu, data curah hujan dan penyinaran matahari memperkuat indikasi adanya perubahan pola iklim. Curah hujan tahunan cenderung bervariasi, dengan titik tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 384,9 mm dan menurun menjadi 317,1 mm pada 2024. Jumlah hari hujan pun sedikit meningkat, dari 17,6 hari (2020) menjadi 20,3 hari (2024), menunjukkan hujan yang lebih sering namun mungkin dengan intensitas yang lebih rendah. Di sisi lain, durasi penyinaran matahari tetap berfluktuasi di kisaran 37–42%, menandakan potensi perubahan dalam tingkat kecerahan dan waktu efektif penyinaran yang dapat berdampak pada sektor pertanian, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu bumi yang terjadi secara global atau regional. Fenomena ini dapat berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari beberapa dekade hingga ribuan tahun. Penyebab utama perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini adalah pemanasan global, yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O). Gas-gas ini terperangkap di atmosfer, mencegah panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke ruang angkasa, dan akhirnya meningkatkan suhu bumi secara keseluruhan.

Berbagai aktivitas manusia berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Sumber utama gas rumah kaca antara lain penggunaan energi listrik, aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan pestisida dalam pertanian, kotoran hewan, limbah sisa makanan, dan sumber lainnya. Berdasarkan data dari signsmart.menlhk.go.id, emisi gas rumah kaca di



Kota Padang Panjang yang berasal dari sektor energi, IPPU (Industri, Proses, dan Penggunaan Produk), pertanian, kehutanan, dan limbah tercatat sebagai berikut:

Tabel 2.26
Sumber Emisi Gas Rumah Kaaca di Kota Padang Panjang

NO.	ITEM	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ENERGI	0,66	27,03	27,03	47,90	48,07
2.	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PERTANIAN	8,73	2,01	1,85	2,96	2,27
4.	KEHUTANAN	-5,22	-5,22	-5,22	-5,22	-5,22
5.	LIMBAH	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
TOTAL		4,20	23,82	23,65	45,64	45,19

Sumber : signsmart.menlhk.go.id, 2024

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa emisi gas rumah kaca di Kota Padang Panjang secara umum berasal dari kegiatan energi dan pertanian berupa aktivitas kendaraan bermotor, dan kegiatan peternakan serta lahan pertanian.

G. Demografi

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena demografi menggambarkan komposisi dan distribusi penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.

1. Jumlah dan Struktur Penduduk

Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 53.693 orang, lalu meningkat menjadi 56.311 orang pada Tahun 2020. Tren pertumbuhan terus berlanjut, dengan jumlah penduduk mencapai 56.971 orang pada Tahun 2021. Kenaikan tersebut berlanjut hingga Tahun 2022 dan 2023, di mana jumlah penduduk berturut-turut mencapai 57.850 orang dan 58.627 orang. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang Panjang meningkat menjadi 59.453 orang, menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Peningkatan angka penduduk ini mencerminkan dinamika perkembangan Kota Padang Panjang yang terus berkembang, dengan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang Timur		Padang Panjang Barat		Padang Panjang
	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)
2020	24.151	42,89%	32.160	57,11%	56.311



Tahun	Padang Panjang Timur		Padang Panjang Barat		Padang Panjang
	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)
2021	24.527	43,05%	32.444	56,95%	56.971
2022	25.000	43,22%	32.850	56,78%	57.850
2023	25.432	43,65%	33.195	56,97%	58.627
2024	25.888	43,54%	33.565	56,46%	59.453
Rata2		43,27%		56,85%	

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Kota Padang Panjang memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan rata-rata persentase jumlah penduduk di Padang Panjang Barat mencapai 56,85%, sedangkan di Padang Panjang Timur hanya 43,27%. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur.

Data kepadatan penduduk untuk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kepadatan Penduduk	2,448	2,447	2,455	2,549	2,585

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Kepadatan penduduk Kota Padang Panjang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, khususnya dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 2.448 jiwa per kilometer persegi dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2.447 jiwa/km² pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022 terjadi kenaikan bertahap menjadi 2.455 jiwa/km², kemudian meningkat cukup signifikan di tahun 2023 menjadi 2.549 jiwa/km², dan kembali naik di tahun 2024 mencapai 2.585 jiwa/km². Peningkatan kepadatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah kota yang luasnya tetap, sehingga memberikan tekanan terhadap kebutuhan ruang, infrastruktur, dan pelayanan dasar. .

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat tinggi di angka 4,88, yang mencerminkan pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun



2021, terjadi penurunan tajam dengan angka laju pertumbuhan hanya 1,17, menandakan adanya penurunan yang signifikan. Setelah itu, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka berturut-turut 1,54 dan 1,48, namun tetap berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk sedikit meningkat menjadi 1,46, menunjukkan adanya pemulihan, meskipun masih belum kembali ke tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti pada tahun 2020.

Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), mencapai 40.010 orang atau sekitar 67,31% dari total penduduk kota. Keadaan ini menciptakan potensi bonus demografi yang signifikan, yang bisa menjadi kekuatan utama dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, penduduk usia produktif tidak hanya akan menjadi jumlah yang besar, tetapi juga produktif dan memiliki kualitas yang unggul. Strategi investasi dalam pendidikan yang baik dan akses kesehatan yang merata akan memastikan bahwa bonus demografi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan kota, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Kolaborasi antar stakeholder dan perencanaan kebijakan yang cermat menjadi kunci untuk mengelola dengan efektif bonus demografi ini agar Kota Padang Panjang dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.29
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024



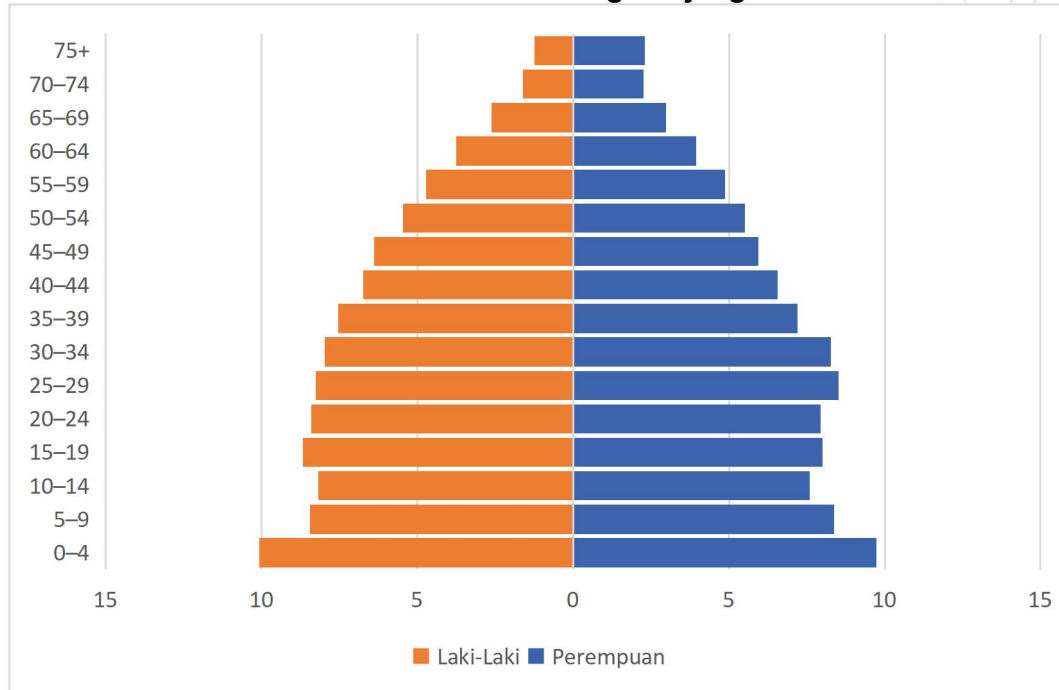
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total	Total per Kelompok	Proporsi	Dependency Ratio	Ket.
	Laki-laki	Perempuan					
0-4	3.010	2.880	5.890	15.580	26,21%	38,94%	Penduduk Muda
5-9	2.520	2.480	5.000				
10-14	2.440	2.250	4.690				
15-19	2.590	2.370	4.950	40.410	67,31%	-	Usia Produktif
20-24	2.510	2.350	4.860				
25-29	2.470	2.520	5.000				
30-34	2.380	2.450	4.830				
35-39	2.250	2.130	4.380				
40-44	2.010	1.940	3.940				
45-49	1.910	1.760	3.660				
50-54	1.630	1.630	3.250				
55-59	1.410	1.440	2.850				
60-64	1.120	1.170	2.290				
65-70	780	880	1.650	3.850	6,48%	9,62%	Penduduk Tua
70-74	480	670	1.150				
75+	370	680	1.050				
Total	29.880	29.600	59.450	59.450	100%	48,56%	

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Rasio ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mencapai 48,56%. Artinya, dalam setiap 100 penduduk usia produktif, terdapat sekitar 49 orang penduduk dengan usia non-produktif yang menjadi tanggung jawab mereka. Rasio ini terdiri dari ketergantungan penduduk muda sebesar 38,94% dan ketergantungan penduduk tua sebesar 9,62%. Fakta ini menunjukkan bahwa beban tanggung jawab terhadap penduduk muda jauh lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap penduduk tua di Kota Padang Panjang. Adanya rasio ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk muda mengindikasikan adanya potensi beban pada sistem pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan untuk fokus pada pembangunan keterampilan dan lapangan kerja bagi generasi muda. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu merancang kebijakan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan penduduk muda.

Meskipun demikian, perhatian juga perlu diberikan pada ketergantungan terhadap penduduk tua, dan kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan yang memadai perlu diimplementasikan untuk mendukung kelompok ini. Pemahaman dan manajemen yang seimbang antara kedua kelompok ini akan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Padang Panjang. Komposisi penduduk juga dapat diamati melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mencerminkan karakteristik ekspansif, menandakan bahwa mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia muda. Piramida penduduk digunakan untuk memvisualisasikan distribusi usia dan jenis kelamin dalam populasi suatu wilayah, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024



Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Proporsi penduduk di kelompok usia muda (0-14 tahun) terlihat lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia tua (65 tahun ke atas). Karakteristik ini dapat diartikan sebagai bonus demografi yang menunjukkan potensi pembangunan ekonomi dan sosial. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebagai bukti, *sex ratio* penduduk di kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 101,00, yang berarti setiap 101 orang penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100 orang jumlah penduduk perempuan, menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berikut perkembangan data rasio penduduk Kota Padang Panjang tahun 2020-2024

Tabel 2.30
Rasio Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penduduk	101	101	101,1	101	101,53

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Selain kelompok usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Menurut tingkat pendidikan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh lulusan SMA ke atas, mencapai 66,40% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh sektor Jasa, mencapai 22,197 orang. Informasi lebih rinci dapat ditemukan pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan Tahun 2024

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak Mempunyai Ijazah	3,41%	4,29%	3,86%
2	SD/Sederajat	10,64%	10,58%	10,61%
3	SLTP/Sederajat	21,38%	16,86%	19,09%
4	SMA Ke Atas	64,56%	68,26%	66,4%
Jumlah		100%	100%	100%

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Tabel 2.32
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian	1,425	511	1.936
2	Manufaktur	1,435	1,203	2.638
3	Jasa-jasa	12,796	9,401	22.197
Jumlah		15.656	11,115	26,771

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

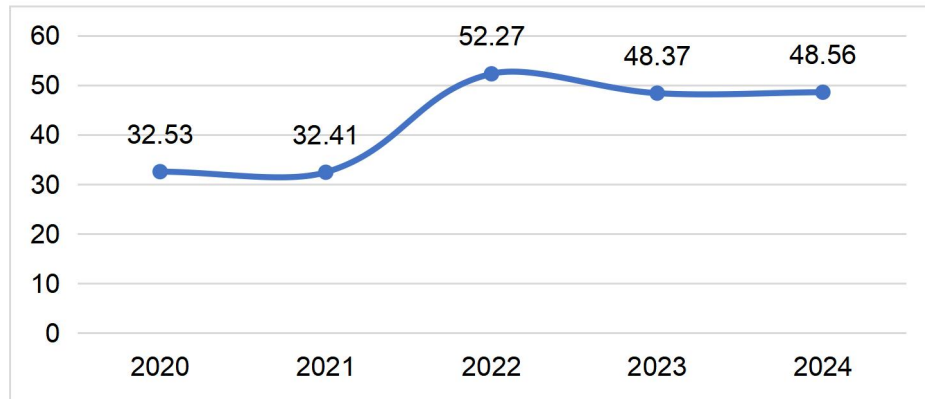
4. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dikaji. Pada 2020 dan 2021, rasio berturut-turut sebesar 32,53% dan 32,41%, menandakan struktur penduduk yang ideal dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun). Namun, terjadi lonjakan signifikan pada 2022 menjadi 52,27%, sebuah peningkatan drastis yang diduga dipengaruhi oleh kombinasi faktor demografis seperti peningkatan angka kelahiran, penurunan partisipasi angkatan kerja pascapandemi, atau migrasi keluar tenaga kerja muda. Angka ini kemudian mengalami penurunan moderat pada 2023 (48,37%) dan 2024 (48,56%), mengindikasikan upaya stabilisasi melalui perbaikan kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.20
Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2020-2024



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Tingginya angka ketergantungan pasca tahun 2022 mencerminkan beban demografis yang perlu menjadi perhatian utama. Dengan hampir setengah dari populasi bergantung pada kelompok usia produktif, tekanan pada sektor ketenagakerjaan, layanan pendidikan, dan kesehatan meningkat. Struktur ini berpotensi menghambat akumulasi modal manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Meski demikian, proporsi usia muda yang tinggi juga dapat menjadi aset jangka panjang, terutama jika disertai investasi dalam pengembangan kapasitas generasi muda melalui pendidikan vokasi dan pencegahan stunting.

Apabila di kaji lebih dalam, berdasarkan data BPS dalam Informasi Ketenagakerjaan Padang Panjang Dalam Tahun 2024, bahwa Jumlah masyarakat Usia Produktif di Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 43.900 jiwa, yang tersebar di dalam kelompok umur seperti tabel berikut:

Tabel 2.33
Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompok Umur
Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
15-19	2.590	11,82%	2.370	10,78%	4.960	11,30%
20-24	2.510	11,46%	2.350	10,69%	4.860	11,07%
25-29	2.470	11,27%	2.520	11,46%	4.990	11,37%
30-34	2.380	10,86%	2.450	11,14%	4.830	11,00%
35-39	2.250	10,27%	2.130	9,69%	4.380	9,98%



Kelompok Umur	Jenis kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
40-44	2.010	9,17%	1.940	8,82%	3.950	9,00%
45-49	1.910	8,72%	1.760	8,00%	3.670	8,36%
50-54	1.630	7,44%	1.630	7,41%	3.260	7,43%
55-59	1.410	6,44%	1.440	6,55%	2.850	6,49%
60+	2.750	12,55%	3.400	15,46%	6.150	14,01%
Total	29.880	100%	29.600	100%	43.900	100%

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

5. Proyeksi Demografi

Demografi memandang penduduk melalui ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran ke ruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kelahiran/fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, 2010). Dalam perkembangannya, kajian mengenai demografi secara formal berkembang ke arah studi kependudukan dengan melihat variabel demografis mempengaruhi variabel non demografis misalnya pengaruh jumlah penduduk terhadap kebutuhan sarana prasarana seperti rumah layak huni, air bersih, listrik, persampahan, sekolah, fasilitas kesehatan dan lainnya. Hadirnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan menegaskan bahwa penduduk diletakkan sebagai fokus/sentral (baik subyek maupun obyek) pembangunan dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak dan berkelanjutan.

Kependudukan merupakan modal dasar yang berpengaruh terhadap perwujudan Indonesia Emas 2045. Secara umum, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Dinamika penduduk yang terjadi saat ini dan akan datang dapat memberikan peluang sekaligus ancaman dalam proses pembangunan. Perubahan komposisi penduduk yang tidak dapat dielakkan perlu penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan.

A. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 berjumlah 59.453 orang. Diproyeksikan pada Tahun 2025 berjumlah 60.264 orang atau



terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 1,4%. Memasuki awal periode Tahun 2025, penduduk Kota Padang Panjang akan menyentuh angka enam puluh ribu jiwa dan terus bertambah pada periode berikutnya hingga angka tujuh puluh ribu di akhir periode pada Tahun 2030. Jumlah penduduk Kota Padang Panjang diproyeksikan bertambah sebanyak 6,38% dalam kurun waktu tahun 2025-2030. Adapun data proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2030

Penduduk Tahun 2024 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
59.453	60.264	61.033	61.802	62.572	63.341	64.110

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Meskipun jumlah penduduk diproyeksikan meningkat, berdasarkan laju pertumbuhan penduduk terjadi perlambatan dari periode awal hingga periode akhir. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk periode Tahun 2025-2030 rata-rata sebesar 1,27%. Kondisi laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang tersebut tampak pada grafik berikut:

Gambar 2.21
Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang, Tahun 2025-2030



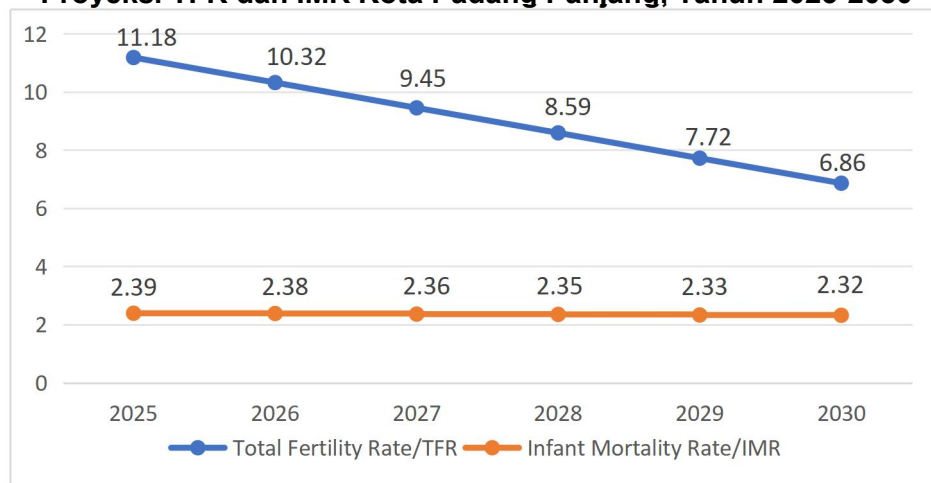
Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Parameter proyeksi penduduk yang dilaksanakan oleh BPS di atas, didasarkan pada angka kelahiran (*Total Fertility Rate/TFR*) dan angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*). Hasil proyeksi penduduk dalam rentang Tahun 2025-2030, rata-rata TFR Kota Padang Panjang berada pada angka 2,4 Artinya, terdapat sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan di Kota Padang Panjang selama masa reproduksinya.



Kemudian, angka kematian bayi/*infant mortality rate* (IMR) pada Kota Padang Panjang sebesar diprediksi pada tahun 11,18 pada tahun 2025 dan menyentuh angka 6,86 pada tahun 2030. Ini merupakan penurunan sebesar 4,32 poin dalam waktu 6 tahun. IMR yang rendah menggambarkan penduduk mampu membeli makanan bergizi, fasilitas kesehatan lengkap, dan obat-obatan memadai. Adapun grafik TFR dan IMR Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Gambar 2.22
Proyeksi TFR dan IMR Kota Padang Panjang, Tahun 2025-2030



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Salah satu cara dalam menyajikan data struktur penduduk adalah menggunakan kelompok jenis kelamin. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki 29.875 orang dan jumlah penduduk perempuan 29.578 orang dengan Rasio 101,00. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Pada periode awal RPJMD hingga periode akhir RPJMD, diproyeksikan rasio jenis kelamin cenderung menurun, namun masih berada di angka 100 hingga Tahun 2030. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Pada Tahun 2025 hingga 2030, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Proyeksi rasio jenis kelamin ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara inklusif. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

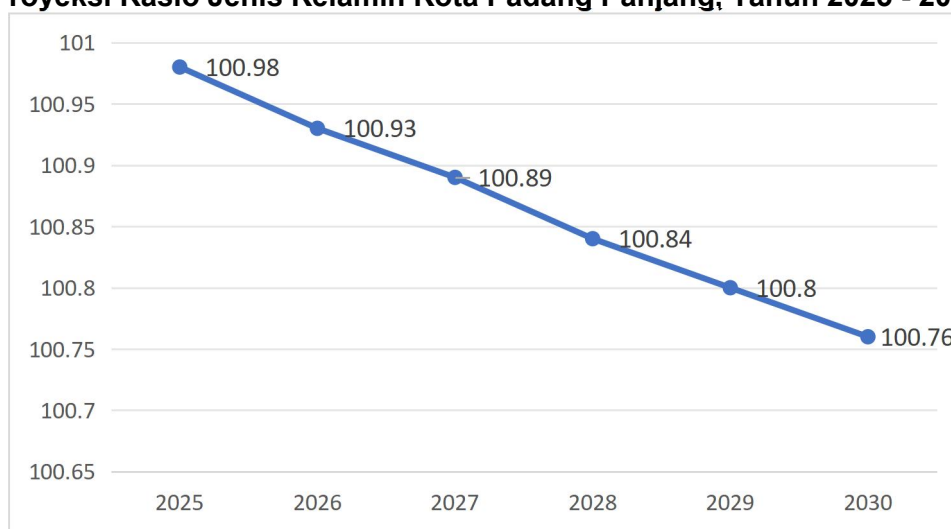


Tabel 2.35
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan
Jenis Kelamin, Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	29.875	30.279	30.667	31.054	31.440	31.827	32.176
Perempuan	29.578	29.985	30.366	30.748	31.132	31.514	31.934
Rasio	101,00	100,98	100,99	101	100,99	100,99	100,76

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Gambar 2.23
Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kota Padang Panjang, Tahun 2025 - 2030



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang Panjang diproyeksikan mencapai 59.453 jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada pada kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebanyak 40.010 jiwa atau sekitar 67,3% dari total populasi. Penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) berjumlah 15.580 jiwa, sementara kelompok lansia (>65 tahun) sebanyak 3.850 jiwa.

Angka ketergantungan total pada tahun ini tercatat sebesar 48,56, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang dari kelompok usia tidak produktif. Sementara itu, angka ketergantungan lansia sebesar 9,62, menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif, sekitar 10 orang yang ditanggung adalah lansia. Untuk proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan
Kelompok Umur, Tahun 2025-2030

Kelompok	Penduduk	Proyeksi Penduduk (Orang)



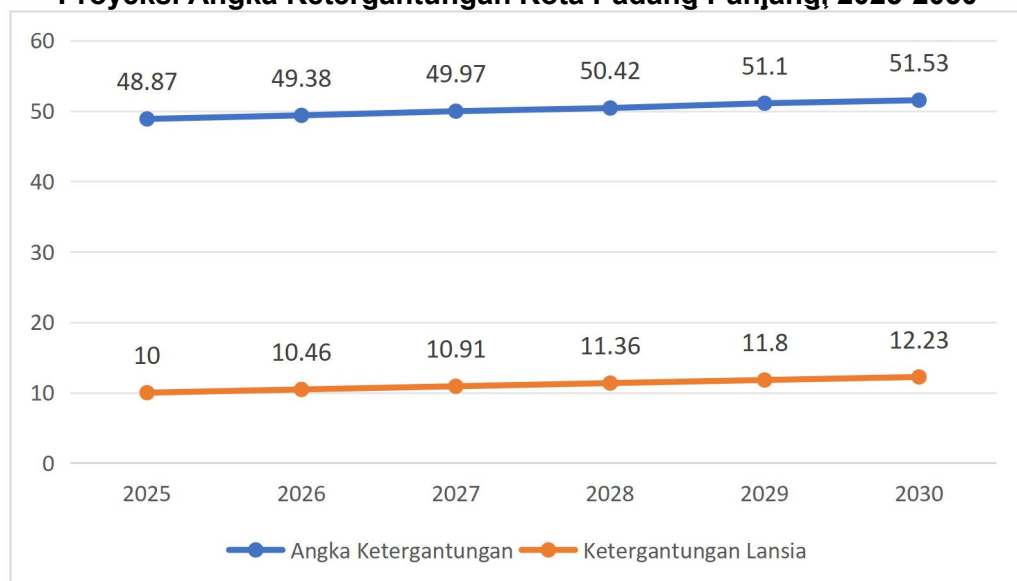
Umur	Tahun 2024 (orang)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14 tahun	15.580	15.737	15.915	16.093	16.272	16.450	16.628
15-64 tahun	40.010	40.480	40.846	41.212	41.577	41.943	42.309
> 65 tahun	3.850	4.047	4.272	4.497	4.723	4.948	5.173
Angka Ketergantungan	48,56	48,87	49,38	49,97	50,42	51,1	51,53
Ketergantungan Lansia	9,62	10,00	10,46	10,91	11,36	11,8	12,23

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Selama periode 2025 hingga 2030, angka ketergantungan di Kota Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan moderat. Angka ketergantungan total naik dari 48,87 pada tahun 2025 menjadi 51,53 pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap kelompok usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) semakin bertambah, meskipun masih berada dalam batas yang relatif terkendali.

Secara khusus, angka ketergantungan lansia juga menunjukkan peningkatan bertahap, dari 10,00 pada tahun 2025 menjadi 12,23 pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang Panjang sedang memasuki fase awal penuaan penduduk, yang membutuhkan perhatian dalam penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta kebijakan perlindungan lanjut usia.. Perkembangan angka ketergantungan tersebut digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 2.24
Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2025-2030



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)



D. Analisa Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk seperti yang sudah dijelaskan di atas, berbanding lurus dengan kepadatan penduduk. Semakin bertambah penduduk, kepadatan juga meningkat. Tampak pada tabel di bawah ini, kepadatan penduduk Kota Padang Panjang di Tahun 2024 sebesar 2.585 jiwa/km². Pada Tahun 2025, kepadatan penduduk meningkat menjadi 2.620 jiwa/km² hingga seterusnya pada akhir periode RPJMD menjadi 2.787 jiwa/km². Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1,2%.

Kepadatan penduduk dapat berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas daerah jika tersedianya tenaga kerja yang banyak dan terampil diiringi ketersediaan infrastruktur serta lapangan kerja memadai. Namun, dapat berdampak negatif seperti, menurunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup karena adanya pencemaran udara, air, tanah, dan suara akibat aktivitas manusia. Pada aspek kesehatan dapat memunculkan penyakit menular akibat kontak fisik dan sanitasi yang buruk. Kemudian, keamanan karena adanya konflik sosial akibat persaingan dan ketimpangan sumber daya dan fasilitas umum. Lalu, ketahanan pangan karena adanya penurunan lahan pertanian dan ketersediaan pangan. Berikut proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.37
Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang Panjang, Tahun 2025-2030

Kategori	Eksisting 2024	Proyeksi Penduduk (Orang)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk	59.453	60.264	61.033	61.802	62.572	63.341	64.110
Luas Lahan dalam km ²	23	23	23	23	23	23	23
Kepadatan Penduduk	2.585	2.620	2.654	2.687	2.721	2.754	2.787

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang



mencapai 4,84%. Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin. Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang	Sumatera Barat	Nasional
2020	-1,44	-1,61	-2,07
2021	3,46	3,29	3,7
2022	4,39	4,36	5,31
2023	4,84	4,62	5,05
2024	4,52	4,36	5,03

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Turunnya LPE Kota Padang Panjang tahun 2024 ini antara lain disebabkan karena terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup.

PDRB ADHK Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 3.009,93 miliar rupiah, naik dari 2.879,85 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,19%, naik dari tahun 2023 yang sebesar 1,91%. Sedangkan pertumbuhan terendah yakni pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,87%.

Pada tahun 2024, mayoritas pertumbuhan lapangan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, akan tetapi terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kenaikan seperti lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik dari 6,52% pada tahun 2023 menjadi 7,45% di tahun 2024. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.39
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,29	4,87	5,43	1,87	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,64	2,23	2,20	4,47	2,57
C	Industri Pengolahan	-2,41	2,44	2,40	4,79	2,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,85	2,84	2,93	3,53	3,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,36	4,43	4,24	2,33	4,05
F	Konstruksi	-3,25	1,02	2,45	6,43	4,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,01	3,20	5,28	4,29	3,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-11,12	4,19	3,19	5,62	3,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-12,04	7,38	10,47	6,52	7,45
J	Informasi dan Komunikasi	8,33	5,42	6,53	7,51	5,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97	8,72	4,52	3,57	6,81
L	Real Estat	0,11	2,17	5,42	6,16	5,80
M, N	Jasa Perusahaan	-4,45	1,05	6,30	6,64	4,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,72	0,73	-1,05	1,91	8,19
P	Jasa Pendidikan	5,91	1,51	5,21	1,73	2,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	5,22	4,43	7,42	4,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	-9,66	6,80	11,02	8,13	7,91
Produk Domestik Regional Bruto		-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Struktur ekonomi Kota Padang Panjang dapat dilihat dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang menunjukkan lapangan usaha atau sektor perekonomian yang berperan besar dalam perekonomian Kota Padang Panjang.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kota Padang Panjang adalah sebesar 4.756,96 miliar rupiah, naik dari tahun 2023 yang sebesar 4.474,08 miliar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki *share* atau distribusi terbesar pada tahun 2024 dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,28%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,77%; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,88%; Konstruksi sebesar 9,58%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 9,52%, dan Jasa Pendidikan dengan kontribusi sebesar 9,52%.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, keenam lapangan usaha tersebut selalu mendominasi perekonomian Kota Padang Panjang, meskipun lapangan usaha Konstruksi mengalami sedikit penurunan dari 9,67% pada tahun 2023 menjadi 9,58% di tahun 2024. Lapangan usaha Transportasi dan Komunikasi



juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 12,20% menjadi 11,77% di tahun 2024. Kontribusi lapangan usaha Jasa Pendidikan juga mengalami penurunan dari 9,59% pada tahun 2023 menjadi 9,52% di tahun 2024. Distribusi dari masing-masing lapangan usaha yang membentuk struktur perekonomian Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Distribusi PDRB ADHB Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,15	5,12	5,14	5,08	4,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25
C	Industri Pengolahan	8,43	8,48	8,31	8,34	8,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
F	Konstruksi	9,83	9,62	9,51	9,67	9,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,96	17,51	18,15	18,15	18,28
H	Transportasi dan Pergudangan	11,77	11,82	11,94	12,20	11,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,64	2,75	2,82	2,82	2,89
J	Informasi dan Komunikasi	9,52	9,65	9,78	9,88	9,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,15	4,46	4,42	4,26	4,31
L	Real Estat	3,59	3,53	3,50	3,61	3,65
M, N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,09	10,28	9,60	9,29	9,52
P	Jasa Pendidikan	10,14	9,89	9,89	9,59	9,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,59	1,55	1,59	1,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,51	4,65	4,76	4,91	5,10
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

B. Tingkat Kemiskinan

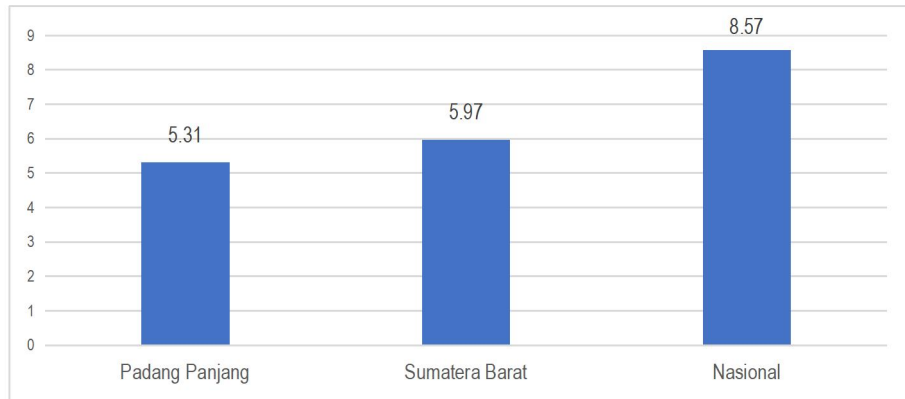
Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 5,31 persen, naik sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2023. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama 5 tahun 2020-20234 menunjukkan tren yang fluktuatif, dan cenderung naik pada 2 tahun terakhir, dari 5,14% di tahun 2022, naik menjadi 5,24% di tahun 2023 dan kembali naik menjadi 5,31% di tahun 2024. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang cenderung naik dalam 2 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang tahun 2024 tetap lebih rendah dibandingkan



dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang masing-masing tercatat sebesar 5,97% dan 8,57%.

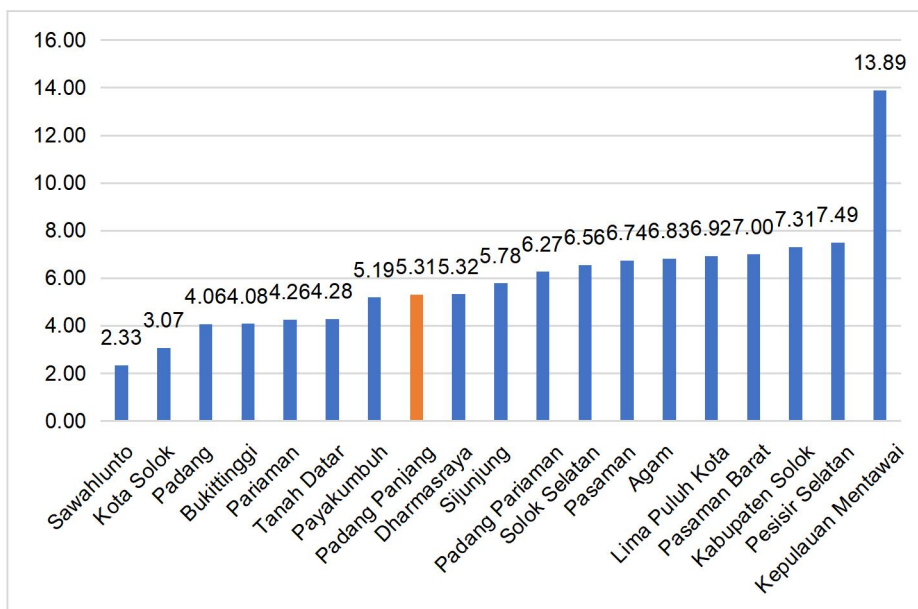
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang berada di tengah-tengah, yaitu lebih rendah dibandingkan 11 daerah, akan tetapi belum mencapai tingkat kemiskinan serendah tujuh daerah lainnya.

Gambar 2.25
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Gambar 2.26
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Kenaikan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang. Trend penduduk miskin ini dalam kurun waktu 2020-2024 fluktuatif, dan dalam 2 tahun terakhir, 2023-2024, menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota



Padang Panjang berjumlah 2.840 orang, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin telah mencapai 3.060 orang.

Kenaikan jumlah penduduk ini antara lain disebabkan naiknya Garis Kemiskinan yang menjadi tolok ukur BPS menentukan ukuran minimum pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Garis Kemiskinan di Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan kenaikan, dari Rp.491.142,- menjadi Rp.634.303 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 telah terjadi kenaikan Garis Kemiskinan sebesar Rp.143.160, atau sebesar 29,15%. Garis Kemiskinan tahun 2024 ini berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai Rp.708.416, perkembangannya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.27
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan P2 adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

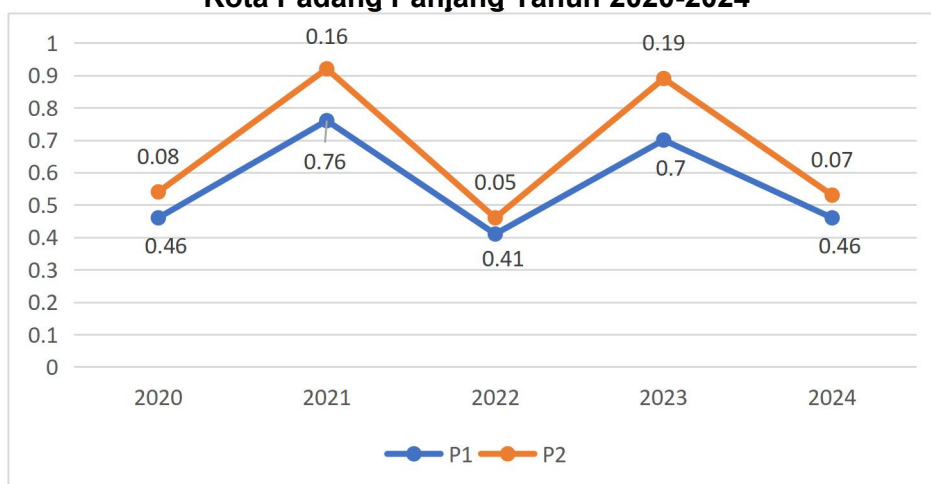
Nilai P1 dan P2 Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Nilai P1 Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 0,46, sama dengan tahun 2020, meskipun sempat mengalami kenaikan tertinggi



menjadi 0,76 pada tahun 2021. Sedangkan nilai P2 Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 0,07, turun dari tahun 2020 yang sebesar 0,08.

Nilai P1 tahun 2024 sebesar 0,46 turun dari 0,70 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Padang Panjang cenderung makin mendekati garis kemiskinan Rp.643.303 dan juga semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Nilai P1 Kota Padang Panjang tahun 2024 ini berada dibawah nilai Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 0,74. Sedangkan nilai P2 tahun 2024 sebesar 0,07, turun dari 0,17 pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Padang Panjang semakin berkurang. Nilai P2 Kota Padang Panjang tahun 2024 ini berada di bawah nilai P2 Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 0,15. Perkembangan datanya dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:

Gambar 2.28
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

C. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita menunjukkan rata-rata pendapatan per orang di suatu wilayah, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, yang digunakan untuk membantu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah.

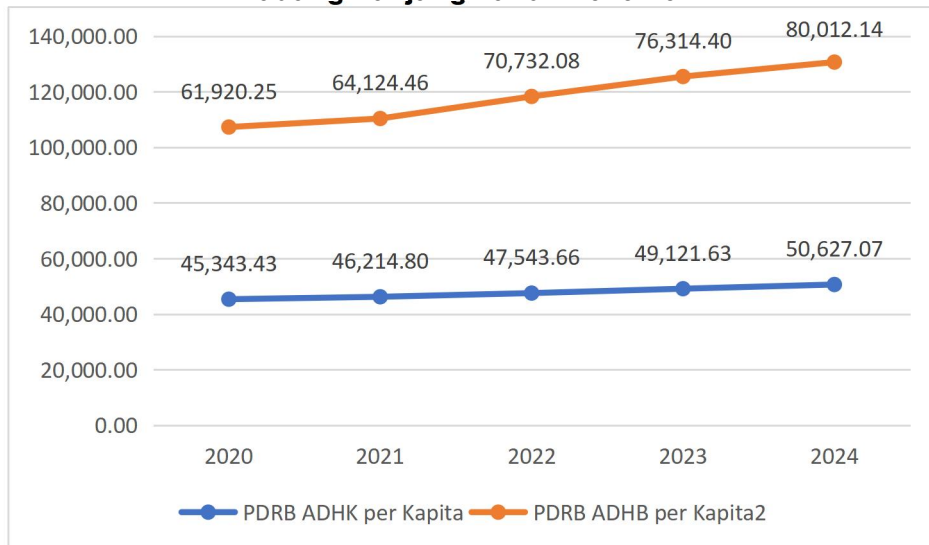
PDRB per Kapita dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada tahun 2024, PDRB ADHK per Kapita Kota Padang Panjang mencapai Rp.50,62 juta dan PDRB ADHB per Kapita mencapai Rp.80,01 juta.

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB ADHK per Kapita naik dari Rp.45,34 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.50,62 juta di tahun 2024, atau naik sebesar Rp.5,28 juta. PDRB



ADHB per Kapita juga mengalami kenaikan dari Rp.61,92 juta di tahun 2020 menjadi Rp.80,01 juta di tahun 2024 atau naik sebesar Rp.18,01 juta. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.29
Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat, dimana PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.34,16 juta dan PDRB ADHB per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.57,04 juta.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, PDRB ADHK per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2024 berada pada posisi ke-3 setelah Kota Bukittinggi dan Kota Padang, sedangkan PDRB ADHB per Kapita juga berada pada posisi ke-3 setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Data perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.41
Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang		Sumatera Barat	
	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita
2020	45.343,43	61.920,25	30.696,21	43.825,66
2021	46.214,80	64.124,46	31.264,98	45.218,16
2022	47.543,66	70.732,08	32.166,76	50.263,83
2023	49.121,63	76.314,40	33.188,07	54.326,60
2024	50.627,07	80.012,14	34.167,59	57.047,21

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah



Tabel 2.42
PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	
	Harga Konstan	Harga Berlaku
Kab. Kep. Mentawai	67,335.09	67,335.09
Kab. Pesisir Selatan	35,994.91	35,994.91
Kab. Solok	44,811.95	44,811.95
Kab. Sijunjung	50,608.60	50,608.60
Kab. Tanah datar	45,066.39	45,066.39
Kab. Padang Pariaman	58,385.81	58,385.81
Kab. Agam	50,019.19	50,019.19
Kab. Lima Puluh Kota	51,985.41	51,985.41
Kab. Pasaman	38,245.84	38,245.84
Kab. Solok Selatan	38,905.35	38,905.35
Kab. Dharmasraya	58,713.54	58,713.54
Kab. Pasaman Barat	46,258.89	46,258.89
Kota Padang	88,225.31	88,225.31
Kota Solok	69,987.76	69,987.76
Kota Sawahlunto	73,597.61	73,597.61
Kota Padang Panjang	80,012.14	80,012.14
Kota Bukittinggi	93,968.08	93,968.08
Kota Payakumbuh	64,205.93	64,205.93
Kota Pariaman	69,169.90	69,169.90
Jumlah	56,915.13	56,915.13
Provinsi Sumatera Barat	57,047.21	57,047.21

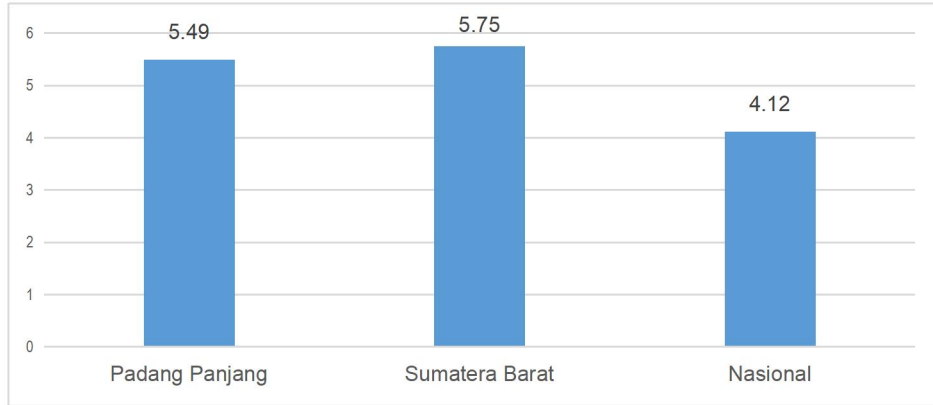
Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasa disebut tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang adalah sebesar 4,94%, turun sebesar 0,55 poin dari tahun 2023 yang berjumlah 5,49%. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, angka ini lebih baik sebesar 0,45 poin, meskipun masih belum sebaik capaian nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini:

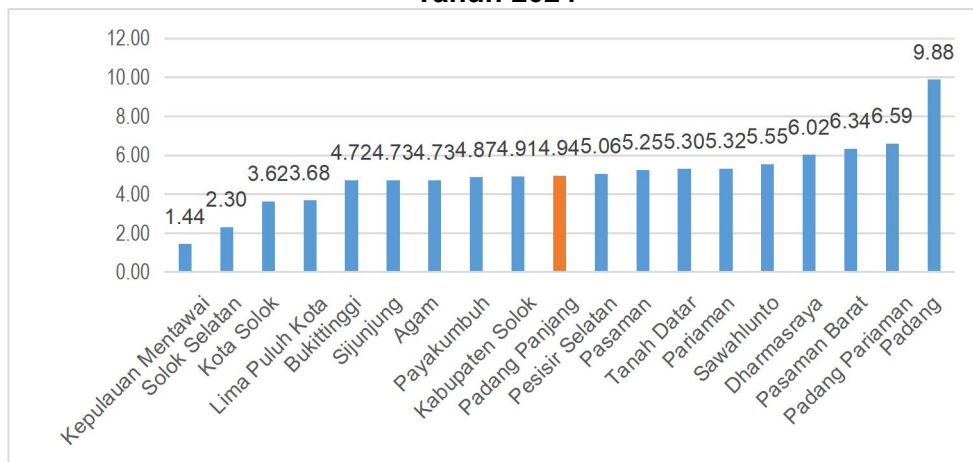
Gambar 2.30
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Namun, angka ini belum sebaik beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Agam, Payakumbuh, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pesisir, Kabupaten Pasaman, Tanah Datar, Pariaman, Sawahlunto, Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Perbandingan datanya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.31
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Barat
Tahun 2024**

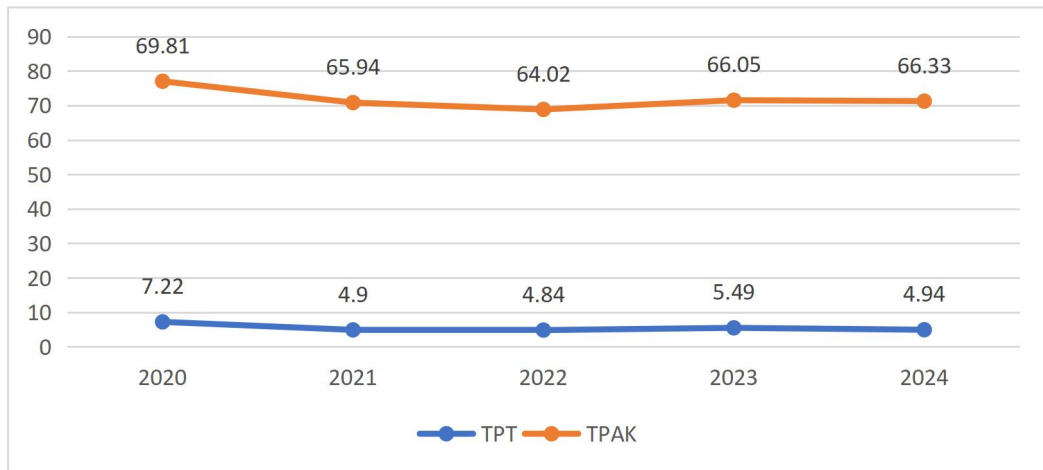


Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025



Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, setelah sempat turun 7,22% pada tahun 2020 menjadi 4,84% pada tahun 2022, tingkat pengangguran ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 5,49% di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 4,94% di tahun 2024. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kota Padang Panjang sempat turun dari 69,81% di tahun 2020 menjadi 64,02% di tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing 66,05% dan 66,33%. Perkembangannya dapat dilihat pada grafik di bawah :

Gambar 2.32
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

E. Indeks Gini

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, dengan kisaran nilai antara 0-1, dimana nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi atau porsi pendapatan terbesar hanya didominasi oleh sekelompok kecil orang saja, dan Rasio Gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,266, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,273. Sejak tahun 2020, tren Indeks Gini Kota Padang Panjang terus menunjukkan penurunan, yang menandakan adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan di kota ini. Penurunan Indeks Gini mencerminkan semakin berkurangnya

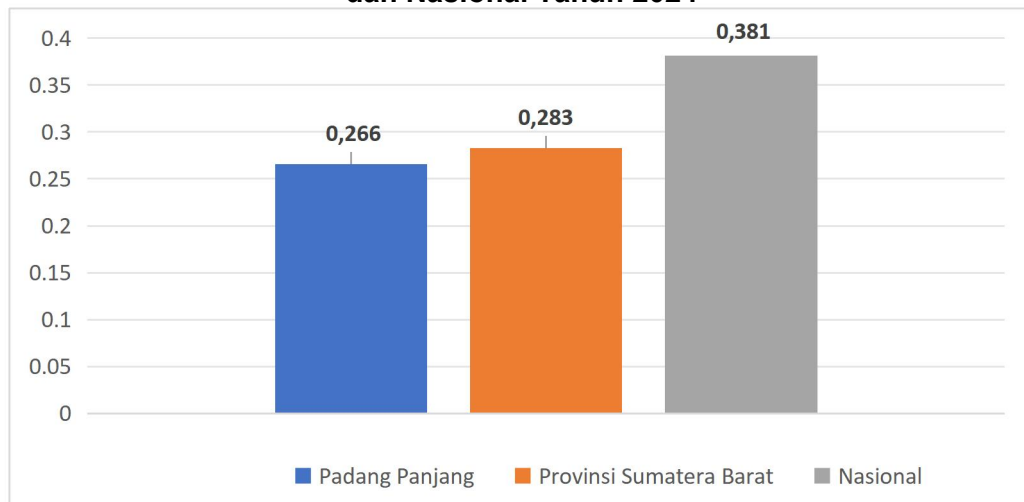


ketimpangan pendapatan, yang merupakan indikator positif dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Padang Panjang menempati peringkat ke-12 terendah dengan nilai 0,266. Kota ini berada di bawah beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang. Namun, jika dibandingkan secara khusus dengan kota-kota lainnya, Padang Panjang menjadi kota dengan Indeks Gini terendah di Sumatera Barat, menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling kecil di antara kota-kota lain di provinsi ini.

Selain itu, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 lebih rendah 0,017 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,283. Kota ini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, yang berada di angka 0,381—lebih rendah sebesar 0,115 poin. Data ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah ini. Data perbandingan indeks gini Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah:

Gambar 2.33
Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber Data: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah



Tabel 2.43
Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat
2020	0.394	0.305
2021	0.306	0.306
2022	0.296	0.300
2023	0.273	0.280
2024	0.266	0.283

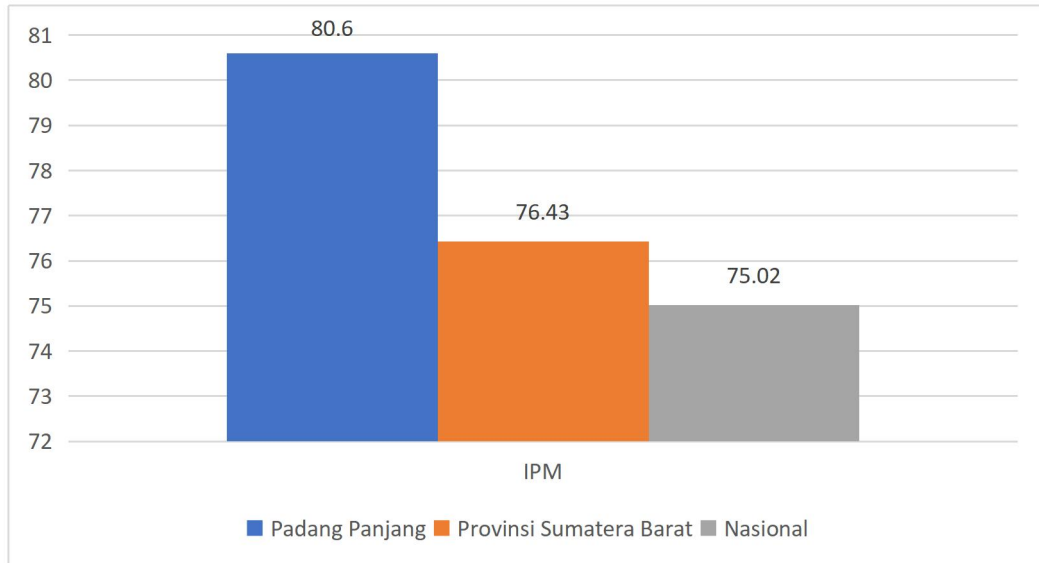
Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 80,60, naik sebesar 1,34 poin dari tahun 2023 yang berada pada angka 79,26. IPM Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini berada diatas IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 76,43 dan juga diatas IPM nasional yang sebesar 75,02. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, maka capaian IPM Kota Padang tahun 2024 ini berada pada peringkat ke-4 tertinggi setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada grafik di berikut :

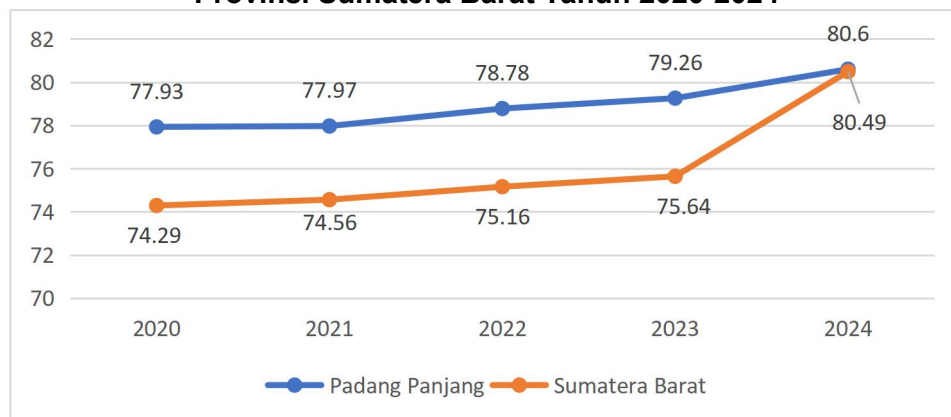
Gambar 2.34
Perbandingan IPM Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang terus meningkat, terlihat dari IPM tahun 2020 sebesar 77,93 kemudian naik menjadi 80,60 pada tahun 2024, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.35
Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

G. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan Kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Cerminan derajat kesehatan suatu masyarakat adalah Usia Harapan Hidup (UHH), UHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup



yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada suatu tahun tertentu..

Derajat kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan pembangunan kesehatan mencapai indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang lebih tinggi yang ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan). Capaian pembangunan Kesehatan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari capaian indikator-indikator berikut:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat. Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 diukur melalui angka Usia harapan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan UHH Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan UHH pada Provinsi Sumatera Barat, maka UHH Kota Padang Panjang lebih tinggi, dimana pada tahun 2024 UHH kota Padang Panjang sebesar 74,48 tahun sedangkan Provinsi Sumatera Barat dengan 74,14 tahun.

Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator ini dapat diwujudkan dengan berbagai strategi dan pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan urusan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pendekatan pemahaman terhadap 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom yaitu mulai dari gaya hidup, keturunan, lingkungan serta sistem pelayanan kesehatan menjadi pemahaman awal agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian UHH sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat.

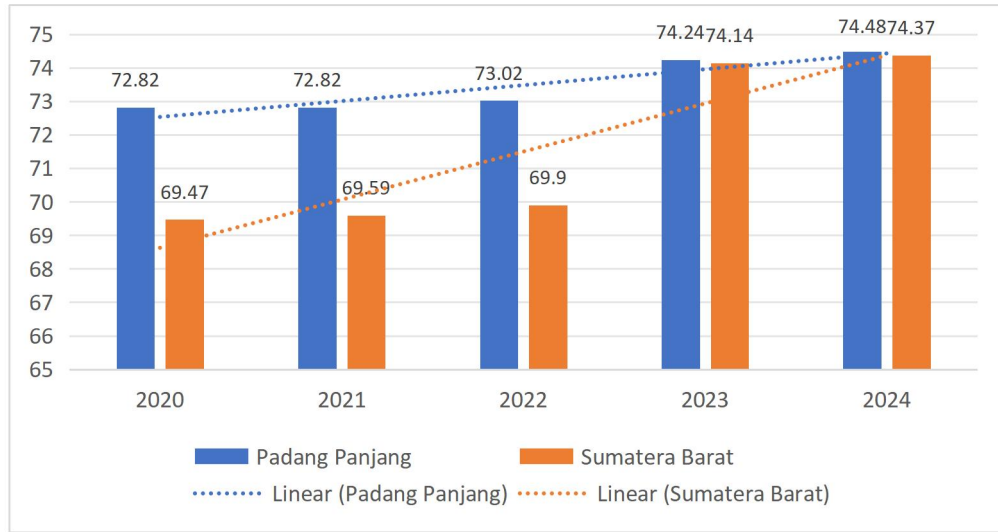
Di samping itu, dalam rangka pencapaian UHH, 4 (empat) faktor tersebut diatas diintegrasikan melalui pendekatan pemahaman terhadap indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan sebagai upaya penurunan angka kematian dan angka kesakitan serta upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Perkembangan UHH di Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.44
Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	72,82	72,82	73,02	73,23	74,48

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Gambar 2.36
Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat,
2020-2024



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, Tahun 2025

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang tidak dapat ditentukan. Menurut WHO Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Padang Panjang jumlah kelahiran hidup jauh dari 100.000 kelahiran hidup, yaitu masih berfluktuatif di bawah dan di atas 1000 kelahiran hidup. Untuk menentukan pencapaian Indikator ini menjadi sulit ditentukan, sehingga untuk menganalisisnya digunakan jumlah kasus kematian Ibu, bayi dan balita. Berikut adalah gambaran jumlah kasus kematian dalam kurun waktu 2020–2024 di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.45 Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Kematian Balita dan Ibu di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kematian Bayi (Kasus)	2	2	2	4	8
Kasus Kematian Balita (Kasus)	2	1	3	0	1
Kasus Kematian Ibu (Kasus)	4	4	1	0	0
Jumlah bayi lahir dalam keadaan hidup (Kasus)	994	1023	750	916	766

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, kasus kematian bayi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, kasus kematian bayi tercatat sebanyak 2 kasus per tahun. Jumlah ini sedikit meningkat menjadi 4 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Peningkatan tajam pada tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap layanan kesehatan bayi baru lahir.

Sementara itu, kasus kematian balita juga menunjukkan variasi dari tahun



ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, turun menjadi 1 kasus pada 2021, kemudian sempat naik menjadi 3 kasus pada 2022, dan menurun kembali menjadi 1 kasus di tahun 2024. Kasus kematian ibu mengalami penurunan signifikan dari 4 kasus di tahun 2020 dan 2021 menjadi 1 kasus pada 2022, lalu 0 kasus pada 2023 dan 2024, yang menunjukkan perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu.

3. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda nawacita, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadikan Puskesmas sebagai pelopor pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan keluarga. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, sasaran, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) juga menekankan esensi fungsi Puskesmas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam upaya promotif dan preventif.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kategori IKS terdiri dari:

- Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$;
- Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500$ $0,800$;
- Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$

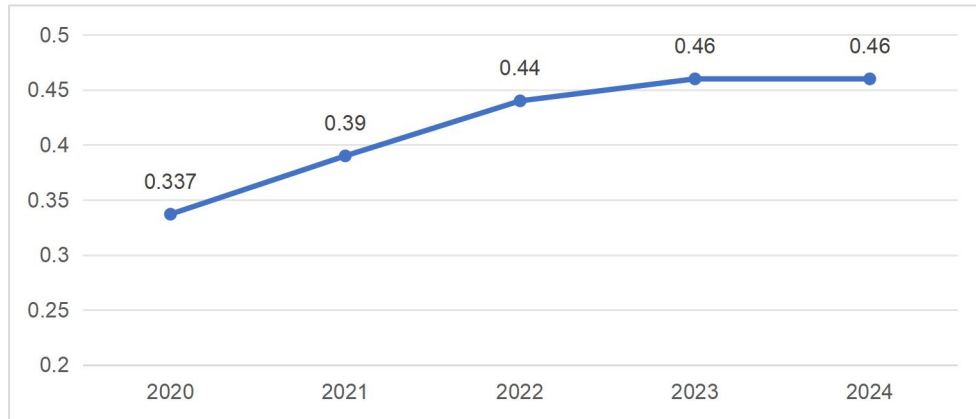
Perkembangan capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 2.46
Capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2020–2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0,337	0,39	0,44	0,46	0,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Gambar 2.37
Perkembangan Capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa IKS Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 0,33 indeks dan pada tahun 2024 yaitu 0,46 indeks, meskipun demikian apabila dilihat dari kategori IKS maka IKS Kota Pada Padang Panjang masih kecil dari 5,00, sehingga secara kategori masih berada pada indeks keluarga tidak sehat. Sehingga masih membutuhkan Upaya intensif dalam peningkatan indeks keluarga sehat.

4. Prevalensi Stunting

Gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang. Kelompok gizi kurang di antaranya adalah stunting. Prevalensi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Di Kota Padang Panjang persentase stunting dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Dimana terjadi penurunan balita stunting sampai tahun 2023 sampai dengan 14,09 persen. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu 19 persen. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.47
Prevalensi Stunting dalam Kurun Waktu 2020–2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020*	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (%)	17,03	20	16,8	14,09	19

Sumber : SSGI, 2025

5. Penyakit Tuberkulosis

CNR (Case Notification Rate) adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru tuberkulosis yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk. Berikut gambaran perkembangan kasus TB di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.48
Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun



	2020	2021	2022	2023	2024
CNR	163,36	275,28	339,13	482	429
Kasus	113	189	205	125	255

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

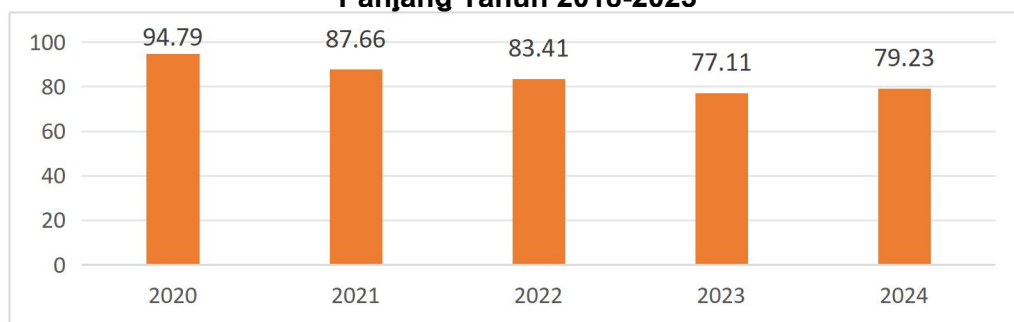
Merujuk pada tabel di atas, pada tahun 2020, CNR Kota Padang Panjang pada angka 163,36. Pada tahun 2021 dengan angka 275,28, tahun 2022 dengan angka 339,13 dan tahun 2023 dengan capaian 482 dan pada tahun 2024 terjadi penurunan yaitu 429. Secara keseluruhan, CNR mengalami tren peningkatan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2023, namun mulai menunjukkan penurunan pada tahun 2024, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pada tahun 2022.

Capaian ini mengindikasikan sudah terjadi peningkatan kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.

6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Capaian pada Tahun 2020 adalah 85,5%, Capaian tahun 2021 (94,79%), pada Tahun 2022 (87,66%) pada Tahun 2023 (83,41%) dan pada Tahun 2024 (79,23%) seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.38
Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Indikator turunan dari angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah lengkap dan sembuh, artinya penanganan tuberkulosis wajib lengkap fase atau tahap berobat dan dinyatakan sembuh. Ada beberapa hal yang menyebabkan turunnya angka capaian ini, diantaranya:

- Lose to Follow-Up



Pada umumnya penurunan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis disebabkan oleh kejadian putus obat (Lose to Follow Up) Lose Follow-up merupakan kejadian dimana pasien telah melakukan proses berobat tetapi tidak tuntas. Kondisi ini terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus, tahun 2022 terdapat 9 kasus, tahun 2023 terdapat 23 kasus dan tahun 2024 meningkat menjadi 41 kasus lose to Follow Up.

Hal ini biasanya terjadi pada bulan kedua dari fase berobat, yang disebabkan adanya gejala yang dirasakan seperti reaksi obat yang membuat pasien tidak datang lagi untuk berobat. Kasus lainnya ketika pasien yang berobat pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tidak lagi datang ke rumah sakit, akan tetapi melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan yang lain dengan pengobatan batuk biasa.

b. Kepatuhan Pasien dalam Berobat

Kendala lainnya adalah gagal dalam pengobatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pasien untuk menyelesaikan tahapan berobat sehingga penyelesaian kasus tuberkulosis menjadi tidak tuntas.

c. Under-Reporting

Under Reporting merupakan kondisi dimana kasus TB yang sudah ternotifikasi melalui pemeriksaan penunjang dan sudah diobati, namun tidak tercatat dan tidak dilaporkan dalam sistem surveillance TB kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil identifikasi kasus Under Reporting terjadi pada fasilitas kesehatan Non Pemerintah yang belum melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus secara optimal melalui sistem pencatatan standar (SITB).

d. Kasus dari daerah lain

Kasus tuberkulosis dari daerah lain atau daerah tetangga yang berobat ke Padang Panjang, akan tetapi tahapan penyembuhan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan di Padang Panjang.

Capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis yang mengalami fluktuasi menggambarkan masih diperlukan konsistensi dalam upaya program tuberkulosis di Kota Padang Panjang.

7. Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam



mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut tergambar dengan cakupan kepesertaan JKN dari Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang panjang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,37	98,69	98,9	101,56	100,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Cakupan Kepesertaan JKN mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN di Kota Padang Panjang sebagai bentuk besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin pembiayaan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan kesinambungan program pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat di kota Padang Panjang (JKMPP) yang sudah berjalan semenjak tahun 2017 sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

Keberadaan program JKMP ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang agar dapat menyelesaikan permasalahan kesehatannya melalui kemudahan pembiayaan dan akses pelayanan guna menjamin kecepatan dan ketepatan mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa memikirkan biaya lagi.

H. Pendidikan Berkualitas yang Merata

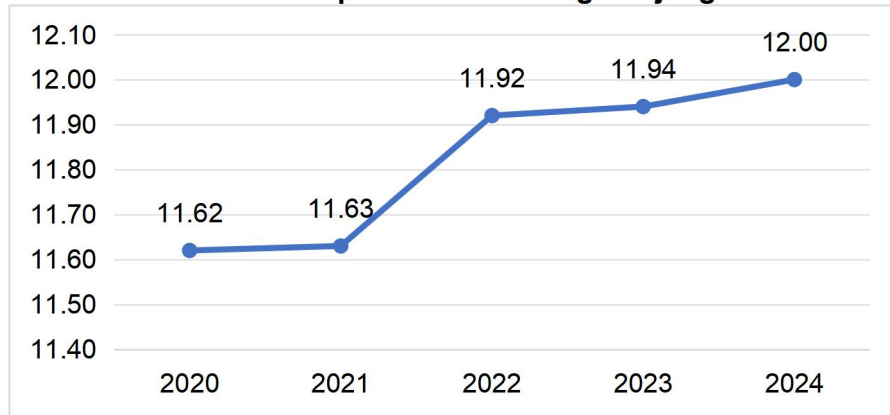
Pendidikan yang merata memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena memberikan akses yang setara kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dengan adanya pemerataan pendidikan, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, menciptakan peluang kerja yang lebih baik, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang merata ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mencerminkan akses pendidikan yang lebih merata. Hal ini berdampak positif pada angka literasi dan numerasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Literasi Digital, yang menunjukkan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan beradaptasi di

era digital. Berikut penjelasan terhadap masing-masing indikator :

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah indikator yang mengukur durasi rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam suatu daerah untuk menempuh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan, yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang ada. Semakin tinggi Rata-Rata Lama Sekolah, semakin banyak individu yang bersekolah lebih lama, yang umumnya terkait dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja yang lebih baik. Perkembangan nilai rata-rata lama sekolah Kota Padang Panjang pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

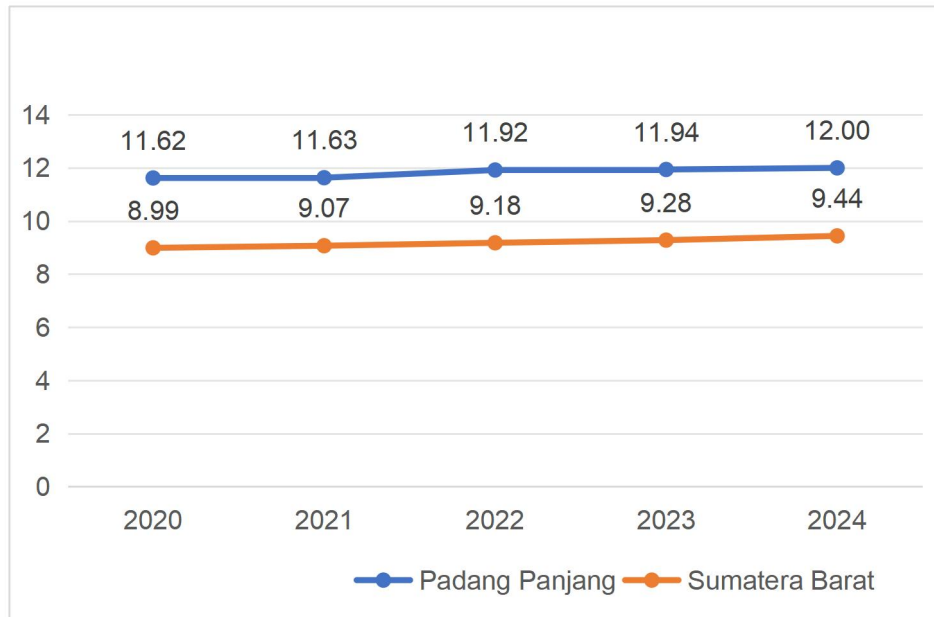
Gambar 2.39
Rata-rata lama sekolah pada Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah tercatat sebesar 11,62 tahun, yang kemudian sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,63 tahun. Pada tahun 2022, RLS mengalami lonjakan signifikan menjadi 11,92 tahun. Peningkatan yang relatif stabil berlanjut hingga tahun 2023 dengan Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 11,94 tahun, dan mencapai angka 12,00 tahun pada tahun 2024.

Gambar 2.40
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024**



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

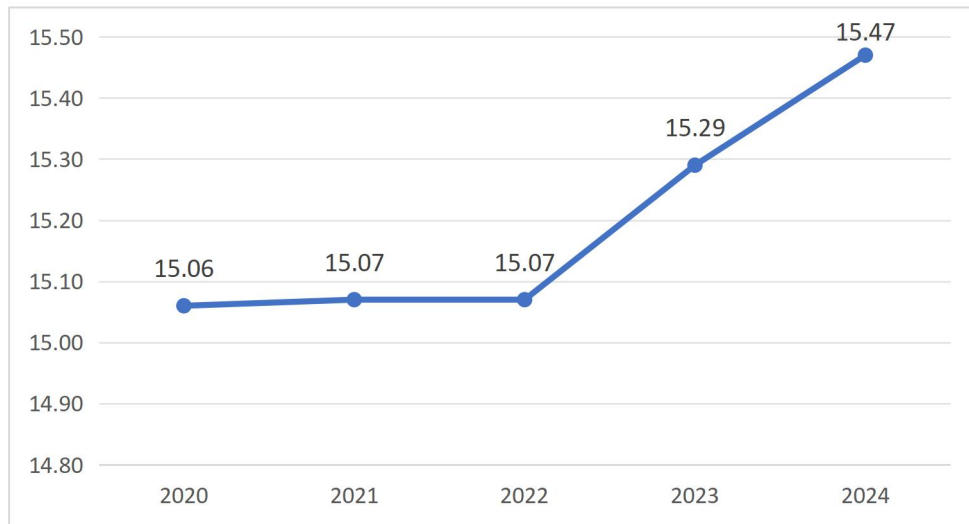
Berdasarkan Gambar di atas yang menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat tahun 2020-2024, Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang tercatat sebesar 11,62 tahun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 12,00 tahun pada tahun 2024, dari data terlihat bahwa Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Padang Panjang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

2. Harapan Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik menyatakan angka harapan lama sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pentingnya angka harapan lama sekolah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas..

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.41
Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Pada tahun 2020, nilai Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 15,06 tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata anak di Kota Padang Panjang diharapkan dapat melanjutkan pendidikan formal mereka sedikit lebih dari 15 tahun. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan yang stabil pada tahun 2021 dan 2022, dengan masing-masing nilai 15,07 tahun, mencerminkan konsistensi dalam sistem pendidikan di Kota Padang Panjang. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan menjadi 15,29 tahun, dan pada tahun 2024, nilai Harapan Lama Sekolah mencapai 15,47 tahun.

3. Angka Literasi/Numerasi

Kualitas hasil belajar digambarkan melalui kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Kemampuan numerasi yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Berikut data kualitas hasil belajar di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.50
Angka Literasi/Numerasi Kota Padang Panjang, Tahun 2023-2024

Indikator	2022		2023		2024	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
Satuan Pendidikan Dasar	89,11	71,56	89,34	71,56	89.34	76.57
Satuan Pendidikan Menengah	79,3	56,78	91,09	86,45	91.09	86.45

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025



Pada Satuan Pendidikan Dasar, perkembangan Indeks Literasi dan Numerasi di Kota Padang Panjang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2022, angka literasi tercatat sebesar 89,11, sedangkan numerasi berada pada angka 71,56, menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan matematika siswa di tingkat dasar sudah cukup baik. Pada tahun 2023, angka literasi sedikit meningkat menjadi 89,34, sementara numerasi tetap pada angka 71,56, yang menunjukkan kestabilan dalam keterampilan membaca dan menulis, namun masih perlu perhatian pada peningkatan kemampuan numerasi. Pada tahun 2024, meskipun literasi tetap stabil di angka 89,34, terjadi peningkatan pada numerasi, yang naik menjadi 76,57. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penguasaan matematika di kalangan siswa pendidikan dasar.

Sementara itu, pada Satuan Pendidikan Menengah, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dalam Indeks Literasi dan Numerasi. Pada tahun 2022, angka literasi tercatat 79,3, dengan numerasi sebesar 56,78, yang mencerminkan kualitas pendidikan yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang luar biasa, dengan literasi naik menjadi 91,09 dan numerasi mencapai 86,45. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di tingkat menengah mengalami perbaikan yang pesat, baik dalam kemampuan membaca dan menulis, maupun dalam keterampilan matematika. Pada tahun 2024, angka literasi dan numerasi di tingkat pendidikan menengah tetap stabil di 91,09 dan 86,45, menunjukkan bahwa perbaikan tersebut terus terjaga. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan peningkatan yang sangat positif dalam kualitas literasi dan numerasi di Kota Padang Panjang, dengan kemajuan yang lebih pesat di tingkat pendidikan menengah.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. IPLM terdiri dari tujuh unsur utama, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan berstandar nasional (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi, dan jumlah anggota perpustakaan. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan serta mendorong peningkatan kualitas hidup melalui literasi. Peningkatan IPLM mencerminkan keberhasilan program literasi yang dapat meningkatkan minat baca, keterampilan, dan daya saing masyarakat di berbagai wilayah.

Perkembangan IPLM Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.51
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Padang Panjang, Tahun 2021-2024

Indikator	Capaian Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	47,2	57,06	88,22	96,78

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Padang Panjang, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IPLM tercatat sebesar 57,06, menjadikan kota ini sebagai yang tertinggi di Sumatera Barat. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai IPLM melonjak menjadi 88,22. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program literasi, seperti pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), peningkatan koleksi perpustakaan, dan kegiatan literasi berbasis komunitas.

Pada tahun 2024, IPLM Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai angka 96,78. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin mendekati visi sebagai kota literasi unggulan. Upaya pemerintah kota melalui inovasi seperti "Lapak Baca," program pendidikan literasi sejak usia dini, pemanfaatan teknologi digital untuk literasi dalam bentuk beberapa inovasi yaitu Publis (perpustakaan berbasis inklusi sosial), Kurenah, ASN Cerdas Peduli, Warung Baca, Gelita Mesra (gerakan literasi kota menuju masyarakat sejahtera), Padang Panjang Abadi (ayo baca digital), Mas Cantik (masyarakat cinta statistik) telah berkontribusi besar terhadap pencapaian ini. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tetapi juga memperkuat budaya literasi di kota tersebut.

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

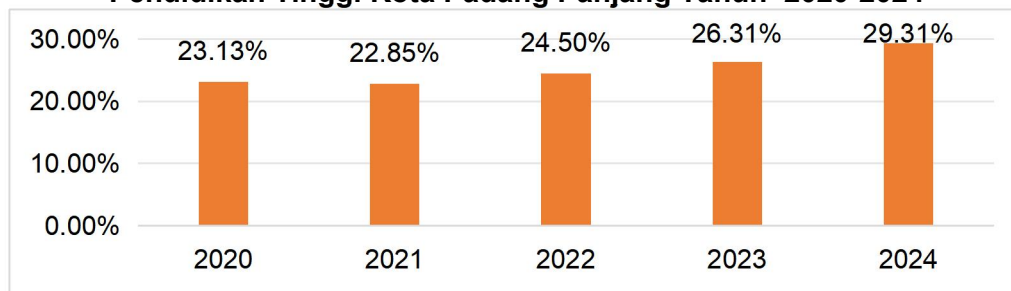
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan meningkatkan produktivitas kerja. Dengan semakin banyaknya penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, maka secara otomatis kualitas SDM akan meningkat, sehingga mampu memenuhi tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif dan dinamis. Hal ini menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional dan global.



Untuk menghitung proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (D3, S1, S2 atau S3) dengan total penduduk berusia 15 tahun ke atas di wilayah tertentu.

Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini. :

Gambar 2.42
Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan data grafik, Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan positif dalam proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan angka 23.13% pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan menjadi 22.85% pada tahun 2021, namun kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 24.50% pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan angka 26.31% dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan proporsi sebesar 29.31%. Dengan Capaian Kualifikasi Pendidikan masyarakat Tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu usaha lebih dalam peningkatan tingkat Pendidikan masyarakat, meskipun tidak seluruh masyarakat usia 15 tahun ke atas dapat menempuh jenjang pendidikan tinggi karena faktor usia dan latar belakang pendidikan awal. Akan tetapi upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga agar tidak terjadi angka putus sekolah bagi masyarakat usia sekolah.

6. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas dan kesesuaian tenaga kerja di suatu daerah. Ketika lulusan pendidikan dapat terserap sesuai dengan bidang keahlian mereka, produktivitas kerja meningkat karena tugas-tugas yang kompleks dapat



diselesaikan secara efisien. Hal ini juga mengurangi kesenjangan keterampilan (skill mismatch), sehingga tenaga kerja yang tersedia benar-benar memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, daerah tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap pakai, yang menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai bidang keahlian menjadi daya tarik bagi investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan menurunkan tingkat pengangguran terdidik. Kondisi ini menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung iklim usaha yang kondusif. Secara keseluruhan, persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi berperan penting dalam memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

I. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif merujuk pada sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, memastikan setiap individu, termasuk kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Beberapa indikator yang menjadi kunci dari perlindungan sosial yang adaptif adalah :

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan hari tua. Dalam konteks adaptif, program ini dapat dimodifikasi untuk menghadapi bencana atau guncangan ekonomi melalui perluasan manfaat dan relaksasi iuran. Hal ini penting untuk memastikan pekerja tetap terlindungi dalam berbagai situasi krisis.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

NO	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk Usia 15-65 Tahun (orang)	37.991	38.506	37.991	39.514	40.010
2	Jumlah Penduduk Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas (orang)	25.625	25.212	24.904	27.035	27.745



NO	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (orang)	6.457	6.592	17.641	15.117	15.386
4	Jumlah Tenaga Kerja sektor informal yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (APBD)(orang)	1.000	8.283	8.283	8.300	6.588
5	Persentase tenaga kerja yang mendapat BPJS ketenagakerjaan (%)	25,20%	26,15%	70,84%	55,92%	55,46%

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Perkembangan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 6.457 orang, dengan persentase cakupan sebesar 25,20%. Angka ini meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 6.592 orang (26,15%). Namun, lonjakan besar terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah peserta mencapai 17.641 orang (70,84%), yang dipengaruhi oleh peningkatan kepesertaan tenaga kerja sektor informal melalui dukungan APBD.

Pada tahun 2023 dan 2024, cakupan kepesertaan mengalami penurunan menjadi masing-masing 55,92% dan 55,46%, meskipun jumlah tenaga kerja yang terdaftar tetap stabil di sekitar angka 15.000-an. Penurunan persentase ini kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja.

2. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang yang ditekuni, hal ini tertuang dalam Kebijakan perlindungan bagi pekerja disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun UU itu masih menggunakan istilah "penyandang cacat", istilah ini tidak lagi digunakan sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas atau *Convention on the Rights People with Disabilities* (CRPD) yang disahkan melalui UU Nomor 19/2011.

Tujuan dari perhitungan persentase disabilitas bekerja di sektor formal adalah untuk mengetahui peran serta dari pemerintah dalam memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, bahwa jumlah disabilitas di Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 307 orang yang terdiri dari 175 orang di Kecamatan Padang Panjang Timur dan 182 di Kecamatan Padang Panjang Barat. Sedangkan pada Awal Tahun 2024 jumlah disabilitas adalah di Kota Padang Panjang adalah 330 orang.

Dilihat dari sektor pekerjaan maka sebaran penyandang disabilitas berdasarkan pekerjaan pada Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 2.53
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Padang Panjang
Tahun 2024

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pelajar / Mahasiswa	93 orang
2.	Belum / Tidak Bekerja	117 orang
3.	Buruh Harian Lepas	25 orang
4.	Perdagangan	10 orang
5.	Petani/Perkebunan	9 orang
6.	Karyawan Swasta	26 orang
7.	IRT	46 orang
8.	Lainnya	4 orang
9.	Jumlah	330 orang
10.	Disabilitas Angkatan Kerja	237 orang
11.	Persentase Disabilitas Bekerja pada Sektor Formal	29,54%

Sumber: Dinas Sosial PPKBPPPA, 2025

Metode perhitungan persentase disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah dengan membandingkan penyandang disabilitas angkatan kerja yang bekerja disektor formal dengan total penyandang disabilitas yang berada pada usia produktif atau angkatan kerja, sehingga penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah 29,54% atau 70 orang dari 237 orang usia kerja. Persentase ini mengindikasikan bahwa perlunya upaya lebih kuat dalam mendorong penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan penghasilan agar terwujud kehidupan yang lebih baik.

J. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beragama maslahat menekankan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral yang mendorong harmoni sosial, toleransi, serta pemberdayaan umat melalui filantropi dan pendidikan berbasis agama. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang mengedepankan moderasi beragama dan kebebasan berkeyakinan sebagai modal dasar membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadaban. Agama juga menjadi sumber inspirasi untuk membentuk karakter masyarakat yang bermartabat dan memperkuat solidaritas sosial, sehingga mampu menghadapi tantangan global dengan nilai-nilai luhur. Berikut beberapa faktor yang terkait dengan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Objek Pemajuan Kebudayaan



Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, terdapat sepuluh objek pemajuan kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kesepuluh objek tersebut adalah:

1. Tradisi Lisan: Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
2. Manuskrip: Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.
3. Adat Istiadat: Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
4. Permainan Rakyat: Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
5. Olahraga Tradisional: Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.
6. Pengetahuan Tradisional: Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.
7. Teknologi Tradisional: Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.
8. Seni: Karya atau hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai estetika, seperti seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, dan seni pertunjukan lainnya.
9. Bahasa: Sistem komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi.



10. Ritus: Upacara atau tata cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual atau sosial.
11. Cagar Budaya: Cagar Budaya dapat berupa Benda Cagar Budaya (BCB), Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terletak di darat maupun di air.

Perkembangan objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.54
Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Manuskrip	30%	30%	30%	40%	55%
2	Tradisi Lisan	30%	70%	70%	70%	70%
3	Adat Istiadat	45%	70%	70%	70%	51,67%
4	Ritus	45%	45%	45%	55%	57,22%
5	Pengetahuan Tradisional	30%	45%	100%	100%	67,27%
6	Teknologi Tradisional	30%	30%	40%	55%	53%
7	Seni	30%	70%	100%	100%	80%
8	Bahasa	30%	30%	55%	70%	72,50%
9	Permainan Rakyat	30%	55%	55%	70%	55%
10	Olahraga Tradisional	30%	30%	55%	70%	100%
11	Cagar Budaya	40%	40%	100%	100%	66,14%
	Total	34%	47%	65,45%	74,09%	66,16%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2025

Penghitungan indikator objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang baru dimulai pada Tahun 2019 dengan pencapaian baru 33%, kemudian naik menjadi 34% pada Tahun 2020, 47% di tahun 2021, 65,45% pada Tahun 2022 dan menjadi 74,09% di tahun 2023.

Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,81% dari capaian tahun 2023 menjadi 66,16%. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan mengalami fluktuasi. Setelah mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, pada Tahun 2024 realisasi pemajuan kebudayaan mengalami penurunan.

Penurunan capaian kinerja pemajuan kebudayaan disebabkan karena dari 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilakukan, masih terdapat 3 langkah pengelolaan yang belum optimal pelaksanaannya, yakni langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi. Pada langkah internalisasi yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara



menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang. Selain itu, belum dimilikinya tim ahli untuk pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang, menyebabkan tahapan mulai dari langkah identifikasi sampai langkah literasi belum optimal dilakukan.

K. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan aspek kesejahteraan masyarakat yang penting dalam meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis, yang menjadi fondasi bagi pembentukan sumber daya manusia berkualitas. Kesetaraan gender memastikan kemitraan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Masyarakat inklusif mempromosikan keragaman dan kesempatan yang sama bagi semua, sehingga memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Dengan memastikan kondisi ini, diharapkan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas yang menjadi motor penggerak pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), dan indeks lainnya berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. IPA membantu mengukur capaian pembangunan perlindungan anak, sementara IPKK bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas dengan memantau pemenuhan hak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kesetaraan gender didukung oleh indeks-indeks yang memantau ketimpangan gender, memastikan kemitraan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Pemuda juga berperan penting dalam memastikan bahwa keluarga berkualitas memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menjadi motor penggerak pembangunan. Dengan demikian, semua indeks ini saling terkait untuk menciptakan masyarakat inklusif yang mendukung terbentuknya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.

1. Indeks Perlindungan Anak

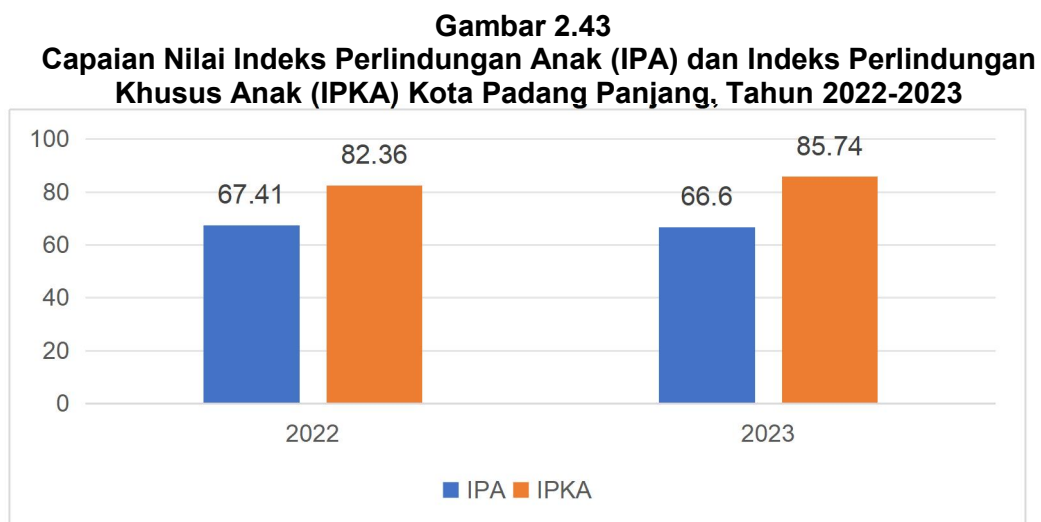
Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta penelantaran. Indeks ini disusun berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), mencakup aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan anak. IPA berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan

perlindungan anak yang menyeluruh di tingkat pusat maupun daerah.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah bagian dari IPA yang secara khusus menyoroti kondisi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak pekerja, anak terlantar, dan kelompok lainnya yang memerlukan perlindungan khusus. IPKA membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kelompok anak tersebut serta mendorong penyusunan program perlindungan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, IPA dan IPKA merupakan alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan suatu wilayah dalam menjamin hak dan perlindungan anak, sekaligus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capaian indikator IPA dan IPKA Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



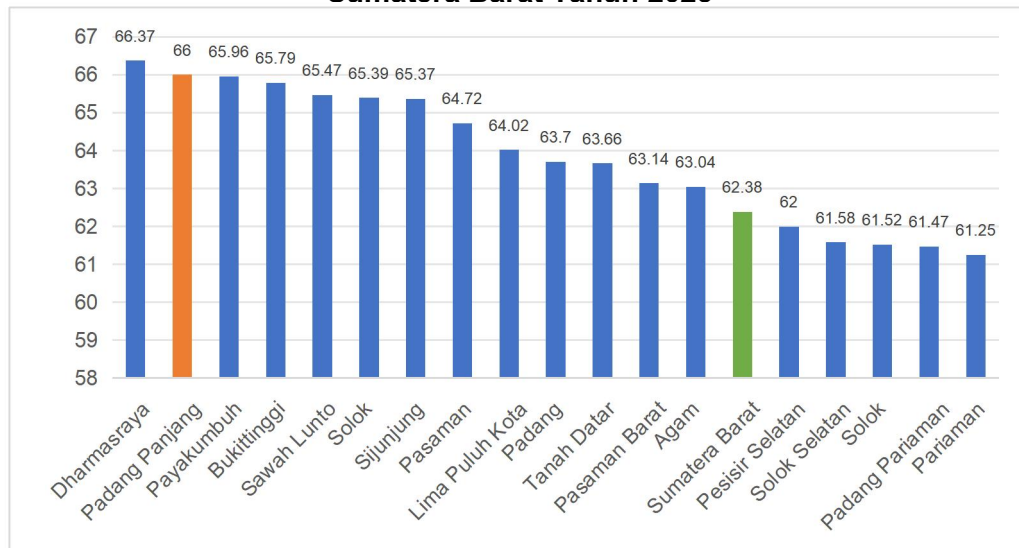
Sumber : <https://www.kemenpppa.go.id/>, 2025

Berdasarkan Gambar 2.48, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami sedikit penurunan dari 67,41 pada tahun 2022 menjadi 66,6 pada 2023. Sebaliknya, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) justru meningkat

dari 81,96 menjadi 84,22.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak dalam kondisi khusus mengalami kemajuan, sementara perlindungan anak secara umum masih perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal..

Gambar 2.44
Capaian Indeks Perlindungan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : <https://www.kemenpppa.go.id/>, 2025

Secara umum, terlihat bahwa Padang Panjang menempati posisi kedua tertinggi dengan IPA sebesar 66,00, hanya terpaut sedikit dari Dharmasraya yang mencatatkan IPA sebesar 66,37. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang memiliki IPA sebesar 62,38, Kota Padang Panjang menunjukkan hasil yang lebih baik dan berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yaitu suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Hasil dari Indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori tangguh, berkembang, atau rentan.

Pengukuran iBangga meliputi dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator ; a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; dan d. keharmonisan Keluarga. Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : a. pemenuhan kebutuhan dasar; b.



jaminan keuangan; c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; dan e. akses media online/daring. Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator: a. interaksi Keluarga; dan b. interaksi sosial.

Setelah dilakukan penghitungan atau pengukuran iBangga, maka akan dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut : iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Perkembangan nilai Ibangga Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.55.
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kota Padang Panjang
Tahun 2022-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	NA	NA	56,12	60,99	66,46

Sumber : <https://siperindu.online>, 2025

Nilai (Ibangga) Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Ibangga tercatat sebesar 56,12, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 60,99 pada tahun 2023. Puncaknya tercatat pada tahun 2024 dengan nilai 66,46, yang mencerminkan kemajuan pesat dalam pembangunan kualitas keluarga di Kota Padang Panjang.

3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada Tahun 2010. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. IPG mengukur kesetaraan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dalam mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan



oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (indeks)	97,7	97,78	98,24	98,19	98,23

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 97,7 dan mengalami kenaikan menjadi 97,78 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022 dengan capaian IPG sebesar 98,24, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut.

Namun, pada tahun 2023, IPG sedikit menurun menjadi 98,19, meskipun penurunannya sangat tipis dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2024 kembali naik menjadi 98,23. Secara keseluruhan, capaian IPG selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan gender, dengan nilai indeks yang terus mendekati angka sempurna, menandakan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

4. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu wilayah. IDG merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga komponen utama: (1) Keterlibatan perempuan di parlemen (politik), (2) Perempuan sebagai tenaga profesional (pengambilan keputusan), (3) Sumbangan pendapatan perempuan (ekonomi). Indeks ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari ketiga komponen tersebut. Semakin tinggi nilai IDG (mendekati 100), semakin baik tingkat pemberdayaan gender di wilayah tersebut, yang berarti perempuan memiliki kesempatan dan peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.57
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024



Indeks Pemberdayaan Gender (indeks)	65,24	66,62	67,82	67,58	75,62

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang positif meskipun tidak sepenuhnya linear. Pada tahun 2020, IDG tercatat sebesar 65,24, kemudian meningkat menjadi 66,62 pada tahun 2021 dan mencapai angka tertinggi pada periode ini, yaitu 67,82 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 67,58. Namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 75,62. Capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum pemberdayaan gender mengalami kemajuan, masih ada tantangan dan fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

Salah satu indikator pendukung IDG adalah proporsi keterwakilan perempuan di kursi DPRD, berikut adalah data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang.

Tabel 2.58
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	10	10	10	10	20

Sumber: Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang, 2025

5. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek pembangunan, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hasil pembangunan. Nilai IKG berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan



SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Padang Panjang dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Tahun 2021-2024

No	Kabupaten/Kota	Capaian Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Kab. Kepulauan Mentawai	0,851	0,85	0,851	0,849
2	Kab. Pesisir Selatan	0,505	0,517	0,482	0,468
3	Kab. Solok	0,48	0,403	0,423	0,377
4	Kab. Sijunjung	0,527	0,501	0,465	0,491
5	Kab. Tanah Datar	0,312	0,305	0,336	0,344
6	Kab. Padang Pariaman	0,75	0,763	0,751	0,722
7	Kab. Agam	0,359	0,239	0,162	0,355
8	Kab. Limapuluh Kota	0,549	0,496	0,492	0,453
9	Kab. Pasaman	0,535	0,522	0,527	0,464
10	Kab. Solok Selatan	0,804	0,787	0,811	0,805
11	Kab. Dharmas Raya	0,553	0,528	0,539	0,457
12	Kab. Pasaman Barat	0,532	0,519	0,494	0,419
13	Kota Padang	0,32	0,171	0,198	0,172
14	Kota Solok	0,19	0,18	0,182	0,147
15	Kota Sawah Lunto	0,184	0,223	0,199	0,270
16	Kota Padang Panjang	0,192	0,153	0,135	0,081
17	Kota Bukittinggi	0,236	0,156	0,159	0,080
18	Kota Payakumbuh	0,325	0,295	0,153	0,175
19	Kota Pariaman	0,331	0,286	0,374	0,120
	Sumatera Barat	0,455	0,43	0,425	0,381

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Padang Panjang menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan dalam periode tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IKG Padang Panjang berada di angka 0,192, lalu turun menjadi 0,153 di tahun 2022, 0,135 di tahun 2023, dan mencapai angka terendah yaitu 0,081 pada tahun 2024.

Penurunan nilai IKG ini mengindikasikan penyempitan kesenjangan gender, yang berarti semakin kecil ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi dan akses terhadap sumber daya pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Jika dibandingkan dengan rata-rata IKG Provinsi Sumatera Barat, yang capaian Kota Padang Panjang jauh lebih baik. Pada tahun 2024, IKG Kota Padang Panjang (0,081) merupakan salah satu yang terendah di Sumatera Barat, mencerminkan kemajuan signifikan daerah ini dalam mengurangi ketimpangan gender secara berkelanjutan.

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda Kota Padang Panjang merupakan generasi penerus dan potensi



strategis pembangunan yang memegang kunci dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Tingkat pendidikan, pemahaman kesehatan reproduksi, serta kesiapan membentuk keluarga (tercermin dari usia perkawinan pertama) menjadi indikator penting kualitas pemuda. Partisipasi aktif pemuda, khususnya laki-laki, dalam pengasuhan anak dan tugas domestik juga menandai kesetaraan peran dalam keluarga. Sebagai kota pendidikan, Padang Panjang berkomitmen mendorong pemuda meraih pendidikan optimal dan memiliki pemahaman holistik sebagai landasan membangun keluarga tangguh dan harmonis di masa depan.

Dalam membangun kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, peran pemuda sangat sentral. Keterwakilan perempuan muda dalam kepemimpinan (organisasi pemuda, karang taruna), kesetaraan akses ke lapangan kerja, serta perubahan sikap terhadap peran gender menjadi ukuran kemajuan. Kota ini juga berupaya memastikan semua pemuda, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal, terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan mengakses layanan dasar secara setara. Semangat toleransi, penghargaan terhadap keragaman, dan partisipasi lintas kelompok di kalangan pemuda menjadi pondasi kokoh bagi terwujudnya masyarakat Padang Panjang yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*".

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah merupakan komponen-komponen yang membentuk kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing baik di tingkat domestik maupun internasional. Berdasarkan berbagai model pengukuran, aspek daya saing daerah terdiri dari beberapa komponen utama.

A. Pengeluaran rata-rata per kapita per tahun

Berdasarkan data pengeluaran rata-rata per kapita Kota Padang Panjang tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran rata-rata per kapita tercatat sebesar Rp10.730. Angka ini mengalami kenaikan tipis pada tahun 2021 menjadi Rp10.754. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hal ini menunjukkan stabilitas daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi.

Kenaikan lebih signifikan mulai terlihat pada tahun 2022, di mana pengeluaran per kapita mencapai Rp11.153 atau meningkat sekitar 3,7% dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan angka sebesar Rp11.310 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp11.840. Secara keseluruhan, dalam periode lima tahun, terjadi kenaikan sebesar Rp1.110 atau sekitar 10,3%. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.45 Pengeluaran rata-rata per kapita per tahun Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

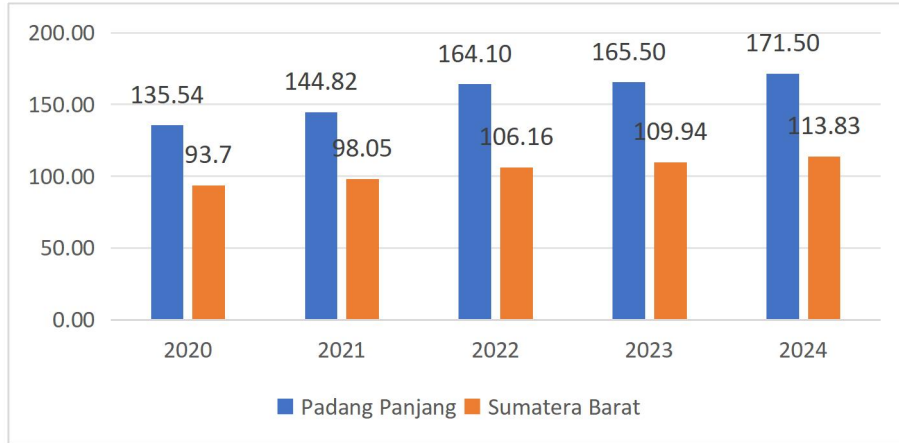
B. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah adalah rasio antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah total tenaga kerja yang bekerja di suatu daerah. DRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu, sedangkan jumlah tenaga kerja adalah banyaknya penduduk yang aktif bekerja dan berkontribusi dalam proses produksi. Dengan demikian, tingkat produktivitas tenaga kerja menggambarkan rata-rata kontribusi setiap tenaga kerja terhadap nilai produksi daerah. Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja, semakin besar pula output yang dihasilkan per pekerja

Capaian produktivitas total daerah Kota Padang Panjang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang sangat positif dan konsisten meningkat. Pada tahun 2020, nilai produktivitas berada di angka 135,54, kemudian terus naik setiap tahunnya menjadi 144,82 (2021), 164,10 (2022), 165,50 (2023), hingga mencapai 171,50 pada tahun 2024. Semakin tinggi angka produktivitas, berarti semakin efisien tenaga kerja dalam menghasilkan output.

Capaian ini selalu berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yang dalam periode yang sama hanya meningkat dari 93,70 menjadi 113,83.

Gambar 2.46 Produktivitas Total Daerah Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

C. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

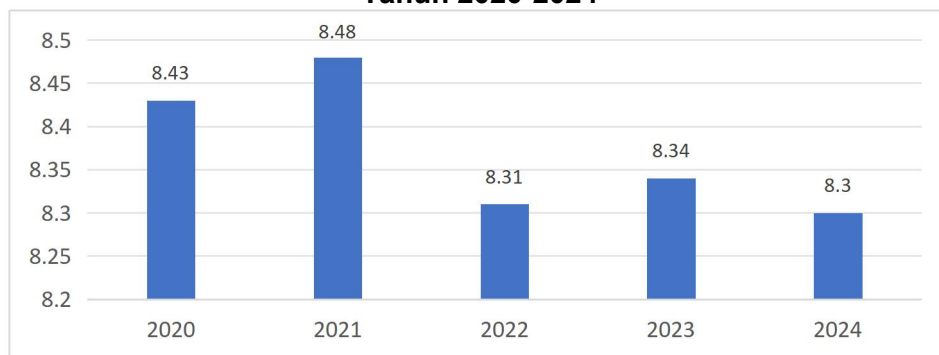
Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi daya saing daerah dan berperan penting dalam mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan dari Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi dapat dilihat pada beberapa faktor berikut ini:

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Peningkatan rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Iptek dan inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pengolahan, sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Panjang berfluktuatif dan cenderung turun pada kisaran 8% sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.47
Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat

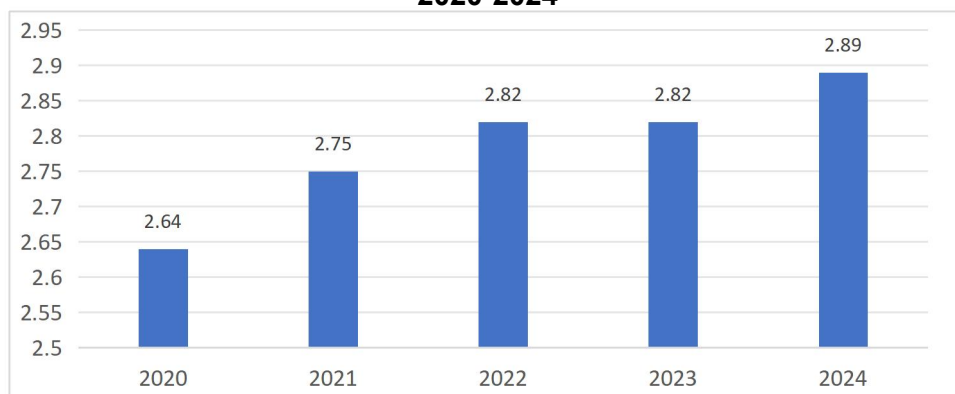
adanya perubahan yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, kontribusi PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 8,43, yang sedikit meningkat menjadi 8,48 pada tahun 2021. Namun, setelah itu kontribusi mengalami penurunan yang signifikan, dengan nilai 8,31 pada tahun 2022 dan 8,34 pada tahun 2023. Di tahun 2024, kontribusi PDRB kembali turun menjadi 8,3. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2021, tren umum menunjukkan penurunan kontribusi dari tahun 2020 hingga 2024.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor akomodasi dan makan minum berperan penting dalam industri pariwisata, yang juga dipengaruhi oleh iptek dan inovasi. Meskipun secara parsial pengaruhnya tidak signifikan terhadap PDRB, secara simultan dengan sektor lain, sektor ini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.48
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

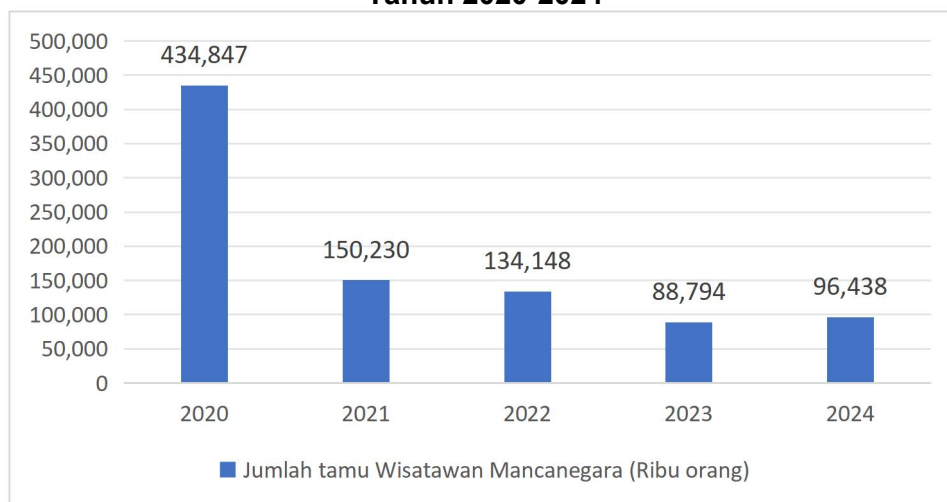
Berdasarkan grafik yang menggambarkan Rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, sektor ini mencatatkan PDRB sebesar 2,64. Angka tersebut mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya, dengan kontribusi PDRB sebesar 2,75 pada tahun 2021. Peningkatan berlanjut di tahun 2022 dengan nilai 2,82, yang tetap dipertahankan pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024, kontribusi sektor ini tercatat mencapai 2,89. Secara keseluruhan, sektor Akomodasi, Makan, dan Minum menunjukkan kinerja yang stabil dan positif, dengan kontribusi PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya penguatan sektor ini sebagai pilar penting dalam perekonomian Kota Padang Panjang.

3. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)



Jumlah tamu wisatawan mancanegara memiliki peran penting dalam menggambarkan kontribusi sektor pariwisata terhadap produktivitas ekonomi daerah. Tingginya kunjungan wisatawan asing mencerminkan daya tarik dan daya saing suatu daerah sebagai destinasi wisata internasional. Kehadiran wisatawan mancanegara turut mendorong pertumbuhan sektor jasa, termasuk perhotelan, restoran, transportasi, hingga industri kreatif dan ekonomi lokal seperti kerajinan tangan dan kuliner tradisional. Belanja yang dilakukan oleh wisatawan asing menjadi sumber pemasukan yang signifikan bagi pelaku usaha lokal dan turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi sektor pariwisata. Selain itu, indikator ini juga menjadi sinyal bagi investor untuk melihat potensi pengembangan kawasan wisata dan infrastruktur penunjangnya. Dengan demikian, peningkatan jumlah tamu wisatawan mancanegara tidak hanya berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi penanda penting dalam upaya diversifikasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Gambar 2.49 Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2025

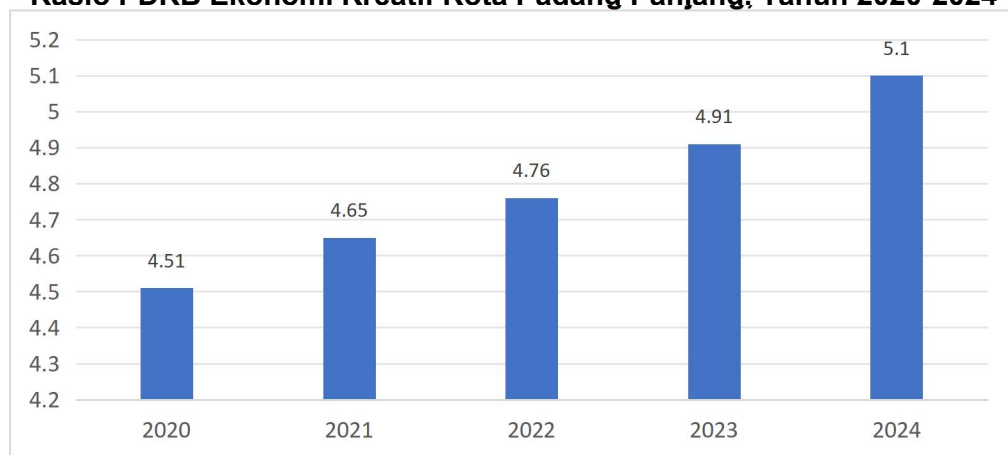
Perkembangan jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang menurun secara signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 434.847 orang wisatawan asing berkunjung, namun jumlah ini menurun tajam pada tahun 2021 menjadi hanya 150.230 orang, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembatasan perjalanan global akibat pandemi COVID-19. Penurunan masih berlanjut di tahun 2022, dengan jumlah wisatawan tercatat sebanyak 134.148 orang, dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 88.794 orang. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terlihat sedikit peningkatan dengan jumlah kunjungan mencapai 96.438 orang, mengindikasikan adanya pemulihan meski masih jauh dari angka sebelum pandemi.

4. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aspek daya saing daerah. Ekonomi kreatif, yang mencakup aspek seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan, menawarkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan peningkatan ekspor produk-produk bernilai tambah. Peningkatan proporsi PDRB Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan produk dan jasa unik yang kompetitif di pasar global, serta memperkuat struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan yang kondusif, akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan ekonomi kreatif dalam jangka panjang.

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.50
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

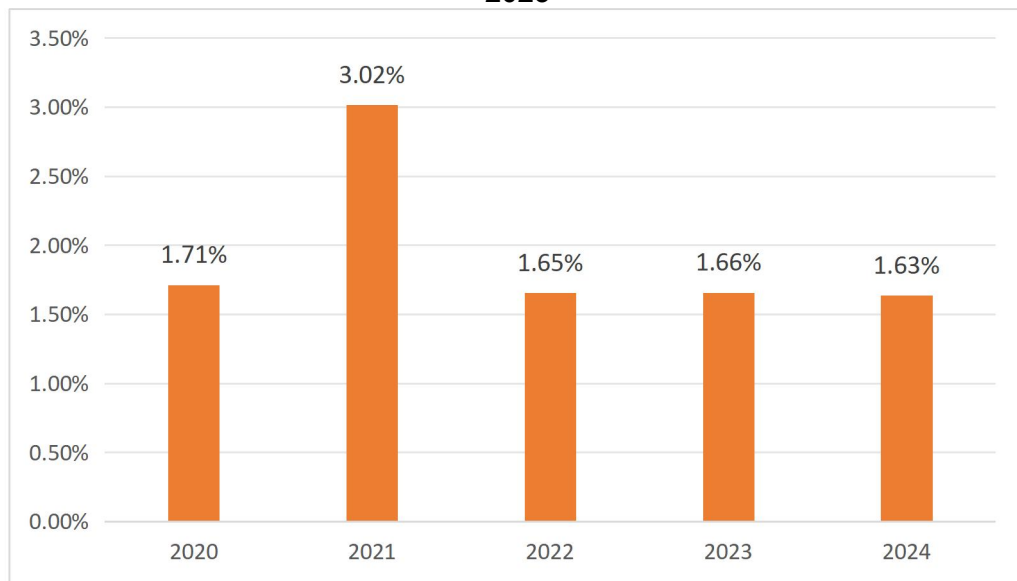
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang menunjukkan tren positif selama periode 2020-2024, sebagaimana terlihat pada grafik. Pada tahun 2020, PDRB Ekonomi Kreatif tercatat sebesar 4.51, kemudian mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya, yaitu menjadi 4.65 pada tahun 2021, 4.76 pada tahun 2022, dan 4.91 pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan nilai mencapai 5.1. Tren pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang.

5. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Indikator Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB adalah ukuran yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu daerah dengan

membandingkan volume usaha koperasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Indikator ini penting untuk menilai kontribusi koperasi dalam perekonomian daerah. Rasio ini menghubungkan aktivitas ekonomi koperasi dengan output ekonomi wilayah yang diukur melalui PDRB, sehingga dapat digunakan untuk memantau perkembangan koperasi dan perannya dalam pembangunan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat. Gambaran Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.51
Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023



Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Rasio volume koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 1,71%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 3,02% pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan tajam menjadi 1,65%, dan angka tersebut relatif stagnan pada tahun 2023 dengan sedikit kenaikan menjadi 1,66%.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi sempat memberikan kontribusi besar terhadap PDRB pada 2021, namun kontribusi tersebut belum stabil dan cenderung kembali ke tingkat sebelum lonjakan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan peran koperasi secara berkelanjutan, baik dari segi manajemen, kapasitas usaha, maupun akses ke pasar dan pembiayaan, agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah tetap signifikan dan meningkat secara konsisten.

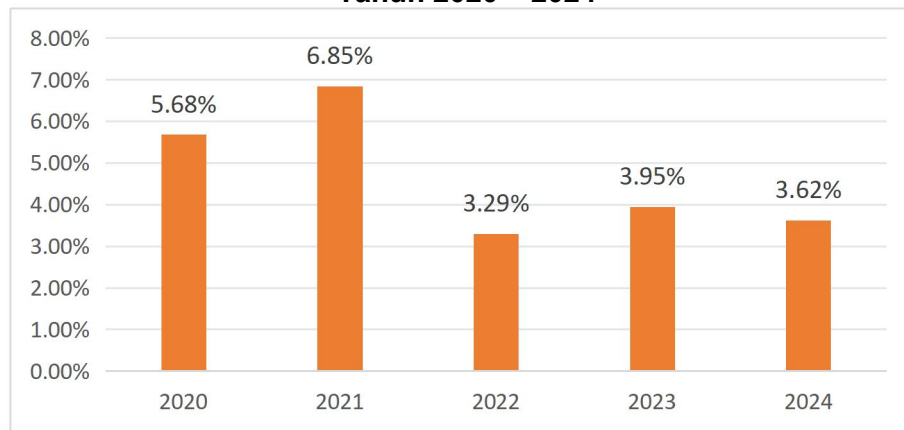
6. Rasio Kewirausahaan



Rasio kewirausahaan daerah adalah ukuran yang membandingkan jumlah orang yang menjalankan usaha dengan mempekerjakan buruh tetap terhadap total angkatan kerja di suatu daerah pada tahun yang sama. Orang yang termasuk dalam kategori ini adalah pengusaha yang menjalankan usahanya atas risiko sendiri dan mempekerjakan minimal satu pekerja tetap yang dibayar. Rasio ini penting karena menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan yang produktif.

Perkembangan rasio kewirausahaan Kota Padang Panjang dapat dilihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.52
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kota Padang Panjang
Tahun 2020 – 2024



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan grafik di atas, rasio kewirausahaan di Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 5.68%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 6.85% pada tahun 2021. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah wirausaha yang mempekerjakan tenaga kerja di Kota Padang Panjang.

Namun, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021, rasio kewirausahaan Padang Panjang mengalami penurunan drastis menjadi 3.29% pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit kenaikan menjadi 3.95% pada tahun 2023, rasio ini kembali menurun menjadi 3.62% pada tahun 2024.

7. Return Of Aset BUMD (ROA BUMD)

Secara umum, ROA BUMD Kota Padang Panjang menunjukkan adanya tren perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dan efisiensi operasional PDAM Kota Padang Panjang pada tahun 2013, 2018, 2023, 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.60
Return Of Aset BUMD Kota Padang Panjang Tahun 2013, 2018, 2023, 2024

No	Indikator	CAPAIAN			
		2013	2018	2023	2024
1	ROA BUMD	-4,11%	-2,57%	0,92%	(belum rilis)

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, 2025

Data Return on Assets (ROA) PDAM Kota Padang Panjang dari Tahun 2013, 2018 dan 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pada 2013, ROA PDAM berada pada angka negatif yang cukup besar, yaitu -4,11%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dari sisi asetnya. Dalam konteks PDAM, kondisi ini bisa mengindikasikan adanya inefisiensi pengelolaan aset atau beban operasional yang tinggi sehingga hasil akhirnya merugi. Di Tahun 2018, ROA PDAM membaik walaupun masih berada di level negatif sebesar -2,57%. Meski demikian, perbaikan dari -4,11% ke -2,57% menunjukkan ada peningkatan efisiensi atau pengurangan kerugian. Ini bisa menandakan bahwa PDAM telah melakukan beberapa perbaikan atau penyesuaian dalam operasional yang mengarah pada pengelolaan aset yang lebih efektif. Tahun 2023, ROA akhirnya positif di angka 0,92%, menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Ini adalah perkembangan yang baik, mengindikasikan bahwa PDAM Kota Padang Panjang berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan aset, sehingga mampu menghasilkan keuntungan.

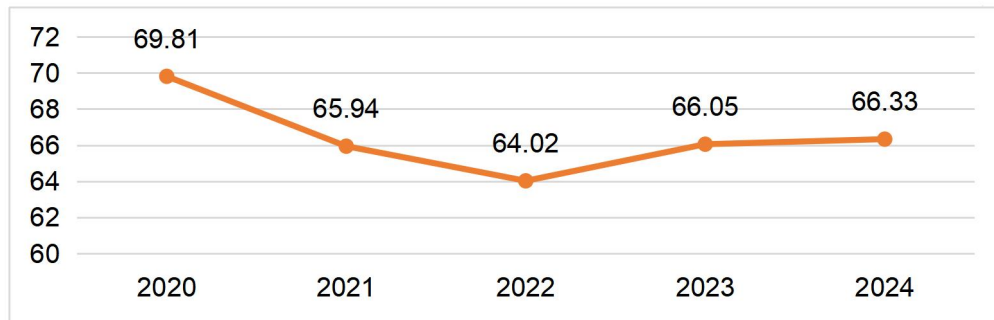
8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam dunia kerja, yang bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing suatu daerah, terutama terkait dengan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, serta produktivitas ekonomi. Ketika TPAK tinggi, artinya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga besar, sehingga potensi sumber daya manusia yang mampu mengadopsi dan mengembangkan Iptek serta inovasi menjadi lebih besar.

Perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang, 2020-2024



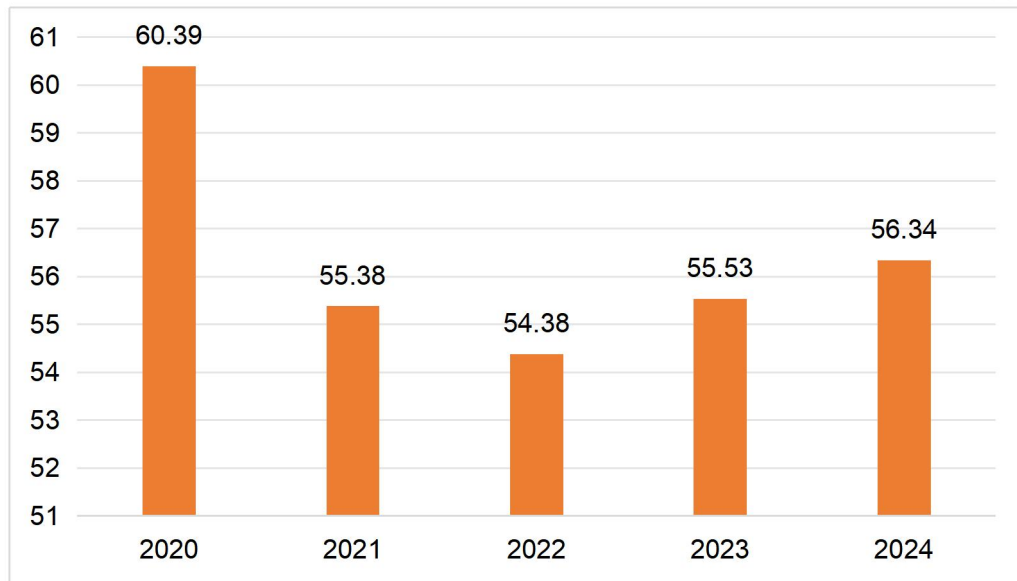
Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

Pada tahun 2020, TPAK berada pada titik tertinggi, yaitu 69,81%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 65,94%. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana TPAK mencapai titik terendah dalam periode tersebut, yaitu 64,02%. Setelah mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, TPAK mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2023, meningkat menjadi 66,05%. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan TPAK mencapai 66,33%, meskipun belum mampu kembali ke level tertinggi pada tahun 2020. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa TPAK mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan penurunan awal diikuti oleh pemulihan bertahap.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah ukuran proporsi perempuan usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Secara matematis, TPAK perempuan dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. TPAK perempuan mencerminkan besarnya pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka ini menjadi indikator penting untuk menilai peran dan keaktifan perempuan dalam kegiatan ekonomi serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Gambar 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Padan Panjang
Tahun 2020-2024



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kota Padang Panjang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan berada di angka 60,39%, menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pasar kerja yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan, masing-masing menjadi 55,38% dan 54,38%, memasuki tahun 2023 dan 2024, TPAK perempuan mengalami tren positif dengan kenaikan berturut-turut menjadi 55,53% dan 56,34%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan peran perempuan dalam dunia kerja, meskipun belum kembali ke tingkat partisipasi tertinggi pada 2020, tren ini mengindikasikan prospek yang baik bagi peningkatan keterlibatan perempuan di sektor ketenagakerjaan.

10. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

Upaya dan hasil kinerja pengembangan inovasi daerah diukur oleh Kementerian dalam Negeri melalui Penilaian Indeks Inovasi Daerah atau juga dikenal dengan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian indeks inovasi daerah terdiri atas bermacam variabel dengan melibatkan tim penilai dari berbagai unsur (pemerintah, akademisi, profesional, dan lain). Berdasarkan hasil



penilaian Kementerian Dalam Negeri atas inovasi daerah yang dilaporkan maka capaian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Tahun	Nomor Surat Keputusan	Jumlah Inovasi Daerah	Nilai Indeks	Peringkat dan Predikat	Keterangan
2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020	55	1.964	20 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot. Skor bobot masing-masing indikator inovasi diperkecil.
2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.5-5848 Tahun 2021, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021	89	64,08	3 (sangat inovatif)	Penghitungan nilai inovasi berubah dari bobot ke indeks.
2022	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6301 Tahun 2022, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022	117	62,04	Sangat inovatif	Penghitungan indeks berubah dengan memberikan porsi signifikan terhadap kuantitas inovasi
2023	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023	55	63,28	Sangat inovatif	-
2024	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024	154	81,35	Sangat inovatif	-

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Kota Padang Panjang telah meraih penghargaan *Innovative Government*

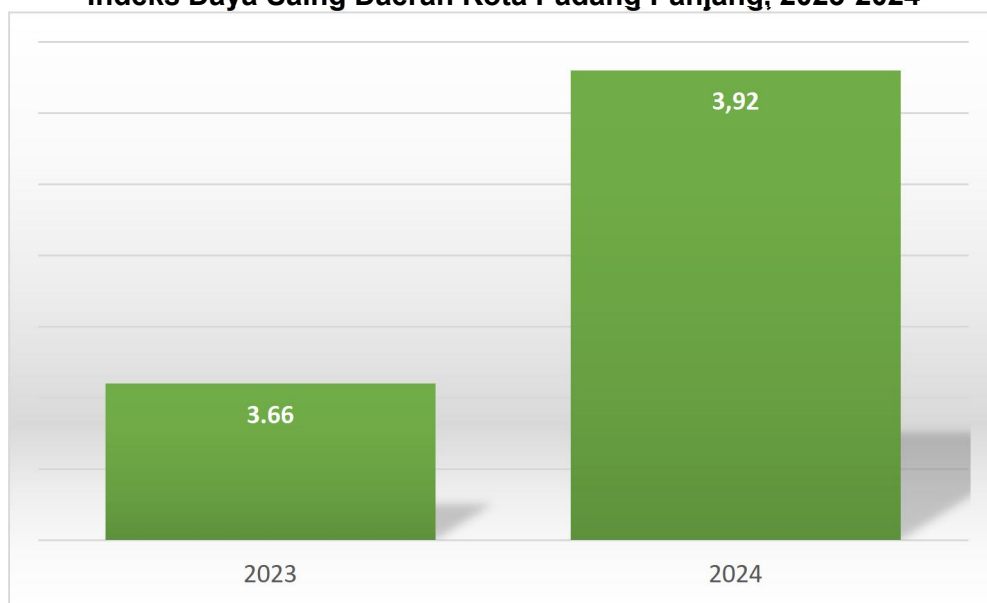


Award (IGA) kategori “Kota Sangat Inovatif” sebanyak tiga kali berturut-turut. Pada IGA 2024, Kota Padang Panjang melaporkan 154 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri yang berasal dari 23 OPD. Beberapa inovasi unggulan yang dilaporkan pada IGA tahun ini antara lain Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko), Setelah melangsungkan akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa (Selalu Samawa) dari Dinas Dukcapil. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (ASIG PBB) oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, dan *Library Edukasi Entertainment* (Libdutainment) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

11. Indeks Daya Saing Daerah

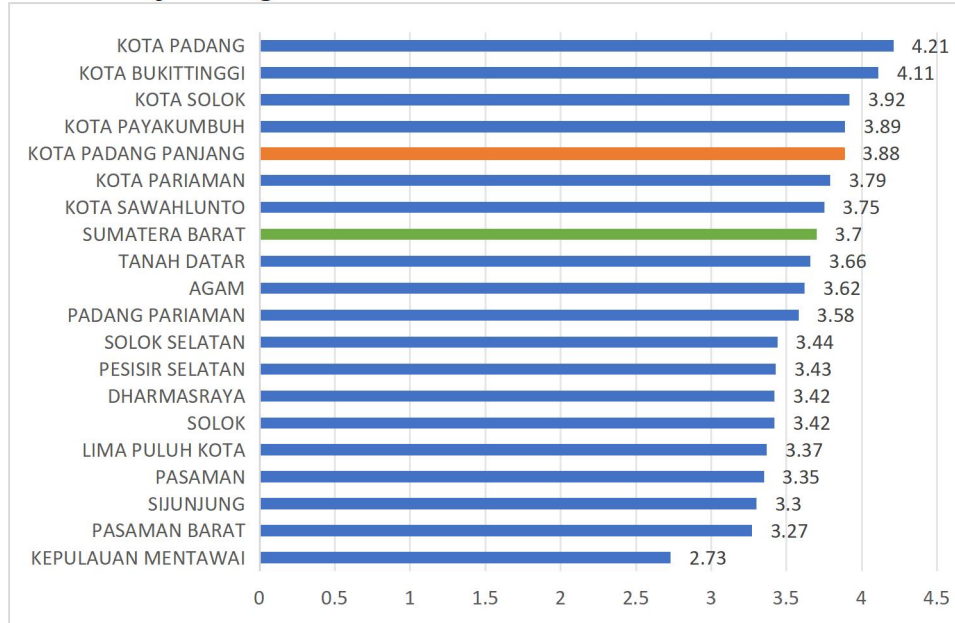
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat yang digunakan untuk memetakan keunggulan dan tantangan yang dimiliki oleh setiap daerah. IDSD mengukur daya saing daerah berdasarkan empat komponen utama, yakni lingkungan penguat, sumber daya manusia (SDM), pasar, dan ekosistem inovasi, yang semuanya sangat relevan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial suatu daerah. Berdasarkan data IDSD Kota Padang Panjang, pada tahun 2023, Kota Padang Panjang memperoleh nilai 3,66, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai 3,88. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin mampu meningkatkan daya saingnya melalui penguatan sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, tenaga kerja terampil, serta sistem keuangan dan inovasi. Melalui pemanfaatan data IDSD ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berfokus pada potensi unggulan, dan memastikan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.55
Indeks Daya Saing Daerah Kota Padang Panjang, 2023-2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Gambar 2.56
Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 Kab/Kota Se-Sumatera Barat



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan Gambar di atas Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 Kota Padang Panjang mencatatkan nilai 3,88, yang menempatkannya di posisi ke-5 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Nilai ini berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat yang sebesar 3,70, menunjukkan bahwa Padang Panjang memiliki daya saing yang relatif baik dibandingkan mayoritas daerah lainnya. Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa kota besar seperti Kota Padang (4,21) dan Kota Bukittinggi (4,11), Padang Panjang masih memiliki ruang untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam aspek penguatan sektor ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur.

D. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi strategi penting dalam transformasi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah yang baik.

Penerapan Ekonomi Hijau Kota Padang Panjang merujuk kepada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 berbasis peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian kehutanan dan perikanan yang dikuantifikasi melalui :



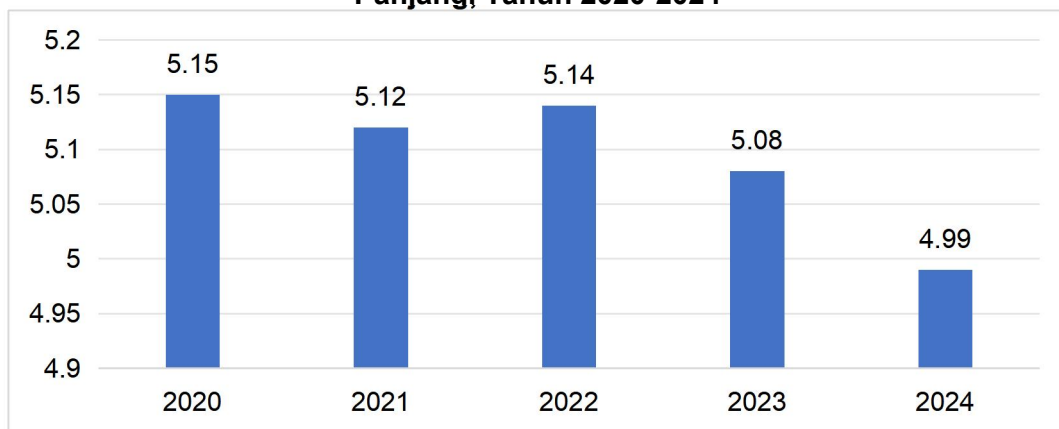
1. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan ekonomi hijau di daerah. Pada ekonomi hijau, sektor pertanian dan kehutanan memainkan peran penting dalam menciptakan praktik berkelanjutan seperti pertanian organik, efisiensi sumber daya, dan konservasi hutan untuk mengurangi emisi karbon serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan inklusi sosial dan efisiensi sumber daya melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Padang Panjang mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor ini mencapai angka tertinggi sebesar 5.15, kemudian mulai menurun menjadi 5.12 pada tahun 2021 dan 5.14 pada tahun 2022. Penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 5.08, dan akhirnya mencapai titik terendah di tahun 2024 dengan nilai 4.99. Tren ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi daerah, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, atau pergeseran fokus ke sektor lain yang lebih produktif.

Perkembangan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.57
Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

2. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengacu pada kemampuan tenaga kerja dalam



menghasilkan output atau nilai tambah di sektor tersebut. Secara makro, produktivitas ini dihitung sebagai rasio antara Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut, sehingga mencerminkan efisiensi dan hasil produksi rata-rata per pekerja.

Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor ini dengan mengedepankan praktik pertanian berkelanjutan yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Contohnya adalah penggunaan teknologi irigasi hemat air, pupuk organik, dan pengendalian hama secara alami, yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan ramah lingkungan, petani dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dengan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat secara signifikan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi tenaga kerja yang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan rendahnya produktivitas sektor pertanian.

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (juta rupiah)	123.840	129.880	136.930	139.490	139.690
Pekerja sektor Pertanian/ Agriculture (orang)	2.214	2.139	2.139	1.942	1.936
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (juta/orang)	55,93	60,72	64,02	71,83	72,15

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025 2025, diolah

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Padang Panjang menunjukkan peningkatan dari 55,93 juta rupiah per orang pada tahun 2020 menjadi 60,72 juta rupiah per orang pada tahun 2021. Selanjutnya, terus meningkat menjadi 64,02 juta rupiah per orang pada tahun 2022, mencapai 71,83 juta rupiah per orang pada tahun



2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 72,15 juta rupiah per orang.

E. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek organisasi untuk meningkatkan nilai layanan dan efisiensi operasional. Pengarusutamaan transformasi digital mencakup tiga aspek utama. Pertama, pengembangan super platform, yaitu penciptaan ekosistem digital terpadu yang mengintegrasikan layanan seperti e-commerce, pembayaran digital, dan AI. Kedua, percepatan transformasi digital, dilakukan melalui penguatan infrastruktur, adopsi teknologi canggih, serta perubahan budaya organisasi agar lebih adaptif dan inovatif. Ketiga, produksi talenta digital, yakni pengembangan SDM yang kompeten di bidang teknologi melalui program seperti Digital Talent Scholarship. Ketiga aspek ini mendukung terbentuknya ekosistem digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era digital.

Salah satu alat strategis untuk mengukur dan memetakan kemajuan transformasi digital adalah Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

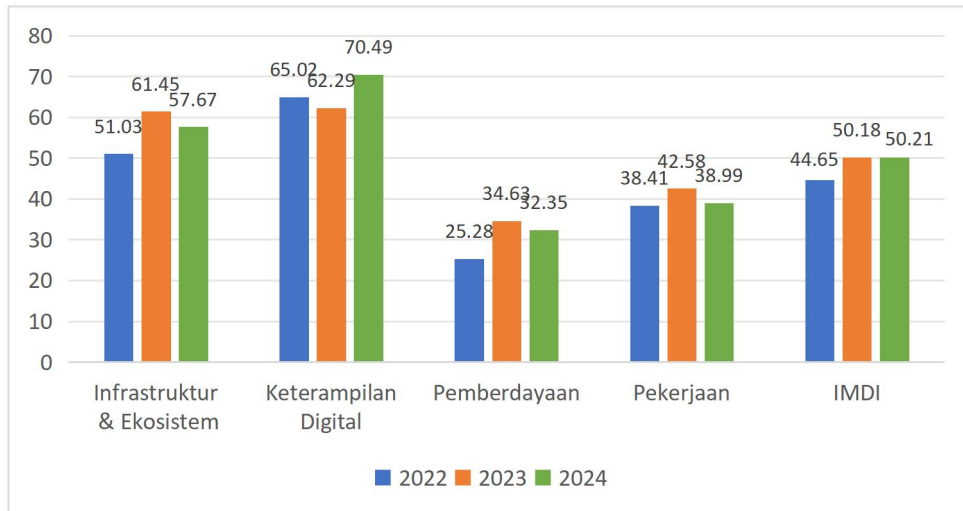
1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Infrastruktur dan Ekosistem adalah untuk Mengukur akses dan kualitas infrastruktur digital. Keterampilan Digital adalah untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Pemberdayaan mengukur kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk produktivitas, dan pekerjaan adalah untuk menilai keterampilan digital yang relevan dengan dunia. Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang Panjang sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.63
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Padang Panjang
Tahun 2022-2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk Kota Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, IMDI Kota Padang Panjang tercatat sebesar 44,65. Kemudian pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan sebesar 5,53 poin, mencapai angka 50,18. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup besar dalam aspek-aspek yang diukur oleh IMDI, seperti infrastruktur digital, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan berbasis digital. Memasuki tahun 2024, IMDI Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Indeks tersebut naik sebesar 0,03 poin menjadi 50,21. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hal ini tetap menunjukkan adanya perkembangan positif dan konsistensi dalam upaya digitalisasi di kota tersebut.

Peningkatan IMDI Kota Padang Panjang ini sejalan dengan komitmen pemerintah kota dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi. Hal ini tercermin dari keberhasilan Padang Panjang meraih peringkat 1 indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester 1-2023 dengan skor 98,5 di Sumatera Barat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong masyarakatnya untuk semakin akrab dengan transaksi digital.

F. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

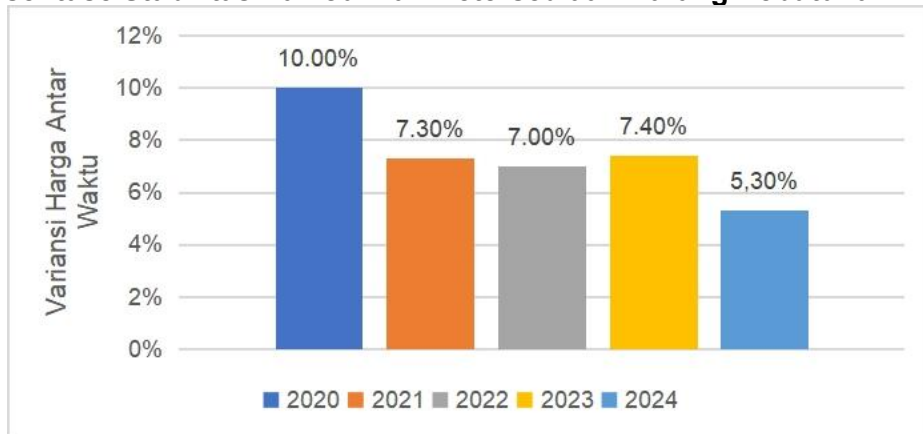
Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan proses dimana ekonomi suatu negara tidak hanya beroperasi secara internal tetapi juga terhubung dan berinteraksi dengan sistem ekonomi dunia. Integrasi ekonomi domestik mengacu pada penggabungan berbagai sektor ekonomi dalam negeri untuk menciptakan efisiensi dan sinergi, sedangkan integrasi ekonomi global adalah proses membuka dan menghubungkan ekonomi domestik ke pasar internasional melalui perdagangan bebas, investasi asing, dan kerja sama ekonomi antarnegara. Proses ini mengurangi hambatan perdagangan dan

investasi, meningkatkan mobilitas modal, tenaga kerja, dan teknologi, serta memperluas pasar bagi produk domestik. Contohnya adalah keterbukaan pasar Indonesia terhadap perusahaan asing dan partisipasi dalam perjanjian perdagangan seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan global. Berikut beberapa indikator yang mempengaruhi Integrasi ekonomi domestik dan global.

1. Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dilihat dari variansi harga antar waktu sebagaimana disajikan gambar berikut:

Gambar 2.58
Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kota Padang Panjang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2020, variasi harga antar waktu tercatat cukup tinggi sebesar 10,00%, mencerminkan ketidakstabilan pasokan atau fluktuasi harga yang cukup tajam. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, terjadi tren penurunan variasi harga yang menandakan peningkatan kestabilan.

Tahun 2021 mencatat penurunan menjadi 7,30%, disusul oleh tahun 2022 sebesar 7,00%. Meskipun tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 7,40%, secara umum fluktuasi tetap berada di bawah level tahun 2020. Perbaikan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2024, di mana variasi harga antar waktu turun drastis menjadi 5,30%, yang menunjukkan tingkat kestabilan harga tertinggi selama lima tahun terakhir.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro berperan sebagai penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di tingkat daerah, stabilitas ini diukur melalui



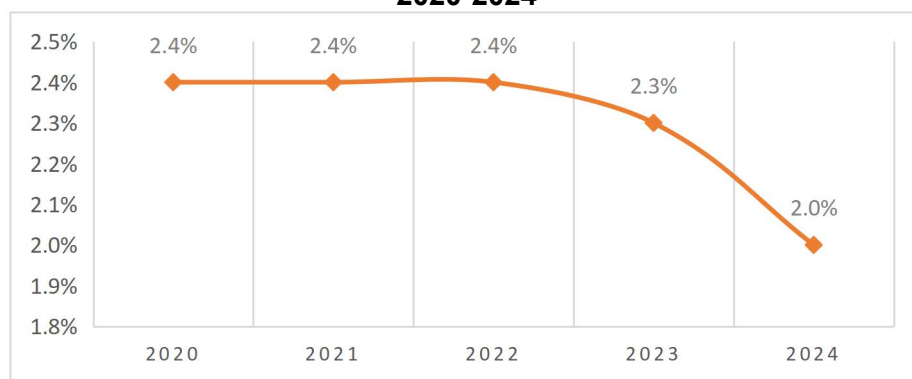
kemampuan menjaga kesinambungan anggaran, mengontrol inflasi yang berdampak pada daya beli, serta memastikan sektor keuangan berfungsi sebagai penggerak investasi inklusif. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menjadi indikator krusial untuk menilai kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan mandiri, sementara Tingkat Inflasi mencerminkan stabilitas harga dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi. Tantangan utama di wilayah urban seperti Padang Panjang meliputi tekanan pada belanja publik akibat kepadatan penduduk, kebutuhan efisiensi alokasi anggaran, serta dinamika pasar yang dipengaruhi kebijakan moneter nasional. Analisis stabilitas makroekonomi tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan tinggi, tetapi juga menjamin pemerataan akses ekonomi dan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang dalam kurun 2020-2024 mencatat dinamika yang patut menjadi perhatian kebijakan. Selama tiga tahun awal (2020-2022), rasio bertahan pada 2,4%, kemudian turun menjadi 2,3% (2023) dan 2,0% (2024). Nilai ini mengindikasikan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perekonomian lokal masih terbatas, dengan hanya sekitar 2% dari total PDRB yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi. Tren ini tidak hanya mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer pusat, tetapi juga mengisyaratkan potensi optimalisasi yang belum tergarap optimal, khususnya di sektor jasa, perdagangan, dan UMKM yang menjadi nadi perekonomian kota.

Gambar 2.59

Gambar 2.60 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Padang Panjang, 2020-2024



Sumber: BPKD dan <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Penurunan rasio pada 2023-2024 dapat dipicu oleh faktor struktural, seperti pertumbuhan PAD yang tertinggal dari laju PDRB, atau kebijakan insentif fiskal untuk meringankan beban pelaku usaha pasca pandemi. Di sisi lain, dominasi usaha mikro dengan omzet di bawah batas pajak turut membatasi



basis penerimaan, sementara kompleksitas administrasi pemungutan pajak properti di kawasan pemukiman padat menghambat perluasan objek pajak. Tantangan ini diperparah oleh karakteristik ekonomi kota yang bertumpu pada sektor informal, di mana transaksi non-digital dan rendahnya kesadaran pajak menjadi penghalang akuntabilitas fiskal.

Meski demikian, kondisi ini membuka peluang untuk membangun sistem perpajakan yang lebih inklusif dan adaptif. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku UMKM melalui pendampingan administrasi, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan transaksi, serta edukasi wajib pajak dapat menjadi kunci meningkatkan kepatuhan. Hal ini tidak hanya bertujuan menaikkan rasio pajak, tetapi juga menciptakan ekosistem fiskal yang transparan dan berkeadilan—sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat..

2. Tingkat Inflasi

Dinamika inflasi di Kota Padang Panjang tidak terlepas dari interaksi ekonomi regional dengan wilayah sekitarnya, termasuk ketergantungan pasokan komoditas pangan dan jasa logistik dari pusat distribusi terdekat. Sebagai kota yang mengandalkan sektor pariwisata budaya dan pendidikan, fluktuasi harga kerap dipengaruhi oleh permintaan musiman—seperti lonjakan harga akomodasi dan kuliner selama festival budaya atau periode liburan—serta kebutuhan pokok harian yang stabil akibat populasi pelajar dan mahasiswa.

Keterkaitan dengan rantai pasok regional menjadikan tekanan inflasi di wilayah tetangga, seperti kenaikan harga bahan pokok atau tarif transportasi, turut berdampak pada stabilitas harga di Padang Panjang. Tantangan utama terletak pada kerentanan kelompok berpenghasilan tetap, seperti tenaga pendidik, pegawai negeri, dan pekerja informal, yang pengeluarannya didominasi kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan atau energi, meskipun moderat, dapat mengurangi daya beli kelompok ini secara signifikan, terutama di tengah ketiadaan mekanisme penyesuaian pendapatan yang responsif.

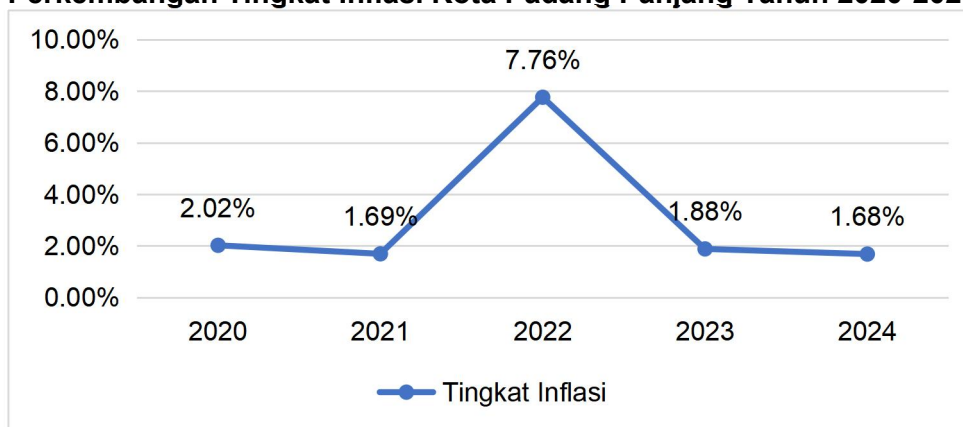
Untuk memitigasi risiko ini, penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian skala kecil di sekitar kota, diversifikasi sumber pasokan energi terbarukan, dan koordinasi kebijakan harga dengan wilayah penyangga menjadi langkah strategis. Dengan pendekatan ini, stabilitas harga tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi tulang punggung aktivitas harian kota.

Tingkat inflasi Kota Padang Panjang dari tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,76%, dan terendah pada tahun 2024 sebesar 1,68%. Perkembangan tingkat inflasi Kota Padang Panjang yang mengacu kepada Indeks Harga Konsumen



(IHK) Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.61
Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

3. Total Dana Pihak Ke Tiga

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*). Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan proporsinya terhadap PDRB Kota Padang Panjang dalam Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.64 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Kota Padang Panjang 2020-2024

Tahun	Total Dana Pihak Ketiga (Ribu)				PDRB (Juta)	Total Dana Pihak ketiga/PDRB (%)
	Giro	Deposito	Tabungan	Total		
2020	1.430.700,00	2.520.227,00	6.942.391,00	10.893.318,00	3.473.230,92	0,314
2021	1.443.190,00	1.910.544,00	6.698.913,00	10.052.647,00	3.651.118,22	0,275
2022	1.443.915,00	2.166.507,00	7.146.202,00	10.756.624,00	4.086.546,10	0,263
2023	1.398.897,00	2.186.360,00	7.337.445,00	10.922.702,00	4.474.080,00	0,244
2024	*	*	*	*	*	*

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Ket : * Data tidak dikeluarkan oleh BI

Dari tabel di atas terlihat bahwa total dana pihak ketiga/PDRB cenderung menurun dalam kisaran 0,244% - 0,312%.

4. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kota Padang Panjang

Nilai transaksi saham adalah nilai total dari transaksi saham yang dilakukan oleh para investor yang berdasarkan domisili (kabupaten/kota). Nilai

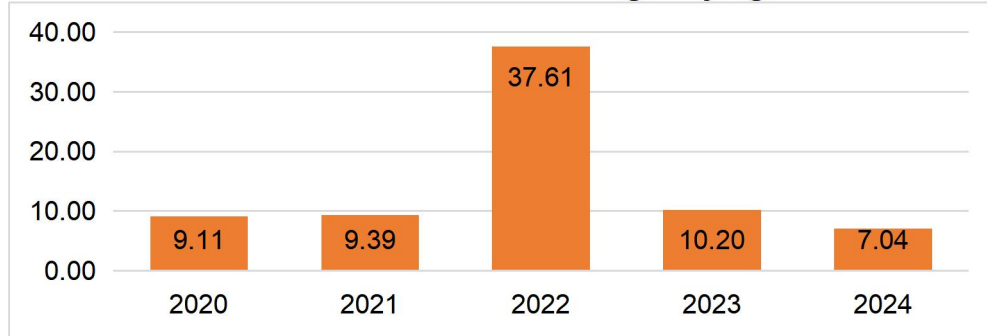


transaksi saham merupakan hasil dari jumlah atau volume saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Secara konkret, nilai transaksi saham per kapita mencerminkan seberapa besar rata-rata nilai perdagangan saham yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah dalam periode tertentu. Ini berkaitan erat dengan kapitalisasi pasar (market capitalization), yaitu nilai total pasar dari saham yang beredar, yang menjadi tolok ukur kekuatan dan potensi perusahaan di pasar modal. Integrasi ekonomi global mendorong masuknya investor asing ke pasar saham domestik, sehingga meningkatkan likuiditas dan nilai transaksi saham. Di sisi lain, peningkatan transaksi saham per kapita juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal semakin aktif dalam investasi, yang memperkuat pasar modal domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Perkembangan nilai transaksi saham Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.62
Rata-Rata Nilai Transaksi Saham Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Nilai transaksi saham di Kota Padang Panjang dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik dan mencerminkan respons masyarakat terhadap berbagai kondisi ekonomi, baik lokal maupun nasional. Rata-rata nilai transaksi tahunan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp9,11 miliar, meningkat sedikit menjadi Rp9,39 miliar pada 2021. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar Rp37,61 miliar, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya literasi keuangan digital serta antusiasme masyarakat terhadap investasi daring pascapandemi. Sayangnya, setelah lonjakan tersebut, terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi Rp10,20 miliar dan Rp7,04 miliar. Penurunan ini perlu dilihat secara hati-hati, karena bisa jadi mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih mencari keseimbangan antara kebutuhan harian dan investasi jangka panjang.

5. Total Kredit per PDRB



Total kredit adalah jumlah dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah. Perkembangan total kredit Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Total Kredit Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023

Tahun	Total Kredit Tahun 2019-2023 (Ribu)				PDRB (Juta)	Total Kredit / PDRB (%)
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	TOTAL		
2020	3.652.042,00	703.050,00	5.962.146,00	10.317.238,00	3.473.230,92	0,297
2021	3.907.150,00	726.502,00	5.614.610,00	10.248.262,00	3.651.118,22	0,281
2022	4.463.220,00	1.011.822,00	5.558.279,00	11.033.321,00	4.086.546,10	0,270
2023	5.114.474,00	1.376.537,00	6.038.078,00	12.529.089,00	4.474.080,00	0,280
2024						

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Rasio kredit terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimulai dengan 0,297% pada Tahun 2020, lalu turun menjadi 0,281% pada 2021, 0,270% pada 2022, dan kembali ke 0,280% pada 2023. Rasio ini mencerminkan seberapa besar total kredit yang diberikan terhadap PDRB, yang menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Secara umum, peningkatan total kredit diiringi oleh peningkatan PDRB, menunjukkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh akses terhadap kredit. Meskipun ada fluktuasi, rasio kredit terhadap PDRB tetap stabil, yang bisa menjadi indikasi keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang. Peningkatan terbesar dalam kredit berasal dari sektor modal kerja dan investasi pada Tahun 2023.

6. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB sektor jasa keuangan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar sektor jasa keuangan menyumbang nilai tambah ekonomi di suatu daerah. Rasio ini penting untuk menilai peran sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Sektor jasa keuangan, melalui penyaluran kredit dan layanan keuangan lainnya, menyediakan modal dan likuiditas yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi. Peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDRB menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan, mengurangi risiko ketidakstabilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah. Rasio PDRB sektor jasa



keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2020--2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Rasio Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	4,15	4,46	4,42	4,26	4,31

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 4,15%, kemudian meningkat menjadi 4,46% pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, rasio ini sedikit menurun menjadi 4,42%, dan kembali menurun menjadi 4,26% pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024, rasio ini kembali meningkat menjadi 4,31%.

7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation)

PMTB merupakan indikator penting yang mencerminkan investasi fisik dalam perekonomian, seperti pembelian mesin, peralatan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks integrasi ekonomi, peningkatan keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung (FDI) mendorong pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) karena perusahaan dan investor melakukan investasi modal untuk memanfaatkan pasar yang lebih luas dan efisiensi produksi yang dihasilkan dari integrasi tersebut. Ketika suatu daerah atau kabupaten/kota membuka diri terhadap perdagangan internasional dan menarik investasi asing, maka terjadi aliran modal yang masuk untuk membangun fasilitas produksi, infrastruktur, dan teknologi baru. Investasi ini dapat meningkatkan kapasitas produksi lokal, memperbaiki kualitas produk, dan menurunkan biaya produksi sehingga produk dapat bersaing di pasar global maupun domestik. Dengan demikian, PMTB tumbuh sebagai refleksi nyata dari investasi fisik yang dilakukan untuk mendukung ekspansi ekonomi akibat integrasi pasar global dan domestik. Berikut perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.

Gambar 2.63
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation) Kota
Padang Panjang, Tahun 2020-2024





Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Padang Panjang antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 dan 2021, PMTB berada di angka sekitar 31%, dengan nilai 31,29% di tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 31,32% pada tahun 2021. Namun, mulai 2022, terjadi penurunan signifikan, dengan PMTB tercatat sebesar 30,21%. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 29,93%, dan terus menurun pada 2024 hingga mencapai 29,55%. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam sektor investasi dan pembangunan modal tetap yang memerlukan perhatian lebih untuk mendorong kembali pertumbuhannya.

8. Ekspor Barang dan Jasa

Integrasi ekonomi domestik melibatkan kerja sama antar daerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Integrasi ekonomi global memungkinkan kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global dengan lebih efektif. Melalui integrasi ini, daerah dapat meningkatkan akses ke pasar global dan menjadi strategi efektif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat posisi ekonomi kabupaten/kota di pasar global. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.67
Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa	-4,42%	-3,06%	0,05%	3,23%	4,22%

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di Kota Padang Panjang menunjukkan tren yang menarik selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, ekspor mengalami penurunan menjadi -4,42%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi global. Pada tahun 2021, penurunan tersebut sedikit berkurang menjadi -3,06%, menunjukkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai terlihat. Pada tahun 2022, penurunan ekspor masih terjadi, tetapi dengan tingkat yang hampir sama, yaitu 0,05%, menandakan bahwa proses pemulihan masih berlangsung. Namun, pada tahun 2023, ekspor barang dan jasa Kota Padang Panjang mulai menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,23%, yang menandakan adanya perbaikan



kondisi ekonomi dan peningkatan aktivitas ekspor. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekspor meningkat lebih lanjut menjadi 4,22%, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang telah berhasil memulihkan dan meningkatkan kinerja ekspornya secara signifikan.

Sebagai kota kecil yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya di Sumatera Barat, Padang Panjang memiliki karakteristik masyarakat yang unik dan cenderung berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi fluktuasi nilai transaksi saham secara langsung. Meskipun nilai transaksi belum sebesar kota-kota besar lainnya, pergerakan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap investasi di pasar modal sudah mulai tumbuh. Maka, ke depan diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi keuangan dan penguatan ekosistem investasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, agar pertumbuhan nilai transaksi saham tidak hanya menjadi angka, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan literasi finansial warga Padang Panjang secara menyeluruh.

H. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Kota inklusif adalah kota yang menjamin aksesibilitas bagi semua warga tanpa diskriminasi, dengan layanan publik yang memadai dan kesempatan ekonomi yang setara. Dalam mewujudkan kota inklusif, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) berperan sebagai alat evaluasi yang efektif untuk menilai kualitas infrastruktur yang ada. Ketersediaan rumah tangga dengan akses hunian layak juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Hunian yang layak tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti akses air minum dan pelayanan kesehatan, tetapi juga harus terjangkau dan aman bagi semua warga. Dalam konteks ini, pengembangan infrastruktur yang baik dan peningkatan akses hunian layak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung daya saing daerah secara keseluruhan. IKLI dapat membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam penyediaan infrastruktur, sehingga memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang memadai. Dengan demikian, integrasi antara pengembangan infrastruktur yang inklusif dan akses hunian layak dapat menjadi kunci untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan kompetitif.



1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Kepuasan masyarakat yang disurvei untuk pengukuran IKLI terhadap infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (layanan *website* dan layanan *wifi*), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Layanan infrastruktur Jalan, trotoar drainase, infrastruktur disabilitas), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Layanan Infrastruktur Rumah Layak Huni (Rulahu), Sampah, Jalan Lingkungan, Limbah, dan Ruang Terbuka Hijau), Dinas Perhubungan (Layanan Infrastruktur Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, *Traffict Light*, Petugas, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir), serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (layanan infrastruktur pasar) yang mulai dihitung sejak Tahun 2019. Perkembangan capaian IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2019-2023

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika	72.03	Kurang Baik	85.61	Baik	80.98	Baik	87.54	Baik	Tidak di ukur	Tidak di uku
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Perhubungan	71.11	Kurang Baik	97.46	Sangat Baik	96.62	Sangat Baik	97.5	Sangat Baik	95,22	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang, Trotoar)	77.10	Kurang Baik	96.36	Sangat Baik	97.92	Sangat Baik	96.31	Sangat Baik	96,71	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	77	Baik	90.69	Sangat Baik	96.8	Sangat Baik	98.69	Sangat Baik	94,56	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar	68.73	Kurang Baik	88.71	Baik	86.59	Baik	84.08	Baik		
Rata-Rata	74.15	Kurang Baik	90.99	Sangat Baik	91.43	Sangat Baik	92.70	Sangat Baik		

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang, 2024

Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kegiatan berupa layanan internet Kota, penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu dan lampu jalan, dan trotoar yang ramah disabilitas di kawasan strategis kota serta peningkatan sarana perdagangan pasar baik di pasar pusat maupun pasar kuliner.



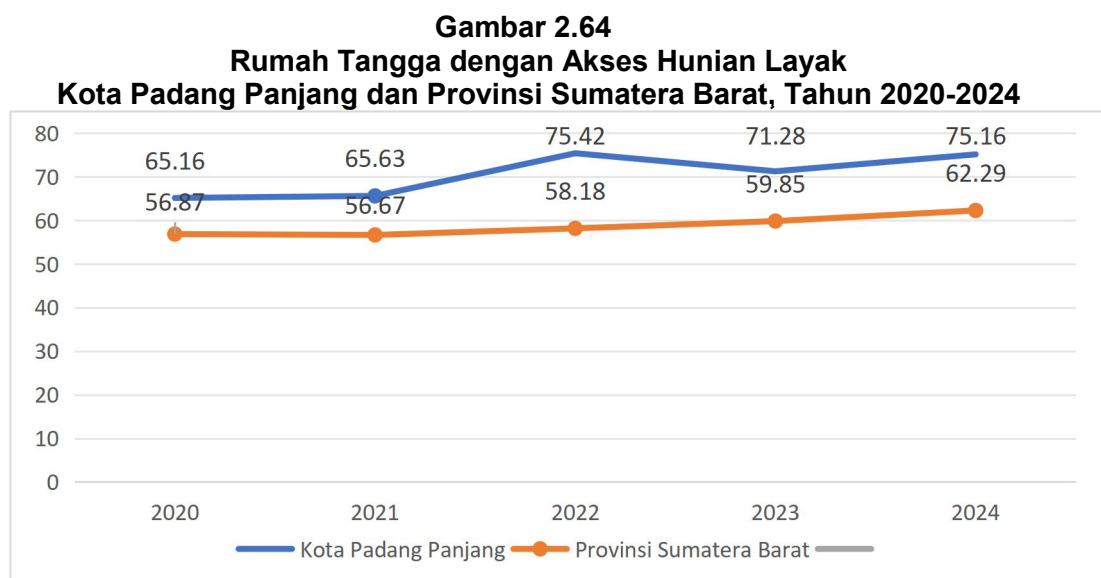
2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak mengacu pada proporsi rumah tangga dalam suatu wilayah yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan tertentu. Standar ini biasanya mencakup beberapa kriteria seperti luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita, akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan yang sesuai dengan standar. Persentase ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas hidup dan kemajuan pembangunan suatu daerah, terutama dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dalam kurun waktu tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	65,16	65,63	75,42	71,28	75,16

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Pada Kota Padang Panjang, persentasenya mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, angkanya sebesar 65,16% dan sedikit menurun menjadi 65,63% di tahun 2021. Kemudian terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022, mencapai 75,42%. Setelah itu,



persentasenya sedikit menurun menjadi 71,28% di tahun 2023, namun kembali naik pada tahun 2024 hingga mencapai 75,16%. Secara umum, Kota Padang Panjang selalu memiliki persentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pertumbuhan di Kota Padang Panjang juga cenderung lebih cepat, meskipun terjadi fluktuasi, sedangkan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kenaikan yang lebih stabil dari tahun ke tahun.

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka mendukung pelayanan publik yang optimal, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk memperkuat regulasi yang ada dan mengimplementasikan sistem tata kelola yang adaptif, dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu langkah utama dalam memperbaiki tata kelola adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, penguatan reformasi hukum dan integritas nasional akan terus diupayakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam upaya tersebut, indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemajuan dan keberhasilan tata kelola yang diterapkan.

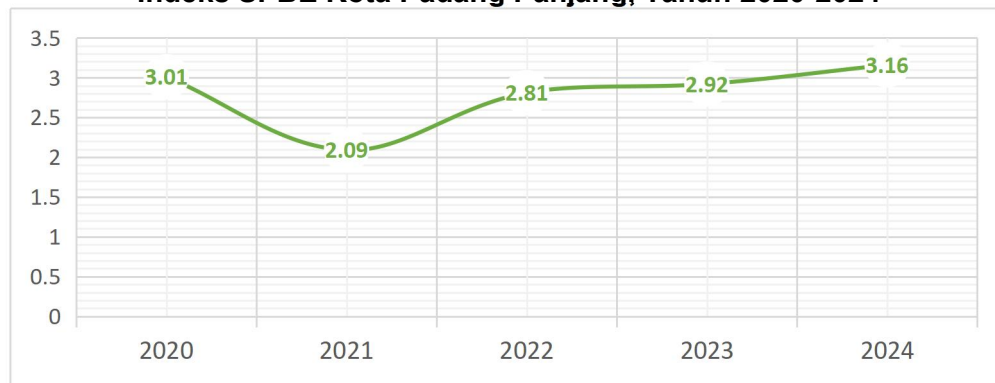
1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum di Kota Padang Panjang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 dan Nomor 23 Tahun 2024, Kota Padang Panjang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi hukum yang meliputi penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas lembaga hukum, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang tercatat sebesar 96,66, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Angka ini mencerminkan pencapaian yang berhasil dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan bebas dari praktik korupsi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan transparan bagi masyarakat.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengimplementasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kota Padang Panjang telah menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam penerapan SPBE selama periode 2020 hingga 2024. Pada 2020, Indeks SPBE tercatat 3,01, namun mengalami penurunan menjadi 2,09 pada 2021. Meskipun demikian, Kota Padang Panjang berhasil meningkatkan skor tersebut menjadi 2,81 pada 2022, 2,92 pada 2023, dan akhirnya mencapai 3,16 pada 2024, yang mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam penggunaan teknologi untuk pelayanan publik.

Gambar 2.65
Indeks SPBE Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, 2025

Namun, beberapa faktor penyebab belum optimalnya implementasi SPBE di Kota Padang Panjang antara lain masih terbatasnya pemahaman implementor, serta keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan penerapan SPBE secara menyeluruh, perlu adanya peningkatan dalam hal pelatihan sumber daya manusia dan pemeliharaan sistem teknologi, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan infrastruktur SPBE. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah Kota Padang Panjang dapat terus meningkat.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kota Padang Panjang berhasil memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,17 berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 659 Tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya yang signifikan dari pemerintah daerah dalam



meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari segi kecepatan, keterjangkauan, transparansi, dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

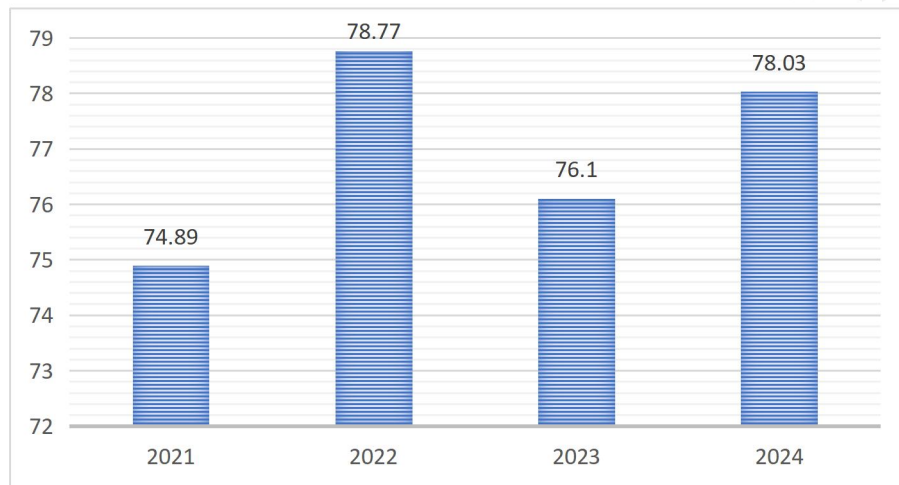
Meskipun sudah ada pencapaian yang baik, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk memperbaiki beberapa aspek layanan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan fasilitas layanan yang lebih ramah dan efisien. Dengan fokus berkelanjutan pada perbaikan pelayanan, Kota Padang Panjang dapat mempertahankan dan meningkatkan skor IPP tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

4. Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta penghindaran terhadap praktik-praktik korupsi. Untuk menilai sejauh mana implementasi integritas ini berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin melaksanakan survei penilaian integritas di berbagai instansi pemerintahan. Hasil survei ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengawasan internal serta penerapan budaya anti-korupsi yang ada. Hasil penilaian dari KPK ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pengawasan serta penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik.

Kota Padang Panjang telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam penerapan integritas pada tingkat pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dalam Indeks Integritas Kota Padang Panjang selama periode 2021 hingga 2024, dengan nilai-nilai yang menunjukkan tren yang konsisten. Pada tahun 2021, Indeks Integritas tercatat sebesar 74,89, yang kemudian meningkat menjadi 78,77 pada 2022. Meskipun terdapat sedikit penurunan menjadi 76,1 pada 2023, Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan pada 2024 dengan skor 78,03. Meskipun fluktuasi skor terjadi, pencapaian ini tetap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan ini juga mencerminkan upaya yang lebih besar dalam memperkuat integritas internal, yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Gambar 2.66
Indeks Integritas Kota Padang Panjang, 2021-2024



Sumber: KPK, 2025

Dengan merujuk pada hasil survei integritas yang dilakukan oleh KPK, Kota Padang Panjang dapat terus mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini akan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin memenuhi harapan masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks persepsi anti korupsi merupakan salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani. Indeks persepsi merupakan komposit dari indeks 10 indikator persepsi anti korupsi yaitu indikator manipulasi peraturan, indikator penyalahgunaan jabatan, indikator menjual pengaruh, indikator transparansi biaya, indikator transaksi rahasia, indikator biaya tambahan, Indikator transparansi pembayaran, indikator hadiah dan Indikator pembuatan curang. Dengan analisa bobot setiap indikator dan indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang artinya data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4 dimana nilai skor 1 merupakan skor persepsi paling rendah, nilai skor 1- 2,50 dengan persepsi penilaian kurang bersih, nilai skor 2,5-3,25 dengan penilaian persepsi anti korupsi cukup bersih dan nilai skor 3,26-4 dengan skor penilaian Indeks persepsi bersih dari korupsi dan skor ini merupakan skor persepsi paling tinggi yang mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, berdasarkan Survei indeks persepsi anti korupsi di Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar 3,92 dengan target skor 3,94 masuk skor dengan kategori bersih dari korupsi.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan



Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan aman. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk memastikan supremasi hukum yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang inklusif dan partisipatif akan terus didorong, dengan tujuan menciptakan kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Selain itu, ketangguhan dalam aspek keamanan menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas daerah dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dalam upaya tersebut, indikator-indikator yang akan diukur mencakup Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, dan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, yang semuanya menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, aman, dan demokratis.

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil menegakkan peraturan yang ada. Penegakan perda yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan aturan diterapkan secara konsisten dan tegas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase ini, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap perda. Selain itu, penyusunan regulasi yang relevan dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar juga menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas penegakan perda dan menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan adil.

Tabel 2.70
Persentase Penegakan Perda yang tertangani Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda yang tertangani	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Padang Panjang, 2025

2. Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk

Angka kriminalitas merupakan sebuah tolok ukur standar yang memungkinkan kita untuk membandingkan tingkat kerawanan suatu wilayah secara adil dari waktu ke waktu, meskipun jumlah penduduknya berubah. Secara sederhana, angka ini mengukur "risiko" kejahatan dengan menghitung berapa



banyak kasus kejahatan yang terjadi dalam setahun. Penggunaan rasio ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang rasa aman dibandingkan hanya melihat total kasusnya.

Berdasarkan data untuk Kota Padang Panjang selama periode lima tahun (2020-2024), kondisi keamanan menunjukkan dinamika yang signifikan. Secara keseluruhan, angka kriminalitas per 1.000 penduduk mengalami fluktuasi. Terjadi perbaikan kondisi yang ditandai dengan penurunan dari 2,66 pada tahun 2020 hingga mencapai titik terendahnya di angka 1,94 pada tahun 2022. Namun, tren positif ini sayangnya tidak bertahan lama, karena angka kriminalitas kembali menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir dan mencapai 2,49 pada tahun 2024, hampir kembali ke level awal periode.

Tabel 2.71
Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk Kota Padang Panjang, 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Kejahatan Konvensional	135	108	95	114	139
Kejahatan Transnasional	15	22	17	17	9
Jumlah Penduduk	56.311	56.971	57.850	58.627	59.453
Angka Kriminalitas Per 1000 Penduduk	2,66	2,28	1,94	2,23	2,49

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025, Diolah

Penentu utama dari fluktuasi ini adalah kejahatan konvensional. Pola kejahatan yang paling dirasakan masyarakat sehari-hari ini menurun sejalan dengan angka kriminalitas hingga tahun 2022, namun kemudian melonjak tajam hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 (139 kasus). Di sisi lain, sebuah tren yang kontras terlihat pada kasus kejahatan transnasional yang jumlahnya cenderung fluktuatif dan justru menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penanganan kejahatan terorganisir lintas negara di Padang Panjang menunjukkan hasil yang baik, tantangan baru kini terletak pada peningkatan kembali kejahatan konvensional yang secara langsung memengaruhi rasa aman masyarakat.

3. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan dan program untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan kebebasan berbicara. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia melalui berbagai program, seperti penyuluhan tentang hak-hak masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, dan penanganan kasus pelanggaran HAM. Untuk meningkatkan persentase capaian aksi HAM, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan HAM dalam setiap sektor pembangunan dan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program-program HAM. Kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Komnas HAM dan organisasi

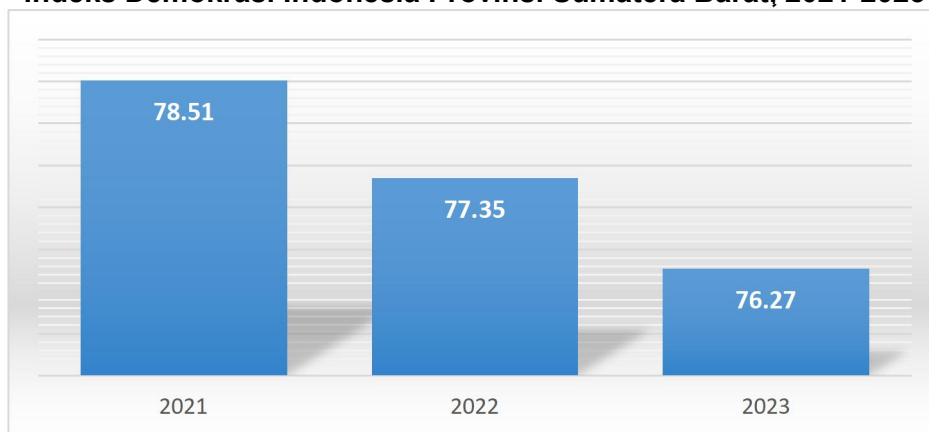


masyarakat sipil juga penting untuk memastikan pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia masyarakat Kota Padang Panjang dapat dipenuhi dengan lebih optimal, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

4. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi. Aspek kebebasan mencakup hak-hak sipil, sementara kesetaraan lebih menekankan pada partisipasi politik yang merata, dan kapasitas lembaga demokrasi mengacu pada efektivitas lembaga-lembaga yang mendukung sistem demokrasi. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi acuan untuk Kota Padang Panjang, terlihat penurunan nilai IDI dalam beberapa tahun terakhir, dengan skor 78,51 pada 2021, 77,35 pada 2022, dan 76,27 pada 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan memperkuat kualitas demokrasi, yang juga mempengaruhi dinamika di Kota Padang Panjang.

Gambar 2.67
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Meskipun terdapat penurunan pada tingkat provinsi, Kota Padang Panjang berupaya untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang



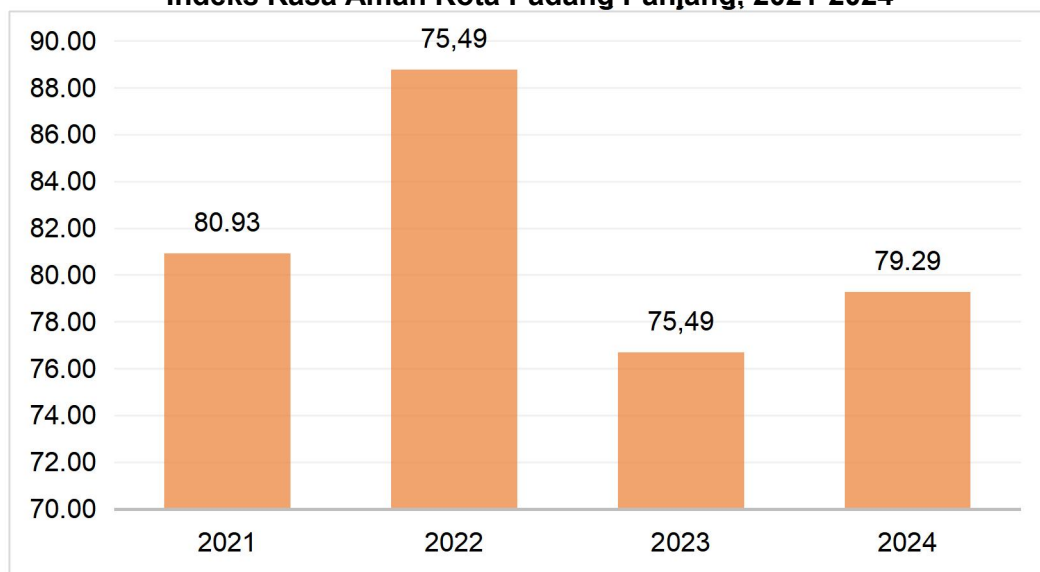
substansial melalui penguatan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah kota fokus pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga demokratis dan memastikan bahwa proses politik lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui upaya ini, Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi yang ada, mengingat pentingnya demokrasi yang kuat sebagai fondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

5. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan dan ketenteraman yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari ancaman seperti kriminalitas dan gangguan lainnya. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan rasa aman dengan memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum.

Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika tingkat keamanan di daerah ini. Pada tahun 2021, skor Indeks Rasa Aman tercatat 80,93, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 88,78. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 76,70, sebelum kembali meningkat sedikit menjadi 79,29 pada tahun 2024. Peningkatan dan fluktuasi ini menunjukkan upaya yang konsisten dari pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan rasa aman masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam mempertahankan tingkat keamanan yang optimal. Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk memperkuat patroli keamanan, kolaborasi dengan aparat keamanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Gambar 2.68
Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang, 2021-2024





Sumber: Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

C. Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Kerjasama daerah memegang peranan krusial dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak merupakan langkah esensial untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan. Berikut diuraikan tentang daftar kerja sama Pemerintah Kota Padang Panjang:



Tabel 2.72 Kerja Sama Kota Padang Panjang

No	Judul Nota Kesepakatan	Pihak Yang Tanda Tangan	No. MOU	Tanggal Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	Capaian Tugas dan Tanggung Jawab	Manfaat dan Dampak yang diterima	Permasalahan
KERJASAMASINERGI TAHUN 2022								
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang.	Mokhammad Najih (Ketua Ombudsman Republik Indonesia) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).	(02/ORI-MOU/II/2022) (02/WAKO-PP/II/2022)	20 Januari 2022, bertempat di Padang Panjang.	2 (dua) Tahun	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan ruang lingkup: Pencegahan Maladministrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang; Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Laporan masyarakat; Pertukaran data atau informasi yang akurat; Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; Kegiatan lain yang disepakati.	untuk mewujudkan Kerja Sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Ombudsman.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.
2	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.	Jumeri (Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).	(4055/C/HK.02.06/2022) (3/WAKO-PP/II/2022)	20 Januari 2022, bertempat di Padang Panjang dan di Jakarta.	5 (lima) Tahun	Sebagai pedoman bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjabarkan Kerja Sama Strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak. Dengan ruang lingkup: Sosialisasi program sekolah penggerak; Penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak; Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak; Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak.	Terjalinnya Kerja Sama Strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.
3	Pengembangan Statistik Kota Padang Panjang.	Arius Jonnaidi (Kepala https://padangpanjangkota.bps.go.id) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).	(001/BPS1374/MOU/06/2022) (7/WAKO-PP/VI/2022)	13 Juni 2022, bertempat di Padang Panjang.	5 (lima) Tahun	Menjalin kemitraan dalam pengembangan statistik di Kota Padang Panjang dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan ruang lingkup: Pembinaan kegiatan statistik, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan sistem informasi statistik; Interoperabilitas data;	Mewujudkan Satu Data Kota Padang Panjang guna mendukung perencanaan, pengembangan dan pembangunan di Kota Padang Panjang.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Judul Nota Kesepakatan	Pihak Yang Tanda Tangan	No. MOU	Tanggal Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	Capaian Tugas dan Tanggung Jawab	Manfaat dan Dampak yang diterima	Permasalahan
						Kegiatan lain yang disepakati.		
4	Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Padang Panjang.	Ariefarahmy (Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).	(W3-A8/1236/HM.01/7/2022) (8/WAKO-PP/II/2022)	13 Juli 2022, bertempat di Padang Panjang.	5 (lima) Tahun	Untuk memberikan landasan dan kerangka Kerja Sama tentang fasilitasi dan pemberian bantuan dalam penyelenggaraan program Pengadilan Agama Padang Panjang yang berorientasi kepada pelayanan publik, memfasilitasi dan memberikan ruang bagi peningkatan sinergi dengan lembaga/dinas terkait khususnya dalam kepentingan proses peradilan dan pelayanan publik, dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Kerja Sama antara Lembaga/Dinas terkait. Dengan ruang lingkup: Fasilitasi dan pemberian wadah; Sinergi antar Instansi/Dinas; Sinergi dalam program pendukung proses peradilan.	Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pihak Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Kota Padang Panjang.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.
5	Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Karjono (Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).	(.....) (16/WAKO-PP/VIII/2022)	19 Agustus 2022, bertempat di Bukittinggi.	3 (tiga) Tahun	Sebagai komitmen awal dan landasan bagi Pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Dengan ruang lingkup: sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila; kerja sama jejaring multi pihak; pendampingan terhadap pembentukan	Untuk membangun dan mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai tugas dan fungsi Pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang.	Tidak ada permasalahan yang terjadi. Catatan: file MOU asli masih pada Pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta.



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Judul Nota Kesepakatan	Pihak Yang Tanda Tangan	No. MOU	Tanggal Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	Capaian Tugas dan Tanggung Jawab	Manfaat dan Dampak yang diterima	Permasalahan
						regulasi dan kebijakan; penyediaan standar materi dan bahan ajar; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; pengendalian dan evaluasi; kegiatan lain sesuai kebutuhan.		
KERJA SAMA SINERGI TAHUN 2023 TMT AGUSTUS 2023								
	Nihil							
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD) TAHUN 2022								
6	Kerja Sama Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan.	Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Eka Putra (Bupati Tanah Datar).	(24/KB/WAKO-PP/XI/2022) (19/KB/BTD-2022)	8 November 2022, bertempat di Padang.	5 (lima) Tahun	Melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan penyediaan pelayanan publik. Dengan ruang lingkup: Kerjasama Urusan Pemerintahan Wajib (6 Urusan); Kerjasama Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar (18 Urusan); Kerjasama Urusan Pemerintahan Pilihan (8 Urusan); Kerjasama Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Urusan).	Untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD) TAHUN 2023								
	Nihil							
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2022								
7	Kemitraan Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Syariah di Kota Padang Panjang.	Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Budi Abdiriva (Area manager Padang Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk).	(15/KB/WAKO-PP/VIII/2022) (02/389-3/225)	4 Agustus 2022, bertempat di Padang Panjang.	5 (lima) Tahun	Sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama kegiatan penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan syariah. Dengan ruang lingkup: Pemanfaatan layanan produk dan jasa perbankan syariah dan mendukung program unggulan Kota Padang Panjang; Mendukung dan ikut serta dalam kegiatan bertemakan syariah	Meningkatkan kinerja dan untuk saling mendukung kegiatan Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Bank Syariah Indonesia Kota Padang	Tidak ada permasalahan yang terjadi.



No	Judul Nota Kesepakatan	Pihak Yang Tanda Tangan	No. MOU	Tanggal Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	Capaian Tugas dan Tanggung Jawab	Manfaat dan Dampak yang diterima	Permasalahan
						terkait pengembangan riset, edukasi dan pelatihan.	Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.	
8	Kerja Sama dalam Pembangunan Daerah.	Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Asri Mukhtar (Direktur Utama PT Semen Padang).	(22/KB/WAKO-PP/X/2022) (000110/HK.03.02/PJJ/50003916/3000/10.2022)	25 Oktober 2022, bertempat di Padang Panjang dan di Padang.	5 (lima) Tahun	Sebagai landasan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya. Dengan ruang lingkup: Penggunaan barang dan jasa produk PT. Semen Padang untuk pembangunan daerah, kegiatan pelestarian lingkungan dan sosial budaya; Pemberian dukungan dari PT. Semen Padang terhadap pembangunan daerah, kegiatan pelestarian lingkungan, pengembangan SDM dan sosial budaya.	melaksanakan percepatan pembangunan daerah, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.
9	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Padang Panjang.	Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Masyhuri Hamidi (Rektor Universitas Metamedia).	(24/KB/WAKO-PP/X/2022) (001/MOU.01.C/META-U/X/2022)	29 Oktober 2022, bertempat di Padang.	4 (empat) Tahun	Sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan ruang lingkup: Pengembangan SDM; Pengembangan software teknologi Informasi; Program penelitian; Pengabdian masyarakat.	Rangka sinergitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Metamedia dengan program dan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Judul Nota Kesepakatan	Pihak Yang Tanda Tangan	No. MOU	Tanggal Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	Capaian Tugas dan Tanggung Jawab	Manfaat dan Dampak yang diterima	Permasalahan
10	Kerjasama Sosialisasi, Penerapan Teknologi Pendidikan Smart Student dan Teacher, Peningkatan Karakter dan Sumber Daya Manusia Secara Daring di Kota Padang Panjang.	Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Muhammad Imam Usman (Co-Founder dan Chief Operating Officer PT. Ruang Raya Indonesia).	(34/KB/WAKO-PP/XI/2022) (120/SK/L/SALES/XI/2022)	7 November 2022, bertempat di Padang Panjang dan di Jakarta.	4 (empat) Tahun	Meningkatkan sinergisitas dan menyelaraskan program kegiatan dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan ruang lingkup: Kerja Sama terkait pelaksanaan Program Indonesia Teaching Fellowship (ITF), Program Bimbingan Kesiapan Kerja (BKK) dan Program Peningkatan SDM melalui Aplikasi Ruangguru; Kegiatan lain yang dapat dilakukan bersama.	Meningkatkan mutu proses dan mutu hasil Pendidikan melalui penggunaan laman (website) dan aplikasi mobile, mengimplementasikan inovasi pelatihan an inovasi pelatihan guru dan kompetensi dalam pengembangan SDM.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2023								
11	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara III Sumatera Barat 2023.	Mahyeldi (Gubernur Sumatera Barat), Hendri Septa (Walikota Padang), Fadly Amran (Walikota Padang Panjang), Erman Safar (Walikota Bukittinggi) dan Andi Bau Malik Barammase, Karaenta Tukajannangang Satrio Sasmito (Ketua Umum DPP MATRA).	(1/KB/WAKO-PP/IV/2022)	17 April 2023, bertempat di Fly Over Bandara Internasional Minangkabau Padang.	1 (satu) Tahun	Sebagai landasan bagi masing-masing PARA PIHAK dalam berkolaborasi melakukan kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara III – Sumatera Barat 2023.	Untuk terwujudnya pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara III - Sumatera Barat 2023 dalam upaya pencapaian ketahanan adat dan budaya Nusantara.	Tidak ada permasalahan yang terjadi. Catatan: file MOU asli masih pada Pihak Bagian Kerjasama Provinsi Sumatera Barat.
12	Kerja Sama Peningkatan Pembangunan Kota Cerdas di Kota Padang Panjang.	Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Raja Gopala Raju Indukuri (Chief Executive Officer - IXIONO PTE LTD).	(5/WAKO-PP/V/2023) 201839075W	29 Mei 2023, bertempat di Padang Panjang.	2 (dua) Tahun	Sebagai dasar untuk peningkatan pembangunan kota cerdas. Dengan ruang lingkup: City wallet dan sistem pedagang; Pengumpulan limbah dan sampah; Properti kota, utilitas, dan manajemen layanan; Perpustakaan pintar; Tanggap Bencana; Mobilitas Publik Terpadu.	Bekerja Sama dalam berbagai bidang sebagai proyek percontohan dalam Peningkatan Pembangunan Kota Pintar di Kota Padang Panjang.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Judul Nota Kesepakatan	Pihak Yang Tanda Tangan	No. MOU	Tanggal Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	Capaian Tugas dan Tanggung Jawab	Manfaat dan Dampak yang diterima	Permasalahan
13	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang.	Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Ansofino (Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat).	(8/KB/WAKO-PP/VII/2023) (32/AU-UPGRISBA/2023)	6 Juli 2023, bertempat di Padang.	4 (empat) Tahun	Sebagai dasar untuk meningkatkan kerja sama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan ruang lingkup: Kegiatan pendidikan (Magang, Beasiswa, Kuliah Tamu, pascasarjana); Kegiatan penelitian; Kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Kegiatan lainnya (entrepreneur muda, sains data, pemberdayaan pangan lokal, dll.); bidang-bidang lain yang disepakati.	Untuk menyinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada diantara Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Universitas Guru Republik Indonesia Sumatera Barat dalam kerangka kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) TAHUN 2022								
14	Fasilitasi Penertiban Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak Bagi Pelajar.	Maini (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang) dan Armen Yudi (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar).	(470/16/PKS/DKPS-PP/XI-2022) (470/840/DUKCAPIL-2022)	8 November 2022, bertempat di Padang.	5 (lima) Tahun	Untuk efektifitas fungsi, peran dan koordinasi guna peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Dengan ruang lingkup: Perekaman dan Penertiban KTP-el; Fasilitasi pengumpulan bahan penerbitan KIA; Fasilitasi penerbitan dilaksanakan secara kolektif bagi pelajar.	Memberikan kemudahan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak bagi pelajar asal Kabupaten tanah Datar yang bersekolah di Kota Padang Panjang dan sebaliknya.	Tidak ada permasalahan yang terjadi.



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Judul Nota Kesepakatan	Pihak Yang Tanda Tangan	No. MOU	Tanggal Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	Capaian Tugas dan Tanggung Jawab	Manfaat dan Dampak yang diterima	Permasalahan
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) TAHUN 2023								
15	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat tentang Pembinaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.	Sonny Budaya Putra (Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang) dan Yefri Heriani (Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat).	(7/PKS/PEM-SETDAKO-PP/VI/2023) (0002/KS.01.01/PDG/VI/2023)	14 juni 2023, bertempat di Padang.	5 (lima) Tahun	Dengan ruang lingkup: Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; Penilaian pemenuhan komponen standar pelayanan publik; Peringkatan tingkat kepatuhan; Bidang-bidang lain. Realisasi keuangan sosialisasi: Honorarium Narasumber Rp.2.400.000,-; Biaya Makan Rp.1.968.750,-; Snack Rp.1.102.500.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pendampingan dalam memenuhi indikator ketaatan standar pelayanan publik sehingga dapat memberikan dampak maksimal terhadap perbaikan predikat kepatuhan standar pelayanan publik.	Berdasarkan kerjasama yang telah dilaksanakan tanggal 14 juni 2023 belum dapat dilaksanakan pembinaan maksimal ke semua unit kerja pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dikarenakan singkatnya jangka waktu pembinaan yang tersedia mengingat jadwal/waktu penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia telah dimulai terhitung bulan juli 2023.



D. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar mencerminkan kemampuan daerah untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayahnya secara menyeluruh. Hal ini dicapai melalui sinergi antara upaya diplomasi yang efektif dan sistem pertahanan yang kuat, sehingga menciptakan daya gentar yang mampu mencegah berbagai ancaman. Dengan kemampuan tersebut, daerah dapat mengelola hubungan internal maupun eksternal secara bijak dan responsif, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram bagi masyarakatnya. Keterpaduan antara diplomasi dan pertahanan ini sangat penting karena langsung berkontribusi pada terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum (trantibum) di wilayah tersebut, yang pada akhirnya mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan lokal secara optimal.

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum

Persentase penurunan pelanggaran trantibum mengukur sejauh mana ketertiban serta keamanan di wilayah terjaga secara kuantitatif, dan ini menjadi indikator keberhasilan dari upaya ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang diberdayakan untuk menjaga stabilitas kawasan.

Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar jumlah pelanggaran terhadap ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum (trantibum) berhasil dikurangi dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini menunjukkan efektivitas penegakan aturan dan upaya menjaga ketertiban publik, di mana semakin tinggi persentasenya berarti pelanggaran yang terjadi semakin berkurang. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.73 Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum
Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggaran Trantibum	134	143	146	173	122	102
Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	NA	-6,72%	-2,10%	-18,49%	12,86%	16,39%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 2025

Pada tahun 2020, tercatat 143 kasus pelanggaran, naik sebesar 6,72% dari tahun 2019. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan jumlah pelanggaran meningkat menjadi 146 kasus, meskipun hanya naik 2,10%. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah pelanggaran melonjak signifikan menjadi 173 kasus, mencerminkan kenaikan sebesar 18,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dalam periode tiga tahun awal, upaya penegakan Trantibum belum menunjukkan hasil optimal, dan tantangan terhadap stabilitas sosial masih cukup tinggi.



Namun, mulai tahun 2023, kondisi mulai membaik. Jumlah pelanggaran Trantibum turun secara signifikan menjadi 122 kasus, atau mengalami penurunan sebesar 12,46% dari tahun sebelumnya. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 102 kasus, menurun 16,39% dibandingkan tahun 2023. Penurunan berturut-turut dalam dua tahun terakhir mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa ketangguhan kawasan dari sisi keamanan dan stabilitas sosial semakin kuat dan efektif.

E. Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Indikator Kerja Kunci (IKK) dalam bidang pendidikan adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam sektor pendidikan. IKK ini dapat digunakan oleh kementerian, dinas pendidikan, sekolah, atau institusi lain untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dari data yang disajikan dalam tabel di bawah dapat dijelaskan bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) Capaian IKK Bidang Pendidikan dimulai tahun 2020 s.d. tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- A. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, diawali dengan 103,33642 % pada tahun 2020, tetapi angka turun pada tahun 2021 menjadi 95,031617 % pada dan 90,4021938 % pada tahun 2022. Peningkatan partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 109,1444092 % dan 103,2891731 % pada tahun 2024;
- B. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama, Mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 104,5535449 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yakni sebesar 101,404741 % atau sebesar 3, 1518039 point;
- C. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, mencapai persentase tertinggi pada tahun 2023, dengan angka sebesar 156,7727401 % dan menjadi 140,5091312 % pada tahun 2024;
- D. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan memiliki persentase tertinggi pada tahun 132,11679 % dan menjadi 55, 2264808 % pada tahun 2024, penurunan



yang signifikan yakni sebesar 76,8903092 point;

- E. Harapan Lama Sekolah di Kota Padang Panjang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai 15,06 % pada tahun 2020, 15,07 % pada tahun 2021, 15,07 % pada tahun 2022, 15,29 % pada tahun 2023 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 15,47 %;
- F. Indeks Rata-rata lama sekolah, seperti Indeks Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Dimulai 11, 62 % pada tahun 2020 dan capaian tertinggi pada tahun 2024 yakni sebesar 12 %. Selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar 0,38 point;
- G. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, dapat dilihat mulai dari tahun 2022 yakni sebesar 99,40 % dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yakni 70, 5% sebesar 28,9 point dan 62,94 % pada tahun 2024;
- H. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat, mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 dan 2024 yakni sebesar 99,05 %. Mengalami peningkatan 0,01 point dari tahun 2022. Terjadi penurunan sebesar 0,60 point dari tahun 2021 yaitu 93,90 %;
- I. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat, sesuai dengan tabel yang disajikan di bawah dapat dilihat, pada tahun 2020 sebesar 97,76 %, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 97,29 %, tahun 2022 sebesar 97,3 %, tahun 2023 sebesar 98,53 % dan tahun 2023 tetap dengan angka 98,53 %;
- J. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud (3-6 tahun) dimulai dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan dan mencapai capaian tertinggi pada tahun 2023 yakni 62,93 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yakni sebesar 20,65 Point atau menjadi 42,28 %;
- K. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat pada tahun 2024 sebesar 105,5 % turun sebesar 0,58 point dari tahun 2024 yaitu 106,08 %. Pada tahun 2020 dan 2022 mempunyai nilai yang sama 106,65 % dan pada tahun 2021 sebesar 108,25;
- L. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat mencapai nilai terendah pada tahun 2023 yakni sebesar 93,35 % dan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 109,31 %. Capaian yang sama terjadi pada tahun 2020 dan 2022 sebesar 107,15 % dan pada tahun 2021 sebesar 102,22 %;
- M. Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat, merupakan indikator yang bersumber dari Rapor Pendidikan yang baru dinilai semenjak tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat sebesar 2,39 % / 2,28 % / 2,1 %, dan untuk tahun 2023 73,62 % / 72,14 % / 58,13 %, serta pada tahun 2024 76.37 % / 75.38 % / 60.71%;
- N. Untuk Indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat



- pada tahun 2022 sebesar 2,48 % / 2,4 % / 2,07 %, tahun 2023 71,29 % / 69,61 % / 57,38 % dan tahun 2024 73.15 % / 74.71 % / 60.82 %;
- O. Seperti halnya Indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas, indeks Literasi dan Numerasi SD sederajat merupakan indikator dalam Rapor Pendidikan, yang baru dihitung semenjak tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks Literasi dan Numerasi SD sederajat 89,11 dan 71,56, tahun 2023 89,11 dan 71,56, serta tahun 2024 89.34 dan 78.57;
- P. Indeks Literasi dan Numerasi SMP sederajat pada tahun 2022 adalah 79,3 % dan 56,78 %, tahun 2023 adalah sebesar 71,56 % dan 56,78 % dan tahun 2024 sebesar 91.09 % dan 86.45 %;
- Q. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar mulai tahun 2020 s.d. 2024 di Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahun 2020 sebesar 18,94 %, tahun 2021 menurun menjadi 18,49 % atau sebesar 0,45 point dan pada tahun 2022 tetap pada 18,49 % dan pada tahun 2023 turun menjadi 5,73 % turun sebesar 6,59 point;
- R. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 11,62, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 12,32 dan 2023 turun menjadi 8,69.

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
I	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	103,33642	95,031617	90,4021938	109,144409 ₂	103,289173 ₁	Disdikbud
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	93,164374	100	100	104,553544 ₉	101,404741	Disdikbud
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	83,657351	102,640845 ₁	100	156,772740 ₁	140,509131 ₂	Disdikbud



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	132,11679	100	100	2,757675	55,2264808	Disdikbud
5.	Harapan lama sekolah	Tahun	15,06	15,07	15,07	15,29	15,47	Disdikbud
6	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,62	11,63	11,93	11,94	12	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	NA	NA	99,40*	70,5	62,94	Disdikbud
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	93,79	93,90	99,4	99,05	99,05	Disdikbud
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97,76	97,29	97,3	98,53	98,53	Disdikbud
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	40,57	45	47,53	62,93	42,28	Disdikbud
12	APK SD sederajat	%	106,65	108,25	106,65	106,08	105,5	Disdikbud
13	APK SMP sederajat	%	107,15	102,22	107,15	93,35	109,31	Disdikbud
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	NA	NA	2,39/2,28/2,1	73,62 / 72,14 / 58,13	76,37 / 75,38 / 60,71	Disdikbud
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	NA	NA	2,48/2,4/2,07	71,29 / 69,61 / 57,38	73,15 / 74,71 / 60,82	Disdikbud
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	NA	NA	89,11/71,56	89,11 / 71,56	89,34 dan 78,57	Disdikbud
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	NA	NA	79,3/56,78	71,56 / 56,78	91,09 dan 86,45	Disdikbud
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	18,94	18,49	18,49*	5,73	5,73*	Disdikbud
19	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	11,62	12,32	12,32*	8,69	8,69*	Disdikbud



b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari pemenuhan Sumber Daya Kesehatan serta Upaya Kesehatan. Sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Dalam mendukung Pembangunan Bidang Kesehatan telah dilaksanakan berbagai Upaya kesehatan serta pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di Kota Padang Panjang. Untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Kesehatan dalam mencapai tujuan terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan pada RPJMD 2020-2024. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kesehatan, 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
II	KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000	2,93	2,84	3,20	3,41	2,78	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,5 %	86,03 %	81,31	91,1	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89%	85,25%	82,92	100,0	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92,68%	90%	82,65	99,45	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	65,29%	63,6%	77,15	92,98	100,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,39 %	72,01%	85,60	91,21	142,42	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	20,1 %	32,8 %	61,32	100,64	118,57	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	52,32%	63,9 %	94,36	96,21	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	49,6%	23,8 %	30,71	35,15	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM	%	100%	81,5 %	100,00	92,13	108,71	Dinas



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	98,3%	100,00	102,50	108,59	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	32,4%	60,32	99,13	116,00	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	87,7%	87,671	98,89	127,53	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi Stunting	%	N	15,6	14,76	16,8	19	Dinas Kesehatan
16	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,82	72,82	73,02	73,23	74,48	Dinas Kesehatan
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,33	0,39	0,44	0,46	0,46	Dinas Kesehatan
18	Persentase Penurunan Kematian Ibu	%	4	4	33,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
19	Persentase Penurunan Kematian Bayi	%	2	2	18,2	155%	-369	Dinas Kesehatan
20	Persentase UHC	%	98,07	101,40	98,9	101,58	100,35	Dinas Kesehatan
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
24	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 100.000	17,76	17,55	17,29	17,06	37,00	Dinas Kesehatan
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0,19	0,22	0,22	0,23	0,22	Dinas Kesehatan
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0,58	0,58	0,56	0,57	0,58	Dinas Kesehatan
29	Indek Keluarga Sehat	indek	0,33	0,39	0,44	0,46	0,46	Dinas Kesehatan

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Indikator Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi. Tiga indikator ini merupakan



indikator yang menggambarkan Sumber Daya Kesehatan dalam ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berorientasi kepada mutu. Berdasarkan data capaian tahun 2020-2025 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu standar Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1 (satu) Tempat Tidur per 1.000 penduduk dan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1,4 per 100.000. Pada tahun 2024 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena penambahan pustu yang sebelumnya 6 unit, pada tahun 2024 menjadi 16 unit yang berada pada setiap kelurahan. Penambahan Pustu ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program Integrasi Layanan Primer di Tatanan Pelayanan Tingkat pertama di Kota Padang Panjang.

2. Di Kota Padang Panjang indikator Usia harapan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pencapaian UHH ini didukung oleh 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi.
3. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan, salah satu program prioritas pemerintah adalah melalui pengelolaan Program tuberkulosis. Hal ini sangat penting karena tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kesakitan, kematian, dan kecacatan jika tidak ditangani dengan baik. Angka kesakitan Capaian ini mengindikasikan sudah terjadi peningkatan kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
4. Prevalensi stunting merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Status Gizi di Masyarakat. Prevalensi stunting merupakan salah satu ukuran dalam menilai status gizi masyarakat di suatu daerah, termasuk di Kota Padang Panjang. Prevalensi stunting mengalami penurunan sampai tahun 2023 (14,09%) . Pada Tahun 2024 (19%). Capaian ini menggambarkan sudah baiknya akses pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang, dimana salah satu strategi yang telah dilakukan adalah penguatan program pembiayaan kesehatan gratis dalam kepesertaan JKN. Pencapaian tersebut belum on track, masih membutuhkan berbagai upaya percepatan untuk terus menurunkan prevalensi stunting.
5. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan



yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). IKS Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 0,33 indeks dan pada tahun 2024 yaitu 0,46 indeks, meskipun demikian apabila dilihat dari kategori IKS maka IKS Kota Pada Padang Panjang masih kecil dari 5,00, sehingga secara kategori masih berada pada indeks keluarga tidak sehat. Sehingga masih membutuhkan Upaya intensif dalam peningkatan indeks keluarga sehat. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi capaian IKS tersebut yaitu; masih rendahnya cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya setiap bulan, hal ini didukung dengan data rendahnya kunjungan balita ke Posyandu dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata kunjungan 62%. Capaian ini masih rendah dibanding standar yang telah ditetapkan yaitu 80%. Selain itu faktor anggota keluarga yang tidak merokok masih rendah. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Implementasi dari Peraturan Daerah tentang Tertib Rokok dinilai masih rendah Tingkat pemahaman masyarakat sehingga masih berperilaku mengkonsumsi rokok. Kedua indikator ini sangat penting menjadi perhatian bersama agar mampu menaikkan IKS di Kota Padang Panjang sebagai cerminan yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat secara komprehensif, termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan keluarga. IKS membantu menilai sejauh mana keluarga memiliki lingkungan dan akses hidup sehat yang memadai, serta digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan bagian dari Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada beberapa indikator kunci, yang diukur berdasarkan indikator-indikator utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan RPJMD, dan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi selama lima tahun terakhir terjaga stabil di angka 58,36% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan mempertahankan layanan irigasi di wilayahnya telah berjalan secara konsisten, meskipun belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan juga mengalami



peningkatan yang signifikan, dari 81,57% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum yang layak bagi masyarakat, sesuai dengan target pembangunan infrastruktur dasar yang diamanatkan dalam RPJMD.

Pada indikator persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, terjadi peningkatan dari 87,47% pada tahun 2020 menjadi 96,1% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Beberapa indikator lain seperti rasio kepatuhan IMB, tingkat kemantapan jalan, rasio tenaga operator bersertifikat, serta indeks kepuasan layanan (IKL kePUan) juga menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun beberapa indikator masih memerlukan perhatian lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tingkat kemantapan jalan meningkat dari 89,77% pada tahun 2020 menjadi 90,34% pada tahun 2024, sedangkan IKL KepuSan mencapai 96,71% pada tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode RPJMD menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik pada sebagian besar indikator utama, khususnya dalam perluasan akses air minum dan sanitasi. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan intervensi dan inovasi kebijakan agar target pembangunan infrastruktur dasar dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus terus dilanjutkan agar dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, hasil capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode RPJMD ini menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan ke depan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	%	58,36	58,36	58,36	58,36	58,36	Dinas PUPR



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	dilayani oleh jaringan irigasi							
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	81,57	84,89	86,00	86,4	100	Dinas PUPR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	86,47	87,87	87,21	89,55	99,1	Dinas PUPR
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio	44	45,63	45,81	46,41	46,8	Dinas PUPR
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	89,77	90,97	90,92	92,28	89,34	Dinas PUPR
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	54,98	60,75	60,75	61	61	Dinas PUPR
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	100,00	98,95	100	Dinas PUPR
8	IKLI KePUan	Indeks	1,15	22,71	0,03	96,31	96,71	Dinas PUPR
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	n/a	n/a	82	82,5	83	Dinas PUPR
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	68,69%	72,49%	72,76%	86,02%	78,96	Dinas PUPR
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	n/a	n/a	3	3	3	Dinas PUPR
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas PUPR
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	Indikator diperiode ini : % Trotoar ramah disabilitas				100	Dinas PUPR
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	54,98	60,75	60,75	61	61	Dinas PUPR
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	96,66	96,78	97,88	98,94	93,19	Dinas PUPR
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	86,47	87,87	87,21	89,55	99,10	Dinas PUPR
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	81,35	74,38	77,91	79,19	81,31	Dinas PUPR
18	Luas kawasan kumuh	%	10,28	5,35	18008	na	2,14	Dinas PUPR

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada umumnya cenderung meningkat. Capaian IKK Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani ke angka 95,52 %, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah



Tidak Layak Huni) ke angka 7,75 % , Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) ke angka 79,31%, Persentase pemukiman layak huni ke angka 99,48 % di tahun 2024 semua capaian tersebut berasal dari 2 (dua) Anggaran APBN dan APBD berupa :

1. Adanya 2 (dua) program yang bersumber dari APBD berupa program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Dengan pelaksanaan 2 (dua) Program kegiatan tersebut maka capaian indikator kinerja dapat tercapai sesuai target.
2. Adanya 2 (dua) Kegiatan APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga oleh Kementerian PUPR pada tahun 2020-2023

Sedangkan Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani yang telah mencapai 100% dikarenakan adanya program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
IV	PERUMAHAN RAKYAT							
1	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	5,5	56,69	73,98	81,74	95,52	Dinas Perkim LH
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,25	3,16	3,37	2,92	7,75	Dinas Perkim LH
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	83,61	83,61	84,51	75	79,31	Dinas Perkim LH
4	IKLI Perkim	Indeks	77	96,9	96,80	98,06	94,56	Dinas Perkim LH
5	Persentase pemukiman layak huni	%	89,14	95,02	97,01	97,90	99,48	Dinas Perkim LH
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100%	100%	100	100%	100	Dinas Perkim LH



e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan diatas yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimana berdasarkan sasaran strategis RPD tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan Perangkat Daerah yakni : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan sasaran : 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran.

Indikator Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh pengaduan atau pelanggaran yang masuk dapat ditangani atau ditanggulangi 100% dari jumlah pelanggaran atau gangguan Trantibum yang terjadi. Hal ini menunjukkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menanggulangi berbagai gangguan trantibum yang terjadi di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan patroli dan pengawasan, dan tokoh masyarakat membantu dalam pengumpulan informasi, penanganan kasus, serta sosialisasi peraturan daerah terkait trantibum serta penggunaan teknologi dalam penanganan kasus trantibum.

Indikator Kinerja Persentase Penegakan Perda telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 semuanya terlayani. Hal ini dapat tercapai dengan upaya :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dan
- e. Pembentukan Tim SK4 yang melibatkan instansi terkait Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri

Indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi



rawan bencana telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan WMK penanganan kebakaran telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat Kota Padang Panjang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dari indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang ditargetkan 10 menit tercapai rata-rata 5,8 menit dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan :

- Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Kota dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah dan instansi instansi pemerintah dan swasta yang ada dalam Kota Padang Panjang;
- Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- Investigasi kejadian kebakaran, dan
- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sementara tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Begitu juga dengan persentase Penegakan PERDA telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100. Capaian urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
Dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
2	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
6	Waktu tanggap (response time)	Menit	10 menit	10 menit	2 menit	3 menit	4 menit	Satpol PP dan Damkar

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan dasar bidang sosial antara lain: rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis baik di dalam maupun di luar panti. Beberapa capaian yang menjadi indikator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
VI	SOSIAL							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	22,74	37,54	92,51	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Angka PPKS	%	6,48	19,61	5,43	4,70	3,69	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	87	92	90	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	57,16	65,54	69,82	89,12	97	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Persentasi sumber	%	70,43	74,15	79,17	100	100	Dinas



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif							Sosial, P2KB P3A

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Terdapat penurunan angka PPKS dari 4,70 pada tahun 2023 menjadi 3,69 pada tahun 2024 , penurunan yang paling signifikan sebesar 21,49 %. Penurunan angka PPKS tersebut merupakan hasil dari upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan bantuan Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat Kota Padang Panjang agar memperoleh hidup layak yang memungkinkan menjalankan fungsi sosial.

PPKS yang tertangani sebanyak 97% adalah upaya mendapatkan bantuan bagi PPKS Padang Panjang dari APBN (bantuan PKH, Program Sembako, ATENSI) maupun memberikan bantuan sumber APBD (Respon Kasus, BTT Erupsi, Alat Bantu bagi Disabilitas, Bantuan Sandang dan Permakanan bagi Lansia dan Disabilitas) dan upaya bimbingan dan pemberdayaan dari pendamping sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sudah maksimal tiap tahunnya yaitu 100%. Untuk Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) mengalami fluktuatif tiap tahunnya, sedangkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja berkisar diatas 9% pertahunnya. Pada Tahun 2024, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,75%. Menurut data dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah, mengalami persentase yang naik turun tiap tahunnya dimana untuk Tahun 2024 mencapai 47,6%. Persentase Tingkat Pengangguran diambil rata-ratanya selama lima tahun ini (Tahun 2020-2024) adalah sebesar 5,49%. Terakhir dari Indikator Kinerja bidang tenaga kerja adalah Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja yang mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan 66,33% pencapaian pada Tahun 2024 dan untuk Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin pada Tahun 2024 sebesar



1,27%. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
VII	TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	DPMPTSP
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	17.57	28.57	32.72	21.05	52.48	DPMPTSP
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	9.93	10.44	11.03	10,06	10,85	DPMPTSP
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	NA	NA	58.42	0,69	0,75	DPMPTSP
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	17.57	28.57	33.09	78,2	47,6	DPMPTSP
6	Tingkat Pengangguran	%	7,22	4,9	4,84	5,49	4,94	DPMPTSP
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	NA	65,94	64,02	66,05	66,33	DPMPTSP
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	NA	NA	NA	26,1	1,27	DPMPTSP

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode 2020 hingga 2024, Dinas Sosial, P2KB, dan P3A mencatat sejumlah capaian penting terkait indikator kinerja utama yang mendukung pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi politik perempuan.

- a. Pengarusutamaan Gender dalam APBD (ARG) :Persentase Alokasi Responsif Gender (ARG) dalam belanja langsung APBD menunjukkan fluktuasi signifikan. Setelah menurun tajam pada 2021 (0,18%), capaian meningkat drastis menjadi 34,73% pada 2023, meskipun menurun kembali di 2024 (4,83%). Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi



dalam perencanaan anggaran yang berpihak pada isu gender.

- b. Penanganan Anak Korban Kekerasan : Persentase anak korban kekerasan yang tertangani oleh instansi terkait mengalami peningkatan drastis sejak 2022, dengan capaian 100% yang berhasil dipertahankan hingga 2024. Ini mencerminkan kinerja optimal dalam respons terhadap kekerasan terhadap anak.
- c. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan : Rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 penduduk perempuan mengalami lonjakan luar biasa pada 2022 (26.373), lalu menurun signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, angka 2024 masih menunjukkan peningkatan dibanding tahun awal, menandakan perlunya intervensi berkelanjutan terhadap isu kekerasan berbasis gender.
- d. Indeks Pembangunan Gender (IDG) : Indeks ini menunjukkan tren positif secara umum, meningkat dari 6,87 (2020) menjadi 67,58 (2024). Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender, meskipun nilai IDG tahun 2024 tidak dilaporkan secara lengkap.
- e. Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) : Predikat KLA mengalami peningkatan, dari Pratama pada 2020 menjadi Utama pada 2023. Ini mencerminkan komitmen yang terus meningkat dalam menciptakan lingkungan ramah anak.
- f. Partisipasi Politik Perempuan di DPRD : Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tetap stabil sebesar 20% selama lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut agar representasi perempuan meningkat di lembaga legislatif daerah. Capaian IKK Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,23	4,14	8,75	34,73	15,38	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,032	0,035	100	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,019	0,015	26373	0,03	31,54	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	IDG	Indeks	65,24	66,62	67,82	67,58	75,62	Dinas



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
								Sosial, P2KB P3A
5	Predikat KLA	Predikat	pratama	Madya	Nindya	utama	Tidak Ada penilaian	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20	20	20	20	Dinas Sosial, P2KB P3A

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indikator Kinerja kunci urusan pangan ada empat yaitu : 1) **Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)** meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Tahun 2024 sebesar 108,504 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 14,018% yang disebabkan oleh adanya penambahan cadangan beras sebesar 12.778,79 kg yang sumber dana dari Dana Insentif Fiscal (DIF) pada APBD Perubahan Tahun 2024. 2) **LPE Sektor Pertanian**; 3) **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**. Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan karena belum berimbangnya pola konsumsi masyarakat; dan 4) **Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk**. Ketersediaan energi yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 2.400 kkal/ kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 63 gram/kapita/hari. Pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein Kota Padang Panjang sudah diatas angka yang dianjurkan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Rincian capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pangan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
IX	PANGAN							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	N/A	N/A	13.043,00	14,018	108,504	Dinpaper
2	LPE Sektor Pertanian	%	1,29	4,87	5,43	1,87	0,15	Dinpaper
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	85,60	85,70	87,30	87,4	86,18	Dinpaper
4	Ketersediaan pangan	Kkal/kapi	2855,36	2486,84	2820,34	2844,14	2844,17	Dinpaper



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	untuk dikonsumsi penduduk	ta/hari						

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pertanahan dalam dokumen perencanaan daerah merujuk pada pengelolaan, pengaturan, dan penataan sumber daya agraria dan tata ruang yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum atas hak atas tanah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut capaian dari urusan bidang pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pertanahan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
X	PERTANAHAN							
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	42	72	80	86,8	94,8	BPKD

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang pertanahan selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase sertifikat aset tanah dan bangunan milik pemerintah kota tercatat sebesar 42%. Angka ini meningkat tajam menjadi 72% pada tahun 2021, lalu terus bertambah menjadi 80% di tahun 2022. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 86,8%, dan akhirnya mencapai 94,8% pada tahun 2024. Peningkatan capaian ini mencerminkan upaya yang konsisten dan efektif dari pemerintah daerah dalam mensertifikatkan aset tanah dan bangunan, sehingga mendukung kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan aset daerah

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dari Tahun 2020 s/d 2024 pada umumnya cenderung meningkat, namun terdapat beberapa indikator yang cenderung fluktuatif.



Capaian IKK Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota dan indikator kualitas air. Perhitungan IKLH merupakan formulasi dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari data tahun 2020 hingga tahun 2024 angka capaian IKLH berkisar antara 61,16 sampai 68,44 sesuai dengan kondisi kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan setiap tahunnya. Dari ketiga komponen perhitungan IKLH, Indeks Kualitas Air merupakan point penting yang harus menjadi perhatian karena masih berada pada angka tergolong rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas air sungai adalah karena secara geografis seluruh ruas sungai yang melewati Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai, dimana hulu sungai berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai yang berada pada batas daerah tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai, sehingga menyebabkan tingginya angka parameter e-coli hampir disemua sungai di Kota Padang Panjang. Serta dengan adanya bencana erupsi gunung Merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 juga mempengaruhi kualitas air sungai.
- b. Capaian indikator pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang berdasarkan data dari dokumen Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih tergolong tinggi dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 99,19%. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah berupa pengelolaan dan pengangkutan sampah ke TPA Sungai Andok menjadi capaian tertinggi pada indikator ini, sedangkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan masyarakat mulai dari sumbernya masih rendah. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat kondisi TPA Sungai Andok sudah dalam kondisi penuh sehingga pemerintah kota harus mencari alternatif lain untuk pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang kedepannya.
- c. Capaian indikator Persentase luas RTH Publik masih tergolong rendah karena masih jauh dari standar ideal Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana luas RTH adalah 10% dari luas wilayah. Pada tahun 2023 terjadi penurunan luas RTH dari 4,23% menjadi 4,18% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 4,19%. Hal ini disebabkan karena beberapa titik lokasi taman dialih fungsikan ke penggunaan lain



seperti akses masuk ke ruko dan rumah penduduk.

Capaian indikator ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota cenderung fluktuatif dan tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum sepenuhnya menaati pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen izin lingkungan yang mereka miliki. Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan maka penanggung jawab usaha juga diberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2024 dari 29 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, terdapat 16 usaha/ kegiatan yang telah taat sesuai dengan dokumen izin lingkungan yang dimiliki. Beberapa indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Lingkungan Hidup,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XI	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	67,93	61,16	66,6	68,44	62,62	Dinas Perkim LH
2	Indeks kualitas air	Indeks	43,68	31,86	46,07	47,21	34,65	Dinas Perkim LH
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	65,26	56,18	56,18	62,04	61,7	Dinas Perkim LH
4	Indeks kualitas udara	Indeks	91,88	91,07	91,29	91,60	89,08	Dinas Perkim LH
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99,37	96,99	97,89	82,20	99,19	Dinas Perkim LH
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	31,4	52,4	54,84	30,77	55,17	Dinas Perkim LH
7	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	73	77	78		85	Dinas Perkim LH
8	Persentase luas RTH Publik	%	4,23	4,22	4,23	4,18	4,19	Dinas Perkim LH
9	Persentase pengelolaan sampah	%	99,37	96,99	97,89	82,2	99,19	Dinas Perkim LH
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	31,4	52,4	62,68	55,6	55,17	Dinas Perkim LH



f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perekaman KTP-el: Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan capaian perekaman yang sangat tinggi, mendekati 100%. Ini mengindikasikan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang optimal dan strategi jemput bola dan sosialisasi yang efektif. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan yang signifikan. Tahun 2022 turun ke 97,45% dan pada tahun 2023 lebih rendah lagi menjadi 96,82%. Penurunan ini disebabkan oleh faktor teknis, yaitu ketersediaan peralatan rekam yang terbatas dan sering terjadinya gangguan jaringan SIAK serta adanya peralihan sistem pengolahan data dari diolah sendiri (oleh Dukcapil Kab/Kota) menjadi diolah Ditjen Dukcapil (Kab/Kota hanya menerima jadi). Di tahun 2024, mulai pulih kembali sehingga perekaman KTP-el naik signifikan ke 99,63%. Hal ini disebabkan adanya upaya perbaikan, evaluasi, dan percepatan layanan di tingkat Disdukcapil mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik (PILPRES, PILKADA dan PILEG) di mana validitas data KTP-el sangat dibutuhkan. Intensifikasi layanan perekaman, termasuk layanan mobile dan layanan khusus untuk pemula dimaksimalkan.

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan identitas hukum anak sejak dini. Hal ini tercermin dari tren capaian positif selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, persentase anak usia 0 hingga kurang dari 17 tahun yang telah memiliki KIA mencapai 82,41%. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 83,42% pada tahun 2021. Capaian ini kemudian melonjak signifikan pada tahun 2022 menjadi 98,24%, sebuah lompatan besar yang menunjukkan efektivitas strategi layanan jemput bola, kerja sama lintas sektor, serta dukungan dari lembaga pendidikan dan orang tua. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing 97,35% dan 96,99%, angka ini tetap tergolong sangat tinggi dan konsisten berada di atas 95%. Penurunan kecil tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor teknis maupun dinamika data target, seperti masuknya anak usia baru atau perpindahan penduduk.

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA: Pemerintah Kota Padang Panjang senantiasa berkomitmen dalam menjamin pemenuhan hak identitas hukum bagi setiap anak, salah satunya melalui kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang sangat penting karena menjadi dasar pengurusan dokumen lainnya, serta pengakuan hukum atas status sipil seorang anak.



Dalam lima tahun terakhir, capaian kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2020, persentase anak yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 97,86%, meningkat tajam menjadi 99,86% di tahun 2021, dan mencapai 99,91% pada 2022, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi sedikit penurunan capaian masing-masing menjadi 91,94% dan 91,61%. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dinamika data penduduk usia anak akibat kelahiran baru yang belum tercatat secara langsung,
- Mobilitas penduduk atau perpindahan keluar-masuk wilayah,
- Keterlambatan pelaporan kelahiran dari masyarakat.

Meski demikian, capaian di atas 90% tetap menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang masih tergolong sangat baik secara nasional. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan untuk memastikan setiap anak yang lahir di Kota Padang Panjang dapat segera memiliki akta kelahiran secara gratis, cepat, dan mudah. Upaya-upaya strategis seperti integrasi pelayanan akta kelahiran dengan fasilitas kesehatan, layanan online, serta kerja sama dengan sekolah-sekolah terus diperkuat untuk mendorong peningkatan kembali capaian di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,93	99,97	97,45	96,82	99,62	Disdukcapil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	82,41	83,42	98,24	97,35	96,99	Disdukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,86	99,86	99,91	91,94	91,61	Disdukcapil



g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat peningkatan angka TFR dari 2,27 menjadi 2,43 yang disebabkan beberapa faktor antara lain pendidikan yang rendah, ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi yang kurang efektif dan juga terdapat penurunan angka mCPR dari angka 71 % menurun menjadi 63,38. Penurunan yang menyatakan bahwa adanya penurunan keberhasilan program KB yang disebabkan belum tingginya kesadaran PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi modern yang bisa dilihat tingginya angka unmet need. Namun demikian terdapat peningkatan dari angka Persentase PUS yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK dari 60,15 menjadi 74%, Peningkatan Rata-rata jumlah anak dalam keluarga dari 2,76 menjadi 1,52, Peningkatan Persentase Ratio Akseptor KB dan Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari 52,65 menjadi 66,46 yang menunjukkan kualitas keluarga sedang membaik dengan indikator-indikator seperti ketentraman, kemandirian, kebahagiaan keluarga meningkat karena meningkatnya kinerja yang merupakan hasil dari meningkatnya kualitas layanan publik, upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dan bantuan Pemerintah Pusat.

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,27	2,51	3 (2.54)	2,51	2,43	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71	67,57	56.60	66,8	63,38	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,58	27,95	27952	13,45	20,51	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	52,65	54	54.13	65,82	66,46	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	60,15	62,44	66.73	70,12	74	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,76	2,14	2.4	2,33	1,52	Dinas Sosial, P2KB P3A



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
7	Ratio akseptor KB	%	50,12	50,22	56,6	58,27	63,38	Dinas Sosial, P2KB P3A

h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dari tahun sebelumnya mengalami gelombang naik turun pada masing-masing indikator :

1. Indeks Kualitas Infrastruktur Perhubungan

Realisasi capaian IKLI Perhubungan tahun 2024 dengan nilai 95,22 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 97,50 hal ini disebabkan ada beberapa unsur penilaian masyarakat yang bernilai rendah, diantaranya :

- Terdapat beberapa titik traffict light tidak berfungsi di area Ekor Lubuk, dan SMP 1 Padang Panjang dikarenakan persimpangan ini memiliki jarak yang pendek dan berpotensi terjadi kemacetan sehingga traffict light tidak difungsikan atau dihapus.
- Kurangnya personil pengamanan Lalu Lintas sehingga belum optimalnya pengawasan lalu lintas.
- Lahan parkir belum mencukupi, kendaraan parkir sembarangan/ditepi jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

2. Rasio Konektivitas Kota

Realisasi capaian rasio konektivitas kota Padang Panjang tahun 2024 dengan nilai 77,77 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 61,54, hal ini didukung oleh trayek angkutan kota terlayani pada 5 trayek serta beroperasinya bus sekolah di 2 (dua) kecamatan pada trayek yang tidak terlayani.

3. Kinerja Lalu Lintas

Realisasi capaian kinerja lalu lintas Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan nilai 0,39 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 0,45, hal ini dipengaruhi oleh faktor volume kendaraan yang cenderung berkurang dikarenakan belum pulih sepenuhnya jalan pasca longsor di Jembatan Tanjung dan jalan Lembah Anai. Capaian untuk Urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perhubungan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XIV	PERHUBUNGAN							
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0.339	0.339	0.339	0,45	0,39	Dinas Perhubungan
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38.84	38.84	38.84	84,62	61,54	Dinas Perhubungan
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	71,10	97,46	96.62	97,50	95,22	Dinas Perhubungan

i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja kunci antara Tahun 2020-2024. Untuk Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sudah 100% dari Tahun 2020. Sedangkan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 78,6% pada Tahun 2024. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah 100% pada Tahun 2023 dan berkurang menjadi 98,8% pada Tahun 2024. Kota Padang Panjang telah meningkatkan Indeks domain layanan SPBE tiap tahunnya dimana Tahun 2024 mencapai 3,82. Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga telah meningkat menjadi 3,16 pada Tahun 2024. Terakhir adalah Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) sebesar 88,35% dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) sebesar 100% pada Tahun 2024. Gambaran indikator Kinerja Kunci bidang urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XX	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Organisasi	%	100	100	100	100	100	Dinas



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo							Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	54.55	54.55	54.55	54,55	78,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	73.22	52.71	42.00	100	98,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	3.55 (Self Assessment)	2.7	2,2	2,81	3,82	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3.01 (Self Assessment)	2.09	2,81	2,93	3,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	107.22	89.32	88.42	88,35	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika

j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi Koperasi yang diikuti peningkatan koperasi aktif dan sehat dapat menunjukkan bahwa gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan di suatu wilayah terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam pergerakan perekonomian daerah yang mandiri dan berdikari. Capaian persentase koperasi aktif di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, capaian tertinggi ada di tahun 2022 sebesar 77,27% dan capaian terendah ada di tahun



2020 sebesar 60%. Rendahnya koperasi kategori aktif tersebut disebabkan masih ada koperasi yang sudah tidak beroperasi namun sulit dibubarkan karena koperasi bermasalah dan rumitnya masalah pembubaran.

Indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 mengalami trend fluktuatif, dimana capaian terendah di tahun 2020 sebesar 0,74% dan capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 6,38 % dikarenakan adanya program unggulan provinsi dalam menciptakan wirausaha muda, sehingga minat masyarakat Kota Padang Panjang untuk ikut berwirausaha meningkat. Lebih lanjut, persentase KSP/USP koperasi sehat tahun 2020-2024 cenderung mengalami tren kenaikan, tahun 2023 sebesar 7,80%, dan meningkat di tahun 2022 sebesar 10,75% serta di tahun 2023 sebesar 11,95%. Walaupun trendnya mengalami kenaikan, capaian persentase koperasi aktif juga berfluktuatif di tahun 2020-2024, capaian terendah di tahun 2020 sebesar 17 %, sedangkan capaian tertinggi di tahun 2023 sebesar 75, 4 % dan capaian koperasi sehat juga masih tergolong rendah namun mengalami trend kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya koperasi di Kota Padang Panjang dalam hal tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan koperasi. Daya saing koperasi masih lemah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Peningkatan jumlah UMKM akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mampu mendorong pergerakan roda perekonomian daerah. Pameran promosi produk merupakan alat pemasaran yang sangat berharga bagi UMKM. Dengan perencanaan yang baik dan strategi yang efektif, UMKM dapat memanfaatkan pameran untuk meningkatkan visibilitas merek, memperluas jaringan bisnis, dan mendapatkan umpan balik yang berharga dari pasar. Meskipun terdapat tantangan, manfaat jangka panjang dari pameran dapat signifikan bagi pertumbuhan dan kesuksesan UMKM. Capaian persentase peningkatan omset usaha juga mengalami trend fluktuasi, dimana capaian tertinggi di Tahun 2022 sebesar 0.5 % dan capaian terendah di tahun 2024 0.1%.

Persentase UMKM yang telah difasilitasi bantuan usaha di Kota Padang Panjang tahun 2020- 2024 tergolong rendah, angka tertinggi ada di tahun 2020 sebesar 3,3%. Dari data tersebut Belum banyak UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha di Kota Padang Panjang dikarenakan terbatasnya APBD Kota Padang Panjang. Secara rinci capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG							



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XVI	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	60	66.66	77.27	74	75.55	Dinas Koperindag
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0.74	0.9	1.23	1	6.38	Dinas Koperindag
3	Persentase koperasi aktif	%	17.25	50	74.58	75.4	73.77	Dinas Koperindag
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	indeks	0.1	0.15	0.18	0.2	0.36	Dinas Koperindag
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada	indeks	0.44	0.48	0.75	0.44	0.24	Dinas Koperindag
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0.12	0.25	0.5142	0.34	0.1	Dinas Koperindag
7	Persentase UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha	%	3.33	2.1	0.36	0.2	0.1	Dinas Koperindag
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	7	7.3	8.2	7	9	Dinas Koperindag
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0.1	0.20	0.03	0.10	0.15	Dinas Koperindag

k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Untuk tabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024, dapat digambarkan pada Tabel dibawah ini. Indikator tersebut terdiri dari 4 (empat) item yaitu Persentase Kenaikan Investasi yang sangat berfluktuatif tiap tahunnya dimana data Tahun 2024 terjadi kenaikan investasi sebesar 6%. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) terjadi penurunan dimana Tahun 2023 sebanyak 52 investor sedangkan pada Tahun 2024 menjadi 26 investor. Untuk Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengalami kenaikan tiap tahunn dengan data Tahun 2024 sebesar 90. Indikator terakhir adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana menunjukkan kepuasan dari masyarakat dengan tingginya angka IKM yang diatas 96%.

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Modal,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XVII	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	51	44	6	9	6	DPMPPTSP
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	10	24	20	52	26	DPMPPTSP
3	Nilai Penyelenggaraan	nilai	NA	3,87	85	89,26	90	DPMPPTSP



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pelayanan Publik							
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	88	96,86	96,18	98,06	97,9	DPMPTSP

I. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga, urusan pemuda dan olahraga merupakan urusan pemerintah non wajib non dasar, penyelenggaraan urusan ini dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu pertama Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dalam kegiatan ekonomi mandiri sangat penting dalam mewujudkan wirausaha muda di Kota Padang Panjang, capaian partisipasi dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan partisipasi dengan angka tahun 2020 senilai 0.18 % dan tahun 2024 menjadi nilai 0.89 %, hal ini dikarenakan adanya pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi mandiri oleh OPD teknis, Bank BUMN dan perusahaan swasta.

Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2020-2024 akan menjadikan Kota Padang Panjang Kota Layak Pemuda sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Kota Layak Pemuda adalah kota yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan yang terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi pemuda dalam pembangunan kota. Dan Kota Padang Panjang Kota Layak Pemuda menjadi salah satu indikator pemerintah daerah dalam urusan kepemudaan.

Indikator kedua Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sangat penting karena memiliki dampak positif yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif tersebut yaitu meningkatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengembangan karakter dan moral, peluang jejaring dan hubungan sosial, pemberdayaan dan kemandirian, serta kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang pada tahun 2021 s/d 2024 masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,56%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, dan kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

Indikator ketiga rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang dari tahun 2022 - 2024 mengalami kenaikan dengan angka pada tahun 2024 sebesar 0,5 %, hal ini berarti Rasio daya saing keolahragaan Kota Padang



Panjang ada karena masyarakat yang melakukan olahraga memiliki aspek kompetitif yang mendorong peningkatan kemampuan, mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, dan memberikan pengalaman yang berharga. Kompetisi dalam olahraga juga memiliki manfaat kesehatan fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga berat badan yang sehat. Sehingga Indikator kinerja Pemerintah terkait jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi dan Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi dari tahun 2020-2024 meningkat dengan Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi Tahun 2024 sebanyak 9 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi, begitu juga Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari Tahun 2020-2024, dimana Tahun 2024 sebanyak 6 prestasi provinsi dan 1 prestasi nasional, ini menandakan bahwa pemerintah kota Padang Panjang memberikan pembinaan kepada para pemuda untuk berprestasi dan mengembangkan diri dalam pembangunan kota dan bangsa. Secara rinci capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Kepemudaan Dan Olahraga, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XVIII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.1898	0.2464	0.4577	0.6766	0.8929	Dinas Porapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.5593	0.87	0.784	0.562	0.56	Dinas Porapar
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	Na	Na	0,1	0,2	0,5	Dinas Porapar
4	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	8 Prestasi provinsi	10 Prestasi provinsi	10 Prestasi provinsi	8 prestasi nasional 62 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	Dinas Porapar
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat	Prestasi	4 prestasi	5 prestasi	6 prestasi	6 prestasi provinsi,	6 prestasi provinsi,	Dinas Porapar



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	nasional/provinsi		provinsi	provinsi	Provinsi	1 prestasi nasional	1 prestasi nasional	
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama	Dinas Porapar

m. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024 pada urusan pemerintahan bidang persandian dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2023 dan terjadi penurunan pada Tahun 2024 yaitu menjadi 34% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.92
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Persandian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XX	PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	NA	56.59 (self assesment)	66,5 (self assesment)	*34 (BSSN)	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2020, data mengenai tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota Padang Panjang belum tersedia. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, penilaian dilakukan melalui assessment mandiri oleh pemerintah daerah. Hasil assessment menunjukkan tren positif: pada tahun 2022 tercatat nilai 56,59, yang kemudian meningkat menjadi 66,5 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, penilaian dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga otoritatif di bidang keamanan siber nasional. Hasil assessment BSSN menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dengan nilai 34. Perbedaan metode dan standar pengukuran yang lebih ketat dari BSSN dibandingkan assessment internal sebelumnya menjadi salah satu faktor penurunan ini

n. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan kebudayaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, urusan kebudayaan termasuk dalam sektor penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Pencapaian

IKK Kebudayaan dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini.

1. Terlestrinya Cagar Budaya pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100%, turun menjadi 78,57% pada tahun 2022 dan 2023, tetapi kembali naik pada tahun 2024 menjadi 100%;
2. Persentase objek pemajuan kebudayaan mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 73%, tetapi Kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 67,24%;
3. Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan dapat di ukur mulai tahun 2022 yaitu 78,57%, naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 100 % dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar 62,5%;
4. Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 30% meningkat pada tahun 2024 menjadi 54%;
5. Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 20% dan naik pada tahun 2024 menjadi 54%.

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kebudayaan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXI	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	78,5714286	78,5714286	100	Disdikbud
2	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	34	47	65,45	73	67,24	Disdikbud
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	-	-	78,57	100	62,5	Disdikbud
4	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	-	-	30	30*	54	Disdikbud
5	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	-	-	20	20*	60	Disdikbud
6	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	-	-	40	40*	49	Disdikbud

o. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Untuk urusan Pemerintahan bidang Statistik, Indikator Kinerja Kuncinya (IKK) terdiri dari 3 (tiga) item. Yang pertama adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dimana tiap tahunnya sudah menggunakannya sehingga menjadi 100%. Yang kedua adalah Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dimana sudah 100%. Dan yang terakhir adalah Indeks Pembangunan



Statistik, pada Tahun 2024 sebesar 1,94. IKK bidang Statistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Statistik,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XIX	STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	NA	NA	2,61	2,6`	1,94	Dinas Komunikasi dan Informatika

p. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kemajuan teknologi multimedia telah mempermudah akses terhadap data, berita, dan informasi, sehingga menuntut perpustakaan daerah untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemanfaatannya. Untuk tetap relevan, perpustakaan harus bertransformasi menjadi ruang interaktif yang mendukung penciptaan pengetahuan dan inovasi. Oleh karena itu, sistem operasional perpustakaan perlu beralih dari pendekatan manual ke sistem digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kota Padang Panjang, pengembangan perpustakaan mengadopsi prinsip "Literasi Digital" untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat melalui buku fisik dan sumber daya digital. Penerapan teknologi ini memungkinkan perpustakaan untuk secara bertahap menyamai standar perpustakaan modern yang lebih maju, sekaligus mengoptimalkan peranannya dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Kinerja bidang perpustakaan terlihat melalui dua indikator kinerja kunci, yaitu Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Sebagaimana yang terlihat dari Tabel di bawah ini, dari tahun 2022 hingga 2024, nilai indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang semakin baik, yaitu dari 58,07 pada tahun 2022 menjadi 67,81 pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 72,47 pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar sekitar 24,8% selama periode tersebut.



Peningkatan yang konsisten pada tingkat kegemaran membaca menunjukkan keberhasilan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mempromosikan berbagai inisiatif budaya membaca terhadap masyarakat. Inisiatif tersebut di antaranya adalah program kampanye membaca masyarakat, dan peningkatan akses terhadap bahan bacaan.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami peningkatan yang sangat baik pada tahun 2022 menjadi 86,54, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 88,22 pada tahun 2023 dan 96,78 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan sebesar 105% dari tahun 2021 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan adanya intensifikasi inisiatif literasi yang efektif, seperti lokakarya literasi masyarakat, program literasi digital, atau intervensi berbasis sekolah. Tren peningkatan yang berlanjut menunjukkan komitmen yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi, menempatkan wilayah ini sebagai pemimpin dalam pembangunan literasi masyarakat.

Bidang perpustakaan menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi dalam mempromosikan kegemaran membaca dan pembangunan literasi. Tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022 menyoroti efektivitas intervensi yang telah ditargetkan sebelumnya. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur perpustakaan, keterlibatan masyarakat, dan program literasi akan sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini. Capaian indikator terkait perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.95
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perpustakaan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXII	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n/a	n/a	58,07	67,81	72,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n/a	47,2	86,54	88,22	96,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

q. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja bidang kearsipan terlihat melalui empat indikator kinerja kunci berikut ini, yaitu: Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas dan Alat Bukti, Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik, Nilai LAKE, dan Rata-rata Nilai LAKI OPD.

Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas dan Alat Bukti adalah sebesar dari 50,07% pada tahun 2021, meningkat menjadi 60,85% pada



tahun 2022, melonjak menjadi 82,2% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 81,72% pada tahun 2024. Peningkatan keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sekitar 63,2%.

Peningkatan signifikan dalam ketersediaan arsip mencerminkan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan arsip tersedia untuk akuntabilitas dan tujuan hukum. Pencapaian yang sangat signifikan pada tahun 2023 menunjukkan periode perbaikan sistem arsip yang intensif melalui digitalisasi atau praktik tata kelola arsip yang lebih baik. Penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan pengelolaan arsip, seperti keterbatasan sumber daya, tetapi tren keseluruhan tetap positif.

Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik meningkat dari 69,03% pada tahun 2021 menjadi 69,33% pada tahun 2022, kemudian melonjak menjadi 83,33% pada tahun 2023, dan tetap pada nilai yang sama pada tahun 2024. Peningkatan keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sekitar 20,7%. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik yang relatif tinggi tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas arsip untuk tujuan nasional dan publik. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencerminkan praktik pengelolaan arsip yang sangat baik, seperti tata kelola penyimpanan yang lebih baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Nilai LAKE meningkat secara konsisten dari 69,78 pada tahun 2021 menjadi 79,89 pada tahun 2022, 83,99 pada tahun 2023, dan 91,51 pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 31,1% selama periode 2021 sampai dengan 2024. Peningkatan berkelanjutan nilai LAKE menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan arsip yang terdiri dari kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional, termasuk organisasi, aksesibilitas, dan pelestarian. Artinya, tata kelola dan pemantauan yang efektif, menjadikan sistem kearsipan sebagai komponen yang andal dalam administrasi daerah.

Rata-rata nilai LAKI OPD meningkat dari 60,18% pada tahun 2021 menjadi 69,07% pada tahun 2022, 73,47% pada tahun 2023, dan 83,03% pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 37,9% selama periode 2021 sampai dengan 2024. Tren peningkatan nilai LAKI menunjukkan perbaikan kinerja kearsipan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini menunjukkan upaya koordinasi dan peningkatan kapasitas yang efektif oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan di berbagai OPD. Artinya ada perbaikan sistemik dalam praktik kearsipan, yang berkontribusi pada tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik. Berikut tabel capaian dari indikator bidang urusan kearsipan :

Tabel 2.96
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kearsipan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXII	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	n/a	50,07	60,85	82,2	81,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	n/a	69,03	69,33	83,33	83,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Nilai LAKE	nilai	n/a	69,78	79,89	83,99	91,51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	n/a	60,18	69,07	73,47	83,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Kelautan dan perikanan memiliki dua indikator kunci yaitu: 1) jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP). Produksi perikanan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya produksi perikanan di Kota Padang Panjang didukung oleh kembali bergeliatnya sektor usaha budidaya perikanan dengan komoditas utama yaitu Ikan Lele, Nila dan Mas. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga jual ikan konsumsi dipasaran dan terjadinya kenaikan konsumsi ikan perkapita pertahun pada tahun 2024 yaitu sebanyak 41,98%, sehingga memicu semangat pembudidayaan ikan di Kota Padang Panjang terutama ikan lele untuk pengembangan budidaya ikan. 2) Peningkatan Produksi Perikanan secara persentase capaian tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan dan tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan tetapi secara kuantitas produksi (ton) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 2.97
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/ Thn	647,95	705,46	735,5	750,028	751,03	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	NA	3,19	5	0,13	0,13	Dinas Pangan dan Pertanian

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi/mengaktifkan sektor produktivitas lainnya. Pariwisata dipandang sebagai industri yang kompleks karena dalam industri pariwisata terdapat industri-industri yang berkaitan seperti kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi lokal, hal ini senada dengan tujuan pembangunan kota Padang Panjang dimana sektor pariwisata diarahkan kepada pengelolaan potensi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan, autentik, dan berdaya saing tinggi. Capaian persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang tahun 2024 masih 27,2 %. begitu juga capaian Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota masih fluktuatif dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 19,72 % menandakan masyarakat belum berperan aktif dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara itu tingkat hunian akomodasi di Kota Padang panjang menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 - 2024, dengan hasil capaian pada tahun 2024 sebesar 34.17 %. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD dan PDRB menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan nilai Tahun 2024 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sebesar 2,89 %, Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD sebesar 2,42 %, begitu juga PAD sektor pariwisata menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan nilai tahun 2024 sebesar Rp 2.283.382.152. hal ini disebabkan karena telah adanya event-event kepariwisataan yang dilaksanakan pada destinasi wisata. Untuk memberikan



rasa aman dan nyaman kepada wisatawan telah dilakukan sertifikasi CHSE (*Cleaning, Healthy, Safety, Environment*) terhadap destinasi wisata dan akomodasi yang ada di Kota Padang Panjang. Dengan adanya sertifikasi CHSE ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berdampak pada peningkatan PAD Kota Padang Panjang dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara rinci capaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pariwisata,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXIII	PARIWISATA							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-41	-99,0	4,560	30,09	27,02	Dinas Porapar
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-78	-12,	5,044	22,19	19,72	Dinas Porapar
3	Tingkat hunian akomodasi	%	14,02	64,11	30,20	33,28	34,17	Dinas Porapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,64	2,75	2,82	2,81	2,89	Dinas Porapar
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,24	1,7	2,42	2,08	2,42	Dinas Porapar
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	-12,04	7,38	10,47	6,52	3,57	Dinas Porapar
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	Na	Na	204,50 0,000	2.110.7 22.322	2.283.3 82.152	Dinas Porapar
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	Na	Na	6	2,33	11,5	Dinas Porapar

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pertanian memiliki delapan indikator kunci yaitu: 1) **Produktivitas pertanian per hektar per tahun** meningkat setiap tahunnya kecuali tahun tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2



ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023 sudah melebihi target; 2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; 3) **Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani** mengalami kenaikan capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dikarenakan Luas Lahan yang ditangani pada sama yaitu seluas 110,3 ha melalui program bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan pelaksanaan inovasi Brigade Perlindungan Tanaman (Brilian); 4) **Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian**, indikator ini baru ditentukan pada RKPD TAHUN 2024-2026 pada tahun 2024; 5) **Produktivitas Padi** meningkat setiap tahunnya kecuali tahun tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2 ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahanan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023 sudah melebihi target; 2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga



kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; **6) Produktivitas Susu Sapi Perah mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya; 7) Persentase penerapan inovasi teknologi, indikator baru yang adanya pada tahun 2024**, indikator ini baru ditentukan pada RKPD tahun 2024-2026 pada tahun 2024; dan **8) Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos** mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 diakibatkan oleh lama pemeliharaan ternak (bansos) yang berbeda.

Tabel 2.99
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pertanian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXV	PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	5,8	6,3	8,04	7,2	7,2	Dinpaper
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	NA	15,17	39,92	16,98	11	Dinpaper
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	NA	52,38	70	75	75	Dinpaper
4	Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	NA	NA	NA	NA	13,8	Dinpaper
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	5,8	6,3	8,04	7,2	7,2	Dinpaper
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter / ekor / hari	9,64	9,63	11,67	11,2	11,8	Dinpaper
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	NA	NA	NA	NA	33,3	Dinpaper
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	10	20,15	20,15	20,15	8,5	Dinpaper

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen. Capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) di Kota Padang Panjang sudah baik, tahun 2023 sebesar 39 dan 2024 sudah mencapai 64%. Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan



rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP. Sarana distribusi salah satunya berupa Alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya). Alat UTTP adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang suatu benda atau bahan yang hasil pengukurannya dapat digunakan sebagai dasar untuk transaksi perdagangan. Agar alat-alat ini dapat dipercaya dan memenuhi standar yang ditetapkan mereka harus melalui proses kalibrasi atau tera ulang dan mendapatkan tanda tera sah. Beberapa alat UTTP yang biasa diterapkan dalam proses tera ulang dan diberi tanda tera sah yaitu timbangan, takal dan meteran, alat ukur listrik, dan sebagainya. Capaian persentase alat UTTP yang di tera ulang dan bertanda tera sah di Kota Padang Panjang selama tahun 2019-2023 cukup fluktuatif, angka tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 83%, dan capaian di tahun 2024 justru menurun menjadi 43%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang/pelaku usaha untuk mengikuti tera/tera ulang. Sementara itu indikator LPE sektor Perdagangan Kota Padang Panjang berfluktuasi dari tahun 2020 sampai 2024, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,28 %, sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan angka senilai 3,98 %, Fluktuasi LPE Sektor Perdagangan disebabkan dengan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menyalurkan barang dan jasa ke konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Sektor perdagangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, bencana yang dapat menurunkan sementara dalam pertumbuhan ekonomi, namun memiliki potensi pemulihan yang kuat setelah pandemi dan bencana berakhir, pada tahun 2024 terjadi bencana alam banjir bandang yang menyebabkan terputusnya jalan lembah anai menuju kota Padang Panjang yang menyebabkan turunnya nilai LPE perdagangan kota Padang Panjang. Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perdagangan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVI	PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	%	29,8	31.4	33,93	39,2	64,2	Dinas Perdagkop UKM



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)							
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	24,9	36,8	73,02	83,3	43,1	Dinas Perdagkop UKM
3	LPE sektor Perdagangan	%	-1,01	3,2	5,28	4,29	3,98	Dinas Perdagkop UKM

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Industri di Kota Padang Panjang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Pertumbuhan Tersedianya Informasi IKM tergolong lambat, tahun 2020 sebesar 0,06%, kemudian meningkat menjadi 0,25% di tahun 2020, dan kembali menguat menjadi 0,26% di tahun 2024. Pertumbuhan IKM di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan nasional. IKM diharapkan mampu mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya. IKM yang tumbuh dengan pesat akan menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), capaian persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri di Kota Padang Panjang tahun 2023 sebesar 6,15% atau masih sangat kecil. SIINAS merupakan sistem yang digunakan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia untuk mendata dan memantau aktivitas industri di seluruh Indonesia. Akun SIINAS wajib dimiliki oleh usaha industri kecil sampai besar. Industri-industri yang memiliki akun SIINAS bertujuan agar mereka mematuhi regulasi dan memastikan bahwa data industri mereka tercatat dengan baik oleh pemerintah. Akun SIINAS juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti insentif, pelatihan, dan bimbingan teknis.

Cakupan bina kelompok penyediaan makan minum termasuk kuliner merupakan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memajukan industri kecil menengah dengan upaya yang dilakukan antara lain: Peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan. Fasilitas pengembangan kemampuan teknologi industri. fasilitas pengembangan standarisasi produk dan pengembangan pasar. Secara rinci capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.101
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perindustrian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVI	PERINDUSTRIAN							
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	Dinas Perdagkop UKM
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0.06	0.25	0.25	0.25	0,26	Dinas Perdagkop UKM
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	Na	Na	55	55	33	Dinas Perdagkop UKM
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	Na	Na	40	40	40	Dinas Perdagkop UKM
5	Persentase pengawasan alat UTP yang bertanda tera sah	%	Na	Na	0	0	5	Dinas Perdagkop UKM
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	Na	Na	0	0	14	Dinas Perdagkop UKM
7	Kenaikan volume perdagangan	%	Na	Na	25	25	30	Dinas Perdagkop UKM
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	Na	Na	25	25	30	Dinas Perdagkop UKM

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah dan DPRD

Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2020 hingga 2024. Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan mencapai angka sempurna, yakni 100% sejak tahun 2022. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2022 juga mencatat indeks yang tinggi. Capaian pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah tetap konsisten sebesar 90% dari tahun 2020 hingga 2024. Demikian pula, kualitas penyelenggaraan sektor ekonomi berhasil mencapai angka maksimum sebesar 100%. Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga stabil pada angka 90% selama lima tahun terakhir.



Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Padang Panjang menunjukkan tren sangat baik, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 97,16, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 96,09 pada 2022 dan 95,26 pada 2023 dan 2024. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) mengalami peningkatan bertahap dari 55,19 pada 2021 menjadi 77,66 pada tahun 2024. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah mencapai puncaknya sebesar 68,25 pada 2023, meskipun nilai tahun 2024 belum dirilis.

Aktivitas keagamaan di masjid berjalan sangat baik, dengan 100% masjid aktif setiap tahunnya. Begitu juga dengan kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan yang juga mencapai angka maksimal 100%. Pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah menunjukkan peningkatan dari 90% (2020–2023) menjadi 95% pada tahun 2024. Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat tajam dari 69,86 (kategori sedang) pada 2021 menjadi 94,46 (kategori tertinggi) pada 2024.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Timur tercatat sebesar 38,78% pada 2024, sementara di Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar 38,36% di tahun yang sama. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk kedua kecamatan menunjukkan hasil sangat baik, masing-masing sebesar 98,10% pada tahun 2022 di Padang Panjang Timur dan 97,75% pada tahun 2024 di Padang Panjang Barat.

Terkait persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan menunjukkan peningkatan dari 4,14% pada 2022 menjadi 68,61% pada 2024. Produksi perda juga mengalami fluktuasi, dengan persentase 8,71% pada 2022, meningkat menjadi 52,84% pada 2023, dan 52,18% pada 2024.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DPRD mencatat angka maksimal sebesar 100% pada tahun 2020. Jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama juga mencapai angka maksimal 100% pada 2020. Pengadaan barang/jasa melalui metode kompetitif tercatat sebesar 100% pada 2020 dan sedikit menurun menjadi 93,49% dan 94,17% pada 2024. Terakhir, penggunaan Produk Dalam Negeri serta produk dari UMKM dan koperasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar 94,17%, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi lokal.

Tabel 2.102 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Sekretariat Daerah dan DPRD, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
XXVI	SEKRETARIAT DAERAH DAN DPRD							
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	NA	NA	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai LPPD	indeks	NA	NA	Tinggi	NA	NA	Sekretariat Daerah
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88.62 (Sangat Baik)	97.16 (Sangat Baik)	96.09 (Sangat Baik)	95.26 (Sangat Baik)	95.26 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
7	Nilai RB	nilai		55,19	59,4	66,54	77,66	Sekretariat Daerah
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	NA	68,25	63,35	63,4	Belum Rilis	Sekretariat Daerah
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	90	90	90	90	95	Sekretariat Daerah
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai		69.86 (Sedang)	89.26 (Tertinggi)	90.72 (Tertinggi)	94,46 (Tertinggi)	Sekretariat Daerah
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	NA	NA	39	NA	38,78	Sekretariat Daerah
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang	nilai	88.97 (Sangat Baik)	97.80 (Sangat Baik)	98.10 (Sangat Baik)	93.3 (Sangat Baik)	94,37 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Timur							
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	NA	NA	39	NA	38,36	Sekretariat Daerah
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	91.75 (Sangat Baik)	97.7 (Sangat Baik)	91.83 (Sangat Baik)	93.9 (Sangat Baik)	97,75 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	NA	NA	4,14	NA	68,61	Sekretariat DPRD
19	Persentase perda yang ditetapkan/dihasilkan	%	NA	NA	52,58	NA	37,28	Sekretariat DPRD
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	NA	NA	8,71	NA	52,18	Sekretariat DPRD
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indeks	100	96,53	79,96	95,83	96,46	Sekretariat DPRD
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100	96,67	92,08	91,67	91,88	Sekretariat Daerah
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	80	52,5	50	93,49	Sekretariat Daerah
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	96,6	86,02	93,75	94,17	Sekretariat Daerah
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	100	96,6	86,02	93,75	94,17	Sekretariat Daerah



5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk unsur perencanaan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana berdasarkan sasaran strategis RPD tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yakni : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKK : Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota), dengan sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan (IKK Indeks Kualitas Perencanaan), 2) Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (IKK : Indeks Inovasi Daerah).

Indeks Kualitas Perencanaan untuk tahun 2024 ditargetkan dengan indeks 70,00 dengan realisasi 72,20 maka capaian kinerja sebesar 103,14%. Indeks Inovasi Daerah untuk tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan dan realisasi indeks "Sangat Inovatif" dengan capaian kinerja 100%. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota untuk tahun 2024 ditargetkan 19,19 dengan realisasi 22,93 maka kinerja sebesar 119,49%. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.103
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perencanaan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVII	PERENCANAAN							
1	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	NA	NA	NA	NA	72,2	Bappeda
2	Indeks Inovasi Daerah	indeks	NA	Sangat Inovatif (64,08)	Sangat Inovatif (62,04)	Sangat Inovatif (63,28)	Sangat Inovatif (81,35)	Bappeda
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	21,31	21,52	22,8	22,88	22,93	Bappeda

b. Keuangan

Secara umum kinerja urusan keuangan relatif sudah cukup baik, walau ada beberapa capaian indikator yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari realisasi capaian kinerja beberapa indikator antara lain :

- Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2020-2024 mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan auditor mengenai



kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian sistem pemerintahan. Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil penilaian penghargaan tertinggi atas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .

- b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 15,92% naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3.90%. Tahun 2024 Rasio PAD sebesar 18,22 % mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 18.41% , tidak tercapai target yang ditetapkan disebabkan bencana tanah longsor akibat lahar dingin erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada tahun 2024 menyebabkan kunjungan tamu yang datang ke Padang Panjang menurun drastis sehingga berdampak langsung terhadap Pajak Restaurant, Hotel dan Pajak Hiburan sehingga penerimaan PAD pada item-item tertentu secara tajam juga mengalami penurunan.
- c. Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah, pada akhir Tahun 2024 hanya memperoleh skor sebesar 63,2. Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah kita masih di bawah target yang ditetapkan hal ini disebabkan Tahun 2024 dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) dimana point yang jadi penilaiannya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk Tujuan Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarannya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD.
- d. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures). Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi belanja untuk urusan pemerintahan umum (misalnya: belanja pegawai, operasional kantor, administrasi umum) dibandingkan dengan total belanja daerah, dengan mengurangi pengeluaran yang sifatnya transfer (seperti dana bagi hasil, bantuan keuangan ke desa, hibah, dsb.).Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 84.53 % sampai tahun 2022 sebesar 89.97%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2024 yaitu 83,98%.
- e. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mengacu pada perbedaan antara anggaran yang direncanakan (pagu belanja dalam APBD) dengan realisasi belanja yang benar-benar



dilaksanakan selama satu periode anggaran. Budget execution tahun 2020 sebesar 8.32% mengalami kenaikan sampai tahun 2022, penurunan terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 2,52% ini menunjukkan realisasi belanja melebihi anggaran sebesar 2.52% dari yang direncanakan di APBD.

- f. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD mengacu pada perbedaan atau selisih antara realisasi PAD yang sebenarnya dengan yang telah dianggarkan dalam APBD .Revenue mobilization juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tahun 2020 sebesar 18.23% dan tahun 2024 mengalami penurunan 13,9%, angka deviasi menunjukkan 13,9% PAD belum tercapai dari target yang telah ditetapkan di APBD.
- g. Manajemen Aset Ini menunjukkan capaian positif, dengan tingkat realisasi yang konsisten dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara lebih efisien dan akuntabel. Kota Padang Panjang dari tahun 2021 sampai 2024 sudah cukup baik dimana Manajemen Aset capaian nya 100%
- h. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya mengukur seberapa besar sisa anggaran yang belum digunakan dibandingkan dengan total pengeluaran pada tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2020 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja sebesar 7.57% sampai tahun 2022 mengalami kenaikan, tahun 2022 sebesar 10.565%, Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8,67%, angka ini menunjukkan sisa anggaran sebesar 8,67% tidak terserap dibandingkan dari total belanja pada tahun sebelumnya.

Meskipun kinerja layanan urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah cukup baik, namun dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan agar capaian kinerja benar-benar optimal. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.104
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Keuangan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVII	KEUANGAN							
1	Rasio PAD	%	3.45	3.90	15,92	18.41	18,22	BPKD
2	Rasio Belanja Urusan	%	84.53	8807.53	89.97	86.147	83,98	BPKD



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)							
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	na	na	70,61	na	63,2	BPKD
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8.32	8831,63	9.113	8.572	2,52	BPKD
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	18.23	10492,12	7,1432	1.117	13,9	BPKD
7	Manajemen Aset	%	4	100	100	100	100	BPKD
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7.57	9.34	10.565	8.708	8,67	BPKD

c. Kepegawaian

Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah unsur kepegawaian dilihat dari 8 (delapan) indikator kinerja kunci yakni : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Indeks Profesionalitas ASN, Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian, Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian serta Indeks Sistem Merit.

Pada Tabel dibawah ini disajikan data kinerja kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar terus mengalami peningkatan dari 74,026% di tahun 2020, 76,01 di tahun 2021, kemudian menjadi 76,9% di tahun 2022 menjadi 78,16% di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 79,91% di tahun 2024. Rasio pegawai fungsional juga menunjukkan terus terjadinya peningkatan dari 2,684% di Tahun 2020, 18,078% di tahun 2021, 20% di tahun 2022 menjadi 22,58% di tahun 2023 dan kembali naik menjadi 22,58% di Tahun 2024. Selanjutnya terkait dengan Sertifikasi Kompetensi, Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 adalah 80,645%, menjadi 18,537% di tahun 2021 kemudian meningkat sedikit demi sedikit menjadi



20,172% di tahun 2022, 25% di tahun 2023, namun terjadi sedikit penurunan menjadi 24,42% di tahun 2023.

Sedangkan untuk Belanja Pegawai, Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan tercatat sebesar 22,012 di tahun 2020, meningkat menjadi 21, 835 di tahun 2021, kemudian menjadi 22,855% di tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 31,624 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 32,872 di tahun 2024. Selanjutnya untuk Indeks profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan dari 65,93 di tahun 2020, 70,05 di tahun 2021 dan 76,51 di tahun 2022 menjadi 84,92 di tahun 2023, namun menurun menjadi 77,59 di tahun 2024. Kemudian terkait Pelayanan dan Perlindungan ASN, berdasarkan data yang ada diketahui bahwa Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi dan perlindungan kepegawaian tetap sudah 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Serta terkait Sistem Merit, dimana penilaian Indeks Sistem Merit baru dimulai pada tahun 2021 yang sudah menunjukkan penilaian "Baik" dengan nilai 330 di tahun 2021 dan meningkat menjadi "Sangat Baik" dengan nilai 325 di tahun 2022 dan 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kepegawaian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVII	KEPEGAWAIAN							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,026	76,01	76.9	78,16	79,91	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,684	18,078	20	21,03	22,58	BKPSDM
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,012	21,835	22,855	31,624	32,872	BKPSDM
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
8	Indeks Sistem Merit	indeks	-	330 (Baik)	325 (Sangat Baik)	325 (Sangat Baik)	na	BKPSDM



d. Pendidikan dan Pelatihan

Capaian unsur pendidikan dan pelatihan diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN dan rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi

Tabel 2.106
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
XXVIII	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Indeks Profesional ASN	indeks	65,93	70,05	76,51	84,92	77,59	BKPSDM
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,645	18,537	20,172	25,00	24,42	BKPSDM

Capaian unsur pendidikan dan pelatihan ASN di Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indeks Profesionalitas ASN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 65,93, meningkat menjadi 70,05 pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 76,51 di tahun 2022. Tahun 2023 angkanya mencapai 84,92, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 77,59 meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, tren ini mencerminkan adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, capaian rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 angkanya sangat tinggi yakni 80,64%, namun turun drastis menjadi 18,537% pada tahun 2021. Meskipun demikian, capaian ini terus mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 17,220% di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 25,042% pada tahun 2023, dan sedikit turun menjadi 24,42% di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi jabatan fungsional masih memerlukan perhatian khusus, baik dalam peningkatan jumlah maupun pemerataan ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi.

e. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah yang



menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada dalam kategori tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.107 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
XXVIII	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Capaian Pengukuran Inovasi Daerah Angka Indeks	Angka	1964 Sangat Inovatif	64,08 Sangat Inovatif	62,04 Terinovatif	63,28 Terinovatif	81,35 Sangat Inovatif	Bappeda

Kinerja inovasi daerah Kota Padang Panjang selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menggambarkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Pencapaian nilai Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun berada dalam kategori Sangat Inovatif, mencerminkan kemampuan daerah dalam menerapkan berbagai terobosan kebijakan, tata kelola, dan pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2020, nilai indeks inovasi mencapai 1.964 dengan metode pengukuran berbasis bobot indikator. Seiring dengan penyesuaian metodologi penghitungan menjadi berbasis indeks mulai tahun 2021, capaian Padang Panjang tetap impresif dengan skor 64,08 dan predikat Sangat Inovatif. Nilai indeks ini cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya, yakni 62,04 pada 2022 dan 63,28 pada 2023, tetap dalam kategori Sangat Inovatif, menunjukkan keberlangsungan penerapan inovasi meskipun terdapat penyesuaian teknis dalam penilaian. Tahun 2024 menjadi tonggak penting, di mana Kota Padang Panjang mencatat peningkatan signifikan dalam nilai indeks menjadi 81,35, mengukuhkan kembali posisinya sebagai daerah dengan tingkat inovasi tinggi.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat

Fungsi penunjang terkait pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sama dengan tahun sebelumnya (2023) yakni berada pada level 3, yang mana hal ini sudah meningkat dari tahun 2021



dan 2022 yang masih berada pada level 2. Sedangkan untuk Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP tetap berada di level 3, dimana hal ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022 dan 2023). Sementara untuk Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat terlihat cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2021 sudah mencapai 100%, kemudian turun menjadi 95,80% pada Tahun 2022, naik menjadi 98,45% pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 96% di Tahun 2024. hal ini menunjukkan terjadi sedikit penurunan kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang di Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Capaian pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.108
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengawasan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
D	UNSUR PENGAWASAN							
XXVII	PENGAWASAN							
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%		Level 2	Level 2	Level 3	Level 3 (3,000)	Inspektorat Kota
2	Kapabilitas Pengawasan Aparat Intern Pemerintah (APIP)	%		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,000)	Inspektorat Kota
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%		100	95,80	98,45	96	Inspektorat Kota

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Padang Panjang Timur

Kecamatan Padang Panjang Timur telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang mencerminkan arah pembangunan yang partisipatif dan terkoordinasi dengan baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, . Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator kerja utama yang menjadi fokus pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

a. Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan

Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 tingkat partisipasi berada pada 21,78%, yang mencerminkan kondisi ideal dalam pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkat terus untuk tahun-tahun berikutnya: yaitu 22,17%



(2022), 24% (2023), dan 33,2% (2024). Untuk tahun 2021 tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tidak mengalami perubahan masih sama seperti tahun 2020 ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, keterbatasan anggaran partisipatif, serta perubahan pola interaksi sosial. Namun demikian, upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terus dilakukan melalui forum musrenbang kelurahan, sosialisasi pembangunan partisipatif, dan program pemberdayaan berbasis potensi local baik itu kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat maupun melalui pokir dalam Musrenbang.

b. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ini menunjukkan tren yang lebih positif. Dimulai dari 33,93% (2020) dan 35% (2021), 2022 (37%), kemudian 2023 (38%), 38,78% di tahun 2024. Capaian ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam program pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi dan kesinambungan partisipasi dari tahun ke tahun.

c. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan menunjukkan tren sangat positif dan stabil, mencerminkan kinerja kelembagaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan mulai dari tahun 2020-2024 pencapaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan seluruh urusan yang menjadi kewenangannya dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b. Kecamatan Padang Panjang Barat

Kecamatan Padang Panjang Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang mencerminkan arah pembangunan yang partisipatif dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator utama yang menjadi fokus pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

a. Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan

Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada awal periode, yakni tahun 2020, tingkat



partisipasi berada pada angka 81%, yang mencerminkan kondisi ideal dalam pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya: 73% (2021), 35,57% (2022), dan 33,44% (2023), sebelum mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 menjadi 38,36%.

Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, keterbatasan anggaran partisipatif, serta perubahan pola interaksi sosial. Namun demikian, upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terus dilakukan melalui forum musrenbang kelurahan, sosialisasi pembangunan partisipatif, dan program pemberdayaan berbasis potensi local baik itu kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat maupun melalui pokir dalam Musrenbang.

b. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ini menunjukkan tren yang lebih positif. Dimulai dari 20% (2020) dan 21% (2021), partisipasi masyarakat mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2022 (35,57%), kemudian sedikit menurun di 2023 (33,44%), dan kembali naik menjadi 38,68% di tahun 2024.

Capaian ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam program pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi dan kesinambungan partisipasi dari tahun ke tahun.

c. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan

Indikator ini menunjukkan tren sangat positif dan stabil, mencerminkan kinerja kelembagaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 78%, kemudian meningkat tajam menjadi 97,75% (2021) dan tetap berada di angka tinggi pada tahun-tahun berikutnya: 91,75% (2022), 93,90% (2023), dan 100% pada tahun 2024.

Capaian maksimal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan seluruh urusan yang menjadi kewenangannya dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Capaian indikator kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.109
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kewilayahan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
D	UNSUR KEWILAYAHAN							



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR							
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	21,78	21,78	22,17	24	33,2	Kecamatan PPT
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	33,93	35	37	38	38,78	Kecamatan PPT
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	Kecamatan PPT
	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT							
4	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	81	73	35,57	33,44	38,36	Kecamatan PPB
5	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	20	21	35,57	33,44	38,68	Kecamatan PPB
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	78	97,75	91,75	93,90	100	Kecamatan PPB

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu urusan pemerintahan yang berfokus pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ideologi Pancasila, serta menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, urusan ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kehidupan politik dan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pembinaan kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, juga mencakup pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik sosial di daerah. Urusan ini diukur melalui tiga indikator yaitu; 1) Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 2) Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah; dan 3) Persentase Konflik yang tertangani.

Capaian indikator kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru mulai dihitung pada 2024 sebagai indikator pengukuran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Pada Tahun 2024, capaian dari indikator ini cukup memuaskan. Namun, cakupan indikator kegiatan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ini belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sebab masih sebatas siswa yang terlibat dalam kegiatan Paskibraka. Kedepannya, perlu disikapi dengan lebih



optimal melalui pelibatan seluruh lapisan masyarakat guna mendukung tercapainya target kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Indikator peningkatan stabilitas daerah juga baru dilaksanakan pengukurannya pada tahun 2024. Meskipun demikian, kondisi tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan terlaksananya koordinasi antara *stakeholder* para pemangku kepentingan. Capaian tersebut harus dipertahankan agar stabilitas daerah di Kota Padang Panjang tetap terjaga dengan konsisten pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, persentase konflik yang tertangani sudah bergerak menjadi lebih baik. Capaian lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah konflik yang tertangani tiap tahunnya. Hal ini tercipta karena adanya koordinasi antar *stakeholder* dan berfungsinya komunitas intelijen di daerah. Kedepannya, lebih difokuskan pada penguatan dalam mengidentifikasi isu dan potensi-potensi konflik secara lebih menyeluruh guna memitigasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu kestabilan daerah.

Capaian indikator kewliayahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.110
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	80	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Konflik yang tertangani	%	70	75	90	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD/RPD PERIODE SEBELUMNYA

Capaian kinerja pembangunan daerah Kota Padang Panjang dalam waktu 5 tahun terakhir, dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja daerah (IKD), yang terdiri dari indikator makro daerah dan indikator kinerja utama.

A. Indikator Makro Daerah



Perkembangan indikator makro daerah kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir mengacu kepada indikator makro yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111
Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	77.93	78	78.78	79.26	80.60
2	Tingkat Kemiskinan	5.47	5.92	5.14	5.24	5.31
3	Tingkat Pengangguran	7.22	4.90	4.84	5.49	4.94
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1.44	3.46	4.39	4.84	4.52
5	PDRB ADHK Per Kapita	45.34	46.19	47.49	49.12	50.62
9	PDRB ADHB Per Kapita	61.92	64.09	70.64	76.31	80.01
7	Gini Rasio	0.394	0.306	0.296	0.271	0.266

Sumber : BPS, 2025, diolah

Perkembangan indikator makro daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 terlihat cenderung fluktuatif untuk beberapa indikator makro, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk indikator lain seperti PDRB per Kapita baik ADHK maupun ADHB cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan begitu pula dengan Gini Rasio yang terus menurun setiap tahunnya.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Kota Padang Panjang yang dievaluasi adalah indikator kinerja utama yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang terdiri dari 32 indikator sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112
Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata Lama Sekolah	11.62	11.63	11.92	11.94	12,00
2	Harapan Lama Sekolah	15.06	15.07	15.07	15.29	15,47
3	Umur Harapan Hidup	72.82	72.82	73.02	73.23	74,48
4	Prevelansi Stunting	17.03	20.00	16.80	14.09	19.00
5	Indeks Pemberdayaan	65.24	66.62	67.82	67.58	-



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Gender					
6	Predikat Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Utama	Utama	Madya
7	Status Kota Layak Pemuda	na	na	na	na	Menuju Pratama
8	Rasio Daya Saing Keolahragaan	na	na	na	na	0.5
9	Nilai SAKIP	B (60,80)	B (61,95)	62.91 (B)	63.28 (B)	64.22 (B)
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	na	na	na	na	63.20
11	Nilai Sistem Merit	na	310 (Baik)	325 (Sangat Baik)	325 (Sangat Baik)	na
12	Maturitas SPIP	na	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
13	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	na	69.86 (Sedang)	89.26 (Tertinggi)	90.72 (Tertinggi)	94.46 (Tertinggi)
14	Indeks SPBE	3.01	2.09	2.81	2.92	3.16
15	LPE sektor Perdagangan	-1.01	3.2	5.28	4.29	3.98
16	LPE sektor pertanian	1.29	4.99	5.54	1.87	0.15
17	LPE sektor akomodasi makan dan minum	-12.04	7.38	10.47	6.52	7.45
18	Persentase pertumbuhan nilai investasi	na	53,78	73,86	45,42	38.6
19	Tingkat Kemiskinan	5.24	5.92	5.14	5.24	5.31
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.22	4.9	4.84	5.49	4.94
21	Pengeluaran perkapita	10.730	10.754	11.153	11.310	11,840
22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	-	60	65.45	73	66.16
23	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	na	na	na	na	71.42
24	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
25	Angka PPKS	6.54	1.9	5.68	4.34	3.69
26	IKLI kePUan	77.10	96.36	93.79	96.31	96.71
27	IKLI Perkim	77	96.9	96.8	98.06	94.56
28	IKLI Perhubungan	71.11	97.46	97.5	87.54	95.52
29	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	na	na	82	82,5	83
30	Indeks Kualitas Air	43.68	31.86	46.07	47.21	34.65
31	Indeks Kualitas Udara	91.88	91.07	91.29	91.6	89.08
32	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65.26	56.18	56.18	62.04	61.7

Dari tabel diatas terdapat beberapa indikator yang belum ada capaian kinerja dari tahun 2020, dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang muncul sewaktu penyusunan dokumen RPD tahun 2024-2026.



Kinerja daerah Kota Padang Panjang secara umum dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	%	82,32	79,58	79,82	89,58	87,05
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,05	6,4	7,13	6,81	5,33
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/kapita	1,206	1,235	1,233	1,249	1,257
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	96,58	98,45	98,09	99,07	na
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	67,93	61,16	66,6	68,44	62,62
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	na	na	12,49	13,08	13,67
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	46,63	48	48,95	49,25	50,18
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	1,90	2,19	9,14	9,56	9,64
9	Indeks Risiko Bencana	poin	113	113,1	113,1	113,2	113,2
10	Indeks Ketahanan Daerah	poin	na	na	na	6,29	na
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,76	1,57	1,55	1,48	1,46
12	Rasio Penduduk	%	101	101	101,1	101	101,53
13	Kepadatan Penduduk	Orang/m	2,448	2,447	2,455	2,549	2,585
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,47	5,92	5,14	5,24	5,31
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	61,92	64,12	70,73	76,31	80,01
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,22	4,9	4,84	5,49	4,94
5	Indeks Gini	angka	0,394	0,306	0,296	0,273	0,266
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	77,93	77,97	78,78	79,26	80,6
7	Usia Harapan Hidup	tahun	73,83	73,93	74,03	74,24	74,48
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,337	0,39	0,44	0,46	0,46
9	Prevalensi Stunting	%	17,03	20	16,8	14,09	9,49



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	11,62	11,63	11,92	11,94	12,00
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,06	15,07	15,07	15,29	15,47
12	Angka Literasi/Numerasi	%	na	na	na	na	na
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	na	47,2	86,54	88,22	96,78
14	Indeks Literasi Digital	angka	na	na	na	na	na
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	25,2	26,15	70,84	55,92	55,46
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	na	na	na	na	na
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	na	na	na	na	na
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	na	67,92	67,41	66	na
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	na	na	na	na	na
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,068	0,192	0,153	0,135	na
21	Indeks Pembangunan Pemuda	poin	na	na	na	na	na
III ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	48,11	48,21	48,3	48,37	48,56
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	-2,41	2,44	2,4	4,79	2,07
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	-12,04	7,38	10,47	6,52	7,45
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-9,66	6,8	11,02	8,13	7,91
5	Rasio Kewirausahaan	%	5,68	6,85	3,29	3,95	na
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,81	65,94	64,02	66,05	66,33
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	na	Sangat Inovatif (64,08)	Sangat Inovatif (62,04)	Sangat Inovatif (63,28)	Sangat Inovatif (81,35)
8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	na	na	na	na	na
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	-31,29	31,32	30,21	29,93	29,55
10	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-4,42	-3,06	0,05	3,23	4,22
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	poin	74.15	90.99	91.43	92.70	95,5
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65.16	65.63	75.42	71.28	na



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Rasio PAD terhadap PDRB (ADHB)	%	2,4	2,4	2,4	2,3	2
15	Tingkat Inflasi	%	2,02	1,69	7,76	1,88	1,68
IV ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	poin	na	na	na	na	96,66
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,01	2,09	2,81	2,92	3,16
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	na	na	4,35	3,83	4,17
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100
6	Indeks Demokrasi Indonesia	%	na	na	na	na	76.27*
7	Indeks Rasa Aman	angka	na	na	75,49	76,6	79,29
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	na	na	na	na	na
9	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	2,37	na	na	3,66	3,92

2.1.6 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil



pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114
Jenis Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang

NO	BIDANG SPM	JENIS PELAYANAN DASAR SPM
1.	Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini b. Pendidikan Dasar c. Pendidikan Kesetaraan
2.	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir d. Pelayanan kesehatan balita e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)
3.	Pekerjaan Umum	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Perumahan Rakyat	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban b. Pelayanan informasi rawan bencana c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6.	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

NO	BIDANG SPM	JENIS PELAYANAN DASAR SPM
		gelandangan dan pengemis di luar panti e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana korban bencana

Sumber : Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2020

Pelaporan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk penilaian kinerja perangkat daerah, untuk pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, serta sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Capaian penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115
Capaian Penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Capaian Penerimaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Tahun 2020-2021								
No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
SPM BIDANG PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	2.230 orang	2.109 orang	2.193 orang	2.393 orang	2.256 orang	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	8.480 orang	9.249 orang	9.910 orang	12.189 orang	9.415 orang	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	181 orang	169 orang	407 orang	437 orang	437 orang	
SPM BIDANG KESEHATAN								
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu yang bersalin yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan	977 orang	929 orang	918 orang	906 orang	767 orang	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu yang bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	997 orang	955 orang	893 orang	923 orang	767 orang	
3	Pelayanan	Jumlah bayi baru	988	940	848	911	775	



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kesehatan bayi baru lahir	lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	orang	orang	orang	orang	orang
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita usia 0– 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.124 orang	2.464 orang	2.611 orang	3.234 orang	3.234 orang
5	Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar di satuan pendidikan dasar	11.792 orang	9.696 orang	10.478 orang	2.896 orang	18.479 orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7.078 orang	11.587 orang	25.256 orang	33.166 orang	25.224 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	2.497 orang	3.028 orang	2.215 orang	4.340 orang	4.695 orang
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	5.706 orang	2.863 orang	3.494 orang	11.487 orang	4.624 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	0	621 orang	775 orang	726 orang	1.261 orang
11	Pelayanan	Jumlah orang	578	756	1.406	1.483	1.624



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kesehatan orang dengan TB	yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	orang	orang	orang	orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	166 orang	115 orang	119 orang	123 orang	139 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan Kesehatan	1.286 orang	1.345 orang	1.344 orang	1.516 orang	1.955 orang
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	9.187 orang	48.358 orang	51.704 orang	58.935 orang	61.559 orang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah	9.287 orang	48.529 orang	52.226 orang	53.582 orang	61.009 orang
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0
2	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni	Jumlah rumah korban bencana yang berhak	0	0	0	0	0



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	bagi korban bencana Kab/kota	memperoleh rumah layak huni					
SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	143 orang	1 orang	90 orang	1 orang	32 orang
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	81 orang	15 orang	37 orang	5 orang	12 orang
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Na	59.999 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na	53.618 orang	3.000 orang	1.882 orang	1.882 orang
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	112 orang	53.618 orang	59.999 orang	0	326 orang
SPM BIDANG SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	35 orang	81 orang	259 orang	244 orang	330 orang
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15 orang	16 orang	16 orang	13 orang	10 orang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	90 orang	127 orang	324 orang	151 orang	355 orang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Jumlah tuna sosial khususnya	0	4 orang	3 orang	67 orang	9 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial					
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	0	123 orang	296 orang	380 orang	1.037 orang

Berdasarkan hasil pelaporan SPM melalui sistem pelaporan secara elektronik Departemen Dalam Negeri melalui aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, dapat dilihat capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Padang Panjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.116
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	BIDANG SPM	TARGET (%)	REALISASI (%)	KATEGORI
1	Pendidikan	100	100	Tuntas Paripurna
2	Kesehatan	100	100	Tuntas Paripurna
3	Pekerjaan Umum	100	99,95	Tuntas Paripurna
4	Perumahan rakyat	100	100	Tuntas Paripurna
5	Ketentraman Ketertiban	100	97,40	Tuntas Utama
6	Sosial	100	100	Tuntas Paripurna

Sumber; Laporan SPM Kota Padang Panjang 2024, 2025

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang menunjukkan capaian yang sangat baik secara umum. Dari enam bidang yang menjadi fokus pemantauan, lima bidang berhasil merealisasikan target secara penuh, yaitu mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas sektor layanan publik telah menjalankan program-programnya secara optimal sesuai dengan ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan.

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, serta Pekerjaan Umum (dengan realisasi 99,95%) seluruhnya masuk dalam kategori “Tuntas Paripurna”, yang menunjukkan pemenuhan menyeluruh terhadap indikator layanan dasar. Khusus bidang Pekerjaan Umum, meskipun terdapat sedikit selisih sebesar 0,05% dari target, capaian ini masih dianggap sangat memuaskan dan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas layanan.

Satu-satunya bidang yang belum mencapai realisasi 100% adalah Ketentraman dan Ketertiban, dengan capaian 97,40%. Meskipun masih tergolong tinggi, bidang ini dikategorikan dalam “Tuntas Utama”, yang berarti sudah mendekati pemenuhan penuh, namun masih terdapat ruang perbaikan.



Beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi capaian ini antara lain faktor keamanan wilayah, keterbatasan personel lapangan, atau tantangan sosial yang dinamis.

Secara agregat, rata-rata realisasi seluruh bidang mencapai 99,56%, yang mencerminkan komitmen kuat dan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan SPM berjalan efektif dan efisien, dengan hasil yang mendekati sempurna.

Capaian ini juga menjadi indikasi bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program di berbagai sektor telah dikelola dengan baik. Namun demikian, tetap diperlukan evaluasi berkala, terutama untuk bidang-bidang yang belum mencapai target maksimal, agar ke depannya seluruh sektor dapat mencapai kategori Tuntas Paripurna secara menyeluruh.

2.1.7 CAPAIAN SDGs TAHUN 2020 - 2024

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam menetapkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dituangkan dalam dokumen Transforming Our World: Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan 2030. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan TPB adalah untuk tetap menjaga pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan pembangunan yang inklusif, serta mewujudkan pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan untuk mendukung kualitas masyarakat, kehidupan dari generasi ke generasi. TPB merupakan komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;



13. Penanganan Perubahan iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

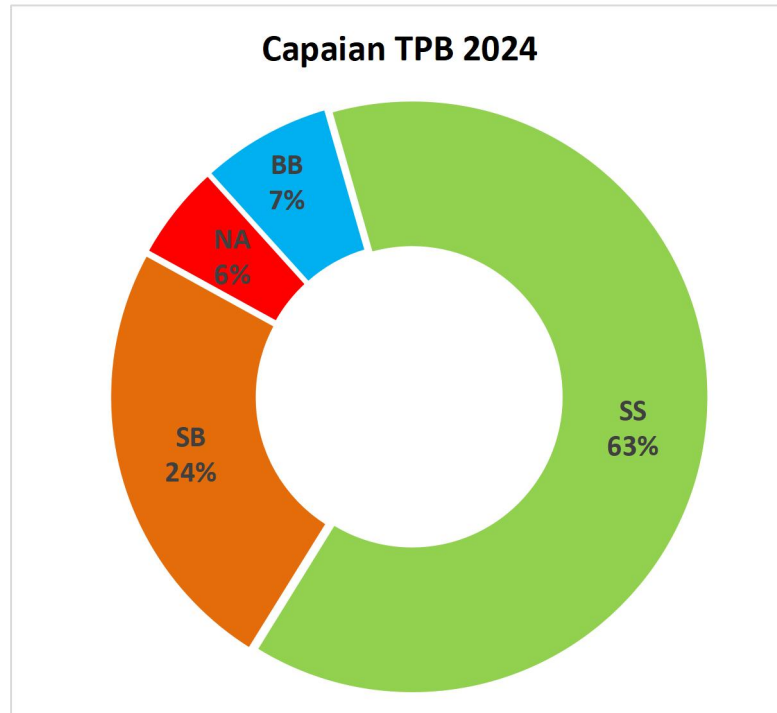
Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Kategori evaluasi capaian TPB Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);
3. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi data tidak tersedia sehingga belum dapat dievaluasi pencapaian target (NA); dan
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB);

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang Panjang pada periode RPJMD. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB dengan kategori SB, NA dan BB.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 63%. Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang secara umum didominasi dengan kategori SS, sedangkan untuk kategori SB, NA dan BB berturut-turut adalah 25%, 5% dan 7%. Komposisi pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.69 Proporsi Capaian TPB Kota Padang Panjang, Tahun 2024



Keterangan:

- SS : Sudah terlaksana dan Sudah tercapai
 SB : Sudah terlaksana tetapi Belum tercapai
 NA : Sudah terlaksana tetapi data tidak tersedia
 BB : Belum terlaksana dan belum mencapai target

Terdapat 130 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 1 (tanpa kemiskinan) dan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera) 16 indikator dan 24 indikator seperti terlihat pada Tabel 4.5. Sementara itu, terdapat TPB yang tidak mempunyai capaian SS yaitu TPB 7 Menjamin Akses Energi.

Terdapat 51 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini adalah TPB 3 kehidupan sehat dan sejahtera dengan 9 indikator. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.117 Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang

No TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BB
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	24	16	6	-	2
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	10	1	-	-
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	24	9	1	-
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	7	5	1	-
TPB 5	Kesetaraan gender	14	8	4	2	-



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BB
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	16	11	4	-	1
TPB 7	Menjamin akses energi	2	-	-	2	-
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	10	7	2	-
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	10	6	3	1	-
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	6	6	-	-	-
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	12	6	1	-	4
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	2	-	-	2
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	1	-	-	1
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1	-	1
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	14	6	-	1
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	7	4	1	3
Total		207	130	51	10	15
Persentase			63%	25%	5%	7%

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025



2.1.8 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ATAU APBD PROVINSI DI KOTA PADANG PANJANG

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBD PROVINSI SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG PANJANG

A. Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan			
				Target	Indikator	Vol	Anggaran
1	Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi	DI Banda Gadang Sigando	Sebagian saluran masih berupa saluran tanah, terakhir kegiatan tahun 2008	Rehabilitasi jaringan irigasi Sigalangga mulai dari TK Darul Falah sampai Lasuang Baruah sepanjang 1,5 km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1500 m	1.000.000.000
2	Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi	Bulakan Dalam	Saluran dalam kondisi rusak berat	Rehabilitasi jaringan irigasi dari simpang madaik pinggir jalan nasional, sisi kiri dan kanan jalan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.333,33	2.000.000.000
3	Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi	Banda II Paninjauan	Sebagian saluran masih tanah (ganting)	Pembangunan saluran lanjutan dan bangunan pembagi sebanyak 3 unit	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		1.000.000.000
4	Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi	Banda Gadang Darek	Kondisi saluran masih rusak (Busur)	Lanjutan rehabilitasi saluran Nurul Ikhlas	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2000 m	1.500.000.000
			Jumlah				5.500.000.000



B. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan			
				Target	Indikator	Vol	Anggaran
5	Pertanian (Hortikultura)		Meningkatnya biaya produksi budidaya tanaman hias terutama dalam penyediaan pupuk dan bibit/indukan tanaman hias	Sarana produksi budidaya tanaman hias krisan dan mawar (bibit/indukan dan pupuk) : Poktan Sansivera Kelurahan Silaing Bawah, KWT Bunga Tanjung Kelurahan Ganting, Poktan Parak Pisang Sepakat Kelurahan Sigando, dan Poktan Usaha Sepakat II Kelurahan Ganting	Terlaksananya pengembangan tanaman hias	4 kelompok tani	300.000.000
6	Pertanian (Hortikultura)		Meningkatnya biaya produksi budidaya tanaman sayuran (cabai)	Sarana produksi budidaya tanaman sayuran (cabai) berupa pupuk NPK dan plastik mulsa.	Terlaksananya budidaya sayuran (cabai)	6 hektar	300.000.000
			Jumlah				600.000.000

C. Bidang Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan			
				Target	Indikator	Vol	Anggaran
7	Pembangunan ruang kelas baru	Padangpanjang Timur	Belum terpenuhinya daya tampung ruang kelas untuk Tingkat SMA	Pembangunan SMA 4 Kota Padang Panjang	Jumlah unit sekolah yang dibangun	1 unit	8.000.000.000
		SMAN 3 Padang Panjang	Belum optimalnya ketersediaan ruang kelas baru di SMAN 3 Padang Panjang	SMAN 3 Padang Panjang RKB 1 Lokal	jumlah RKB yang dibangun	1 unit	400.000.000
		SMAN 2 Padang Panjang	Belum optimalnya ketersediaan ruang kelas baru di SMAN 2 Padang Panjang (Rombel 26 -Jumlah siswa	RKB: 2 kelas bertingkat	jumlah RKB yang dibangun	2 unit	1.300.000.000



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan			
				Target	Indikator	Vol	Anggaran
			keseluruhan 882 - Jumlah guru 57 - Tenaga kependidikan 11 - jumlah keseluruhan 68)				
		SMA 1 Padang Panjang	Belum tersedianya RKB yang memadai	Penangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun	4 unit (2 Lt)	4.000.000.000
8	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SMAN 3 Padang Panjang	Belum optimalnya jumlah dan kondisi sanitasi di SMAN 3 Padang Panjang	Pembangunan sarana sanitasi sekolah: SMAN 3 Padang Panjang :WC Siswa 4 unit air bersih	jumlah sarana sanitasi yang diadakan	4 unit	100.000.000
		SMAN 3 Padang Panjang	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan gedung di SMAN 3 Padang Panjang	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah: drainase SMA 3	Jumlah Sarana, Prasarana dangedung sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 unit	150.000.000
		SMAN 2 Padang Panjang	Kondisi sarana sanitasi yang kurang memadai	Rehab WC sebanyak 4 unit	jumlah sarana sanitasi yang direbailitasi	4 unit	200.000.000
		SMAN 2 Padang Panjang	Kondisi sarana sanitasi yang kurang memadai	Pengadaan Air Bersih	jumlah sarana sanitasi yang diadakan	1 unit	100.000.000
9	Pembangunan gedung serba guna	SMK 2 Padang Panjang	Belum tersedianya ruang serbaguna	Pembangunan gedung serba guna (aula)	jumlah gedung serbaguna yang dibangun	1 unit (30 m x 15 m)	2.475.000.000
			Jumlah				16.725.000.000
			Total				22.825.000.000



2.1.9 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DI KOTA PADANG PANJANG

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Usulan			
					Indikator	Target	Anggaran (Rp.)	Instansi Tujuan
1	Pengembangan Kawasan Islamic Center -0.476626, 100.410516)	Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (0°28'35.9"S 100°24'37.9"E	Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi	Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	85.404.035.000,00	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR
2	Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan Kota Padang Panjang Koordinat Koordinat	Padang Panjang	Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses menuju Islamic Center. jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah (<i>upper view</i> Kota Padang Panjang)	Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses menuju Islamic Center. jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah (<i>upper view</i> Kota Padang Panjang)	Jumlah jalur hijau yang ditata	1 kawasan	8.000.000.000,00	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Usulan			
					Indikator	Target	Anggaran (Rp.)	Instansi Tujuan
3	Usulan pengembangan kawasan Rest Area dan PDIKM	Silaing Bawah 0°28'07.8"S 100°22'42.4"E -0.468845, 100.378440	Penataan Kawasan Rest Area dan Kawasan PDIKM sebagai suatu kawasan wisata terintegrasi (Gedung multi Service), Library Knowledge Center) akan menjadi daya tarik tersendiri karena berlokasi di koridor utama DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini juga diharapkan akan menjadi hub UMKM Sumatera Barat nantinya	Penataan Kawasan Rest Area dan Kawasan PDIKM sebagai suatu kawasan wisata terintegrasi (Gedung multi Service), Library Knowledge Center) akan menjadi daya tarik tersendiri karena berlokasi di koridor utama DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini juga diharapkan akan menjadi hub UMKM Sumatera Barat nantinya	Jumlah kawasan yang dikembangkan	1 kawasan	72.034.345.000,00	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR
4	Penataan Jalur Pendestrian Jalan Sutan Syahrir	Silaing Bawah	Jalan Sutan Syahrir merupakan jalan yang berada dalam kawasan rest Area dan PDIKM (koridor utama DPP Padang Bukittinggi)	Jalan Sutan Syahrir merupakan jalan yang berada dalam kawasan rest Area dan PDIKM (koridor utama DPP Padang Bukittinggi)	Jumlah kawasan pedestrian yang ditata	1 kawasan	22.000.000.000,00	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR
5	pembangunan kawasan sport center	Ekor Lubuk	Pengembangan kawasan sport center akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menunjang koridor DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai kawasan olah raga dan wisata pendidikan (wisma atlet, rusunawa, aquatic station, dll). Tahun 2022 dan 2023 Kota Padang Panjang sudah menganggarkan pembangunan gedung serbaguna dan beberapa venue senilai 70 M	Pengembangan kawasan sport center akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menunjang koridor DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai kawasan olah raga dan wisata pendidikan (wisma atlet, rusunawa, aquatic station, dll). Tahun 2022 dan 2023 Kota Padang Panjang sudah menganggarkan pembangunan gedung serbaguna dan beberapa venue senilai 70 M	Jumlah kawasan Sport Center yang dikembangkan	1 kawasan	500.000.000.000,00	Kementerian Pemuda Olahraga



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Usulan			
					Indikator	Target	Anggaran (Rp.)	Instansi Tujuan
6	Optimalisasi SPAM	Padang Panjang	1. Cenderung menurunnya kuantitas/debit sumber air pada musim kemarau (Rispan, 2015) 2. Masih kurangnya kualitas air saat musim hujan. Nilai kekeruhan air adalah 56,879% berdasarkan hasil evaluasi 2018, 60% berdasarkan hasil evaluasi 2019 3. Belum optimalnya Kontinuitas Jam operasi layanan air minum (dari target 24 jam layanan air minum Kota Padang Panjang baru mencapai 23,43 jam)	1. Cenderung menurunnya kuantitas/debit sumber air pada musim kemarau (Rispan, 2015) 2. Masih kurangnya kualitas air saat musim hujan. Nilai kekeruhan air adalah 56,879% berdasarkan hasil evaluasi 2018, 60% berdasarkan hasil evaluasi 2019 3. Belum optimalnya Kontinuitas Jam operasi layanan air minum (dari target 24 jam layanan air minum Kota Padang Panjang baru mencapai 23,43 jam)		1 Paket	17.967.057.000,00	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR
7	Lanjutan Pendaman Sungai Batang Anai di Lubuk Mata Kucing	Pasar Usang	Saat ini di wilayah Tanah datar sudah dilakukan Pendaman di sisi kiri dan kanan sungai sehingga perlu lanjutan pendaman di daerah lubuk mata kucing. Saat ini masih kurang pendaman sebesar 150 m di sisi kanan dan 500 m disisi kiri, serta perlu lanjutan sebesar 60 m sampai batas kota	Saat ini di wilayah Tanah datar sudah dilakukan Pendaman di sisi kiri dan kanan sungai sehingga perlu lanjutan pendaman di daerah lubuk mata kucing. Saat ini masih kurang pendaman sebesar 150 m di sisi kanan dan 500 m disisi kiri, serta perlu lanjutan sebesar 60 m sampai batas kota	Jumlah DAM yang dikembangkan	1 Paket		Kemetrian PUPR
8	Pembuatan crossing jalan di saluran irigasi	Sigando	beberapa titik jalan yang dilewati saluran irigasi mengalami penyumbatan dan salurannya patah di bawah jalan tepatnya dekat SMAN 1 Sumbar	beberapa titik jalan yang dilewati saluran irigasi mengalami penyumbatan dan salurannya patah di bawah jalan tepatnya dekat SMAN 1 Sumbar	Jumlah Crossing jalan yang dibuatkan irigasi	1 Paket		Dirtjen SDA



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Usulan			
					Indikator	Target	Anggaran (Rp.)	Instansi Tujuan
9	Perbaikan Jalan Terminal	Bukit Surungan	Kondisi jalan di Terminal Busur sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan perbaikan	Kondisi jalan di Terminal Busur sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan perbaikan	Panjang jalan yang di perbaiki	1 Paket		Kementerian PU PR
10	Rehabilitasi Lanjutan Pasca Bencana Galodo Di Lubuk Mato Kucing, Pembuatan Bangunan Penangkap Mata air ,Bangunan Penampung Air, dan Jaringan Perpipaan	Pasar Usang	Sumber Air Lubuk Mata Kucing merupakan Sumber Air Utama maka sudah seharusnya optimalisasi Secepatnya dilakukan.	Sumber Air Lubuk Mata Kucing merupakan Sumber Air Utama maka sudah seharusnya optimalisasi Secepatnya dilakukan.	Jumlah Kawasan rehabilitasi galodo	1 Ls	5.517.302.363,00	Kemetrian PUPR
11	Rehabilitasi Bangunan Penangkap air SPAM Sungai Andok	Kampung Manggis	Perlu adanya bangunan intake yang baik agar dapat menangkap air sesuai dengan kebutuhan	Perlu adanya bangunan intake yang baik agar dapat menangkap air sesuai dengan kebutuhan	Jumlah bangunan yang direhab	1 Ls	1.588.619.000,00	Kemetrian PUPR
12	Pembuatan Bangunan Pengolahan air (WTP) SPAM Sungai Andok	Kampung Manggis	Perlu adanya instalasi pengolahan air yang memadai untuk mendapatkan kualitas air yang sesuai baku mutu dan meminimalisir kekurangan air saat musim kemarau	Perlu adanya instalasi pengolahan air yang memadai untuk mendapatkan kualitas air yang sesuai baku mutu dan meminimalisir kekurangan air saat musim kemarau	Jumlag Bangunan pengelolaan air SPAM yang dibangun	1 Ls	5.941.938.000,00	Kemetrian PUPR
13	Rehabilitasi Bangunan Penampung dan Optimalisasi Jaringan Perpipaan Produksi Distribusi SPAM	Bukit Surungan	Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Lubuk Mata Kucing	Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Lubuk Mata Kucing	Jumlah Bangunan yang di rehab	1 Ls	6.662.200.000,00	Kemetrian PUPR



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Usulan			
					Indikator	Target	Anggaran (Rp.)	Instansi Tujuan
	Lubuk Mato Kucing							
14	Pembuatan Resevoir (bak penampung) dan Optimalisasi Jaringan perpipaan untuk pelayanan SPAM Kandang di Tabek	Ganting	Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Kandang Ditabek	Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Kandang Ditabek	Jumlah reservoir yang di buat	1 Ls	3.774.300.000,00	Kemetrian PUPR
1	Pengembangan Kawasan Islamic Center -0.476626, 100.410516)	Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (0°28'35.9"S 100°24'37.9"E	Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi	Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	85.404.035.000,00	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR
2	Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan Kota Padang Panjang Koordinat Koordinat	Padang Panjang	Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses	Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses menuju Islamic Center.	Jumlah jalur hijau yang ditata	1 kawasan	8.000.000.000,00	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR



No	Fokus	Lokasi	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Usulan			
					Indikator	Target	Anggaran (Rp.)	Instansi Tujuan
			menuju Islamic Center. jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah (<i>upper view</i> Kota Padang Panjang)	jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah (<i>upper view</i> Kota Padang Panjang)				

2.1.10 BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA

Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD sekurang-kurangnya satu tahun sekali oleh BUMD/Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian. BUMD yang ada di Kota Padang Panjang, yaitu :

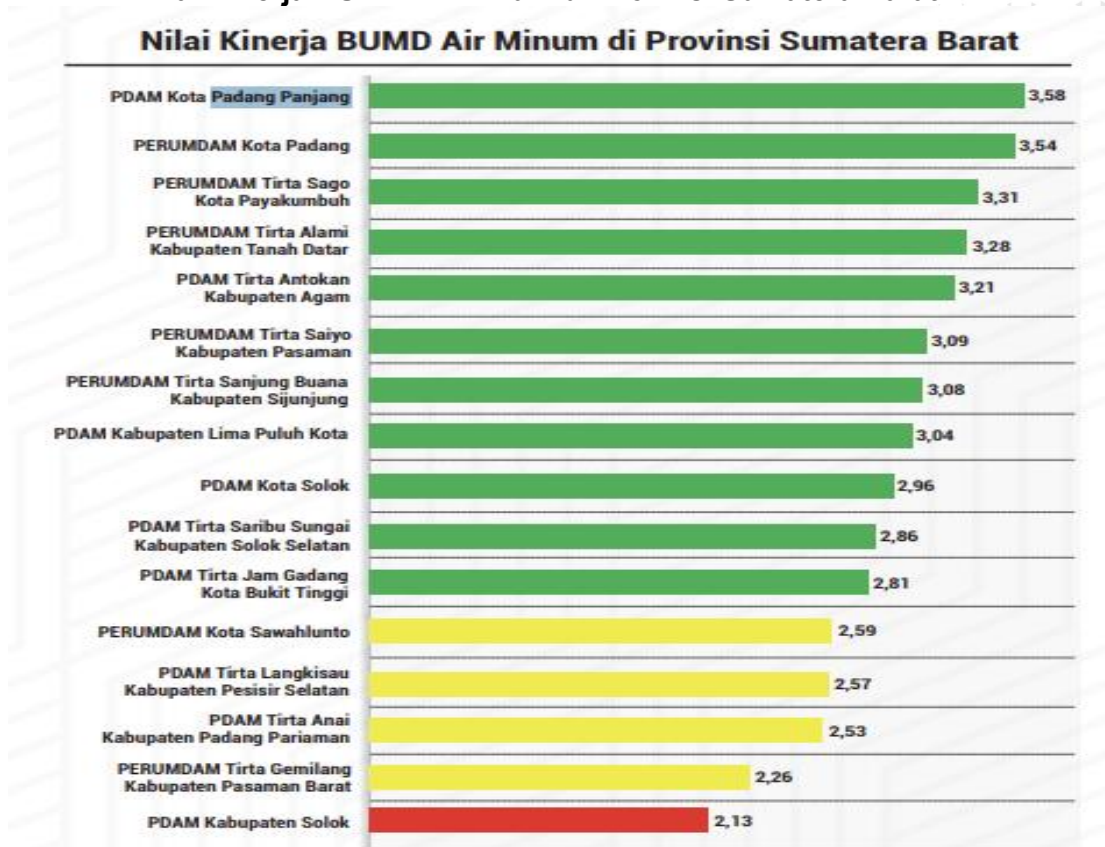
1. Perumda Tirta Serambi

PDAM Tirta Serambi Kota Padang Panjang merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat, yang berkedudukan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebagai PDAM, tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PDAM Tirta Serambi Kota Padang Panjang dibentuk berawal dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 03 Tahun 1979, yang ditetapkan pada 18 Januari 1979. Perda ini mencatatkan PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang sebelumnya merupakan Seksi Air Minum di bawah koordinasi Badan Pemerintahan Kantor Walikota Padang Panjang. Pada 17 Mei 1982, PDAM Kota Padang Panjang resmi berstatus sebagai Perusahaan Daerah dengan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian, pada tahun 2002, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2002 untuk mempertegas status PDAM sebagai perusahaan milik Pemerintah Kota Padang Panjang. Transformasi lebih lanjut terjadi pada 11 Agustus 2023, ketika PDAM Kota Padang Panjang berubah status menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang. Perubahan ini didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang. Perda Nomor 2 Tahun 2023 ini mengatur berbagai aspek pengelolaan Perumda, termasuk nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, kegiatan usaha, tarif, modal, organ perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Pengawas serta Direksi, tata kelola perusahaan, perencanaan dan pelaporan, penggunaan laba, operasional, kerjasama dan pinjaman, evaluasi, dana pensiun, asosiasi, penggabungan dan peleburan, pembubaran, serta pembinaan dan pengawasan.

Perumdam Tirta Serambi Kota Padang Panjang menunjukkan kinerja yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun menghadapi tantangan besar seperti bencana alam. Capaian kinerja Perumdam Tirta Serambi dengan nilai 3,58 kategori “sehat” merupakan hasil penilaian kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) seperti Tirta Serambi Padang Panjang oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) atau lembaga terkait yang menilai kinerja PDAM secara nasional. Sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.70
Nilai Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi Sumatera Barat



Walikota Padang Panjang selaku kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemda Kota Padang Panjang memiliki 1 BUMD yaitu: Perumda Air Minum Tirta Serambi. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi berkinerja baik dan saat ini belum bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah /deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rekening Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tabel 2.118
Nilai Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi Sumatera Barat

Tabel Nilai Kinerja BUMD Air Minum Provinsi Sumatera Barat

No	BUMD Air Minum	Nilai Tahun Buku 2022	Kinerja	Cakupan Pelayanan (%)	Jumlah Pelanggan (SL)	Efektivitas Penagihan (%)	Tingkat Kehilangan Air (%)	Tarif Rata-Rata (Rp/m ³)	HPP dengan NRW Rril (Rp/m ³)	Selish Tarif Rata-Rata dan HPP NRW Rril (Rp/m ³)	FCR/ NON FCR
1	PDAM Kota Padang Panjang	3,58	SEHAT	68,60%	11.384	99,03%	24,85%	2.982	3.316	(334)	Non FCR
2	PERUMDAM Kota Padang	3,54	SEHAT	65,75%	143.142	97,73%	27,49%	5.810	5.364	446	FCR
3	PERUMDAM Tirta Sago Kota Payakumbuh	3,31	SEHAT	96,47%	34.486	95,43%	35,75%	4.416	4.456	(40)	Non FCR
4	PERUMDAM Tirta Alami Kab. Tanah Datar	3,28	SEHAT	29,21%	26.878	94,51%	30,76%	3.554	3.049	505	FCR
5	PDAM Tirta Antokan Kab. Agam	3,21	SEHAT	20,89%	17.690	96,76%	21,32%	3.868	4.217	(348)	Non FCR
6	PERUMDAM Tirta Saiyo Kab. Pasaman	3,09	SEHAT	47,04%	24.452	66,95%	27,75%	3.120	3.793	(674)	Non FCR
7	PERUMDAM Tirta Sanjung Buana Kab. Sijunjung	3,08	SEHAT	26,15%	19.484	94,90%	28,03%	5.035	4.566	468	FCR
8	PDAM Kab. Lima Puluh Kota	3,04	SEHAT	16,03%	17.722	96,15%	28,70%	2.095	2.872	(778)	Non FCR
9	PDAM Kota Solok	2,96	SEHAT	79,24%	19.460	93,53%	32,03%	3.967	5.252	(1.285)	Non FCR
10	PDAM Tirta Saribu Sungai Kab. Solok Selatan	2,86	SEHAT	36,94%	13.986	96,49%	33,53%	2.430	2.088	342	FCR
11	PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi	2,81	SEHAT	53,23%	15.934	98,87%	41,49%	3.338	3.456	(118)	Non FCR
12	PERUMDAM Kota Sawahlunto	2,59	KURANG SEHAT	41,70%	9.140	90,03%	34,17%	3.942	4.265	(323)	Non FCR
13	PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan	2,57	KURANG SEHAT	34,37%	34.635	88,22%	63,43%	3.084	3.560	(476)	Non FCR
14	PDAM Tirta Anai Kab. Padang Pariaman	2,53	KURANG SEHAT	43,69%	36.758	89,21%	32,93%	4.571	5.329	(758)	Non FCR
15	PERUMDAM Tirta Gemilang Kab. Pasaman Barat	2,26	KURANG SEHAT	18,98%	17.974	50,73%	28,04%	3.966	6.069	(2.103)	Non FCR
16	PDAM Kabupaten Solok	2,13	SAKIT	17,42%	17.926	84,80%	34,37%	2.683	2.875	(192)	Non FCR

2. Bank Nagari

Bank Nagari, yang merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat, memiliki sejarah panjang dalam mendukung perekonomian dan pembangunan daerah, termasuk di Kota Padang Panjang. Bank ini didirikan pada 12 Maret 1962 dan telah berkembang pesat seiring waktu. Bank Nagari membuka kantor cabang di Kota Padang Panjang sebagai bagian dari ekspansi layanan perbankan ke seluruh wilayah Sumatera Barat. Kehadiran bank ini di Padang Panjang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan, termasuk tabungan, kredit, dan layanan keuangan lainnya.

Berdasarkan 2 BUMD yang ada di kota Padang Panjang kedua BUMD ini dalam kondisi sehat, total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada kedua BUMD tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada BUMD Kota Padang Panjang

Nama BUMD dan Bidang Usaha	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah dan Penda Penyertaan Modal Terakhir	Total Penyertaan Modal dan Proporsi Kepemilikan	Target, realisasi dan capaian laba 2023	Target dan realisasi Dividen 2023	Target, Realisasi dan capaian Laba s/d 31 Desember 2024	Target dan realisasi Dividen 2024	Target, Realisasi dan capaian Laba 2025	Target dan realisasi Dividen 2025
Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum	Perda no 2 Tahun 2023 tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, sebelumnya bernama PDAM Kota Padang Panjang yang didirikan berdasarkan Perda Kota Madya dari II Padang Panjang No 3 Tahun 1979 tentang Pendirian PDAM Kota Madya dari II Padang Panjang sebagaimana telah diganti dengan Perda Kota Padang Panjang No 2 tahun 2002 tentang status PDAM Kota Padang Panjang	Jumlah: Rp. 2.397.021.870 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012	Rp. 5.981.000.000 Proporsi kepemilikan 100%	Target: Rp. 209.408.801 Realisasi: Rp. 250.453.801 Capaian: 122,41%	Target: Rp. 0 Realisasi: Rp. 0	Target: Rp. 28.330.330- Realisasi: Rp. 71.125.208 Capaian: 274% (Lap. Des 2024)	Target: Rp. 0 Realisasi: Rp. -	Target: Rp. 14.182.071- Realisasi: Capaian:	Target: Rp. 0
PT. Bank Nagari Provinsi Sumatera Barat Bidang Usaha Perbankan	Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 1973 tanggal 9 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan perda No. 2 Tahun 1990	Jumlah: Rp. 1.000.000.000 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Rp. 40.398.000.000 Proporsi kepemilikan 2,17%	Target: Rp. 519.780.000.000 Realisasi: Rp. 523.770.000.000 Capaian: 107,7%	Target: Rp. 7.652.135.000 Realisasi: Rp. 7.922.888.824 Capaian: 103%	Target : 555.300.000.000- Realisasi: Rp. 479.343.000.000 Capaian: 86,33% (Lap. Nov 2024)	Target: Rp. 8.000.000.000 Realisasi: Rp. - Capaian: -%	Target : (menunggu RUPD) Realisasi: Capaian: -	Target: Rp. 8.000.000.000

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah secara umum mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah biasanya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari tiga komponen utama:

1. **Pendapatan Daerah:** Merupakan hak pemerintah daerah yang menambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari:
 - 1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD),** yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
 - 2) **Dana Perimbangan,** yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat sebagai transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
 - 3) **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,** misalnya pendapatan hibah atau pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. **Belanja Daerah :** Semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
3. **Pembiayaan Daerah:** Transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan dan realisasi pendapatan daerah, yang biasanya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat masih cukup besar di banyak daerah. Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak daerah, menjadi fokus utama untuk meningkatkan kemandirian fiskal

daerah, namun belum semua daerah mampu sepenuhnya mandiri dan masih bergantung pada transfer dana pusat.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Rasio KFD Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya trend pertumbuhan positif meskipun masih tergolong dalam kategori yang rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan kapasitas fiskal daerah Kota Padang Panjang tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.120
Pertumbuhan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2020	0,477	Sangat Rendah
2021	0,415	Sangat Rendah
2022	1,14	Sangat Rendah
2023	1,087	Rendah
2024	1,103	Rendah

Sumber : Kemenkeu, 2021-2024

Tahun 2020-2021 Rasio KFD Kota Padang Panjang berada pada level sangat rendah dengan nilai 0,477 pada 2020 dan menurun menjadi 0,415 pada 2021. Ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas dan bahkan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan pada rasio KFD menjadi 1,140, namun kategori masih tetap "Sangat Rendah". Hal ini menandakan adanya peningkatan kapasitas fiskal, meskipun belum cukup untuk masuk ke kategori yang lebih baik.

Tahun 2023-2024 Rasio KFD sedikit menurun menjadi 1,087 pada 2023 dan naik kembali menjadi 1,103 pada 2024, dengan kategori berubah menjadi "Rendah". Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal daerah, meskipun masih dalam kategori rendah. Secara faktual Kota Padang Panjang masih sangat tergantung pada transfer dana pusat dengan kontribusi rata-rata lebih dari 80% dari total pendapatan

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat Kota Padang Panjang menunjukkan tren perbaikan kapasitas fiskal dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun ada peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022, kapasitas fiskal daerah masih tergolong rendah dan perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal dapat dicapai melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan anggaran, dan pengurangan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai target indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang. Pengelolaan keuangan daerah selama periode ini menggunakan pendekatan berbasis kinerja, dengan fokus pada belanja yang terukur. Analisis kinerja ini mencakup evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan daerah, memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Secara terperinci gambaran umum komposisi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Komposisi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	PENDAPATAN (Rp.)	BELANJA DAERAH (Rp.)	PEMBIAYAAN (Rp.)
1	2020	546.345.635.456,66	593.388.193.076,43	47.042.557.619,77
2	2021	571.382.246.839,00	622.193.172.395,00	50.810.925.556,00
3	2022	551.112.035.302,00	616.638.674.470,00	65.526.639.168,00
4	2023	568.394.580.757,00	627.319.623.960,00	59.925.043.203,00
6	2024	624.270.615.623,00	673.273.185.861,66	49.002.570.238,66

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat pendapatan daerah mengalami fluktuasi pada periode 2020-2024. Tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding 2020, dari Rp546,35 miliar menjadi Rp571,38 miliar, tahun 2022 turun menjadi Rp551,11 miliar, namun kembali naik pada 2023 dan mencapai

puncaknya di 2024 sebesar Rp624,27 miliar. Kenaikan pendapatan di 2024 menunjukkan perbaikan kapasitas penerimaan daerah.

Belanja daerah cenderung meningkat setiap tahun, dari Rp593,39 miliar di 2020 menjadi Rp673,27 miliar di 2024. Penurunan kecil terjadi pada 2022 dibanding 2021, tetapi secara umum tren belanja meningkat. Peningkatan belanja ini mengindikasikan peningkatan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Pembiayaan daerah berfungsi menutup defisit antara pendapatan dan belanja. Pembiayaan meningkat dari Rp47,04 miliar di 2020 ke Rp65,53 miliar di 2022, lalu menurun kembali menjadi Rp49,00 miliar di 2024. Penurunan pembiayaan di 2024 dapat menandakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif atau peningkatan pendapatan yang lebih baik sehingga kebutuhan pembiayaan berkurang.

Secara keseluruhan, kinerja APBD 2020-2024 menunjukkan tren positif dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Secara umum, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri dari tiga komponen utama, Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang menambah ekuitas dana selama satu periode anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, Belanja Daerah: merupakan semua pengeluaran daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Kota Padang Panjang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berdasarkan kinerja pendapatan daerah dan kontribusi per komponen pendapatan daerah tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.122
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%	KONTRIBUSI PENDAPATAN
1	Tahun 2020				
a	PAD	67.181.021.098,66	79.428.802.696,06	118,23%	14,50%
b	Pendapatan Transfer	450.809.220.887,00	440.669.126.054,00	97,75%	80,45%
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	28.355.393.471,00	27.676.973.946,00	97,61%	5,05%
	Jumlah	546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26%	100%
2	Tahun 2021				
a	PAD	87.875.303.281,00	93.078.598.622,15	105,92%	16,32%
b	Pendapatan Transfer	475.026.194.358,00	469.578.642.449,00	98,85%	82,32%

NO.	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%	KONTRIBUSI PENDAPATAN
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	8.480.749.200,00	7.778.372.913,00	91,72%	1,36%
	Jumlah	571.382.246.839,00	570.435.613.984,15	99,83%	100%
3	Tahun 2022				
a	PAD	85.290.001.002,00	85.713.053.396,03	100,50%	15,92%
b	Pendapatan Transfer	462.812.034.300,00	450.760.096.758,00	97,40%	83,72%
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	3.010.000.000,00	1.921.204.276,00	63,83%	0,36%
	Jumlah	551.112.035.302,00	538.394.354.430,03	97,69%	100%
4	Tahun 2023				
a	PAD	111.360.094.521,00	102.302.543.259,00	91,87%	18,58%
b	Pendapatan Transfer	453.424.486.236,00	444.487.283.334,00	98,03%	80,74%
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	3.610.000.000,00	3.720.002.189,00	103,05%	0,68%
	Jumlah	568.394.580.757,00	550.509.828.782,00	96,85%	100%
5	Tahun 2024				
a	PAD	121.417.303.824,00	94.385.171.734,88	77,74%	16,18%
b	Pendapatan Transfer	502.853.311.799,00	488.770.713.144,00	97,20%	83,81%
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	60.387.584,00		0,01%
	Jumlah	624.270.615.623,00	583.216.272.462,88	93,42%	100%
	RATA RATA				
	PAD			98,85%	16,30%
	Pendapatan Transfer			97,85%	82,21%
	Lain-lain Pendapatan yang sah			71,24%	1,49%
				89,31%	100,00%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum, kinerja pendapatan daerah terlihat relatif stabil selama tahun 2020 hingga 2024. Rata-rata realisasi PAD selama 5 tahun adalah 98,85%, dengan kontribusi sekitar 16,30% terhadap total pendapatan. Realisasi PAD melebihi target pada tahun 2020, 2021, dan 2022, namun menurun pada tahun 2023 dan 2024, terutama pada 2024 dengan realisasi hanya 77,74%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi PAD pada tahun-tahun terakhir.

Pendapatan Transfer merupakan komponen yang memberikan kontributor terbesar, dengan rata-rata realisasi mencapai 97,85% dan kontribusi sebesar 82,21%. Realisasi transfer cenderung stabil dan mendekati target setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang Panjang masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat karena sangat bergantung pada pemerintah pusat, artinya tingkat kemandirian fiskal kita tidak berkembang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata realisasi hanya 71,24% dengan kontribusi kecil sekitar 1,49%. Realisasi komponen ini sangat fluktuatif dan cenderung rendah, bahkan pada 2024 targetnya nol namun realisasi tetap ada.

Dari kinerja pendapatan daerah rata-rata realisasi total pendapatan daerah selama 5 tahun mencapai 89,31% dari target. Tahun 2020 dan 2021 bahkan sempat melampaui target (100,26% dan 99,83%), namun pada tahun-tahun berikutnya realisasi sedikit menurun.

Untuk menghitung proyeksi pendapatan daerah perlu dilihat rata-rata

pertumbuhan realisasi pendapatan daerah secara rinci selama 5 tahun terakhir. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2020–2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.123
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN
PENDAPATAN DAERAH	547.774.902.696,06	570.435.613.984,00	538.392.534.006,00	550.509.828.782,00	583.216.272.462,88	1,68%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.428.802.696,06	93.078.598.622,00	85.711.232.972,00	102.302.543.259,00	94.385.171.734,88	5,22%
Pajak Daerah	7.826.867.948,00	8.690.622.734,00	9.607.630.952,00	10.351.130.237,00	9.688.742.631,00	5,73%
Retribusi Daerah	4.656.919.048,15	5.110.089.222,00	4.525.744.984,00	4.951.418.406,00	64.870.692.621,50	304,46%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.313.227.292,00	5.356.882.481,00	6.565.068.670,00	7.345.866.623,00	7.922.888.824,00	6,79%
Lain-lain PAD yang Sah	60.631.788.407,91	73.921.004.185,00	65.012.788.366,00	79.654.127.993,00	11.902.847.658,38	-13,17%
PENDAPATAN TRANSFER	460.593.650.000,00	469.578.642.449,00	450.760.096.758,00	444.487.283.334,00	488.770.713.144,00	1,63%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	440.669.126.054,00	437.252.759.204,00	421.985.012.110,00	420.531.185.089,00	459.088.864.897,00	1,14%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.924.523.946,00	32.325.883.245,00	28.775.084.648,00	23.956.098.245,00	29.681.848.247,00	14,60%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.752.450.000,00	7.778.372.913,00	1.921.204.276,00	3.720.002.189,00	60.387.584,00	-19,93%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.752.450.000,00	7.778.372.913,00	1.921.204.276,00	3.720.002.189,00	60.387.584,00	-19,93%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 adalah sekitar 1,68% per tahun. Berikut rincian pertumbuhan komponen utama pendapatan

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh rata-rata 5,22% per tahun terdiri dari:
 - ❖ Pajak Daerah tumbuh 5,73% per tahun.
 - ❖ Retribusi Daerah mengalami lonjakan sangat tinggi dengan pertumbuhan 304,46%, terutama karena realisasi tahun 2024 yang sangat besar.
 - ❖ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh 6,79%.
 - ❖ Lain-lain PAD yang Sah justru menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif -13,17%.
- 2) Pendapatan Transfer tumbuh rata-rata 1,63% per tahun yang terdiri dari:
 - ❖ Transfer dari Pemerintah Pusat tumbuh lebih rendah, yaitu 1,14%.
 - ❖ Transfer Antar Daerah tumbuh lebih tinggi, yaitu 14,60%.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan rata-rata -19,93%.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kota Padang Panjang tumbuh moderat dengan kontribusi terbesar dari pendapatan transfer, sementara PAD

menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik terutama didorong oleh pajak dan retribusi daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uang untuk pelayanan publik. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah, maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kota Padang Panjang selama periode 2020-2024. Sehingga dapat di gunakan sebagai salah satu pedoman untuk menentukan kebijakan belanja daerah periode 2025-2029 untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Kota padang panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2020 s/d 2024

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Tingkat Pertumbuhan
1	2020	593.388.193.076,43	544.006.534.759,84	91,68%	
2	2021	622.193.172.395,00	555.719.900.371,67	89,32%	2,15%
3	2022	616.638.674.470,00	545.209.090.060,57	88,42%	-1,89%
4	2023	627.319.623.960,00	560.604.099.846,51	89,36%	2,82%
5	2024	673.273.185.861,66	625.753.832.103,60	92,94%	11,62%
Rata- Rata		638.820.730.042	569.871.510.285	90,36	3,68%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas Realisasi belanja daerah berkisar antara 88,42% hingga 92,94% dari target yang ditetapkan. Rata-rata realisasi selama periode 2020-2024 adalah 90,36%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Pemerintah Kota Padang Panjang mampu merealisasikan sebagian besar anggaran belanja yang telah direncanakan

Tingkat pertumbuhan belanja daerah bervariasi dari tahun ke tahun pada tahun 2021, belanja daerah tumbuh sebesar 2,15%, tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -1,89%, tahun 2023 kembali tumbuh positif sebesar 2,82% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 11,62%.

Pemerintah Kota Padang Panjang secara konsisten merealisasikan sekitar 90% dari target belanja daerah setiap tahun, Tingkat pertumbuhan

belanja daerah fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama periode 2020-2024 adalah sebesar 3,68%.

Untuk melihat pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Padang Panjang periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2020 - 2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN
BELANJA DAERAH	544.006.534.759,84	555.719.900.371,67	545.209.090.060,57	560.604.099.846,51	625.753.832.103,60	3,68%
BELANJA OPERASI	463.863.739.212,97	497.085.255.883,51	500.946.024.159,19	500.526.647.773,12	553.232.938.495,14	4,60%
Belanja Pegawai	243.421.203.426,00	277.397.396.272,00	274.854.709.130,00	269.913.737.971,00	311.212.828.135,00	6,64%
Belanja Barang dan Jasa	216.466.466.427,97	211.448.725.752,21	215.702.732.760,19	213.027.916.239,39	214.426.378.424,14	-0,22%
Belanja Subsidi	-	-	-	-	4.456.800,00	
Belanja Hibah	3.541.647.559,00	6.530.264.177,00	5.533.245.269,00	14.925.838.562,73	17.174.049.136,00	63,48%
Belanja Bantuan Sosial	434.421.800,00	1.708.869.682,30	4.855.337.000,00	2.659.155.000,00	10.415.226.000,00	180,98%
BELANJA MODAL	54.603.589.783,87	58.117.257.988,16	44.125.315.551,38	60.005.452.073,39	71.751.888.415,46	9,48%
Belanja Modal Tanah	17.466.718.833,00	20.617.652.200,00	-	-	9.421.400,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.850.495.356,30	18.046.108.011,44	8.619.083.038,55	8.180.468.257,00	14.731.124.143,00	7,46%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.663.481.704,67	10.230.551.413,04	19.894.170.109,27	41.765.626.953,65	39.342.022.232,00	58,02%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.201.107.926,89	6.721.942.992,68	14.267.020.506,56	9.223.976.168,74	16.570.946.513,46	34,63%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.211.260.463,01	2.501.003.371,00	1.345.041.897,00	835.380.694,00	1.004.874.127,00	-26,11%
Belanja Modal Aset Lainnya	210.525.500,00	-	-	-	93.500.000,00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.539.205.763,00	517.386.500,00	137.750.350,00	72.000.000,00	769.005.193,00	187,25%
Belanja Tidak Terduga	25.539.205.763,00	517.386.500,00	137.750.350,00	72.000.000,00	769.005.193,00	187,25%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 adalah 3,68% per tahun. Belanja Daerah secara keseluruhan tumbuh rata-rata 3,68% terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi tumbuh lebih tinggi, yaitu 4,60% terdiri dari
 - a) Belanja Pegawai tumbuh signifikan sebesar 6,64% per tahun.
 - b) Belanja Barang dan Jasa relatif stagnan dengan pertumbuhan negatif kecil -0,22%.
 - c) Belanja Subsidi mulai muncul pada 2024 dengan nilai kecil.
 - d) Belanja Hibah tumbuh sangat tinggi, mencapai 63,48% (karena hibah uang ke KPUD, Bawaslu, Kapolres pada tahun 2023 dan 2024 untuk pelaksanaan pilkada)
 - e) Belanja Bantuan Sosial juga meningkat tajam dengan pertumbuhan 180,98%.
- 2) Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan rata-rata 9,48%, dengan rincian:
 - a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tumbuh 58,02%.
 - b) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tumbuh 34,63%.
 - c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin tumbuh 7,46%.

- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurun -26,11%.
- 3) Belanja Tidak Terduga mengalami lonjakan sangat tinggi dengan pertumbuhan 187,25% hal ini disebabkan penganggaran belanja tidak terduga pada tahun 2020 untuk penanganan pandemi covid 19 yakni sebesar Rp.25.539.205.763,- kemudian sedikit mengalami penambahan juga di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini dikarenakan untuk penanganan banjir bandang yang terjadi pada bulan Mei tahun 2024.

Secara umum belanja daerah menggambarkan bahwa Kota Padang Panjang meningkatkan alokasi belanja modal dan bantuan sosial secara signifikan terutama pada tahun 2024 paska terjadinya bencana banjir bandang erupsi Gunung Marapi yang menyebabkan terputusnya akses utama Padang-Padang Panjang. Sementara itu belanja pegawai juga mengalami peningkatan yang cukup besar, belanja barang dan jasa relatif stabil, kemudian belanja tidak terduga dan hibah menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, hal ini menandakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak dan program-program strategis daerah.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Penerimaan pembiayaan selama 5 tahun hanya dilakukan 1 kali pada tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000.000,- serta realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,05 persen. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.126
Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2020–2024

URAIAN	TAHUN 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	RATA- RATA PERTUM- BUHAN
PEMBIAYAAN	50.810.925.555,99	65.526.639.168,47	58.710.083.113,46	48.615.812.049,73	49.002.570.238,66	0,54%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.810.925.555,99	65.526.639.168,47	58.710.083.113,46	48.615.812.049,73	50.002.570.238,66	1,05%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.810.925.555,99	65.526.639.168,47	58.710.083.113,46	48.615.812.049,73	50.002.570.238,66	1,05%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	1.000.000.000,00	
Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	1.000.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO	50.810.925.555,99	65.526.639.168,47	58.710.083.113,46	48.615.812.049,73	49.002.570.238,66	0,54%

URAIAN	TAHUN 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	RATA- RATA PERTUM- BUHAN
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Padang panjang tahun 2020-2024 didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang konsisten setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan 1,05%. Untuk pengeluaran pembiayaan baru terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari, sebagai investasi modal dari pemerintah daerah.

Sedangkan pembiayaan netto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan) menunjukkan tren stabil dengan rata-rata pertumbuhan 0,54% per tahun.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca Daerah Kota Padang Panjang adalah data yang menyajikan posisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

A. Aset

Aset Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang selama periode Tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,59 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Aset lancar mengalami pertumbuhan minus sebesar 13,59 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,98 persen, dan Aset lainnya minus sebesar 1,42 persen. Dan Investasi jangka panjang tidak mengalami pertumbuhan.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 12,24 persen. Peningkatan kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp14.548.634.631,66 pada tahun 2024.

C. Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang selama Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan secara bertahap. Berdasarkan dari Laporan posisi Keuangan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, pada periode tersebut ekuitas mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 2,57 persen. Gambaran neraca daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu

Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.127 Neraca Kota Padang Panjang Tahun 2020 -2024

NO	URAIAN	TAHUN					RATA- RATA PERTUM- BUHAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET	1.249.655.188.297,43	1.290.185.671.093,71	1.274.558.595.403,62	1.395.244.975.193,44	1.379.459.549.467,69	2,59
	A. Aset Lancar	80.233.449.452,22	93.740.150.473,19	86.502.615.300,46	76.320.938.956,06	36.862.429.028,68	(13,59)
	B. Investasi Jangka Panjang	54.004.795.036,88	54.145.182.036,03	54.355.282.529,73	54.506.956.656,56	54.007.822.541,62	0,00
	C. Aset Tetap	1.072.041.659.198,83	1.096.419.035.252,99	1.087.776.317.343,93	1.219.865.853.490,32	1.247.853.975.355,89	3,98
	D. Aset Lainnya	43.375.284.609,50	45.881.303.331,50	45.924.380.229,50	44.551.226.090,50	40.735.322.541,50	(1,42)
	JUMLAH ASET	1.249.655.188.297,43	1.290.185.671.093,71	1.274.558.595.403,62	1.395.244.975.193,44	1.379.459.549.467,69	2,59
2	KEWAJIBAN	12.632.361.642,70	7.863.151.161,77	11.416.541.826,80	18.685.826.286,04	14.548.634.631,66	12,24
	A. Kewajiban Jangka Pendek	12.632.361.642,70	7.863.151.161,77	11.416.541.826,80	18.685.826.286,04	14.548.634.631,66	12,24
	B. Kewajiban Jangka Panjang	- ,00					
	JUMLAH KEWAJIBAN	12.632.361.642,70	7.863.151.161,77	11.416.541.826,80	18.685.826.286,04	14.548.634.631,66	12,24
3	EKUITAS	1.237.022.826.654,73	1.282.322.519.931,94	1.263.142.053.576,82	1.376.559.148.907,40	1.364.910.914.836,03	2,57
	Ekuitas	1.237.022.826.654,73	1.282.322.519.931,94	1.263.142.053.576,82	1.376.559.148.907,40	1.364.910.914.836,03	2,57
	JUMLAH EKUITAS	1.237.022.826.654,73	1.282.322.519.931,94	1.263.142.053.576,82	1.376.559.148.907,40	1.364.910.914.836,03	2,57
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.249.655.188.297,43	1.290.185.671.093,71	1.274.558.595.403,62	1.395.244.975.193,44	1.379.459.549.467,69	2,59

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Aset Kota Padang Panjang tumbuh rata-rata 2,59% per tahun, dengan komponen terbesar adalah aset tetap yang tumbuh lebih tinggi yaitu 3,98% per tahun. Aset Lancar justru mengalami penurunan signifikan rata-rata -13,59%, terutama pada tahun 2024.

Sedangkan untuk kewajiban (kewajiban jangka pendek) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 12,24%, menunjukkan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek yang perlu diperhatikan. Sedangkan ekuitas daerah tumbuh stabil sekitar 2,57% per tahun, mencerminkan peningkatan nilai bersih aset setelah dikurangi kewajiban. Total kewajiban dan ekuitas selalu seimbang dengan total aset, sesuai prinsip neraca

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi keuangan daerah adalah perkiraan atau rencana keuangan pemerintah daerah untuk periode tertentu di masa depan, yang mencakup estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran tahunan (APBD) dan membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan

efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, proyeksi keuangan daerah meliputi Perkiraan Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Perkiraan Belanja Daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai prioritas pembangunan daerah. Perkiraan Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi ini disusun berdasarkan analisis kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, tren pendapatan dan belanja sebelumnya, serta rencana strategis pembangunan daerah. Proyeksi keuangan daerah menjadi alat penting dalam proses penyusunan APBD dan pengambilan keputusan fiskal untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan pencapaian target pembangunan daerah. Dengan demikian, proyeksi keuangan daerah adalah fondasi perencanaan keuangan yang membantu pemerintah daerah mengantisipasi kebutuhan dana dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam jangka menengah.

Keberhasilan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tentunya harus didukung oleh kemampuan pendanaan daerah yang kuat dalam membiayai pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan atau 2026 – 2030 sangat perlu di dukung oleh kerangka pendanaan yang merupakan proyeksi pendanaan daerah yang di sajikan berdasarkan hasil analisa perhitungan kapasitas riil keuangan daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah tentunya identifikasi sumber-sumber penerimaan daerah tentunya menjadi dasar utama untuk menentukan proyeksi belanja pembangunan daerah. Perencanaan anggaran yang tepat adalah kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah, penekanan terhadap pentingnya alokasi sumber daya publik yang efisien dan adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan meminimalkan biaya sosial.

Dalam konteks ini, proyeksi anggaran dari tahun 2025 hingga 2030 bukan hanya sebagai alat untuk meramalkan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menerapkan strategi yang terukur dan efektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menyusun perencanaan anggaran daerah sebagai wujud kerangka pendanaan pembangunan daerah. Penentuan kebijakan keuangan

yang tepat tentunya harus berdasarkan pada analisis yang cermat terhadap risiko dan keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dengan belanja yang direncanakan.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

Proyeksi Pendapatan Daerah merupakan perkiraan atau estimasi jumlah pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu (biasanya tahunan atau lima tahunan), yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan RPJMD.

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2020-2024, maka untuk tahun 2026-2030 pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Sejalan dengan misi jangka panjang Kota Padang Panjang, yaitu melakukan transformasi, maka secara umum arah kebijakan pendapatan daerah secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah sebagai pijakan penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah yang diawali dengan penyusunan peta jalan kemandirian fiskal secara komprehensif yang diokuskan pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.
- 2) Reformasi kebijakan fiskal daerah melalui perbaikan basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi. Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.
- 3) Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, e- wallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.
- 5) Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini

sekalius meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

- 6) Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergal. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.
- 7) Melakukan Performance-Based Revenue Targeting per OPD, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Secara lebih rinci Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026-2030 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Penguatan Pajak Daerah melalui:
 - 1) Digitalisasi sistem pajak daerah (e-tax, e-BPHTB, e-PBB, dll.).
 - 2) Penyesuaian tarif dan basis pajak berdasarkan potensi riil (PBB, pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dll.).
 - 3) Ekstensifikasi wajib pajak (menambah jumlah WP melalui pendataan ulang objek/subjek pajak).
 - 4) Mendorong transparansi dan kepatuhan melalui edukasi dan insentif.
 - 5) Optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui:
 - a) Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang saat ini hanya sekitar 50-60% melalui penggunaan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.
 - b) Melaksanakan Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
 - c) Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.



- b. Revitalisasi Retribusi Daerah melalui :
 - 1) Evaluasi tarif retribusi secara berkala agar sesuai nilai layanan.
 - 2) Digitalisasi retribusi pasar, parkir, sampah, dan pelayanan publik.
 - 3) Minimalisasi kebocoran pungutan tunai, dorong sistem non-tunai.
 - 4) Penataan ulang unit pelayanan retribusi
- c. Optimalisasi BUMD dan Aset Daerah
 - 1) Revitalisasi BUMD yang tidak produktif, atau restrukturisasi model bisnis
 - 2) Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga.
 - 3) Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
 - 4) Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
 - 5) Menjalin kemitraan dengan lembaga Nasional/internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.
- d. Penguatan Lain-Lain PAD yang Sah melalui:
 - 1) Pengaturan ulang mekanisme pendapatan dari jasa giro, surplus BLUD, denda/sanksi, dan kontribusi pihak ketiga.
 - 2) Pastikan ketepatan klasifikasi pendapatan, agar tidak terjadi pencatatan double atau kesalahan agregasi.
- e. Digitalisasi Pendapatan Daerah Real-Time, melalui :
 - a) Pengembangan Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi secara real-time untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh pemerintah daerah.
 - b) Integrasi Data Pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
 - c) Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan.
- f. Menerapkan (Smart Fiscal Management): menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien, melalui:
 - a) Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility yakni Pemerintah

Daerah harus menjaga keseimbangan antara fixed cost dan variable cost, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio fixed cost harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran variable cost, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

b) Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring, yakni sebuah sistem yang diimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara e-budgeting dan e-monitoring dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem real-time data analytics, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Kebijakan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Kebijakan dan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi merupakan strategi yang sangat penting bagi pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Padang Panjang, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah yang masih cukup bergantung pada transfer pemerintah pusat. Untuk mengoptimalkan pendapatan transfer ditengah stagnasi dana transfer, maka arah kebijakan kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong efisiensi belanja daerah
- 2) Mempercepat penggalan sumber-sumber PAD baru
- 3) Memperkuat kinerja aset daerah
- 4) Membangun kerjasama kemitraan dengan sektor swasta
- 5) Menggali potensi skema pembiayaan inovatif
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kolaborasi pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah tersebut, sehingga proyeksi pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030 dengan mempertimbangkan analisis pendapatan daerah yang terukur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.128
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH	572.656.518.317	550.295.478.000	66.653.387.900	586.038.076.779	06.522.245.547	628.929.824.302
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.737.235.317	136.675.100.000	50.354.500.000	165.608.200.000	81.920.070.000	200.113.627.000
Pajak Daerah	20.372.697.142	24.760.000.000	27.090.000.000	30.290.000.000	32.485.000.000	36.550.000.000

URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
Retribusi Daerah	76.740.473.872	101.445.100.000	111.747.500.000	122.649.500.000	135.499.500.000	148.234.500.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000	8.000.000.000	8.800.000.000	9.680.000.000	10.648.000.000	11.712.800.000
Lain-lain PAD yang Sah	7.624.064.303	2.470.000.000	2.717.000.000	2.988.700.000	3.287.570.000	3.616.327.000
PENDAPATAN TRANSFER	459.919.283.000	413.620.378.000	16.298.887.900	420.429.876.779	24.602.175.547	428.816.197.302
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	439.728.237.000	393.429.332.000	95.998.887.900	399.926.876.779	03.894.145.547	407.901.087.002
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.355.761.000	8.355.761.000	8.439.318.610	8.523.711.796	8.608.948.914	8.695.038.403
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tidak Ditentukan Penggunaannya	337.314.137.000	337.314.137.000	40.687.278.370	344.094.151.154	47.535.092.665	351.010.443.592
DAU yg Ditentukan Penggunaannya	50.953.164.000	47.759.434.000	46.872.290.920	47.309.013.829	47.750.103.967	48.195.605.007
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.164.455.000	43.164.455.000	43.164.455.000	43.164.455.000	43.164.455.000	43.164.455.000
Insentif FISKAL	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.375.528.523	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.375.528.523	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Dari proyeksi pendapatan daerah Kota Padang Panjang tahun 2026-2030 dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp 550,295 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 628,930 miliar pada tahun 2030. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mengalami pertumbuhan signifikan, hampir dua kali lipat dari Rp136,675 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp200,114 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini didorong oleh :

1. Pajak Daerah: Diproyeksikan meningkat dari Rp24,76 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp36,55 miliar pada tahun 2030.
2. Retribusi Daerah: Diharapkan meningkat signifikan dari Rp101,445 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp148,235 miliar pada tahun 2030.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Relatif stabil di angka Rp 8-11 miliar.
4. Lain-lain PAD yang Sah: Cenderung stabil di angka Rp2-3 miliar.

Pendapatan Transfer: Diproyeksikan meningkat tipis dari Rp413,62 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp428,82 miliar pada tahun 2030. Komponen utama meliputi:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Mengalami sedikit kenaikan dari Rp393,43 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp407,90 miliar pada tahun 2030 hanya untuk mengakomodir potensi kenaikan gaji tiap tahun.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari bagi hasil pajak: Cukup stabil di angka Rp20 miliar.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Tidak ada proyeksi untuk komponen ini selama periode 2026-2030.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kota Padang Panjang menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini mengindikasikan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga diharapkan stabil, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah.

2.2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

Proyeksi kebijakan belanja daerah Kota Padang Panjang akan memfokuskan pada kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi belanja juga akan mendanai urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
2. Belanja daerah difokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas.
3. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan difokuskan untuk menunjang Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Nasional antara lain :
 - a) Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan;
 - b) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - c) Pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - e) Dukungan swasembada pangan; dan
 - f) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Pemenuhan belanja BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, belanja yang didanai dari DAK dan belanja-belanja yang wajib untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pengalokasian belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) menuju 30% (tiga puluh

persen) dari total belanja APBD.

6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja Kota Padang Panjang tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.129
Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030

N O	URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
	BELANJA DAERAH	579.992,019,272,94	550.295.478.000	566.653.387.900	586.038.076.779	606.522.245.547	628.929.824.302
I	BELANJA OPERASI	512,432,998,107,94	495.295.478.000	487.653.387.900	510.038.076.779	504.522.245.547	494.929.824.302
1	Belanja Pegawai	284,035,654,345,06	249.097.896.775	239.097.896.775	237.097.896.775	235.097.896.775	233.097.896.775
2	Belanja Barang dan Jasa	212,561,720,344,88	231.697.581.225	232.655.491.125	249.540.180.004	239.024.348.772	244.431.927.527
3	Belanja Subsidi	134,546,684,00	500.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4	Belanja Hibah	7,366,554,916,00	7.000.000.000	7.000.000.000	14.000.000.000	20.000.000.000	7.000.000.000
5	Belanja Bantuan Sosial	8,334,521,818,00	7.000.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
II	BELANJA MODAL	65,959,021,165,00	53.000.000.000	77.000.000.000	74.000.000.000	100.000.000.000	132.000.000.000
1	Belanja Modal Tanah	-	-	25.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,480,435,995,00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,165,625,527,00	43.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	65.000.000.000	92.000.000.000
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20,659,288,070,00	5.000.000.000	7.000.000.000	9.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	653,671,573,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1	Belanja Tidak Terduga	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp550,3 miliar pada 2026 menjadi Rp628,9 miliar pada 2030. Belanja Operasi menjadi komponen terbesar, namun diperkirakan mengalami sedikit penurunan dari Rp495,3 miliar (2026) menjadi sekitar Rp494,9 miliar (2030), dengan pengurangan bertahap pada belanja pegawai. Belanja Pegawai diproyeksikan menurun secara bertahap, dari Rp249 miliar pada 2026 menjadi Rp233 miliar pada 2030, menandakan efisiensi pengelolaan SDM.

Belanja Barang dan Jasa relatif stabil dengan kecenderungan naik pada tahun 2028. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mengalami fluktuasi,

dengan puncak alokasi pada 2029.

Belanja Modal diperkirakan meningkat signifikan dari Rp53 miliar pada 2026 menjadi Rp132 miliar pada 2030, dengan peningkatan besar pada belanja modal gedung dan bangunan serta jalan dan irigasi. Sedangkan Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 2 miliar per tahun secara konsisten.

Secara umum arah kebijakan belanja menunjukkan efisiensi pada belanja rutin dan peningkatan investasi modal. Prioritas pengeluaran ke sektor infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Perlu diiringi dengan penguatan kapasitas fiskal, agar tidak mengandalkan pembiayaan defisit.

A. Proyeksi Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark (terutama Proyeksi Belanja Pegawai dan Belanja Modal)

Penentuan prioritas rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030 mengacu sepenuhnya pada Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa :

1. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :
 - a) Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
 - b) Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
2. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Proyeksi belanja pada Tabel 2.129 telah mempertimbangkan kebutuhan optimal untuk Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

- a) Proyeksi belanja pegawai sudah diproyeksikan turun dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 (maksimal 30%)

Tabel 2.130 Proyeksi Belanja Pegawai Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI			
	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH	592,550,001,000	610,298,701,000	626,105,571,000	644,794,128,000
BELANJA PEGAWAI	196,665,000,300	201,989,610,300	206,731,671,300	212,338,238,400
Tunjangan Guru	18,996,541,000	18,996,541,000	18,996,541,000	18,996,541,000
Belanja Pegawai – Tunjangan Guru	177,668,459,300	182,993,069,300	187,735,130,300	193,341,697,400
Rasio Belanja Pegawai (dikurangi Tunjangan Guru) dari Belanja Daerah	29.98	29.98	29.98	29.99

- b) Proyeksi belanja modal diproyeksi naik dari tahun ke tahun dengan proyeksi yang disesuaikan dengan pentahapan program prioritas (minimal 40%)

Tabel 2.131 Proyeksi Belanja Modal Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI			
	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH	592,550,001,000	610,298,701,000	626,105,571,000	644,794,128,000
BELANJA MODAL (A)	242,900,000,000	250,500,000,000	258,000,000,000	265,000,000,000
BELANJA HIBAH MENDUKUNG INFRASTRUKTUR PUBLIK (B)	-	-	-	-
BELANJA INFRASTRUKTUR LAINNYA (JIKA ADA) (C)	-	-	-	-
TOTAL A+B+C	262,900,000,000	270,500,000,000	278,000,000,000	285,000,000,000
BELANJA DAERAH	592,550,001,000	610,298,701,000	626,105,571,000	644,794,128,000
BELANJA TRANSFER	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000
Belanja Daerah – Belanja Transfer	592,550,001,000	609,498,701,000	625,305,571,000	643,994,128,000
Rasio Belanja Infrastruktur Publik dari Belanja Daerah (dikurangi Belanja Transfer)	44.37	44.38	44.46	44.26

Proyeksi Prioritas belanja juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

B. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan earmark merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi utang untuk tahun berikutnya. Hal ini

berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam APBD seperti gaji, honor tenaga harian, pembayaran rekening listrik, air dll. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

C. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah potensi pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan mengelola keuangan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Perhitungan pendapatan yang dibuat pada tabel 2.128 sudah memperhitungkan potensi pendapatan maksimal yang dapat diperoleh oleh Kota Padang Panjang. Mengingat terbatasnya sumber PAD Kota Padang Panjang, maka proporsi PAD terhadap total APBD berada pada angka 20-30%.

2.2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang Panjang tahun 2026-2030 adalah:

1. Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber utama pembiayaan daerah untuk menutup defisit atau mendukung investasi daerah diasumsikan nol

setiap tahunnya dan akan dialokasikan pada perubahan APBD tahun berjalan.

2. Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Penyertaan modal Pemerintah Daerah direncanakan untuk penyertaan modal terhadap perusahaan daerah di Kota Padang Panjang.
3. Efisiensi Belanja Daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong pengelolaan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.132
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN	6.451. 405.669,94	-10 M	-13 M	-10 M	-10 M	-9 M
A. Penerimaan Pembiayaan	6.451. 405.669,94	0	0	0	0	0
B. Pengeluaran Pembiayaan	0	10 M	13 M	10 M	10 M	9 M
PEMBIAYAAN NETTO	6.451. 405.669,94	-10 M	-13 M	-10 M	-10 M	-9 M

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada Bab ini akan dipaparkan permasalahan yang dianggap menjadi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang dan perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan secara terstruktur dan konkrit dalam bentuk program, kegiatan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam hal ini tentu saja permasalahan utama pembangunan daerah akan menjadi prioritas sesuai dengan periode/ waktu perencanaan. Disamping itu, juga dipaparkan isu strategis daerah, dimana isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan harapan bahwa identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah akan menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang ke depan.

2.1.1 Identifikasi Permasalahan

Bagian ini mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan pembangunan daerah Kota Padang Panjang sebagai hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun lalu dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan beberapa urusan yang berpengaruh. Identifikasi permasalahan pembangunan menggunakan tiga kriteria yaitu: (a) cakupan masalah dan dampak yang ditimbulkan; (b) merupakan masalah yang terus menerus terjadi sehingga menghambat proses pembangunan dan (c) masalah tersebut terkait dengan komponen utama pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.133
Identifikasi Permasalahan di Kota Padang Panjang

Akar Masalah	Permasalahan
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFIS	
1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	
- Terjadi kenaikan suhu rata-rata dan suhu maksimum - Penurunan kelembaban maksimum - Variasi curah hujan dan fluktuasi penyinaran matahari	Perubahan Iklim membuat meningkatnya risiko bencana
Kota ini berada di jalur lintasan regional, posisi ini memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan pengelolaan lalu lintas, urbanisasi cepat, dan tekanan pembangunan, permasalahan lingkungan	Posisi Strategis namun daya saing belum optimal
1.2 Potensi Sumber Daya Alam	
Semakin berkurangnya lahan pertanian	Berkurangnya hasil produksi pertanian
1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	
- Kenaikan ini relatif kecil dan cenderung stagnan, dengan fluktuasi tipis setiap tahun - Ketergantungan pada Sumber Energi Konvensional	Meskipun jumlah penduduk dan listrik terjual meningkat, konsumsi listrik per kapita hanya naik sedikit
- IKP Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi yang menunjukkan ketahanan pangan yang belum stabil dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. - Pengurangan Lahan Pertanian dan	- Ketahanan pangan belum stabil dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. - Berkurangnya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk

Akar Masalah	Permasalahan
Ketergantungan pada Pasokan Luar Jumlah produksi padi tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk	
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan - Pangan yang dikonsumsi masyarakat Kota Padang Panjang belum beragam dan seimbang (masih kurang mengonsumsi sayur, buah dan ubi-ubian namun berlebih padi-padian, lemak dan minyak)	Masih banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara nutrisi
1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas	
- Kota Padang Panjang berada di hilir dari sistem sungai yang hulunya berada di Kabupaten Tanah Datar. - Kontaminasi air sudah terjadi sejak di wilayah hulu, sehingga Padang Panjang menerima air yang sudah tercemar sejak awal masuk ke wilayahnya.	Rendahnya mutu kualitas air akibat pencemaran Sungai
- Masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestik langsung ke sungai, terutama limbah tinja. - Hal ini menyebabkan tingginya kadar fecal coli, yang sangat mempengaruhi nilai IKA. - Edukasi, pengawasan, dan sanksi terhadap pembuangan limbah tidak berjalan optimal.	Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sanitasi
- Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal atau tangki septik yang layak. - Pemukiman padat atau di bantaran sungai mungkin tidak memiliki akses ke sistem sanitasi tertutup.	Belum memadainya Infrastruktur Pengelolaan Limbah
- Tidak ada atau minimnya pengawasan rutin terhadap kualitas air dan aktivitas pencemar. - Penegakan aturan lingkungan hidup masih lemah, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha (jika ada) yang mencemari air.	Kurangnya Monitoring dan Penegakan Hukum
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali	Penurunan kualitas tutupan lahan
Penurunan nilai IKTL mempengaruhi IKLH	Kualitas lingkungan hidup menurun
- Fluktuasi persentase sampah terolah akibat sistem pengelolaan yang belum optimal - Total timbulan sampah yang terus meningkat	Belum optimalnya pengelolaan timbulan sampah terolah
Tantangan dalam pengelolaan sampah	Kapasitas dan efisiensi fasilitas

Akar Masalah	Permasalahan
organik dan daur ulang material	pengolahan sampah terbatas
Cakupan layanan pengumpulan sampah yang masih sangat rendah (di bawah 10% rumah tangga)	Sebagian besar rumah tangga belum mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah
Keterbatasan armada dan sistem pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah belum merata dan optimal
- Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan volume sampah. - Gaya hidup konsumtif dan penggunaan produk sekali pakai memperbanyak sampah non-organik (plastik, kemasan, dsb). - Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya (reduce, reuse, recycle / 3R).	TPA sudah melebihi kapasitas daya tampung
- Pengelolaan limbah B3 masih bergantung pada pihak ketiga - Limbah B3 belum sepenuhnya terkelola secara efektif	- Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 - Masih rendahnya cakupan sanitasi aman
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
- Belum tersedianya Dokumen Kebencanaan (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontingensi), sehingga kegiatan yang dilakukan selama ini belum terarah dengan baik. - Nilai Indeks risiko Bencana stagnan sejak 2015 meskipun ada perubahan risiko	Belum optimalnya mitigasi bencana
2.1.7 Demografi	
Belum optimalnya sebaran infrastruktur kewilayahan	Tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayah terutama pada kec.ppb
- Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) tinggi, dengan dependency ratio muda sebesar 38,94% - Mayoritas penduduk berada pada usia produktif (67,31%), namun lapangan kerja didominasi sektor jasa	- Beban pada sistem pendidikan dan kesehatan meningkat, kebutuhan fasilitas dan tenaga pendidik serta kesehatan bertambah - Risiko pengangguran terselubung dan kurangnya diversifikasi ekonomi, potensi bonus demografi belum optimal
Ketergantungan penduduk tua mulai meningkat (9,62%)	Kebutuhan layanan sosial dan kesehatan lansia meningkat, potensi beban jangka panjang jika tidak diantisipasi
Tingkat pendidikan didominasi lulusan SMA ke atas (66,4%), namun proporsi lulusan SD dan SLTP masih signifikan	Masih ada kelompok masyarakat dengan keterampilan rendah

Akar Masalah	Permasalahan
Komposisi pekerjaan didominasi sektor jasa (22.197 orang), pertanian dan manufaktur jauh lebih kecil	Belum optimalnya pengembangan sektor jasa untuk mendukung perekonomian
2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
2.1 Kesejahteraan Ekonomi	
Belum optimalnya pengelolaan ekonomi lokal	laju pertumbuhan ekonomi relatif stagnan cenderung menurun
- Kurangnya diversifikasi sumber penghasilan: Ketergantungan pada sektor tertentu membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi. - Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dan keterampilan: Masyarakat miskin seringkali memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan pelatihan keterampilan. - Mental masyarakat yang cenderung mengandalkan bantuan dari Pemerintah	Tren Kemiskinan yang Fluktuatif dan Cenderung Naik
- Banyak pencari kerja belum memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan lapangan usaha - Meningkatnya jumlah pencari kerja - Kurang tersedianya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka fluktuatif dan cenderung naik
Masih Adanya Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Penurunan gini ratio relatif lambat.
2.2 Kesehatan untuk Semua	
- Pemenuhan 12 indikator IKS (seperti imunisasi lengkap, KB, sanitasi, dll) masih rendah - Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum membudaya - Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak masih terbatas di beberapa wilayah - Kurangnya intervensi promotif dan preventif oleh Puskesmas	IKS Kota Padang Panjang masih berada di kategori "keluarga tidak sehat"
- Asupan gizi ibu hamil dan balita belum tercukupi - Pemantauan tumbuh kembang anak tidak rutin - Edukasi gizi kepada keluarga belum intensif - Masih ada keluarga yang tidak memanfaatkan Posyandu secara aktif	Masih ada balita yang mengalami stunting, menunjukkan masalah gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak belum optimal.
Kepatuhan pasien rendah karena	Penemuan kasus TB meningkat,

Akar Masalah	Permasalahan
pengobatan lama dan efek samping obat • Sistem pelacakan dan pengawasan pasien TB (DOTS) belum kuat • Kurangnya edukasi mengenai pentingnya pengobatan tuntas • Under-reporting oleh fasilitas layanan kesehatan swasta atau mandiri	namun banyak pasien tidak menyelesaikan pengobatan (lose follow-up), under-reporting, dan kepatuhan pasien rendah
2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	
• Peningkatan RLS lambat, hanya naik sedikit tiap tahun.	Masih ada masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
• Literasi meningkat sangat lambat, numerasi stagnan	Kualitas pembelajaran numerasi dan literasi belum optimal
• Kompetensi dan distribusi guru belum merata	
• Kurangnya infrastruktur yang memadai	Belum optimal peningkatan indek pembangunan literasi masyarakat
• Rendahnya minat baca	
2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	
• Masih adanya kelompok rentan tetap tidak terlindungi dari risiko ekonomi, kecelakaan kerja, dan tidak memiliki jaminan hari tua	Penurunan persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meski jumlah peserta stabil, diakibatkan bertambahnya penduduk usia kerja
• Kurangnya akses dan kesempatan kerja layak bagi penyandang disabilitas di sektor formal, serta implementasi kebijakan yang belum optimal	Rendahnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
• Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya	Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar
• Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku seni	Rendahnya tingkat partisipasi pelaku seni
• Penurunan fungsi pemangku adat dan ulama akibat disruptsi teknologi	Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat pada generasi muda
• Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional	Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat
2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
• Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya	Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar
• Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku seni	Rendahnya tingkat partisipasi pelaku seni
• Penurunan fungsi pemangku adat dan	Kurangnya pemahaman terhadap nilai-

Akar Masalah	Permasalahan
ulama akibat disrupted teknologi	nilai agama dan adat pada generasi muda
Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional	Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat
2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
- Masih adanya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi anak. - Lemahnya regulasi terkait perlindungan khusus anak - Belum adanya sistem pelaporan terintegrasi terkait permasalahan anak - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menindak lanjuti permasalahan anak	Belum terwujudnya sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.
- Masih rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) belum merata. - Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pola asuh - Masih terdapatnya kasus pernikahan dini - Belum optimalnya program bangga kencana	Nilai iBangga masih dalam kategori berkembang, belum mencapai kategori tangguh.
- Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan - Rendahnya pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
3 ASPEK DAYA SAING DAERAH	
3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	
Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan vokasi	Rendahnya daya saing tenaga kerja
3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
- Kurangnya diversifikasi produk industri pengolahan dan inovasi menyebabkan daya saing sektor ini kurang optimal dalam menghadapi persaingan pasar regional dan global - Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri pengolahan	Menurunnya kontribusi PDRB Industri Pengolahan
- Belum optimalnya daya tarik wisata - Belum optimalnya promosi pariwisata	Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB

Akar Masalah	Permasalahan
Fasilitas pendukung seperti ruang kreatif, akses teknologi, dan sarana produksi masih terbatas	Belum optimalnya perkembangan ekonomi kreatif
Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan	
Kurangnya Jaringan Promosi dan Pemasaran yang Efektif	
Keterbatasan Tenaga Kerja Kreatif dan SDM Terampil	
Sebagian besar koperasi masih bergerak di usaha simpan pinjam, perlu mendorong hadirnya banyak koperasi berbasis produk/jasa/perdagangan (koperasi sektor riil)	Masih rendahnya kontribusi koperasi dalam perekonomian kota padang panjang
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah - Banyak orang lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal yang dianggap lebih stabil dan bergaji tetap, sehingga minat untuk menjadi wirausaha rendah - Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan	Belum optimalnya rasio kewirausahaan
	Tingkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja fluktuatif dan cenderung naik
- Perempuan seringkali harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan produktif, sehingga mengurangi kesempatan bekerja di sektor formal. - Minimnya fasilitas yang mendukung perempuan bekerja, seperti tempat penitipan anak dan kebijakan ramah gender di tempat kerja.	Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
Masih rendahnya asset dan omset industri	Belum adanya industri kecil
3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	
- Belum optimalnya pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian (PIHP) Bukit Surungan. - Populasi Sapi perah yang terus menurun - Teknologi pengolahan susu belum optimal - Produksi susu tidak semuanya terserap pasar - Belum semua petani tergabung dalam kelompok tani agar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi - Alokasi pupuk belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan petani pada	Rendahnya PDRB Sektor Pertanian

Akar Masalah	Permasalahan
RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) - Masih adanya petani yang tidak melakukan penebusan pupuk sesuai dengan RDKK yang telah disusun sebelumnya - Belum meratanya kios pengecer di tiap kecamatan - Masih terjadinya penebusan pupuk diatas HET - Masih ditemui kondisi stok pupuk tidak tersedia di kios pengecer - Tidak semua jenis komoditi pertanian mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi	
Rendahnya minat masyarakat bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.	Belum optimalnya Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
3.4 Transformasi Digital	
Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana produktivitas	Belum optimalnya nilai Indeks Masyarakat Digital
Masih belum terbentuknya Relawan TIK	
3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
- Rendahnya minat investasi baru - Kurangnya insentif investasi - Keterbatasan lahan - Diversifikasi produk ekspor kurang - Daya saing produk rendah	Belum optimalnya nilai investasi dan ekspor barang dan jasa
3.6 Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar	Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur
Belum optimalnya ketersediaan/pengelolaan gedung strategis kota	
Kurangnya sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman	
Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian	masih belum optimalnya rumah tangga dengan akses hunian layak (data https://sumbar.bps.go.id)
Masih cukup tingginya angka kemiskinan	
3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	

Akar Masalah	Permasalahan
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal - Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Masih rendahnya kemandirian ekonomi
4 ASPEK PELAYANAN UMUM	
4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
- Belum optimalnya adopsi teknologi informasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik - Belum meratanya kualitas infrastruktur teknologi informasi - Kapasitas SDM TI belum memenuhi kompetensi	Belum optimalnya Pelayanan publik dan layanan pemerintahan
Pengawasan internal dan budaya integritas belum sepenuhnya kuat	Indeks Integritas daerah masih fluktuatif dan belum stabil pada tren peningkatan
Regulasi belum sepenuhnya sederhana	Belum optimalnya proses birokrasi
4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	
- Maraknya penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Masih terjadinya kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

Dari permasalahan-permasalahan di atas dapat dirangkum permasalahan utama dalam berbagai aspek pembangunan yang tercermin dalam data-data yang telah disajikan sebelumnya, yaitu :

- Kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial belum merata**, ditandai dengan rendahnya akses layanan dasar, masih adanya anak putus sekolah, ketimpangan distribusi guru, rendahnya cakupan jaminan sosial, serta belum optimalnya perlindungan kelompok rentan.
- Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan belum tercapai**, ditandai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi, kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, ketergantungan pada sektor tertentu, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.

3. **Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya efisien, akuntabel, dan berbasis digital**, ditandai dengan lemahnya regulasi, belum optimalnya pelayanan publik, serta transformasi digital yang belum berjalan maksimal.
4. **Supremasi hukum, stabilitas sosial, dan kepastian ekonomi daerah belum optimal**, ditandai dengan lemahnya penegakan hukum lingkungan, pengawasan, serta stabilitas ekonomi makro dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal.
5. **Ketahanan sosial, budaya, dan nilai keagamaan Kota Serambi Mekkah belum sepenuhnya terjaga**, ditandai dengan Permasalahan pada pelestarian budaya, rendahnya partisipasi generasi muda dalam seni budaya, serta ketahanan sosial dan keluarga yang masih lemah.
6. **Kualitas lingkungan hidup masih rendah dan upaya adaptasi serta mitigasi bencana belum memadai**, ditandai dengan masih adanya pencemaran air, pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya cakupan sanitasi, serta mitigasi bencana yang belum terarah.
7. **Pembangunan daerah belum sepenuhnya berkelanjutan**, ditandai dengan masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, ketergantungan pada sumber eksternal, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal.
8. **Infrastruktur dasar dan strategis belum sepenuhnya berkualitas dan ramah lingkungan**, ditandai dengan Permasalahan terkait infrastruktur dasar, transportasi publik, hunian layak, dan pengelolaan limbah.

2.1.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai.

Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui

identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

A. Isu Strategis Global

Tantangan pembangunan global dan nasional ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal). Tantangan pembangunan global dan nasional tersebut, seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2.71
Tantangan Pembangunan Global



Sumber : Rankhir, RPJPN Tahun 2025-2045.

A. Demografi Global dan Nasional

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut, memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya

terus melambat, Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045, masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunya angka kelahiran.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

B. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti Konéik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan.

Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera

Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo- Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antar negara. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (borderless) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Sementara itu, nilai output negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015 negara berkembang menyumbang 55 % dari nilai output, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 % dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 % pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makro ekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

C. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), edge computing, auto robotic system, 3D, dan future technologies.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Hal ini disebabkan karena berkembangnya teknologi dimasa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomatisasi di sebagian besar aktivitas industri, seperti; nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif, digitalisasi yang mendukung konektivitas, material maju, rekayasa genetika dan bioteknologi.

Selain itu, perkembangan teknologi dimasa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis AI, sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis. Di samping itu, perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Disisi lain, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (remote working) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola work from anywhere (WFA). Di sisi lain, hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti; properti dan perkantoran. Oleh karena itu, teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan

transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

D. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DATA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95% pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Sementara itu, di Asia dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia, separuhnya berada di negara emerging economies.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sebagian kota di Asia dan Afrika, sekitar 25-30% penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyeru ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis meta data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Disisi lain, dampak pandemi Covid-19 di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

E. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang, terutama negara G7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan kecenderungan yang berlanjut, terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat Global Value Chain (GVC) seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital serta keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis.

Kerja sama Kawasan seperti; Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (PEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi serta inovasi dan teknologi.

F. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada Tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada Tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter

global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Kecenderungan penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Sehingga munculnya perusahaan teknologi finansial (financial technology) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

G. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 % terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

H. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam di antaranya air, pangan dan energi, sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan sumber daya alam global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam,

pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

I. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus menerus tidak dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan. Perubahan secara signifikan Triple Planetary Crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi keempat yang dinamakan innovative designs.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam rancangan teknokratik RPJMN dirumuskan beberapa Risiko Global Jangka Menengah yaitu :

1. Risiko kegagalan *climate action*
2. Cuaca ekstrim seiring perubahan iklim
3. Deglobalisasi
4. Krisis lapangan pekerjaan
5. Krisis utang
6. Konfrontasi geoekonomi

7. Risiko kegagalan *cybersecurity*
8. Biodiversity loss
9. Asset bubble burst

B. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Isu Jangka Menengah berdasarkan rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia : (Hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar).
2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral : (Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional).
3. Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global : (Produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global).
4. Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan : (Perlu national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik keluar pulau, Perlunya Pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan).
5. Aging Population Negara Maju : (Usia produktif negara maju menurun, Potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia).

Pada periode 2025-2029 Kerangka Ekonomi Makro tumbuh dengan Rata-rata sebesar 5.6 - 6.1 persen (Skenario Transformatif Dan Super Transformatif) yang dapat dilihat dari :

1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi:

- 1) Pertumbuhan ekonomi didorong oleh transformasi struktural yang diindikasikan dengan peningkatan industri pengolahan sebesar 5.8-7.0 persen
- 2) Sektor pertanian tetap tumbuh meningkat didorong peningkatan produktivitas sebesar 3.5 - 4.0 persen
- 3) Sektor listrik sebesar 5.6 - 6.1 persen dan konstruksi tumbuh mendukung pengembangan sektor industri dan pembangunan IKN sebesar 6.4 - 6.7 persen
- 4) Sektor jasa-jasa produktif dan transportasi sebesar 7.4 - 8.4 persen akan berkembang seiring pertumbuhan industri pengolahan dapat dilihat dari sektor perdagangan sebesar 5.2 - 5.6 persen

2. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran:

- 1) Konsumsi RT dan LNPRT tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat yang tumbuh sebesar 5.4 - 5.6 persen
- 2) Konsumsi pemerintah tumbuh terjaga seiring dukungan pemerintah dalam

Pembangunan tumbuh sebesar 5.0 - 5.7 persen

3) Pertumbuhan investasi meningkat mendukung pengembangan industri

Pengolahan tumbuh sebesar 6.4 - 6.7 persen

4) Ekspor tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan sektor industri tumbuh sebesar 7.2 - 7.9 persen

5) Impor tumbuh tinggi seiring kebutuhan pembangunan kebutuhan untuk penguatan fondasi transformasi tumbuh sebesar 7.4 - 8.3 persen

Pembangunan Nasional pada periode 2025–2029 merupakan tahap pertama periode perencanaan dalam RPJPN, isu strategis nasional harus telah mempertimbangkan dokumen RPJPN Tahun 2025 – 2045. Adapun isu strategis nasional diarahkan untuk mengikuti pembagian misi transformasi yang menjadi dasar pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 sebagai berikut:

A. Isu Strategis Transformasi Sosial

1. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan Gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah yang disebabkan oleh:

- 1) AKI masih tinggi (189/100.000)
- 2) Stunting masih tinggi (19%)
- 3) Prevalensi obesitas 21,8%
- 4) Kasus baru TB peringkat ke-2 dunia
- 5) Kusta peringkat ke-3 dunia
- 6) 51,14% puskesmas tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
- 7) 24,7 RSUD Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- 8) 36,53 Rumah Sakit terakreditasi paripurna 56,4% FKTP terakreditasi

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang yang disebabkan oleh:

- 1) Layanan pendidikan belum merata
- 2) Kualitas pendidikan masih rendah
- 3) Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas
- 4) Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah
- 5) Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah

3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif yang disebabkan oleh:

- 1) Akurasi program bantuan sosial masih rendah
- 2) Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
- 3) Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
- 4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
- 5) Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
- 6) Program Jaminan Sosial belum optimal

B. Isu Strategis Transformasi Ekonomi

1. Industri

- 1) Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022)
- 2) Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas TK Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas TK Jepang di tahun 1960-an (APO, 2022)
- 3) Kompleksitas dan daya saing produk, produk UNCTAD industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk knowledge intensive (Basri, 2023; , 2021)
- 4) Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh unskilled labour (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017)
- 5) Mismatched produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS 85, Indonesia mengekspor produk yang permintaannya melambat dalam 5 tahun terakhir (Trademap, 2023)
- 6) Rendahnya kemampuan inovasi, dalam Global Innovation Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara
- 7) Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022)

2. Pariwisata

- 1) Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (overtourism) dan akulturasi budaya dari wisatawan

- 2) Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- 3) Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- 4) Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- 5) Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

3. Ekonomi Kreatif

- 1) Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
- 2) Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
- 3) Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- 4) Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- 5) Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah

4. Ekonomi Biru

- 1) Rendahnya produktivitas ekonomi di sektor perairan, PDB maritim hanya 7.6% pada tahun 2021 perairan, PDB maritim hanya 7.6% pada tahun 2021
- 2) Biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi, sehingga peringkat nilai OHI*
- 3) Indonesia adalah 127 dari 221 negara
- 4) Prevalensi kemiskinan yang tinggi di masyarakat pesisir, dengan tingkat kemiskinan extreme 4.19% pada tahun 2021 (lebih tinggi dari pada tahun 2021 (lebih tinggi dari persentase nasional yaitu 4%))
- 5) Tuntutan pembangunan berkelanjutan, yang melihat kemajuan secara holistik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan

5. UMKM dan Koperasi

Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi, dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.

6. Ketenagakerjaan

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia (berada di bawah rata-rata negara kawasan ASEAN), menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

7. Badan Usaha Milik Negara

- 1) Kinerja BUMN
- 2) Daya Saing BUMN
- 3) Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan

8. Percepatan Transisi Energi

- 1) Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun
- 2) Emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi;
- 3) Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil
- 4) Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai
- 5) Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi
- 6) Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang
- 7) Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran
- 8) Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan
- 9) Ketergantungan pada produksi impor
- 10) Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga
- 11) Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi
- 12) Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi)

9. Ekonomi Sirkular Industri

- 1) Pemanfaatan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU (Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)) yang belum optimal
- 2) Rendahnya kapasitas pengolahan limbah elektronik (e-waste)
- 3) Rendahnya tingkat pengumpulan sisa material untuk suplai industri daur ulang
- 4) Ketergantungan terhadap bahan baku kritis industri
- 5) Pemanfaatan limbah B3 untuk bahan bakar dan bahan baku industri masih terbatas
- 6) Industri yang menerapkan standar industri hijau masih terbatas
- 7) Desain produk dan kemasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri daur ulang
- 8) Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional kegiatan usaha pariwisata
- 9) Kurangnya fasilitas pengumpulan sisa produk dan material tekstil dan elektronik
- 10) Belum adanya standar pengelolaan limbah sisa konstruksi
- 11) Belum adanya rantai pasok bahan baku sirkular yang terintegrasi
- 12) Beberapa material membutuhkan teknologi tinggi untuk proses daur

ulanganya

13) Tata kelola terkait ekonomi sirkular masih belum optimal.

10. Tenaga Kerja Hijau

- 1) Rendahnya pemahaman mengenai pekerjaan hijau (green jobs)
- 2) Terbatasnya data dan informasi mengenai pasar kerja hijau
- 3) Belum terintegrasinya kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau (green jobs)
- 4) Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau
- 5) Belum memadainya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)
- 6) Terbatasnya panduan dan model pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) baik di tingkat nasional maupun daerah
- 7) Masih lemahnya peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)

11. Pengelolaan Hutan Lestari

- 1) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional masih rendah
- 2) Rendahnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
- 3) Belum berkembangnya Bioekonomi Sektor Kehutanan
- 4) Belum tuntasnya tata batas kawasan hutan
- 5) Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial belum mencapai kondisi ideal
- 6) Terbatasnya kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- 7) Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif
- 8) Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal

12. Digital

- 1) Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional
- 2) Digitalisasi Sektor Strategis
- 3) Aspek Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital

13. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- 1) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
- 2) Perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal Supply Side:
- 3) Belum optimalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global
- 4) Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat

14. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- 1) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas

- 2) Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif
- 3) Tata Kelola yang Belum Terpadu, Inovatif, dan Kolaboratif
- 4) Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan
- 5) Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak
- 6) Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana
- 7) Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

C. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

1. Integritas Partai Politik

Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal).

2. Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritas

3. Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.

4. Sistem Penggajian Tunggal

Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif

5. Manajemen Talenta

Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN)

6. Kualitas Regulasi

Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal

7. Integrasi Proses Bisnis

Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi

D. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

1. Stabilitas Makro

Risiko climate action; Deglobalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang, Konfrontasi geoekonomi; Asset bubble burst; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga higher for longer; tensi geopo litik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS da Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi kedepan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta

imbal hasil obligasi yang tinggi.

2. Pertahanan

Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.

3. Politik Luar Negeri

Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antara antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren global economic decoupling; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

4. Hukum

Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.

5. Keamanan

Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.

6. Demokrasi

Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

E. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

1. Isu Agama

- 1) Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan Bersama
- 2) Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2023 sebesar 76,02
- 3) Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang
- 4) inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan

2. Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

- 1) Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi.
- 2) Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal;
- 3) Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nyasudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, dan Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku
- 4) Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada
- 5) rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi

3. Isu Budaya

- 1) Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global
- 2) Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 3) Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13

4. Energi

- 1) Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah
- 2) Pangsa pemanfaatan energi baru-terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil
- 3) Efisiensi perusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik
- 4) Kurangnya eksplorasi
- 5) Institusi pengelolaan energi yang belum efisien, didominasi oleh BUMN energi dan peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam permasalahan pengelolaan

5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda
- 2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal
- 3) Ketimpangan gender yang masih tinggi
- 4) Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit

terwujud

6. Pangan

- 1) Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan
- 2) Peningkatan kualitas panganyang dikonsumsi
- 3) Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
- 4) Tingginya fluktuasi harga pangan antar waktu dan antar wilayah
- 5) Rendahnya kesejahteraan petanidan nelayan penyedia komoditas pangan

C. Isu Strategis Regional

Wilayah Sumatera memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional, ditandai dengan dominasi ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas primer seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang mencakup hampir 50% PDRB pada tahun 2023. Namun, kontribusi nilai tambah dari sektor ini masih rendah dan rentan terhadap fluktuasi pasar global. Diversifikasi dan hilirisasi industri di kawasan ini belum optimal, hanya mencakup sekitar 20% dari PDRB, dengan investasi yang masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan industri hulu. Di sisi lain, Sumatera juga menghadapi berbagai tantangan strategis seperti keterbatasan infrastruktur, kerentanan bencana terutama di pesisir barat yang dilalui Pegunungan Bukit Barisan, serta degradasi lingkungan akibat kebakaran hutan, abrasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas pertambangan.

Meski demikian, Sumatera menyimpan potensi besar sebagai tulang punggung bioindustri dan kemaritiman nasional. Kawasan ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 10,2 juta hektare yang menyumbang 67% produksi nasional, serta komoditas perkebunan lain seperti karet, kopi, tebu, dan kelapa dengan kontribusi signifikan. Sumatera juga mendukung ketahanan pangan nasional dengan kontribusi 27% terhadap produksi beras dan 16% terhadap produksi perikanan. Potensi energi di wilayah ini pun sangat menjanjikan, baik dari energi fosil (batu bara, gas bumi, dan minyak bumi) maupun energi terbarukan seperti air, panas bumi, surya, bioenergi, dan arus laut. Kedekatannya dengan jalur utama perdagangan maritim global, yaitu Selat Malaka, memberikan keunggulan komparatif di sektor logistik dan perdagangan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi **“Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi regional sebesar 7,2% pada tahun 2029 serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,24–5,24% dan peningkatan Indeks Modal Manusia hingga 0,656. Strategi pembangunan meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan, pembangunan kawasan industri, pusat pertumbuhan baru dan pariwisata, pemberdayaan dan penguatan

ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau, hingga penguatan layanan dasar dan peningkatan kualitas SDM.

Fokus pembangunan di Sumatera Barat dalam periode 2025–2029 diarahkan pada dua kawasan strategis, yaitu Kepulauan Mentawai sebagai wilayah percepatan pengentasan kemiskinan, serta Dataran Tinggi Minangkabau sebagai kawasan parekraf unggulan. Kawasan dataran tinggi yang mencakup Bukittinggi, Sawahlunto, Batusangkar, Payakumbuh, dan Padang Panjang memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada peningkatan daya saing destinasi melalui pendekatan 6A pariwisata (atraksi, aksesibilitas, amenitas, akomodasi, aktivitas, dan *awareness*), pembangunan pasar wisata terintegrasi dengan pusat seni dan budaya, serta revitalisasi kawasan kota melalui *urban renewal*.

Dalam konteks tersebut, Kota Padang Panjang memegang peranan penting sebagai bagian dari sistem kota-kota di Sumatera Barat. Kota ini berstatus sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan menjadi simpul strategis dalam konektivitas regional karena letaknya yang menghubungkan dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Selain itu, Padang Panjang juga menghubungkan Kota Bukittinggi dan Batusangkar (PKW dan PKL), serta menjadi titik krusial dalam jalur kereta api antara Kota Padang dan Kota Solok. Perannya sebagai daerah hulu bagi Wilayah Sungai Akuaman dan Indragiri, serta cagar alam Lembah Anai, menempatkan Kota Padang Panjang sebagai kota yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hulu.

Sebagai bagian dari poros barat–timur serta destinasi pariwisata tingkat III, Kota Padang Panjang didorong untuk memperkuat peranannya melalui penyediaan sarana dan prasarana kota serta pariwisata yang memenuhi standar. Pengembangan ekonomi di kota ini diarahkan pada sektor tersier seperti jasa transportasi, keuangan, dan pendidikan, yang merupakan sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara spasial, aktivitas ekonomi Kota Padang Panjang masih bersifat lokal dengan keterkaitan utama ke Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta interaksi lintas provinsi ke Kabupaten Kampar (Riau) dan beberapa daerah di Jawa Barat.

Sebagai wujud implementasi pengembangan tersebut, strategi pembangunan Kota Padang Panjang diarahkan pada beberapa fokus utama. Pertama, peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki dalam rangka penguatan peran sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan, dan wisata yang Islami. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan pusat-pusat pelayanan baru di wilayah timur kota, optimalisasi pusat kegiatan yang sudah ada, dan penguatan konektivitas antar pusat kegiatan guna mencegah urban sprawl. Kedua, peningkatan kualitas jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air, termasuk optimalisasi sistem

prasarana kota yang fungsional, estetis, dan adaptif terhadap potensi bencana. Ketiga, pemeliharaan kawasan lindung, melalui penetapan, perlindungan, dan pemulihan fungsi ekologis wilayah, serta pemenuhan RTH minimal 30% dari luas kota.

Strategi selanjutnya mencakup upaya pencegahan kerusakan kawasan lindung melalui pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan wilayah berbatasan, pembangunan kawasan budi daya berbasis mitigasi bencana, dan penetapan ruang evakuasi. Dalam pengembangan kawasan pemukiman, Kota Padang Panjang menegaskan posisinya sebagai kota unggulan sektor pendidikan, kesehatan, dan wisata dengan standar layanan bertaraf internasional. Di samping itu, strategi juga diarahkan untuk penguatan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk pelestarian kawasan pertanian pangan dan pengaturan ruang sektor informal. Upaya pengendalian pertumbuhan kawasan budi daya juga menjadi prioritas, guna memastikan keberlanjutan lingkungan melalui kepatuhan terhadap daya dukung dan daya tampung wilayah. Terakhir, pengembangan kawasan strategis kota seperti Pasar Pusat, Ganting, Kota Baru, dan objek wisata tematik, serta Islamic Center, diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya kota.

Berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 beberapa isu pembangunan yang berkaitan dengan Kota Padang Panjang dalam pengembangan kewilayahan Sumatera Barat dalam jangka panjang berupa *multiinfrastructure corridor* dan kunci infrastruktur logistik antara lain adalah:

1. Jalan Tol: Sumatera Barat memprioritaskan segmen jalan Tol Pekanbaru-Payakumbuh, Payakumbuh-Bukittinggi, Bukittinggi-Padangpanjang, Padang Panjang-Padang, Sumatera memerlukan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung, Lubuk Alung-Lubuk Basung, dan Lubuk Basung-Simpang Ampek, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Bukittinggi-Lubuk Sikaping, dan Jalan Tol Tol Padang-Painan, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Muaro Sijunjung, Muaro Sijunjung-Pulau Punjung, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Padang-Arosuka, Arosuka-Solok, dan Solok-Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Batusangkar, Batusangkar-Padangpanjang, Sumatera Barat membutuhkan Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Kep. Mentawai
2. Jaringan Perkeretaapian: Sumatera Barat membutuhkan Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang – Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Sumatera Barat membutuhkan Pembangunan jalur ganda pada segmen Jalur KA Padang– Bandara Internasional Minangkabau.
3. Ke depan, pengembangan Kota Padang Panjang memerlukan kebijakan yang menekankan pada pembangunan ekosistem pariwisata holistik

berbasis kualitas dan keberlanjutan (*quality and sustainable tourism*), urban renewal, serta pengembangan MICE economy (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*). Selain itu, perlu juga mendorong infrastruktur pendukung untuk mengembangkan ekonomi bernilai tambah tinggi dan industri yang berdaya saing.

D. Isu Strategis Kota Padang Panjang

Sementara itu secara umum isu strategis RPJPD Propinsi Sumatera Barat yang relatif dipengaruhi oleh isu nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025- 2045 mencantumkan baik isu sosial. Isu ekonomi dan isu tata kelola pemerintahan.

Lebih jauh isu strategis yang mengemuka adalah tentang masih rendahnya pendapatan perkapita nasional dan provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan yang relatif tinggi dan Gini Ratio yang juga tinggi, rendahnya daya saing sumber daya manusia dan masih belum optimalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Juga mengemuka isu strategis tentang implementasi ekonomi hijau dan perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dari telaahan KLHS RPJPD Kota Padang Panjang dan dokumen perencanaan nasional dan propinsi (RPJPN dan RPJPD Propinsi, maka dalam perumusan isu strategis dilihat dari berbagai dokumen terkait antara lain:

1. Isu strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045

Tabel 2.134
Isu strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045

No	Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang	Rumusan Isu KLHS RPJMD
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
2	Penurunan kualitas dan kuantitas tutupan lahan bervegetasi	Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
3	Belum terwujudnya kehidupan sehat yang optimal	
4	Belum optimalnya kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	
5	Belum optimalnya akses air bersih yang layak dan berkelanjutan	Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

No	Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang	Rumusan Isu KLHS RPJMD
6	Belum optimalnya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi untuk mewujudkan lapangan pekerjaan yang tetap, produktif dan layak	
7	Peningkatan frekuensi bencana	
8	Belum optimalnya pencapaian kualitas pendidikan terkait dengan numerasi dan literasi	
9	Belum optimalnya kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif	
10	Belum terwujudnya akses energi yang berkelanjutan	
11	Meningkatnya potensi penurunan ketersediaan pangan	Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
12	Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif	
13	Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan termasuk pengurangan korupsi dan pengambilan keputusan yang responsif	
14	Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi	
15	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan	Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

2. Isu strategis RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045

- 1) Peningkatan SDM yang Berdaya Saing
- 2) Produktivitas Ekonomi Yang Berkelanjutan
- 3) Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif
- 4) Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah
- 5) Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah
- 6) Lingkungan Hidup Berkualitas yang Berkelanjutan
- 7) Pembangunan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

3. Isu Strategis KLHS RTRW Kota Padang Panjang

Tabel 2.135
Isu Strategis KLHS RTRW Kota Padang Panjang

No	Isu
1	Alih fungsi lahan (sawah) menjadi penggunaan lain
2	Meningkatnya pendirian bangunan tanpa izin yang diluar peruntukannya
3	Menurunnya daerah tangkapan air
4	Meningkatnya jumlah timbunan sampah
5	Tingginya frekuensi bencana gempa dan longsor
6	Rendahnya daya dukung jasa penyediaan air bersih di kawasan pemukiman

No	Isu
7	Belum optimalnya kapasitas penyediaan air bersih
8	Rendahnya ketersediaan ruang untuk pengembangan pembangunan.
9	Rendahnya ruang terbuka hijau pada kawasan pemukiman
10	Rendah dan semakin menurun kualitas air sungai

4. Isu strategis KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Ketidak-taatan dalam pemanfaatan ruang (terkait ketersediaan lahan)
3. Pengelolaan air belum optimal
4. Mengintensifkan penjaminan pelaksanaan LP2B
5. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan
6. Peningkatan Layanan transportasi publik yang aman dan menguntungkan
7. Semakin menurunnya ketersediaan pangan

5. Isu Strategis Revisi RTRW Kota Padang Panjang

Karakteristik wilayah Kota Padang Panjang dan isu strategis yang dapat dijadikan sebagai muatan dasar untuk tujuan penataan ruangnya adalah sebagai berikut:

- a. Kota Padang Panjang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek sistem transportasi, lingkungan, kawasan strategis dan pariwisata baik secara nasional, provinsi dan regional.
- b. Arahkan pengembangan kawasan lindung di Kota Padang Panjang berupa Kawasan perlindungan setempat, Kawasan cagar alam, dan ruang terbuka hijau.
- c. Arahkan pengembangan kawasan budidaya di Kota Padang Panjang berupa kawasan pemukiman, Kawasan pertanian, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, infrastruktur perkotaan serta kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. Ketidakseimbangan pemanfaatan ruang kawasan terbangun, dimana terkonsentrasi di bagian barat (Kec. Padang Panjang Barat). Sehingga pada wilayah bagian barat banyak terjadi masalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (pelanggaran). Selanjutnya perkembangan kawasan terbangun mulai cenderung ke bagian timur (Kec. Padang Panjang Timur), sehingga alih fungsi lahan mulai terjadi terutama sawah.
- e. Seluruh wilayah rawan terhadap bencana gempa bumi dan letusan gunung api serta sebagian wilayahnya rawan longsor.

- f. Ketersediaan ruang yang sesuai untuk pengembangan perkotaan terbatas dan paling dominan berlokasi di bagian timur (Kecamatan Padang Panjang Timur) yang sebagian besar penggunaan lahan eksistingnya berupa kawasan pertanian dengan dominasi sawah.
- g. Ketersediaan sumber daya air cukup besar untuk mendukung pengembangan kegiatan perkotaan.
- h. Sistem transportasi belum optimal baik secara kualitas dan kuantitas
- i. Ketersediaan sarana dan prasarana kota cukup memadai terutama pada bagian barat meskipun sebagian belum berfungsi optimal.
- j.

Keterkaitan antar komponen yang dipertimbangkan dalam perumusan isu strategis dapat digambarkan dengan skema berikut ini:

Gambar 2.72
Keterkaitan Komponen Perumusan Isu Strategis



6. Isu Strategis RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Isu strategis RPJMD Kota Padang Panjang disusun berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan terkait capaian kinerja Pembangunan pelaksanaan RPJMD 2018-2023.
- 2) Misi dan Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045.

- 3) Capaian Kinerja pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dimuat dalam dokumen KLHS RPJMD 2025-2029.
- 4) Isu strategis dan Indikasi Program RTRW Kota Padang Panjang
- 5) Arah Kebijakan RPJPD Propinsi Sumatera Barat
- 6) Isu aktual (Hasil Konsultasi Publik, Musrenbang dan Perkembangan terkini). Isu actual yang menjadi pembicaraan public dan perlu ditangani segera sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius dimasa datang .

Berbagai faktor yang mempengaruhi perumusan isu strategis termasuk pembangunan jalan tol Padang- Sicincin diperkirakan pada tahun-tahun yang akan datang jalan tol ini akan dilanjutkan dan akan melalui kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Pembangunan jalan tol ini nantinya akan berpotensi mengurangi jumlah kendaraan yang akan melewati kota Padang Panjang. Kondisi ini diduga akan berpengaruh kepada lalu lintas dan perdagangan Kota Padang Panjang. Jika Pembangunan jalan tol tersebut dilaksanakan maka akan terjadi konversi lahan pertanian dan hutan seluas 158,97 ha. Konversi lahan ini berpotensi mempengaruhi air larian dan ketersediaan air untuk kota Padang Panjang.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pada semua dokumen KLHS dan RPJPD, rencana Pembangunan kabupaten yang berbatasan serta capaian pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yang mencakup aspek aspek Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Tata Kelola Pemerintahan dan Kebencanaan serta Kualitas Lingkungan Hidup maka isu-isu strategis RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2029 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia Yang Sehat, Berdaya Saing Dan Berakhlak

Isu Pembangunan Manusia yang Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

- a. Penurunan Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup penyelenggaraan Pendidikan (terutama pada aspek Literasi, Numerasi dan pencapaian harapan lama sekolah), Pengelolaan kesehatan, tingkat pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh rendahnya daya saing penduduk usia kerja. Begitu juga dengan pelunya meningkatkan kembali urgensi implementasi ajaran agama untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mengingat makin meningkatnya beberapa fenomena kekerasan, penyalahgunaan narkoba, judi *online* dan kasus-kasus penyimpangan seksual (penyakit masyarakat).
- b. Capaian Daya saing manusia Indonesia secara umum memperlihatkan kecenderungan menurun, Berdasarkan SKOR PISA 2022, bahwa Indeks PISA Indonesia masih rendah, yang diukur dari kemampuan membaca, sains dan matematik yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan daya saing. Begitu juga

dengan kondisi Kota Padang Panjang saat ini, masih rendahnya rendahnya kemampuan membaca, sains dan matematik sangat memberi pengaruh terhadap peningkatan kemampuan SDM untuk mewujudkan kualitas pembangunan manusia di Kota Padang Panjang. Pada lain sisi Revolusi Industri 4.0 telah berdampak kepada semua bidang kehidupan, termasuk bidang Pendidikan. Sehingga perlu mengupayakan peningkatan intensitas keterlibatan dunia pendidikan dalam pola pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berfikir kritis. Kemampuan yang tinggi di bidang teknologi informasi menuntut perubahan yang signifikan pada proses belajar mengajar. Selain memerlukan keterampilan dalam teknologi informasi juga menuntut model pembelajaran yang mendorong peningkatan kemampuan berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi yang tinggi dan pengembangan kreativitas serta kemampuan memecahkan masalah serta berkolaborasi. (*Critical thinking, Communication skill, Creativity, Problem Solving dan Colaboration*).

Meskipun Pendidikan di Kota Padang Panjang perlu melibatkan diri dalam pola-pola Pendidikan global, pendidikan Kota Padang Panjang tetap perlu mempertahankan bahkan merevitalisasi budaya-budaya lokal yang unggul serta telah teruji dalam waktu yang panjang. Karena itu pengenalan yang lebih substansial kepada budaya lokal yang unggul tetap harus dikembangkan.

- ❖ Peningkatan kualitas kesehatan, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas manusia tentunya harus semakin didorong. Peningkatan pelayanan kesehatan sejak dini perlu dilakukan. Sementara itu hal yang perlu dikendalikan adalah perubahan pola konsumsi masyarakat dalam banyak hal mengabaikan gizi dan pola makan yang sehat, pengembangan perilaku hidup sehat dengan penyediaan infrastruktur publik, seperti sarana olah raga, jalan sepeda dan perlindungan optimal untuk pejalan kaki.

Hal yang tidak kalah penting adalah mendorong peningkatan pelayanan kesehatan mental, pengembangan lembaga konseling kesehatan jiwa perlu di dorong dan ditempatkan sebagai salah satu prioritas untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Untuk mencapai umur yang panjang dan hidup sehat maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu lebih jauh secara saksama memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Secara umum untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang lebih baik diperlukan pengembangan sistem kesehatan yang tangguh dan responsiv untuk memastikan pencapaian usia harapan hidup makin tinggi. Sistem kesehatan yang tangguh perlu memperhatikan aspek kesehatan mental dan fisik, dengan demikian fokus kita tidak hanya pada pendekatan bersifat fisik dan kuratif namun juga memperhatikan

mental dan preventif. Penekanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam periode RPJMD saat ini perlu diberikan kepada aspek kesehatan mental. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan salah satu hak azasi manusia yang universal. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9.162.886 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Dari jumlah ini diperkirakan prevalensi depresi mencapai 3,7% (info data kesehatan mental Indonesia, Tirta .id) di akses 17 Juli 2024). Stigma buruk yang berkembang dalam masyarakat terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa mempersulit penanganan orang dengan gangguan jiwa. Lebih jauh diketahui kasus depresi pada remaja sudah mencapai angka yang tinggi, dimana 19% remaja Indonesia mempunyai ide untuk bunuh diri. Bentuk gangguan jiwa tersebut meliputi Fobia Sosial, Gangguan Perilaku dan Gangguan Pemusatan perhatian dan hipervaktivitas.

Masalah kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan adalah stunting, obesitas, tekanan darah tinggi dan peningkatan temuan kasus TBC. Kasus kurang gizi (under weight) balita tercatat 7,2% (capaian TPB/ KLHS). Statistik kesehatan kota Padang Panjang mencatat angka penderita hipertensi mencapai 118 orang untuk rawat inap. Untuk TBC mencapai 127 orang yang rawat jalan dan 16 orang yang rawat inap. Temuan kasus TBC meningkat dari 103 orang pada tahun 2022 menjadi 125 orang pada tahun 2023 (bandingkan dengan data rawat Inap 127).

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan kesehatan dimasa datang adalah meningkatnya proporsi penduduk berusia lanjut. Bahkan berdasarkan prediksi BPS penduduk berusia diatas 75 tahun akan semakin meningkat. Dengan demikian layanan kesehatan untuk orang tua memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. (lihat grafik prediksi jumlah penduduk 2035).

- ❖ Peningkatan daya saing tenaga kerja untuk memasuki pasaran dunia kerja terkait dengan pengembangan pola pembelajaran yang telah dikemukakan di atas. Selanjutnya perlu perlu dikembangkan kebijakan yang mendorong badan-badan usaha baik negara maupun swasta membuka peluang bagi pelatihan keterampilan dan kecakapan berkomunikasi.
- ❖ Untuk mewujudkan manusia yang berakhlak maka Pendidikan agama, adat dan budaya perlu diintensifkan. Pengajaran agama dan budaya seyogyanya lebih ditekankan kepada implementasi yang substansial. Dorongan berupa contoh perilaku nyata akan sangat membantu internalisasi ajaran agama dan budaya. Penghargaan kepada harkat

kemanusiaan yang merupakan salah satu poin penting dalam ajaran agama perlu diterjemahkan dalam pembiasaan budaya antri, berdiskusi yang sehat dan penghargaan kepada hak-hak manusia dan makhluk lain.

2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Masih rendahnya capaian PDRB perkapita Kota Padang Panjang memperlihatkan bahwa kebutuhan optimal untuk hidup layak belum terpenuhi. Data Tingkat kemiskinan, meskipun telah memperlihatkan penurunan namun masih jauh dari target RPJP Nasional yang telah ditetapkan. Sementara itu tingkat ketergantungan Kota Padang Panjang terhadap pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat relatif tinggi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan.

- a. Secara konvensional pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sejauh ini didukung oleh beberapa sektor. Hasil analisis Tipologi Klassen memperlihatkan bahwa sektor-sektor tradisional yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi malah mengalami tekanan. Sektor pertanian dan perikanan berada pada kuadran IV (tertekan). Karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan perlu diperhatikan. Diketahui bahwa salah satu faktor penyebab turunnya produktivitas pertanian adalah akibat terjadinya penurunan kesuburan lahan. Faktor lain diduga terkait dengan dukungan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menurunnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian tradisional, tentu seyogyanya disikapi dengan mengembangkan strategi-strategi baru. Pengembangan agrowisata, pertanian modern (hidroponik sebagai contoh), perubahan komoditas dan peningkatan nilai tambah produk mungkin bisa menjadi solusi terhadap masalah ini. Secara bertahap upaya untuk pengolahan hasil pertanian perlu didukung dengan pengembangan industri manufaktur yang relevan.

Perkembangan di bidang peternakan beberapa waktu lalu yang memperlihatkan adanya potensi untuk pengembangan industri manufaktur perlu didorong lewat kerja sama yang intensif antar OPD. Optimalisasi perencanaan antar sektor pertanian/peternakan penghasil susu, sektor industri pengolahan susu (mungkin menjadi produk turunan sederhana seperti keju, yoghurt dan lain-lain), dan sektor pemasaran/perdagangan. Selanjutnya sektor pariwisata dapat menjadikan produk berbasis susu ini menjadi salah satu icon wisata Kota Padang Panjang. Untuk lebih memberdayakan petani/peternak pengembangan koperasi untuk penyediaan bahan dan alat produksi serta penjaminan kualitas dapat lebih didorong peningkatannya.

b. Pengembangan Pariwisata.

Selanjutnya sektor Pariwisata sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan (lihat kontribusi Pariwisata dalam PDRB). Upaya yang serius untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dari aspek amenitas, atraksi, aksesibilitas dan layanan yang ramah dan berkualitas perlu dikembangkan. Pemanfaatan PDIKM, *Islamic Centre* dan Wahana wisata lainnya perlu dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan perluasan promosi dan penonjolan aspek-aspek khusus. Pembenahan bertahap pada layanan koleksi dan pola pelayanannya PDIKM mendesak untuk dilakukan. Waterboom/Mifan mungkin dapat direvitalisasi mengingat berkurangnya pemandian alam di Mega Mendung sebagai dampak banjir bandang tanggal 11 Mei 2024.

Hal lain yang layak dipertimbangkan adalah mengupayakan pemunculan kembali aspek wisata Sejarah. Sejarah Diniyah Putri dengan Rahmah El Yunusiah, Perkembangan pendidikan Muhammadiyah Kauman, Rumah Inyik DR Abdul Karim Amrullah (Ayah Buya Hamka) dan Buya Hamka, peningkatan akademik di *Islamic Centre* dan atraksi budaya di ISI Padang Panjang beberapa hal yang amat layak dikembangkan. Pengembangan infrastruktur non fisik mestinya menjadi perhatian yang utama juga. Wisata kuliner perlu didorong dengan peningkatan kebersihan dan kenyamanan serta kepastian harga untuk pengunjung.

Kegiatan wisata berbasis alam dan budaya dapat dikembangkan seperti peningkatan promosi dengan memberi tanda dengan *QRCode* pada pohon pohon penting dan bernilai budaya. Informasi tentang tumbuhan yang terdapat dalam *QRCode* tersebut akan meningkatkan minat generasi muda dan meningkatkan lama tinggal dikawasan wisata. Nama nama kelurahan di Kota Padang Panjang yang sebagian terkait dengan tumbuhan seperti Kampung Manggis, atau informasi geologi seperti Ngalau dapat dijadikan informasi yang dicanyumkan dalam QR.

c. Sektor Perdagangan

Setelah Pembangunan Pasar hal lain yang perlu lebih digairahkan adalah penjualan komoditas lokal yang diberikan sentuhan unik dan spesifik. UMKM dan koperasi pendukung UMKM melalui skema bapak angkat anak angkat layak didorong dengan intensitas maksimal. Namun perubahan perilaku konsumen, dengan maraknya perdagangan *online* mesti disikapi sejak dini dengan mengembangkan pelatihan-pelatihan dan keterampilan komunikasi digital. Terkait dengan sektor perdagangan, produk susu yang telah berkembang memerlukan sentuhan kemasan dan promosi yang lebih

artistik. Kemasan yang menarik dan spesifik untuk makanan seperti pergedel layak dicoba untuk dikembangkan.

d. Pengembangan Ekonomi Hijau.

Produk alami seperti minyak atsiri dari bahan bahan herbal secara bertahap perlu dimulai. Lewat kerjasama dengan industri menengah. pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pewarna, perasa, pewangi, aromatik dan obat herbal layak dikembangkan .

Pada dasarnya pengembangan ekonomi hijau ini lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diolah secara sederhana dengan teknologi yang sesuai dan dapat dioperasikan oleh penduduk lokal serta tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran air dan peningkatan gas rumah kaca. Lebih jauh pengembangan ekonomi hijau dapat berupa pengolahan sampah dengan menggunakan maggot yang kemudian menjadi makanan ikan atau ternak, pembibitan tanaman lokal dan endemic Sumatra, seperti Andalas (bibitnya terdapat di PDIKM), pembibitan tanaman hias dan tanaman buah, peternakan galo-galo penghasil madu, peternakan burung. Capaian yang cukup berarti pada beberapa daerah seperti daerah sekitar tambang di Nusa Tenggara Barat yang membibitkan tanaman untuk reklamasi tambang bisa dijadikan contoh. Kerusakan ekosistem Batang Anai secara bertahap memerlukan reforestasi, yang peluang penyediaan bibitnya dapat dikembangkan di Kota Padang Panjang. Lebih jauh pengembangan ekonomi hijau ini dapat diselaraskan dengan ekoeduwisata yang memberikan pengetahuan tambahan untuk siswa ketika dilibatkan dalam dalam kerja - teknis nursery pada lokasi pembibitan tanaman. Contoh lain untuk ekonomi hijau yang telah diimplementasikan adalah pemanfaatan energi surya untuk pompa air Batang Ombilin untuk mengairi sawah penduduk di Talawi Sawah Lunto.

Penekanan istilah inklusif untuk pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pelibatan sebanyak mungkin pelaku lokal, dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan memang dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting mengingat perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan tekanan pasar luar negeri semakin intensif. Meningkatnya pemasaran buah non lokal (seperti Apel, Anggur dan Pir) jelas akan merugikan pemasaran buah lokal seperti jeruk, pisang dan sawo serta buah lainnya. Strategi terpadu, termasuk intervensi kebijakan untuk penyediaan buah dan produk lokal untuk makanan dalam acara-acara resmi pemerintah, perlu dilakukan. Dalam jangka menengah jika faktor-faktor produksi berada dalam jangkauan penduduk lokal dan hasil produksi di manfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat lokal atau regional maka ratio gini dapat ditekan pada tataran optimal.

3. Adaptasi Dan Mitigasi Bencana

Potensi bencana Kota Padang Panjang tergolong tinggi hal ini dapat dilihat dari jumlah gempa yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebanyak 774 kali dan yang dirasakan dengan intensitas cukup kuat sebanyak 32 kali. Selanjutnya kejadian banjir dan longsor tetap terjadi meskipun intensitasnya relatif rendah. Akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global diperkirakan kejadian bencana seperti banjir akibat curah hujan yang tinggi akan makin sering terjadi seperti banjir bandang yang terjadi pada bulan april dan mei 2024 yang telah memutus akses penduduk Kota Padang Panjang (putusnya akses jalan dari Kayutanam ke Kota Padang Panjang, putusnya jembatan Lubuk Mata Kucing dan Jembatan Tanjung). Disamping itu juga letusan gunung Marapi yang terjadi dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 juga berdampak terhadap Kota Padang Panjang. Secara umum indeks risiko Bencana Kota Padang Panjang termasuk kategori sedang (IRBI). Menyikapi hal tersebut di atas maka langkah-langkah adaptasi dan mitigasi bencana perlu dilakukan.

a. Adaptasi bencana

Sejalan dengan rekomendasi KLHS RPJPD 2025-2045 maka adaptasi, berupa peningkatan kapasitas Kota dan Penduduk dalam menghadapi bencana perlu menjadi perhatian serius. Pendekatan untuk adaptasi meliputi:

- ❖ Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang besarnya potensi bencana dan meningkatkan kemampuan dan ketangguhan terhadap bencana. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan kemampuan petugas kelurahan dan BPBD dalam menghadapi bencana, termasuk peningkatan dalam memprediksi kejadian bencana berdasarkan kajian ilmiah dan kelengkapan informasi.
- ❖ Mengembangkan konstruksi infrastruktur publik yang lebih tahan terhadap bencana. Bangunan perumahan dan perkantoran agar diupayakan mengikuti standar konstruksi untuk daerah rawan bencana gempa. Seterusnya adaptasi perlu dikembangkan dalam hal penyediaan pangan. Ketersediaan pangan alternatif yang cukup jika terjadi gempa perlu diupayakan secara terpadu baik menyangkut jenis pangan alternatif, penyimpanan dan kesiapsiagaan pendistribusian. Pengembangan “*living food bank*”, sebagai bentuk revitalisasi rangkang “*alang babega*” perlu dilakukan. Hal yang sama juga agar penyediaan air bersih dengan pola penyediaan cepat dapat diupayakan.
- ❖ Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok siaga bencana sampai level terendah di tingkat RT. Kelembagaan kelompok siaga bencana ini seyogyanya didukung dengan aturan-aturan yang dikembangkan sesuai dengan kekhususan pada lokasi dan distribusi tanggung jawab yang dikembangkan secara demokratis, perbedaan potensi bencana seperti gempa bumi, atau kebakaran akibat erupsi memerlukan kejelasan pembagian tanggung jawab dan kewenangan.

Berdasarkan pengalaman kejadian pandemi Covid 19, maka cara pandang dan tanggapan terhadap potensi bencana, pola pencegahan dan penanganan saat kejadian memerlukan tambahan pengetahuan kelompok.

b. Mitigasi bencana

Secara umum dipahami bahwa mitigasi terutama ditekankan untuk mengurangi potensi terjadinya bencana, sejauh bencana tersebut memang dapat dikendalikan dalam batas kemampuan manusia. Bencana seperti banjir, longsor, kebakaran lahan dan bencana sosial dapat diupayakan pencegahannya sejak awal. Pemanfaatan ruang dan menjaga kualitas lingkungan yang optimal dapat mengurangi kejadian bencana banjir, longsor dan bencana sejenisnya.

Namun jika merujuk pada UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi lebih ditujukan kepada serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko tersebut dapat dilakukan baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran publik. Dalam hal ini mitigasi bisa menjadi sekaligus adaptasi terhadap bencana.

Khusus untuk menghentikan atau memperlambat pemanasan global yang menimbulkan perubahan iklim dan memperbesar potensi terjadinya bencana dapat dilakukan serangkaian tindakan yang meliputi, peningkatan ruang terbuka hijau dan perubahan pola hidup menuju hemat energi.

Dalam upaya mengurangi potensi terjadinya banjir maka kerja sama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dibutuhkan. Terutama untuk mengendalikan degradasi lingkungan hutan di hulu Sungai yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar.

Hal lain yang perlu penekanan adalah kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana. Kegiatan pertambangan mineral non logam seperti pasir dan kerikil di sungai yang berpotensi menimbulkan gangguan aliran sungai dan longsor harus dikendalikan sedini mungkin, Koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan dan/atau UKL/UPL) harus diperkuat antara Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan BPBD Kesbangpol.

Untuk Kegiatan Pembangunan yang berpotensi tinggi untuk menimbulkan bencana maka harus dilakukan analisis risiko bencana. Secara teknis apakah dikaji bersama dengan penyusunan AMDAL atau tersendiri perlu disepakati oleh pihak terkait.

Dari hasil analisis KLHS diketahui bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat terkait pelayanan psikososial belum dikembangkan di kota Padang Panjang. Terutama layanan pendampingan psikososial terkait pendidikan pada daerah rawan bencana, belum dilakukan pelatihan khusus

untuk tenaga pendidik yang memiliki kemampuan layanan psikososial untuk siswa dan proses belajar mengajar dalam situasi darurat atau paska bencana.

Sebagai bagian dari ketahanan terhadap bencana, bentuk bencana kesehatan seperti pandemi covid 19 perlu mendapat perhatian khusus. Pengembangan dan penyempurnaan sistem kesehatan kota membutuhkan peningkatan penanganan yang menyangkut perbaikan empat (4) determinan kesehatan publik perkotaan, yakni determinan lingkungan sosial, lingkungan fisik/infrastruktur, ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah optimalisasi dukungan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin.

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Berkeadilan

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih menyangkut aspek-aspek penting berikut; tidak adanya korupsi, tidak ada pelanggaran, waktu penyelesaian program yang tepat, pelayanan perizinan cepat dan murah. Maka melihat dari kinerja beberapa OPD yang terkait pelayanan publik perlu dilaksanakan beberapa penyesuaian dan perbaikan. Inovasi yang telah dilakukan masih memerlukan penyempurnaan secara bertahap.

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan masih perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Dari hasil SAKIP yang bernilai B (63,28) dapat dikatakan perlu perbaikan pada banyak hal yang meliputi:

- a. Ketepatan perumusan masalah dan Solusi yang ditetapkan dalam penyusunan program
- b. Ketepatan waktu penyelesaian program dan kegiatan
- c. Keterkaitan antara *output* dan *outcome* capaian program untuk mendukung capaian indikator kinerja utama
- d. Penjenjangan/*cascading* kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional.
- e. Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya
- f. Aplikasi manajemen kinerja sudah dibangun, namun belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual.

Hasil evaluasi AKIP internal yang dilakukan oleh Inspektorat perlu dipedomani dalam rangka memberikan *reward* dan *punishment* kepada perangkat daerah.

Aspek penting lainnya adalah perlu perencanaan berbasis data yang terintegrasi. DUKCAPIL dalam hal ini perlu melakukan pengolahan data kependudukan yang dapat di distribusikan secara berkala tanpa harus menunggu data BPS yang dalam beberapa hal bersifat proyeksi dan hasil survey. Selain itu pendataan penduduk dapat dikembangkan dalam bentuk tambahan data terpilah seperti pengelompokan penduduk berdasarkan pendapatan (30% tertinggi, 30% sedang dan 40% terendah. Data yang lebih akurat ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan yang lebih akurat seperti untuk penanggulangan kemiskinan, penyediaan obat dan vaksin serta perencanaan pengembangan PAUD. Basis data terintegrasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi (berbasis digital) akan sangat membantu akselerasi dan akurasi perencanaan. Pergeseran dari pengolahan dokumen fisik menjadi dokumen digital menimbulkan kerawanan tersendiri mengingat potensi pencurian data yang semakin canggih. Karena itu perlu ada tambahan/*backup* untuk data-data yang telah terdigitalisasi.

Dalam upaya meminimalisir praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) perlu dikembangkan kebijakan khusus antar Lembaga. Mendorong pengawasan yang *variative* termasuk dari Lembaga non Pemerintah (LSM, *Corruption Watch*).

Penguatan dan pendayagunaan layanan publik perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Survey kepuasan publik terhadap kemudahan, murah, cepat dan keramahan pelayanan agar diselenggarakan secara berkala .

Harmonisasi aturan, penyesuaian organisasi dan profesionalitas pegawai akan sangat berkontribusi kepada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan public yang berkeadilan. Penyiapan sumber daya manusia untuk pelayanan yang optimal perlu diselenggarakan dengan penekanan kepada pelayanan sepenuh hati, professional dan berintegritas .

Untuk mendorong kemudahan berusaha perbaikan dan peningkatan kualitas informasi layanan dan ketersediaan informasi awal yang valid amat diperlukan. Belajar dari pengalaman kota-kota lain di Indonesia dan kota-kota negara lain inovasi terus menerus berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan. Keberanian berfikir *out of the box* namu bertanggung jawab terbukti amat membantu penyelesaian masalah- perkotaan .

5. Pengembangan Kota Berkelanjutan

Kualitas Lingkungan Hidup cenderung menurun dari waktu ke waktu bila dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kualitas air pada sebagian besar sungai dikategorikan waspada. Alih fungsi lahan pertanian telah terjadi dan kesuburan lahan realtif menurun. Pengelolaan sampah masih bersifat kumpul

angkut dan buang, tidak terlihat perubahan signifikan penggunaan sampah untuk energi atau daur ulang sampah untuk pupuk.

Memperhatikan hal tersebut maka salah satu isu strategis untuk lima tahun kedepan adalah bagaimana membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa menurunkan kualitas lingkungan. Penyebab utama degradasi lingkungan hidup adalah peningkatan jumlah penduduk yang kemudian membutuhkan ruang untuk pemukiman sehingga menimbulkan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan infrastruktur publik, peningkatan sampah dan limbah baik limbah domestik maupun limbah industri rumah tangga, bengkel, pasar dan hotel serta rumah sakit. Untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut maka pola Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu mengubah paradigma yang selama ini lebih bersifat eksploitatif kearah pola pembangunan yang bersifat berkelanjutan.

Langkah awal untuk mewujudkan Pembangunan kota berkelanjutan adalah mengubah kesadaran publik tentang pemenuhan kebutuhan yang essensial, bukan keinginan. Kesadaran tentang pemenuhan kebutuhan yang essensial akan berpeluang menjururkan keserakahan baik terhadap sumber daya dan ruang. Untuk itu penekanan yang berlebihan pada peningkatan ekonomi untuk saat ini semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang perlu ditinggalkan. Hal tersebut akan berimplikasi pada penetapan kriteria baru dalam keberhasilan pembangunan yang tidak hanya menampilkan peningkatan PDRB tetapi juga IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

Untuk mewujudkan pengembangan kota berkelanjutan beberapa langkah berikut perlu dilakukan :

a. Peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan.

Penyadaran publik terkait pentingnya peningkatan ruang terbuka hijau harus diupayakan secara intensif. Kebijakan dan aturan pembangunan pemukiman yang telah ada agar diimplementasikan secara maksimal. Dalam hal tertentu jika diperlukan dapat dikembangkan kebijakan baru untuk mendorong semakin luas dan tingginya NDVI (*Natural Density Vegetation Index*). Semakin baik NDVI maka potensi kekeringan, penurunan kesuburan lahan, longsor, banjir, kebakaran lahan dan kerusakan akibat angin puting beliung dapat diminimalkan. Dalam kaitan ini mengembangkan partisipasi publik lewat rekayasa idomatik seperti penciptaan slogan atau penetapan visi "*Padang Panjang sebagai Kota Taman*" atau *Padang Panjang sebagai kota Ramah Keanekaragaman hayati dan budaya*" layak dilakukan. Kebijakan LP2B (Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan) agar segera diimplementasikan dengan pengembangan insentif dan disinsentif. Selanjutnya hutan sekitar kota yang masih tersisa perlu di pertahankan dan hanya dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan non ekstraktif. Misalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hutan untuk wisata terbatas.

b. Pengendalian timbunan sampah dan Limbah.

Pola pengelolaan sampah 4R (*reduksi, reuse, reutilization, recycling*) penting untuk dilaksanakan lewat variasi-variasi terkini. Sampah plastic dapat didaur ulang sebagai sumber bahan bakar (bensin), sampah organic digunakan untuk pengembangan maggot dan sampah lain seperti battery, obat sisa perlu diolah secara khusus. Untuk lebih melibatkan banyak pihak maka penyebarluasan informasi sebaiknya melibatkan tenaga pendidik, ulama dan tokoh masyarakat. Strategi *mainstreaming* lewat media sosial merupakan peluang yang bisa digunakan.

Pengendalian limbah, terutama limbah domestic sejak awal perlu dilakukan dengan pengembangan sistem drainase perkotaan terintegrasi (*integrated sewerage system*).

Secara bertahap dapat dikembangkan master plan pengelolaan limbah. PDAM bisa memanfaatkan peluang pengelolaan limbah berbayar dari hotel, restoran, mini market dan perbankan.

c. Pemanfaatan energi minim Gas Rumah Kaca.

Diseminasi informasi terkait dengan penggunaan energi surya baik energi termal maupun *fotovoltaic* perlu dilaksanakan. Energi termal biasanya digunakan untuk pengering hasil pertanian, sementara energi *fotovoltaic* adalah konversi energi surya kepada energi Listrik. Lampu penerangan jalan, pompa air, penyimpanan vaksin seyogyanya menggunakan energi surya. Pada Lokasi tertentu penggunaan energi angin perlu dimulai. Angin dapat memutar kincir yang akan menghasilkan energi Listrik.

Dalam kaitan dengan ini mendidik masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pengembangan jalan sepeda dan penyediaan trotoar yang nyaman. Kebijakan penyediaan bus sekolah untuk berangkat dan pulang dari lokasi terseleksi dapat dipertimbangkan untuk periode RPJMD 2025-2029 ini.

1) *Transit Oriented Development*

Pengembangan pemukiman terpadu juga merupakan upaya untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Pemukiman terpadu akan mengurangi mobilitas publik yang berpotensi meningkatkan pencemaran udara. Pada suatu lingkungan pemukiman dapat didorong penyediaan pasar lokal, puskesmas, sarana ibadah, rekreasi dan sekolah. Hal ini dicapai dengan perencanaan Rencana Detil Tata Ruang yang dikaji secara saksama.

2) *Pengembangan infrastruktur Hijau.*

Secara bertahap Pembangunan jalan baru atau perbaikan jalan perlu dilengkapi dengan mempertimbangkan ruang untuk pejalan kaki dan pohon pelindung yang meningkatkan tutupan vegetasi. Bangunan Gedung juga dapat dilengkapi dengan tanaman merambat sedemikian rupa akan meningkatkan

serapan karbon. Mengingat kota Padang Panjang belum memiliki pemakaman umum resmi, perlu diupayakan penyediaan pemakaman umum tersebut dengan konsep *makam – taman*. Pohon pelindung disekitar makam perlu dikembangkan dan pada pemakaman yang sudah ada namun belum memiliki pohon pelindung perlu diupayakan penanaman pohon.

Jalur Hijau kota yang terletak diantara badan jalan atau diantara bangunan perlu ditingkatkan kualitasnya. Tepian Sungai agar dikelola dengan meminimalkan bangunan pemukiman dan difungsikan sebagai pengaman dari potensi luapan Sungai.

Lapangan olah raga yang juga merupakan ruang terbuka perlu dilengkapi dengan penanaman rumput dan pepohonan yang mendukung peningkatan kesegaran jasmani.

Saluran drainase perkotaan, yang sebagian sudah cukup dalam perlu dipelihara, namun mengingat peningkatan intensitas bangunan yang mengurangi daerah resapan air perlu dikembangkan sumur resapan dan biopori untuk mengendalikan genangan yang muncul sehabis hujan.

3) *Peningkatan konservasi bangunan tua dan bernilai Sejarah.*

Bangunan tua yang telah dibangun sejak periode colonial perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Bangunan SMA, Diniyah Putri, Stasiun kereta Api dan bangunan masjid Asasi yang memiliki nilai sejarah dapat direvitalisasi dengan

4) *Pembangunan Kota Kota Baru di Tanah Erfpach.*

Di tengah tekanan urban yang makin menguat dan keterbatasan ruang di kawasan pusat kota, Padang Panjang dihadapkan pada pilihan bertahan dengan kondisi yang ada atau berani mengambil langkah besar menjemput masa depan yang membuka berbagai peluang. Dari opsi tersebut maka lahirlah sebuah harapan besar: Pembangunan Kota Baru Padang Panjang di Tanah Erfpacht seluas 41 hektar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

❖ *Keterbatasan Lahan: Dilema Kota Kecil yang Tumbuh*

Padang Panjang, dengan topografinya yang unik dan sejarahnya sebagai kota pendidikan dan spiritual, mengalami pertumbuhan kebutuhan lahan yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang tersedia. Kawasan pusat telah dipadati oleh infrastruktur pemerintahan, pemukiman padat, fasilitas publik, serta pusat pendidikan lama. Kita semakin dihipit keterbatasan lahan. Pusat kota yang dulu lapang kini makin padat dengan harga tanah yang makin tinggi, keterbatasan ini memunculkan sejumlah persoalan:

- a) Kemacetan lokal dan kepadatan fungsi di kawasan pusat.
- b) Minimnya ruang terbuka hijau dan taman interaktif.
- c) Keterbatasan ruang ekspansi untuk kampus dan inovasi pendidikan.

- d) Peluang ekonomi yang stagnan di pusat kota akibat minimnya ruang tumbuh.

Dengan demikian, pembangunan kota baru menjadi kebutuhan struktural, bukan sekadar pilihan

Tanah Erfpacht dipilih bukan hanya karena lahannya tersedia, tetapi karena letaknya yang strategis sebagai perpanjangan alamiah dari kota inti. Lokasi ini memungkinkan konektivitas mudah ke pusat kota sekaligus memiliki ruang untuk merancang tatanan baru tanpa beban tata ruang lama. Sebagai kawasan seluas 41 hektar, Kota Baru ini akan dibangun dengan pendekatan mixed-use development yang saling melengkapi antara ruang publik, fasilitas pendidikan, sarana olahraga dan budaya, wisata agro, serta kawasan ekonomi baru.

❖ **Elemen-elemen Utama Kota Baru**

a) **Taman dan Ruang Publik**

Didesain sebagai paru-paru kota sekaligus ruang rekreasi dan kontemplasi. Taman ini akan menjadi simbol inklusivitas dan kemajuan peradaban—di mana semua warga, tanpa memandang latar belakang, bisa berkumpul, bermain, dan berdialog.

b) **Alun-alun Kota Baru**

Sebuah ikon kebanggaan, tempat perayaan budaya, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Di sinilah ruh kebersamaan dan identitas Minangkabau akan terus disemai di tengah modernitas.

c) **Kampus dan Sekolah Inovatif**

Mendorong kelahiran smart city education hub. Kampus dan sekolah baru akan dikembangkan dengan pendekatan ramah lingkungan, digitalisasi pembelajaran, dan koneksi dengan dunia industri serta wirausaha lokal. Ini akan memperkuat identitas Padang Panjang sebagai Kota Pelajar Serambi Mekah.

d) **Sirkuit Motor dan Arena Sport Tourism**

Sirkuit ini menjadi magnet baru bagi generasi muda. Tak hanya olahraga, tetapi juga ruang untuk event otomotif, festival, dan ekonomi kreatif. Potensi ekonomi dari sport tourism bisa berkembang pesat, termasuk sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM.

e) **Gelanggang Pacuan Kuda**

Merawat warisan budaya Minang yang telah diakui secara nasional, pacuan kuda akan dikemas dengan modernitas tanpa kehilangan nilai historis dan filosofi. Event-event rutin akan meningkatkan kunjungan wisata dan menghidupkan denyut ekonomi lokal.

f) **Kebun Buah dan Agro Edupark**

Kawasan ini akan menjadi pusat agro-edukatif untuk siswa, mahasiswa, dan wisatawan. Konsep wisata petik buah, pelatihan pertanian organik, serta pemasaran produk lokal akan membentuk ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan.

❖ **Tata Ruang dan Konsep Kota Berkelanjutan**

Kota Baru ini akan dibangun dengan prinsip tata ruang adaptif dan ekologis:

- a) **Zonasi yang tertata**
Memisahkan dan mengintegrasikan fungsi pendidikan, publik, ekonomi, dan residensial secara harmonis.
- b) **Infrastruktur hijau dan drainase ekologis**
Menyesuaikan dengan kontur alami dan risiko bencana geologis di kawasan perbukitan.
- c) **Smart energy dan manajemen pengelolaan sampah**
Energi terbarukan dan pengolahan sampah mandiri akan menjadi bagian dari sistem pengelolaan kota.

❖ **Dampak Sosial, Budaya, dan Ekonomi**

Ruang publik yang luas akan meningkatkan kohesi sosial, memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap kotanya, dan menyediakan ruang aman untuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Dengan adanya gelanggang budaya, alun-alun, dan pusat kegiatan adat, Kota Baru tidak akan menjadi kota impersonal. Justru di sinilah napas budaya lokal disematkan dalam arsitektur dan aktivitas warganya. Sedangkan secara ekonomi kehadiran Kota Baru membuka peluang:

- a) **UMKM kuliner dan souvenir lokal**
- b) **Investasi sektor pendidikan, hospitality, dan hiburan.**
- c) **Peluang lapangan kerja baru.**
- d) **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi.**

❖ **Prospek Investasi dan Kolaborasi**

Pemerintah kota dapat mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat realisasi pembangunan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Investor dapat diarahkan untuk membangun: Asrama dan kampus pendidikan, Hotel dan wahana wisata, pusat belanja lokal dan coworking space, restoran tematik dan kedai kreatif. Dengan branding kota baru yang kuat, investor tidak hanya membeli lahan, tapi ikut menjadi bagian dari sejarah perubahan wajah kota Padang Panjang.

Pembangunan Kota Baru Padang Panjang bukan tentang menambah bangunan, tapi membangun ruang hidup yang bermartabat, terencana, dan menjanjikan masa depan. Di tanah Erfach yang dahulu sunyi dan terabaikan, akan lahir harapan baru, anak-anak kota yang berlari di taman-taman yang hijau, mahasiswa yang berdiskusi di kampus modern, dan pedagang kecil yang tersenyum menjajakan dagangannya di tengah geliat ekonomi baru. Dari sini, Padang Panjang tak hanya bertahan sebagai kota kecil di jantung Sumatera barat, tapi tumbuh menjadi pusat budaya, pendidikan, dan wisata yang layak diperhitungkan di Indonesia

6. Layanan Sektor Perumahan Dan Infrastruktur Dasar

Beberapa isu terkait pembangunan sektor perumahan dan infrastruktur dasar Kota Padang Panjang antara lain adalah:

- a) Optimalisasi pemanfaatan ruang terbatas untuk penyediaan hunian layak dan terjangkau, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Kota Padang Panjang.
- b) Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH = 1.388 unit) dan backlog perumahan (42%).
- c) Penyediaan perumahan berkelanjutan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar, tata ruang, dan transportasi perkotaan.
- d) Peningkatan akses layanan air bersih yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber air baku secara terpadu.
- e) Penguatan sistem pengelolaan air limbah domestik baik melalui sistem individual yang memenuhi standar maupun sistem terpusat skala kota/komunal.
- f) Perbaikan pengelolaan persampahan secara modern dan ramah lingkungan, termasuk pengurangan sampah di sumber dan pemanfaatan teknologi pengolahan.
- g) Pengembangan sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap perubahan iklim, untuk mengurangi risiko genangan dan banjir.
- h) Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan energi dan PJU, guna menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan kota yang aman dan nyaman.
- i) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan sektor perumahan dan infrastruktur dasar, termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan swasta.



BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, visi, misi, serta sasaran pokok pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun dan menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan menengah lima tahunan (RPJMD) setiap periode kepala daerah.

3.1.1. Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Visi RPJPD adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun mendatang, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat terwujud. Visi ini menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan menganalisis tren periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi bukan sekadar impian atau serangkaian harapan, melainkan suatu komitmen dan usaha untuk merencanakan dan mengelola perubahan demi mencapai tujuan yang diinginkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045, Visi RPJPD Kota Padang Panjang dituangkan sebagai berikut:

“Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Dengan penjabaran sebagai berikut :

Agamis

Kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Panjang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang agamis menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai, budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan,



pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal. Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi agamis dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Maju

Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan Kota Padang Panjang yang berlandaskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunnya kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat, ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah, SDM yang unggul dan maju, pengembangan infrastruktur kota, adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas guna mewujudkan masyarakat yang maju.

Sejahtera

Sejahtera ditandai dengan peningkatan perekonomian masyarakat secara merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan yang asri dan lestari, permukiman yang layak dan nyaman. Sejahtera ini ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta memiliki pendapatan yang mencukupi. Pada tahun 2045, kesejahteraan masyarakat dengan kualitas SDM yang berdaya saing dapat terwujud. Kondisi ini ditandai dengan tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur yang berkualitas.

Berkelanjutan

Komitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Berkelanjutan merupakan komitmen untuk terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat yang tinggi ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup

yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, sampah, serta sungai terjaga dengan baik.

Terwujudnya “Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” tercermin dari 5 (lima) sasaran visi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang
Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET				
				2030	2035	2040	2045	
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	79,06	192,70	306,60	420,30	454,60	
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,54	10,51	11,51	12,71	14,12	
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	3,20-3,76	2,48-3,02	1,45-1,97	0,5 -1	
		Rasio Gini	0,285	0,266	0,248	0,231	0,229	
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	6,05	6,22	5,71	5,22	
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,38 (sedang)	3,41 (tinggi)	3,42 (tinggi)	3,43 (tinggi)	3,44 (tinggi)	
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,78	82,87	85,46	88,42	90,96	
		Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137.780.000/ Orang	152.780.000 / Orang	167.780.000 /Orang	182.780.000 /Orang	197.780.000 /Orang	
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	75,47	76,53	77,59	78,65	

Sumber : RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045, 2024

3.1.2. Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang merupakan upaya utama pembangunan yaitu:

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial**, Misi ini menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk menciptakan SDM yang berdaya saing dan berkarakter unggul. Hal ini sejalan dengan misi RPJPN 2025–2045, yaitu menciptakan SDM unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi**, Pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada penguatan struktur ekonomi berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan untuk mendorong



pertumbuhan yang merata dan berdaya saing. Misi ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, optimalisasi inovasi, dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan BUMD. Pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui pemberdayaan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

- 3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif,** Misi ini menekankan optimalisasi sumber daya aparatur pemerintah melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sarana prasarana, serta pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Ditekankan pula pentingnya pengawasan, tata kelola regulasi, dan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta stabil secara ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.
- 4. Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah,** Misi ini berfokus pada supremasi hukum dan stabilitas ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan kota yang aman, tertib, dan produktif. Fokus diarahkan pada penguatan keamanan, penegakan hukum, dan pengelolaan risiko ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini mencakup pengelolaan keuangan yang prudent, peningkatan daya saing, dan diversifikasi ekonomi lokal guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, daerah dapat memperkuat kemandirian ekonomi, melindungi hak masyarakat, serta meningkatkan daya tarik kota sebagai tempat tinggal, investasi, dan pariwisata.
- 5. Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah,** mencakup upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik melalui penguatan jaringan sosial dan akses layanan dasar. Di bidang budaya, fokus diarahkan pada pelestarian nilai, tradisi, dan warisan lokal sebagai panduan etika dan perilaku masyarakat. Sementara itu, aspek ekologi menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Tantangannya adalah menjadikan identitas Serambi Mekah bukan sekadar simbol, tetapi tercermin nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,** berfokus mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui distribusi sumber daya yang adil, perencanaan terpadu, dan penguatan pemerintahan daerah. Pendekatan ini mempertimbangkan potensi dan kebutuhan spesifik tiap wilayah dengan prinsip inklusivitas. Investasi infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal (UMKM, pertanian, pariwisata), serta peningkatan konektivitas menjadi kunci dalam membuka akses dan peluang ekonomi bagi seluruh



masyarakat. Melalui kolaborasi dan kebijakan yang partisipatif, pembangunan wilayah diharapkan berjalan berkelanjutan dan menyeluruh.

- 7. Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan,** Misi ini bertujuan mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang pemerataan wilayah. Infrastruktur yang memadai harus memastikan keterhubungan antardaerah dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, infrastruktur juga dituntut memperhatikan dampak lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pengendalian polusi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengembangan infrastruktur hijau. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.
- 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah,** Misi mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan konsisten, tidak hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga bagi generasi mendatang. Hal ini dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran yang terpadu serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Pembangunan yang berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, sehingga daerah menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan.

3.1.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang dibagi 4 tahapan, dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1. Tahap I (2025-2029) yakni Penguatan fondasi Pembangunan Daerah:** merupakan langkah awal yang sangat penting dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan yang diharapkan, meliputi kerangka regulasi, kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, dan networking, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program selama ini antara lain kondisi kebencanaan, dukungan sarana dan prasarana Infrastruktur, kualitas SDM.
- 2. Tahap II (2030-2034) yakni Akselerasi Transformasi:** mengacu pada upaya percepatan perubahan dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dengan lebih cepat dan efektif yang di fokuskan

pada beberapa aspek penting antara lain transformasi digital, inovasi dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur, tata kelola kelembagaan, strategi komunikasi yang efektif, reformasi ekonomi dan keuangan menjaga sustainabilitas dan keberlanjutan, keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

- 3. Tahap III (2034-2039) yakni Ekspansi Global:** mengacu pada strategi untuk melakukan ekspansi Kota Padang Panjang di kancah regional, nasional dan internasional, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan regional, nasional dan internasional melalui penguatan diplomasi ekonomi, pengembangan produk dan pasar ekspor, peningkatan daya saing industri, pendidikan dan riset global, penguatan ekonomi dengan memberikan nilai tambah pada ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler, dan menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
- 4. Tahap III (2034-2039) yakni Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan :** yang ditandai dengan terwujudnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama di semua lini kehidupan, masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, pembangunan yang adil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang utuh, infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas, inovasi dan teknologi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemandirian dan ketahanan secara ekonomi, sosial dan geopolitik

Sasaran pembangunan daerah dituangkan dalam bentuk capaian indikator makro yang mencerminkan keberhasilan pembangunan lintas sektor. Adapun indikator utama pembangunan yang menjadi fokus selama periode RPJMD 2025–2029 sebagai tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Periode I RPJPD
Tahun 2025 - 2045

MISI/ TUJUAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2030
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial		
TP 1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,50	75,60
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	0,00
2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,10	5,00
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100,00	100,00



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

MISI/ TUJUAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2030
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	87,00	90,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100,00	100,00
TP 2	Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan bernuansa islami		
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	L: 84,70 N: 67,97	L: 85,20 N: 70,27
5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,14	12,62
5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,42	15,75
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	27,12	28,03
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,10	75,60
TP 3	Meningkatnya Perlindungan Sosial		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	3,20-3,76
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,68	56,09
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	50,43	51,43
MISI 2	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi		
TP 4	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,46	8,94
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,94	3,23
12.b	Jumlah Tamu Asing yang Berkunjung (ribu orang)	152	175
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	4,95	4,95
14.a	Proporsi jumlah Usaha mikro non pertanian (%)	11,5	13
14.b	Proporsi jumlah IKM (%)	3,91	5,21
14.c	Rasio Kewirausahaan	3,65	3,84
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	2,44	2,83
14.e	ROA BUMD	1,75	3,63
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	5,26
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	56,37	62,96
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,73	59,23
17.b	Indeks Inovasi Daerah	65,81 (Sangat Inovatif)	72,39 (Sangat Inovatif)
TP 5	Penerapan Ekonomi Hijau		
18.a	1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	5,20	5,50
18.b	2. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	118,38	126,55
TP 6	Peningkatan Penerapan Transformasi Digital		
19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	56,14	62,11
TP 7	Integrasi Ekonomi Lokal		
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (Koefisien Variansi Harga Antar Waktu) (%)	8,8	8,5
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,19	30,94



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

MISI/ TUJUAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2030
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	3,34	3,72
TP 8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan		
23.a	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi	1,43	1,44
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	97,12	98,21
MISI 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif		
TP 9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
24	Indeks Reformasi Hukum	70,25	72,50
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3,44
26	Indeks Pelayanan Publik	4	4,30
27.a	Survei penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	77	78
MISI 4	Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah		
TP 10	Meningkatnya Supremasi Hukum		
28	Persentase Penegakan Perda	100	100
29	Angka kriminalitas per 1000 penduduk (kasus)	1,8	1,7
30	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif	82,0	83,3
TP 11	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Daerah		
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,29	0,40
32	Tingkat Inflasi	2.80-3.6	2.32-3.12
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	2,88	16,38
33.d	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	12.835.752	25.784.262
33.e	Total Kredit/PDRB	15,30	28,45
34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	4,3	4,4
TP 12	Ketangguhan Diplomasi dan Kerja sama Daerah		
35	Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan	100	100
36	Persentase penurunan pelanggaran trantibum	2,5	2,75
MISI 5	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah		
TP 13	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya		
37	Persentase objek pemajuan kebudayaan (%)	75	75,5
38	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	100	100
TP 14	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender		
39	Indeks Pembangunan Keluarga	60,5	61,5
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.15-0.14	0.13-0.12
40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	82.36	83,52
TP 15	Lingkungan Hidup Berkualitas		
41	Indeks tutupan lahan	69,51	69,86
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	74,47
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	27,55%	43.05
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,21	28.93
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	75,00	80,50



MISI/ TUJUAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2030
TP 16	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan,		
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita (Kwh)	1529	2258
43.b	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,49	5,20
43.c.1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.210	0.22
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	92,25	93,75
TP 17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	113,2	112,40-107,40
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	75.47

3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

3.2.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu :

“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

3.2.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sarasannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di



Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Asta Cita dan juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2.3. Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

Gambar 3.1

Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025 - 2029

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)
- ✓ GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 % (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)
- ✓ Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029)
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

3.3. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Dalam rangka memastikan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada periode 2025–2029, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan daerah. RPJMD ini merupakan penjabaran dari RPJPD 2025–2045 dan disusun secara politis-teknokratis sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Visi dan misi yang dirumuskan tidak hanya menggambarkan harapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga mencerminkan semangat kolektif untuk menjawab tantangan pembangunan serta mendorong terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang maju, adil, dan berkelanjutan

3.3.1. Visi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip no one left behind.

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 diukur melalui sasaran visi yaitu:

Tabel 3.3
Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2030
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142.65
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96
		Rasio Gini (indeks)	0,274	0.266
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51
		Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90
3	Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, 2025

3.3.2. Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang operasional, terukur, dan berdampak nyata. Visi ini mencerminkan harapan masyarakat akan masa depan yang menjunjung nilai-nilai keislaman, kemajuan di berbagai bidang, dan keadilan bagi seluruh warga. Sebagai penjabaran visi, disusun 8 (delapan) misi pembangunan yang menjadi



langkah strategis dalam menghadapi tantangan, memanfaatkan potensi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing secara berkelanjutan. Perumusan misi ini mempertimbangkan kesinambungan pembangunan, prioritas nasional, isu strategis global-regional, dan nilai-nilai khas masyarakat Minangkabau.

Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7. Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
8. Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

3.3.3. Sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Tahun 2025- 2029

Dari 8 (delapan) Misi RPJMD dijabarkan menjadi beberapa sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.4
Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,98	78,77	79,6	80,4	81,1
	Indeks Modal Manusia	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63
Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	10,05	10,18	10,32	10,45	10,59
	Harapan Lama Sekolah	14,39	14,47	14,55	14,63	14,71	14,79
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	19,51	25,63	31,76	37,88	13,87
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	74,54	74,82	75,1	75,38	75,66
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	121	112	103	94	85
	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,5	19,62	18,74	17,87	16,99	16,11
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	71	75,45	79,90	84,35	88,80	93,25
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,11	92,34	92,57	92,79	93,02	93,25
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	94,89	95,70	96,52	97,33	98,15
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN							
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	84,01	84,81	85,60	86,39	87,18	87,98
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,90
Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	77.574.909	81.970.058	86.365.206	90.760.354	95.155.502	99.550.650
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,84	6,51	6,18	5,86	5,53	5,20



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	69,51	70,33	71,15	71,97	72,79
	Indeks Ekonomi Biru	25,19	27,43	29,68	31,92	34,17	36,41
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,615	0,617	0,618	0,620	0,622
	Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,7	53,61	55,52	57,44	59,35	61,27
MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN							
Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Indeks Desa	7,83	8,38	8,97	9,84	10,84	11,83
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	39,22	39,40	39,58	39,76	39,94	40,12
	Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten (%)	4,16	5,63	6,87	6,94	7,35	5,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 - 5,76	5,18 - 5,66	4,99 - 5,56	4,81 - 5,47	4,62 - 5,37	4,43 - 5,28
Sasaran 1 Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	1,35	1,46	1,57	1,68	1,79
	Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)	4,60	4,48	4,42	4,30	4,24	4,14
	Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	6,31	5,94	5,49	5,08	4,64	4,21
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	66	67,9	69,8	71,7	73,77
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	10,57	12,57	14,57	16,57	18,57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	44,168	47,106	50,044	52,982	55,92
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	32,532	36,064	39,596	43,128	46,66
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	14,966	18,932	22,898	26,864	30,83
MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT							
Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,65	3,72	3,8	3,87	3,94
	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	4,63	4,576	4,522	4,468	4,414	4,36



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Tingkat Inflasi (%)	2,8 - 3,6	2,71 - 3,56	2,61 - 3,53	2,51 - 3,49	2,42 - 3,46	2,33 - 3,43
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	30,154	30,518	30,882	31,246	31,61
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,5	16,658	16,816	16,974	17,132	17,29
	Indeks Inovasi Daerah	72,5	72,876	73,252	73,628	74,004	74,38
Sasaran 1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	8,46 - 8,53	8,61 - 8,70	8,76 - 8,87	8,92 - 9,04	9,07 - 9,21	9,23 - 9,38
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,01	19,814	21,618	23,422	25,226	27,03
	Total Kredit/PDRB (%)	24,4	25,736	27,072	28,408	29,744	31,08
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	2.926.183	4.129.523	5.332.863	6.536.203	7.739.543	8.942.883
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,92	1,28	1,64	2	2,36	2,72
	Konsumsi listrik per kapita	707	801,85	896,7	991,55	1086,4	1181,25
	Intensitas Energi Primer	160	158,5	157	155,5	154	152,50
Sasaran 2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	75,794	76,278	76,762	77,246	77,73
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,2	34,506	36,812	39,118	41,424	43,73
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	15	16,5	18	19,5	21	22,50
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	39,6	41,2	42,8	44,4	46
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	60,104	60,798	61,492	62,186	62,88
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,15	11,248	11,346	11,444	11,542	11,64
Sasaran 3 Mendorong pertumbuhan UKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,53	3,608	3,686	3,764	3,842	3,92
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	87,35	87,98	88,61	89,24	89,87



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA							
Tujuan Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	170,51	167,982	165,454	162,926	160,398	164,19 - 157,87
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	78,16	78,37	78,58	78,79	79,00
	Indeks Kinerja Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	54,55	56,48	58,41	60,34	62,27
Sasaran 1 Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	18,08	18,972	19,864	20,756	21,648	22,54
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)	28,05	29,764	31,478	33,192	34,906	36,62
	Indeks Ketahanan Daerah						
Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,08	1,428	1,776	2,124	2,472	2,82
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	-	-	-	-	-	-
Sasaran 3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,162	6,224	6,286	6,348	6,41
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	2,95	2,85	2,75	2,66	2,58	2,50
MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27	76,61	76,96	77,31	77,662	78,01 (Sedang)
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	69,78 - 69,79	70,03 - 70,04	70,28 - 70,29	70,53 - 70,54	70,78 - 70,80
Sasaran 1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 - 60,65	61,06 - 61,15	61,54 - 61,66	62,02 - 62,16	62,5 - 62,67	62,98 - 63,18
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,064	3,068	3,072	3,076	3,08



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	72,55 - 72,67	72,87 - 73,04	73,19 - 73,39	73,51 - 73,75	76,9
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,39 - 0,37	0,38 - 0,36	0,37 - 0,35	0,36 - 0,34	0,350 - 0,330
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	73,908	74,656	75,404	76,152	0,350 - 0,330
Sasaran 3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	58,63	59,5	60,37	61,24	62,11
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,25	66,35	66,45	66,55	66,65
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	94,3	94,6	94,9	95,2	95,5
MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UKM							
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63	1,68
Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)	43,08	46,31	49,54	52,78	56,01	59,24
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)	21.104.516	23.214.968	25.536.464	28.090.111	30.899.122	30.899.122
Sasaran 2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13
	Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,59	3,88	4,17	4,46	4,75	5,04
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF							
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	73,16	73,91	74,66	75,40	76,15	76,90



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Sasaran 1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18
	Indeks Reformasi Hukum	70	71,53	73,06	74,59	76,12	77,65
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,84	3,90	3,96	4,01	4,07	4,13
	Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan	37,5	40,63	43,75	46,88	50,00	53,13
Sasaran 3 Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,20	1,22	1,25	1,27	1,3
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	2,06	2,21	2,35	2,50	2,64



3.4. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

3.4.1. Visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi yang digunakan adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang mencerminkan arah dan tujuan pembangunan selama masa jabatan mereka.

Penyusunan RPJMD sendiri berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta visi, misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada masa kampanye.

Dengan dasar tersebut, maka visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah:

“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”

Untuk memperjelas makna dan arah dari visi tersebut, berikut ini disajikan penjabaran dari setiap unsur utama dalam visi pembangunan:

- Maju** : Memiliki makna bahwa pembangunan yang akan dicapai adalah pembangunan yang pesat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Yaitu dalam bentuk Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai didukung adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas. Padang Panjang tumbuh dengan ekonomi yang stabil dan merata ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah.
- Sejahtera** : Adanya perbaikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, merata dan berkeadilan. Pembangunan kota diselenggarakan dalam semangat mewujudkan masyarakat kota yang berdaya / mandiri / berdaulat yang ditandai dengan akses setiap individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Infrastruktur kota mendukung kemajuan ekonomi yang inklusif, menciptakan



lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi semua warga. Selain itu, hubungan sosial di antara masyarakat.

Bermarwah : Kota yang menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai luhur agama, kearifan lokal dan adat istiadat berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dijunjung tinggi yang mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup harmonis dan beradab.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang lebih maju, tangguh, inklusif, dan sejahtera. Visi ini juga merupakan bentuk komitmen politik kepala daerah sekaligus representasi aspirasi kolektif masyarakat yang ingin mewujudkan masa depan Kota Padang Panjang dalam bingkai identitas sebagai Serambi Mekah yang kokoh. Berikut adalah Sasaran Visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029:

**Tabel 3.5 Sasaran Visi RPJMD Kota Padang Panjang
Tahun 2025-2029**

SASARAN VISI	Indikator	Satuan	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Pendapatan Per Kapita									
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp.Juta	80,01	80,80	84,55	89,46	94,82	100,82	105,68
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	8,30	9,54	10,73	11,93	12,12	13,32	14,51
Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang									
	Tingkat Kemiskinan (%)	%	5,31	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70
	Rasio Gini	Angka	0,266	0,266	0,259	0,245	0,230	0,216	0,201
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,52	5,15	5,95	7,12	7,31	7,65	6,22
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3.14 (Thn 2023)	3,38	3,39	3,39	3,40	3,40	3,41
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat									
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,6	81,50	82,40	83,30	84,20	85,10	86,00
	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	%	4,94	4,43	3,93	3,42	2,91	2,41	1,90
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62,62	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89



Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan Kota Padang Panjang akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dengan mengedepankan semangat kolaboratif. Seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, akan dilibatkan secara aktif guna memastikan terbangunnya sinergi dan partisipasi yang luas. Dengan demikian, cita-cita bersama untuk menjadikan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.4.2. Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi pembangunan. Misi menjadi landasan penting dalam merumuskan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, misi mencerminkan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi atau pemerintahan, sekaligus menggambarkan komitmen dan konsistensi kinerja yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi “Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”, serta dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis, serta tantangan dan potensi Kota Padang Panjang ke depan, maka dirumuskan lima misi pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan jangka menengah.

Adapun misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi

Misi ini bertujuan untuk menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama dalam pencapaian kemajuan Kota Padang Panjang. SDM yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga oleh kemampuannya beradaptasi, berpikir kritis, serta memiliki akhlak dan karakter yang kuat sebagai fondasi kehidupan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan menjadi langkah strategis. Pendidikan vokasional, pelatihan kerja, serta penguatan literasi digital dan kewirausahaan akan diperkuat guna menciptakan lulusan yang siap kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja.



Selanjutnya, pengembangan kreativitas dan inovasi menjadi aspek penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era disrupsi teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah daerah akan mendorong tumbuhnya ruang-ruang kreatif, memperkuat ekosistem inovasi lokal, serta menjembatani sinergi antara sektor pendidikan, industri, dan komunitas. Hal ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide segar yang memberi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, program pembangunan diarahkan untuk membentuk individu yang memiliki kompetensi unggul, produktivitas tinggi, serta mampu bersaing secara sehat di tingkat lokal, nasional, maupun global. Daya saing ini tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga keunggulan sikap, etos kerja, dan semangat berinovasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, seluruh upaya tersebut perlu ditopang oleh masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Oleh karena itu, pembangunan sektor kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian misi ini. Layanan kesehatan dasar yang berkualitas, pemenuhan gizi, pengendalian penyakit, serta peningkatan kesadaran hidup bersih dan sehat akan terus dioptimalkan. Dengan masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif, Kota Padang Panjang akan memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan.

Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal

Misi ini mengarahkan pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang agar bertumpu pada kekuatan dan keunikan potensi lokal yang dimiliki daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian strategi yang komprehensif, termasuk penguatan kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung iklim usaha, investasi, dan daya saing lokal. Revitalisasi dan penataan pusat-pusat perdagangan juga akan dilakukan untuk menstimulasi berkembangnya sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, perdagangan, pertanian dan peternakan, serta industri pengolahan.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan pelaku usaha lokal dengan memberikan dukungan pelatihan, akses permodalan, serta penguatan jaringan

distribusi dan pemasaran produk. Dalam jangka menengah, pendirian perusahaan daerah berbasis multiusaha akan menjadi instrumen penting dalam mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal. Penguatan sektor pariwisata juga menjadi bagian integral dari misi ini, khususnya pariwisata berbasis budaya yang menonjolkan kekayaan lokal seperti seni, tradisi, sejarah, dan nilai-nilai keislaman khas Serambi Mekah. Upaya ini akan diiringi dengan penyelenggaraan event tematik, festival budaya, dan pengembangan kuliner khas daerah sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, pembangunan pusat ekonomi kreatif akan difokuskan sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara nyata, yang ditandai dengan meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan. Pembangunan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berorientasi keberlanjutan inilah yang menjadi landasan utama bagi Kota Padang Panjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama untuk memastikan terciptanya sistem birokrasi yang efisien, partisipatif, serta adaptif terhadap dinamika perubahan.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, responsif, dan inovatif. Profesionalisme aparatur pemerintah dapat ditingkatkan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penerapan manajemen talenta guna mengoptimalkan potensi individu dan mendorong budaya kerja yang kompeten dan berintegritas. Penguatan kapasitas kelembagaan juga akan dilakukan agar sistem pemerintahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat. Aspek akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam proses pemerintahan akan terus diperkuat melalui reformasi birokrasi dan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan diselenggarakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu merespons kebutuhan



masyarakat secara efektif.

Penyediaan pelayanan publik yang prima merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan misi ini. Hal ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih mudah diakses, murah, efisien, dan efektif. Selain itu, inovasi dalam layanan publik terus didorong sebagai bagian dari transformasi pemerintahan menuju sistem kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kota Padang Panjang akan menciptakan ruang bagi lahirnya berbagai bentuk inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Misi 4 Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal

Misi ini mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat Padang Panjang yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter hanya dapat dicapai apabila nilai-nilai agama, adat istiadat, serta kearifan lokal benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi sosial dan budaya dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan memiliki identitas yang kuat.

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang rukun, aman, dan tertib melalui penguatan kohesi sosial, toleransi antar warga, serta pengelolaan keamanan berbasis masyarakat. Upaya ini berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan kelompok rentan seperti pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas, agar setiap lapisan masyarakat merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam pembangunan.

Untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat, pemerintah mendorong penguatan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan aktivitas keagamaan, terutama di masjid sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat. Pendidikan karakter yang berbasis nilai agama dan kearifan lokal juga terus dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya. Pelestarian dan pengembangan budaya serta kearifan lokal menjadi elemen penting dari misi ini. Seni tradisional, adat istiadat, dan ekspresi



budaya masyarakat akan terus dirawat dan dikembangkan agar menjadi kekuatan budaya yang mampu memperkuat jati diri daerah sekaligus menjadi daya tarik budaya yang bernilai ekonomi. Dengan misi ini, Kota Padang Panjang diarahkan menjadi kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kokoh dalam nilai, harmonis dalam kehidupan sosial, dan kaya dalam warisan budaya serta spiritualitas masyarakatnya.

Misi 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota hijau yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan masa depan. Pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap infrastruktur dasar. Hal ini meliputi perbaikan dan pengembangan prasarana transportasi, penyediaan air minum yang layak, penataan drainase, serta sistem perparkiran yang terpadu dan efisien.

Pada aspek lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas utama. Salah satu fokus strategisnya adalah pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan, guna mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di perkotaan. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) secara fungsional dan inklusif juga menjadi bagian penting dari misi ini. RTH akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekologis masyarakat, seperti ruang publik, taman keluarga, taman anak, taman lansia, dan hutan kota, yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan kota terhadap tekanan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim. Dengan pendekatan berkelanjutan dan partisipatif, pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan diharapkan dapat berjalan seimbang, sehingga mendukung transformasi Padang Panjang sebagai kota hijau yang nyaman, sehat, dan inklusif bagi seluruh warganya.



3.4.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2030

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil dari perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan merupakan rumusan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi, yang didasarkan kepada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel berikut :



Tabel 3. 6
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Padang Panjang

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH										
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81,5	82,4	83,3	84,2	85,1	86
		S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,67	15,85	16,02	16,19	16,37	16,54
			Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	12,16	12,30	12,43	12,57	12,70	12,84
			Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	%						
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	97,88	97,00	97,30	97,50	98,00	98,50
		S1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,17	77,01	77,85	78,69	79,53	80,37
		S1.3 : Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86
		S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70	71	72	73	74	75
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal	T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,95	7,12	7,31	7,65	6,22
			Tingkat Kemiskinan	%	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,43	3,93	3,42	2,91	2,41	1,90
			Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,5	89,23	90	91,25	92,5	94,28
			Tingkat Inflasi	%	2,8-3,6	2,71-3,56	2,61-3,53	2,51-3,49	2,42-3,46	2,33-3,43
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,54	10,734	11,928	12,122	13,316	14,51
			Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	18,35	18,43	18,5	18,58	18,65	18,73
			Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,94	2,998	3,056	3,114	3,172	3,23
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,38	5,6	5,82	6,03	6,15	6,26
		S2.2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,19	30,34	30,49	30,64	30,79	30,94
			Nilai Investasi	Milyar	44,75	75	100	42,75	76,5	68,4
		S2.3 : Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	8,8	8,74	8,68	8,62	8,56	8,5
		S2.4 Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok	Tingkat Kesempatan Kerja	%						
			Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	137,78	140,78	143,78	146,78	149,78	152,78
		S2.5 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	2.714	2.368	2.023	1.671	1.325	980
			Pengeluaran Per kapita	Rp. Juta	11.643	11.771	11.900	12.029	12.157	12.286
		S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	5,2	5,26	5,32	5,38	5,44	5,5
			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	6,49	6,232	5,974	5,716	5,458	5,2
		S2.7 : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah								



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif	T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79,72	81,78	83,84	85,9	87,96	90
		S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,38	3,386	3,392	3,398	3,404	3,41
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,2	4,22	4,24	4,26	4,28	4,3
			Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,82	97,4	97,7	98,4	98,7	98,9
			Nilai SAKIP Kota	Angka	66,85	69,48	72,11	74,74	77,37	80
			Indeks Pemerintahan Digital	Angka	3,3	3,45	3,59	3,73	3,87	4,00
			Indeks Inovasi Daerah	Angka	82,22 (Sangat inovatif)	82,81 (Sangat inovatif)	84,41 (Sangat inovatif)	86 (Sangat inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat inovatif)
		S3.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Angka	78,5	79	79,5	80	80,5	81
			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	73	74	75	76	77	78
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	68,4	73,5	77,6	82,1	84,4	85,5
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka						
		S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	86,4	87,2	87,7	88,4	85,8	86,9
		S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,29	0,312	0,334	0,356	0,378	0,4
			Persentase kenaikan PAD							
Misi 4 : Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya		Indeks Rasa Aman	Angka	86,2	86,39	89,09	91,78	91,88	92
		S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75
			Indeks Harmoni	Indeks	70	72	74	76	78	80
		S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	Angka PPKS	Angka	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5
		S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	%	88	90	93	95	98	100
			Persentase pemajuan objek kebudayaan	%	66,60- 67,07	67,22- 67,72	67,84- 68,38	68,46- 69,03	69,08- 69,69	69,70- 70,34
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan	T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	95,6	95,7	95,8	95,9	96	96,1
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89
		S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak	IKLI KePUan	Angka	96,81	96,91	97,01	97,11	97,21	97,31
			IKLI Perkim	Angka	96,92	96,95	97,15	97,35	97,55	97,75
			IKLI Perhubungan	Angka	96,83	96,9	97,02	97,09	97,16	97,23
			Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	73,63	75,97	78,32	80,66	83,01	85,35
		S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Angka	78,68	78,78	78,88	78,98	79,08	79,18
			Indeks Kualitas Air	Angka	72,47	72,62	72,77	72,92	73,07	73,22
			Indeks Kualitas Lahan	Angka	69,51	69,58	69,65	69,71	69,78	69,85
		S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38

3.4.4. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara visi dan misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dengan visi dan misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 sebagai bentuk penjamin kesinambungan arah pembangunan daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan disusun dengan mengacu dan merujuk pada visi jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Oleh karena itu, keterkaitan antara keduanya menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program, kebijakan, dan sasaran pembangunan dalam RPJMD mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan daerah dapat dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Visi RPJPD 2025 - 2045	Visi RPJMD 2025 - 2029
PADANG PANJANG AGAMIS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH
Misi RPJPD 2025 - 2045	Misi RPJMD 2025 - 2029
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi	Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal
Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif
Misi 4 : Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	
Misi 5 : Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan
Misi 7 : Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
Misi 8 : Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah	

Keterkaitan antara misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045 di Kota Padang Panjang menunjukkan hubungan yang bersifat hierarkis, di mana RPJMD menjadi langkah operasional untuk mencapai visi jangka panjang RPJPD. Berikut analisis mendalam mengenai keterkaitan tersebut

1. Keterkaitan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Misi 1 RPJPD yang menekankan pada upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing melalui transformasi sosial memiliki keterkaitan erat dengan misi RPJMD yang menargetkan terwujudnya SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing tinggi. Keduanya menempatkan **peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama** pembangunan daerah, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Misi 1 RPJMD, "Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi", yang secara operasional menerjemahkan agenda transformasi sosial RPJPD. RPJMD merincikan upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik, sarana prasarana, serta pendekatan pembelajaran berbasis teknologi dan muatan lokal yang membentuk karakter. Lebih lanjut, fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, seperti penanganan stunting dan layanan kesehatan unggul, serta pemberdayaan pemuda melalui fasilitas dan kegiatan kepemudaan, merupakan langkah konkret dari RPJMD untuk mencapai SDM yang tangguh dan produktif. Kesetaraan gender yang juga menjadi prioritas dalam RPJMD memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas SDM ini inklusif dan merata, secara holistik mendukung capaian RPJPD dalam menciptakan SDM berdaya saing melalui transformasi sosial yang menyeluruh.

2. Keterkaitan Pembangunan Ekonomi

Misi 2 RPJPD yang bertujuan mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi sangat selaras dengan Misi 2 RPJMD yang fokus pada peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. Keduanya menempatkan **pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama** dengan pendekatan yang mengedepankan pengembangan potensi unggulan daerah.

Kata "Masyarakat Sejahtera" dalam RPJPD menjadi tujuan akhir yang juga tercermin dalam RPJMD melalui upaya "meningkatkan perekonomian

daerah" yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata. Kata "Transformasi Ekonomi" di RPJPD dijabarkan dalam RPJMD melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung revitalisasi pusat perdagangan dan pengembangan sektor unggulan, sehingga transformasi tersebut berjalan secara sistematis dan terukur. Istilah "Potensi Ekonomi Lokal" menjadi landasan bersama, dimana RPJPD menekankan pemanfaatan potensi unggulan daerah, sementara RPJMD mengimplementasikan dengan fokus pada sektor seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang memang menjadi kekuatan lokal.

3. Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan

Misi 3 RPJMD, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan, dan inovatif, secara jelas mengakomodir Misi 3 RPJPD yang menekankan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. **Kata "tata kelola pemerintahan" menjadi titik temu utama**, dimana RPJPD menekankan integritas dan adaptasi sebagai fondasi transformasi, sementara RPJMD mengembangkan aspek pelayanan, akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan inovasi sebagai wujud konkret dari transformasi tersebut. Profesionalitas sumber daya manusia aparatur yang menjadi fokus RPJMD merupakan implementasi nyata dari transformasi berintegritas dan adaptif yang diamanatkan RPJPD.

Selanjutnya, Misi 4 RPJPD yang menekankan ketangguhan, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah juga tercermin secara implisit dalam Misi 3 RPJMD. Ketangguhan pemerintahan tercapai melalui tata kelola yang responsif dan inovatif, yang memungkinkan pemerintah daerah menghadapi dinamika dan tantangan dengan efektif. Demokrasi substansial diwujudkan melalui transparansi dan pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata, sehingga memperkuat legitimasi dan stabilitas sosial. Stabilitas ekonomi makro daerah juga didukung oleh tata kelola yang akuntabel dan profesional, yang menciptakan iklim pemerintahan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

4. Ketahanan Sosial Budaya

Misi 5 RPJPD yang menekankan penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah secara jelas selaras dengan Misi 4 RPJMD yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter berbasis nilai agama dan adat istiadat. Kata "ketahanan sosial budaya" pada RPJPD menjadi fondasi utama

yang diperkuat melalui upaya membangun masyarakat rukun dan berkarakter di RPJMD, dengan nilai agama dan adat istiadat sebagai pijakan kuat dalam menjaga keharmonisan sosial dan pelestarian budaya lokal. Penguatan ekologi yang diamanatkan RPJPD juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, yang menjadi bagian integral dari kualitas kehidupan masyarakat yang diupayakan dalam RPJMD.

Lebih lanjut, kedua misi ini saling melengkapi dalam membangun identitas dan karakter khas Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah. RPJPD menekankan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal dan lingkungan hidup. Sementara itu, RPJMD menerjemahkan hal tersebut ke dalam program nyata yang meningkatkan rasa aman, kerukunan, dan budaya masyarakat dengan landasan agama dan adat yang kuat. Dengan demikian, Misi 4 RPJMD menjadi penjabaran konkret dari Misi 5 RPJPD, memastikan bahwa pembangunan sosial budaya dan ekologi berjalan beriringan demi mewujudkan masyarakat Padang Panjang yang harmonis, berbudaya, dan berkarakter khas daerahnya.

5. Pemerataan pembangunan infrastruktur

Misi 5 RPJMD yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang sebagai kota hijau berkelanjutan secara jelas mengakomodir Misi 6 RPJPD yang menekankan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Kata “pemerataan pembangunan infrastruktur” pada RPJMD menjadi wujud konkret dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata di RPJPD. Selain itu, fokus RPJMD pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan mendukung Misi 7 RPJPD tentang pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang fungsional dan inklusif merupakan implementasi nyata dari prinsip pembangunan ramah lingkungan yang diamanatkan RPJPD.

Selanjutnya, Misi 5 RPJMD yang mengedepankan pemerataan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup juga sejalan dengan Misi 8 RPJPD yang menuntut kesinambungan pembangunan daerah. Pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, seperti transportasi, air minum, dan sistem perparkiran terpadu, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan kota terhadap tekanan lingkungan dan perubahan

iklim. Hal ini mencerminkan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD. Dengan demikian, Misi 5 RPJMD menjadi penjabaran konkret dari Misi 6, 7, dan 8 RPJPD, yang bersama-sama mengarahkan pembangunan Kota Padang Panjang menuju kota hijau, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.4.5. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan dan keterpaduan antara visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025–2029. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional dan regional. Dengan adanya harmonisasi visi dan misi antar tingkat pemerintahan, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat saling mendukung, memperkuat pencapaian sasaran strategis nasional, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.8
Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

RPJMN Tahun 2025 - 2045	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029	RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029
Visi	Visi	Visi
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045	SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN	PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH
Asta Cita	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal

RPJMN Tahun 2025 - 2045	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029	RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029
energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 3 : Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	
Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	
Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 7 : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan		
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba		
Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.	Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat
Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan

1. Fokus pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Asta Cita 4 menegaskan komitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Fokus pada pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif ini selaras dengan Misi RPJMD Provinsi yang menitikberatkan pada pendidikan merata dan kesehatan berkualitas sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua dokumen perencanaan ini secara bersama-sama menegaskan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta layanan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Misi RPJMD Kota Padang Panjang yang bertujuan mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing tinggi merupakan penjabaran konkret dari Asta Cita 4 dan Misi RPJMD Provinsi. Kata “berkualitas” dan “berdaya saing” menjadi titik temu utama yang menghubungkan ketiga dokumen tersebut, dimana pembangunan SDM tidak hanya difokuskan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas karakter dan inovasi. Penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam Asta Cita 4 juga tercermin dalam upaya pengembangan SDM Kota yang inklusif dan berkeadilan, sehingga sinergi antara RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kota dapat memperkuat fondasi pembangunan manusia yang holistik dan berkelanjutan

2. Fokus Kemandirian Ekonomi

Asta Cita 2 menegaskan pentingnya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Hal ini sejalan dengan Misi 2 RPJM Provinsi yang menempatkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan, serta Misi 7 RPJM Provinsi yang mengedepankan peningkatan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Fokus pada swasembada pangan dan ekonomi kreatif di Asta Cita diimplementasikan melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal, yang juga menjadi bagian dari Misi 2 RPJMD Kota dalam meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Asta Cita 3, 5, dan 6 yang menekankan peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan industri kreatif, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sangat relevan dengan Misi 3 RPJM Provinsi yang memposisikan nagari/desa sebagai basis kemajuan dan Misi 4 RPJM Provinsi yang menjadikan Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat. Misi 5 RPJMD Kota yang mengedepankan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup juga mendukung kesinambungan dan pemerataan ekonomi yang diamanatkan dalam Asta Cita dan RPJM. Dengan demikian, sinergi antara Asta Cita, RPJM Provinsi, dan RPJMD Kota terwujud dalam upaya bersama membangun ekonomi daerah yang mandiri, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi

3. Fokus Penguatan Tata Kelola

Asta Cita 1 dan 7 dalam RPJMN secara jelas menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, serta reformasi dalam sektor politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Fokus ini menunjukkan arah pembangunan nasional yang tidak hanya bertumpu pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai dasar negara dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks ini, Misi 8 RPJMD Provinsi yang menekankan "Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif" menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Asta Cita, karena keduanya mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik melalui reformasi birokrasi dan penguatan institusi.

Lebih lanjut, Misi 3 RPJMD Kota yang menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan, dan inovatif juga sangat relevan dengan Asta Cita 1 dan 7. Upaya ini merupakan bentuk implementasi di tingkat lokal dari agenda nasional dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berpijak pada prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, terdapat kesinambungan visi dan arah kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah, yang memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan nilai-nilai konstitusional.

4. Fokus penguatan harmoni, pelestarian budaya, pengamalan nilai agama, dan pembentukan karakter masyarakat.

Asta Cita 8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta pentingnya toleransi antar umat beragama sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nilai-nilai ini memiliki keselarasan langsung dengan Misi 6 RPJMD Provinsi, yaitu membangun kehidupan beradab dan berbudaya yang berbasis agama dan kearifan lokal. Penekanan pada keluarga berkualitas dalam misi provinsi menjadi elemen pendukung dalam menumbuhkan harmoni sosial dan pelestarian budaya. Kedua arah kebijakan ini menunjukkan adanya keterkaitan nilai dalam memperkuat identitas lokal, kerukunan hidup beragama, dan pembangunan yang berakar pada budaya dan moralitas masyarakat.

Selanjutnya, Misi 4 RPJMD Kota yang bertujuan mewujudkan masyarakat Kota Padang Panjang yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter berbasis nilai agama serta adat istiadat juga secara eksplisit selaras dengan Asta Cita 8. Kata "rukun" dan "berkarakter" mengindikasikan



peningkatan toleransi dan keharmonisan sosial antar umat beragama dan kelompok budaya, yang merupakan inti dari misi nasional tersebut

5. Fokus Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Asta Cita 3 secara eksplisit menekankan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, dorongan terhadap kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta kelanjutan pengembangan infrastruktur sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Kata “pengembangan infrastruktur” dalam Asta Cita 3 sangat relevan dengan Misi 5 RPJMD Provinsi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur berkeadilan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Hal ini menunjukkan keselarasan yang kuat dalam memastikan infrastruktur tidak hanya berkembang secara merata, tetapi juga tahan terhadap risiko bencana, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, Misi 5 RPJMD Kota Padang Panjang yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan kota hijau berkelanjutan juga secara eksplisit selaras dengan Asta Cita 3. Kata “pemerataan pembangunan infrastruktur” dan “kualitas lingkungan hidup” mengindikasikan fokus pada pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan, yang mendukung pengembangan lapangan kerja dan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif.

3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan selama kurun lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada bab sebelumnya, diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengeralahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian tujuan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan adalah pedoman dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi mencerminkan cara atau pendekatan yang akan diambil, sedangkan arah kebijakan adalah prinsip atau pedoman dalam pengambilan keputusan. Strategi dan arah kebijakan perencanaan berperan penting dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. Dengan strategi yang terarah dan kebijakan yang konsisten, perencanaan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan merupakan metode untuk merumuskan kerangka implementasi yang dapat langsung dieksekusi kedalam bentuk program-program Pembangunan. Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan sesuai dengan periode RPJMD yang telah disusun yakni 5 tahun dari Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

3.5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan Dan Sasaran

A. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah

kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Sinkronisasi tujuan, sasaran dan strategi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai Berikut:

1. MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi.

Misi ini berfokus pada terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Padang Panjang yang berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. Untuk mencapai misi tersebut, perlu diperhatikan berbagai aspek penting, antara lain pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat, partisipasi pemuda, peningkatan olahraga, peningkatan kualitas literasi masyarakat, serta kesetaraan gender.

Intervensi terhadap berbagai aspek tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas SDM Kota Padang Panjang, yang tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, capaian IPM Kota Padang Panjang berada pada angka 80,60 dan diproyeksikan meningkat menjadi 86,00 pada tahun 2030.

Untuk mencapai target tersebut, telah disusun strategi yang terarah dan terukur. Rincian strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah konkret dalam mewujudkan SDM Kota Padang Panjang yang berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing.

Tabel 3.9
Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi		
T1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	S1: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	ST1: Meningkatkan Pengembangan Pendidikan
		ST2: Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat
		ST3: Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital serta Intensifikasi Literasi Digital Masyarakat
	S2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	ST1: Menurunnya angka kematian ibu dan bayi
		ST2: Peningkatan gizi masyarakat
		ST3: Pengendalian penyakit
		ST4: Pembudayaan hidup sehat
	S3: Meningkatkan prestasi olahraga dan peran	ST5: Penguatan tata kelola, pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		ST6: Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
		ST1: Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan

VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi		
	pemuda dalam pembangunan	ST2: Peningkatan kapasitas Pemuda dalam Pembangunan ST3: Peningkatan Manajemen dan Kerja sama pengelolaan Atlet Daerah
	S4: Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	ST1: Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana
		ST2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga
		ST3: Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender
		ST4: Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga
		ST5: Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak

2. MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal

Misi 2 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan peningkatan ekonomi Kota Padang Panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi inklusif dimaknai sebagai upaya meningkatkan perekonomian secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Aspek-aspek penting dalam misi ini mencakup peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan nilai investasi, serta penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya tersebut diharapkan menghasilkan dampak akhir berupa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 6,22% pada tahun 2030, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1,70% pada tahun 2030, serta penurunan gini rasio menjadi 0,201.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah disusun strategi yang terarah berbasis potensi lokal, dengan fokus pada keberlanjutan ekonomi daerah. Rincian strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.10
Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal		
T2: Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan	S1: Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal	ST1: Peningkatan kapasitas perdagangan
		ST2: Pengembangan Usaha industri
		ST3: Peningkatan daya saing dan kapasitas koperasi serta UKM dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat

VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal		
Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat	S2: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	ST1: Peningkatan pengembangan dan promosi pariwisata ST2: Pengembangan usaha ekonomi kreatif
	S3: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	ST1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan
	S4: Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok	ST1: Memperkuat stabilitas pasokan dan harga komoditas pokok
	S5: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	ST1: Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi
		ST2: Membangun jejaring global dalam peningkatan kesempatan kerja
		ST3: Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja
	S6: Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	ST1: Percepatan Penanggulangan kemiskinan
	S7: Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	ST1: Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan
		ST2: Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal

3. MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani

Tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan, seiring dengan perubahan paradigma berpikir masyarakat yang menuntut layanan publik yang cepat, akurat, dan berkualitas. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam mendukung penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.

Pelaksanaan Misi 3 diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dengan menyiapkan aparatur yang kompeten; transparan melalui penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat; akuntabel dengan pengelolaan anggaran yang terukur dan tepat guna; inovatif dan responsif melalui layanan yang mudah, cepat, dan ramah; serta mengedepankan konsep pelayanan publik yang benar-benar melayani.

Strategi yang akan ditempuh meliputi pembenahan sektor layanan publik, adopsi teknologi informasi dalam seluruh layanan, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan perencanaan dan inovasi, penerapan transparansi keuangan, peningkatan pengawasan terhadap layanan publik, serta perluasan penerapan teknologi informasi dalam seluruh proses pemerintahan.

Dampak yang diharapkan dari misi ini adalah meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari 77,66 pada tahun 2024 menjadi 90 pada tahun 2030. Rincian strategi pelaksanaan Misi 3 dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah terarah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif.

Tabel 3.11
Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif		
T3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	S1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	ST1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		ST2: Meningkatkan tata kelola dan manajemen digital pemerintah untuk mewujudkan budaya digital dalam mendukung transformasi digital pemerintah
		ST3: Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mewujudkan interoperabilitas data lintas opd
		ST3: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
	S2: Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	ST1: Optimalisasi Pengawasan Internal dan Eksternal
		ST2: Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola perencanaan dan keuangan Daerah
	S3: Meningkatnya profesionalisme ASN	ST1: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN
	S4: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	ST1: Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
		ST2: Diversifikasi dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Baru

4. MISI 4 : Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta aktualisasi nilai nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Keamanan masyarakat dan perlindungan sosial merupakan salah satu layanan esensial yang wajib diwujudkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan Misi 4, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; penguatan kembali upaya internalisasi nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan; perlindungan terhadap kelompok yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya; serta peningkatan perlindungan terhadap anak.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak akhir berupa peningkatan rasa aman masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Rasa Aman dari 86,04 pada tahun 2024 menjadi 92,00 pada tahun 2030.

Rincian sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan Misi 4 dapat dilihat pada tabel berikut, yang menggambarkan langkah-langkah terarah dalam mewujudkan keamanan dan perlindungan sosial di Kota Padang Panjang.

Tabel 3.12
Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 4: Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat		
T4: Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya	S1: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	ST1: Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat
	S2: Meningkatkan perlindungan sosial terhadap masyarakat	ST1: Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat
	S3: Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	ST1: Memperkuat Karakter dan Identitas Padang Panjang Sebagai Kota Serambi Mekah ST2: Memperkuat kerukunan antar umat beragama ST3: Penguatan kelembagaan pemajuan kebudayaan

5. MISI 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan langkah penting yang perlu diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Misi 5 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum, serta menjaga kualitas lingkungan, baik air maupun udara. Dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan lingkungan hidup yang baik, diharapkan Kota Padang Panjang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat perekonomian, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi bencana.

Dampak akhir yang diharapkan dari pelaksanaan Misi 5 adalah terwujudnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan lingkungan hidup yang nyaman, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 62,62 pada tahun 2024 menjadi 74,89 pada tahun 2030.

Rincian sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan Misi 5 dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah terarah dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang.

Tabel 3.13
Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan		
T5: Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh	S1: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak	ST1: Penyediaan dan pengembangan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial
		ST2: Pengembangan sistem transportasi perkotaan
		ST3: Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang



VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan		
bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan		ST4: Meningkatnya akses hunian layak dan terjangkau
	S2: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	ST1: Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	S3: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	ST1: Meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030 dirumuskan berdasarkan strategi yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Perumusan arah kebijakan RPJMD Kota Padang Panjang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat penjabaran arah kebijakan tiap tahun berdasarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.14

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030

SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Meningkatkan Pengembangan Pendidikan	Peningkatan pengembangan profesi guru yang berkelanjutan (upgrading untuk guru -grade A,B,C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan kurikulum yang inovatif, bermuatan lokal, yang berbasis agama, adat dan budaya lokal dengan meningkatkan peran serta pemangku agama dan adat dalam dunia pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kolaborasi Antar Sektor untuk meningkatkan mutu Pendidikan (Negeri & Swasta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengembangkan sistem informasi pendidikan dan pengelolaan data pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penanganan Angka Putus Sekolah kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemerataan akses terhadap Pendidikan melalui aspek sarana dan prasarana pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan SMP Boarding School	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP bagi siswa kurang mampu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan Sarana Learning Knowledge Center/ Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Teknologi	✓	✓				
		Pembentukan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di setiap kelurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital serta	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung perpustakaan Digital	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan aksesibilitas dan literasi masyarakat terhadap transformasi digital	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0
	Intensifikasi Literasi Digital Masyarakat							
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	Penurunan AKI AKB dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan gizi masyarakat	Percepatan penurunan stunting	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan layanan gizi masyarakat berbasis siklus hidup mulai dari 1000 HPK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberian Makanan Tambahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengendalian penyakit	Penguatan deteksi dini faktor risiko melalui penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengendalian penyakit dengan pembudayaan hidup sehat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan Pembiayaan Penanganan Penyakit menular/tidak menular	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembudayaan hidup sehat	Peningkatan komunitas gerakan masyarakat hidup sehat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan peran kader kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyehatan lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan tata kelola, pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Pemenuhan SDM sesuai standar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan layanan unggulan penanganan penyakit jantung di RSUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemenuhan sarana dan prasarana alat kesehatan di fasilitas kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan Kerja sama layanan Unggulan RSUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	Penguatan layanan kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemenuhan sediaan farmasi di fasilitas kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan tata kelola data informasi dan informasi teknologi terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan	Penjaringan bibit Atlet Usia Dini melalui O2SN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyelenggaraan event olahraga tahunan		✓			✓	
		Meningkatkan pembinaan terhadap olahraga berprestasi melalui penjaringan dan pembinaan secara berjenjang (Talent Scouting)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberian reward terhadap atlet berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Padang Panjang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Keikutsertaan dalam event olahraga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kapasitas Pemuda dalam Pembangunan	Pembangunan pusat kegiatan kepemudaan (youth centre)		✓	✓	✓		
		Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan untuk Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Manajemen dan Kerja sama pengelolaan Atlet Daerah	Peningkatan Kerja sama antara KONI dengan Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Atlet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan Kerja sama pembinaan karir Atlet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Pelaksanaan Konseling Keluarga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM Kader KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelaksanaan Pendataan Keluarga untuk mendukung Kesertaan ber-KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Peningkatan Pengetahuan Orang tua terhadap peningkatan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelaksanaan Bimbingan terhadap remaja dalam merencanakan / menyiapkan kehidupan berkeluarga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan infrastruktur pelayanan keluarga	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0
	Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender	Meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelaksanaan Kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan peran perempuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Peningkatan Infrastruktur layanan Perlindungan perempuan dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelaksanaan Kerja sama lintas sektor untuk mencegah dan menangani praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Penguatan Regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal	Peningkatan kapasitas perdagangan	Peningkatan ketrampilan dan literasi digital bagi pelaku usaha perdagangan (transformasi digital)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan revitalisasi Infrastruktur pusat perdagangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan Usaha industri	Pengembangan produktivitas usaha industri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi Pengembangan industri pertambangan rakyat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran industri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan daya saing dan kapasitas koperasi serta UKM dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi akses permodalan, promosi dan pemasaran hasil produk/jasa koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Peningkatan pengembangan dan promosi pariwisata	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas			✓			
		Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta event pariwisata unggulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Revitalisasi objek wisata dan pengembangan destinasi wisata baru yang berdaya saing	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembinaan terhadap Pelaku usaha pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Pengembangan ekosistem dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi akses permodalan dan promosi bagi usaha ekonomi kreatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan tata kelola Penanaman Modal dan perizinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan fasilitasi dan promosi penanaman modal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan pengkajian terhadap potensi investasi yang sesuai dengan potensi daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Memperkuat stabilitas pasokan dan harga komoditas pokok	Menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi data dan informasi terkait harga kebutuhan pokok masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	✓	✓				
		Optimalisasi program Pelatihan Tenaga kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan Kerja sama Pendidikan tenaga kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi akses Pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Membangun jejaring global dalam peningkatan kesempatan kerja	Pengembangan kerja sama penempatan tenaga kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja	Fasilitasi penyelenggaraan jaminan sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Percepatan Penanggulangan kemiskinan	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengurangi kantong-kantong kemiskinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan pelaku usaha perikanan (pembudidaya / pengolahan / pemasaran)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan dan subsidi bagi petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kerja sama wilayah pengembangan peternakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan pertanian perkotaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan produk pertanian unggulan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk pangan diversifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penataan dan pembangunan infrastruktur sektor pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan varietas tanaman pangan lokal yang memiliki potensi tinggi dan tahan terhadap kondisi iklim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal	Penerapan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pengembangan Sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi / digital	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan regulasi pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan infrastruktur pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan tata kelola dan manajemen digital pemerintah untuk mewujudkan budaya digital dalam mendukung transformasi digital pemerintah	Penyediaan infrastruktur TIK yang berkualitas dan tangguh serta pemanfaatannya secara optimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan layanan digital di lingkungan pemerintah Daerah dan sektor publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menyiapkan arsitektur dan peta rencana Pemerintah digital	✓	✓				
		Meningkatkan kompetensi SDM digital pemerintah daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan regulasi implementasi TIK pemerintah daerah dan sektor publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan edukasi penggunaan TIK masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mewujudkan interoperabilitas data lintas opd	Meningkatkan Infrastruktur Pengelolaan Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan Kompetensi SDM Pengelolaan Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengembangkan Big Data padang Panjang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengembangkan Standart dan Metadata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan sistem informasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi Pengawasan Internal dan Eksternal	Penguatan kapabilitas dan independensi pengawasan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola perencanaan dan keuangan Daerah	Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan data	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan pengelola keuangan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya profesionalisme ASN	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN	Pembentukan Unit Teknis Pengembangan Kompetensi ASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan efektivitas penarikan pajak dan retribusi daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan regulasi dan kebijakan Pendapatan Asli Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Diversifikasi dan pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Baru	Identifikasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai sumber PAD baru	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemanfaatan aset daerah secara optimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan produktif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga (Swasta/Pusat) dalam pengembangan potensi daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Peraturan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Intensifikasi sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan forum komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi penegakan peraturan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum dan lintas sektor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat	Akurasi pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kerja sama lintas sektoral dalam penguatan perlindungan sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan infrastruktur dan ruang komunitas yang Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan program dan fasilitasi kegiatan kreativitas dan produktivitas bagi penyandang disabilitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan program pemberdayaan bagi lansia yang relevan dan berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	Memperkuat Karakter dan Identitas Padang Panjang Sebagai Kota Serambi Mekah	Penguatan peran Masjid/Mushalla sebagai pusat kegiatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kualitas dan kapasitas calon ulama melalui fasilitasi biaya pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan promosi pusat atraksi dan pertunjukan budaya Islami	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengoptimalkan upaya Satu Rumah Satu Hafidz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Memperkuat kerukunan antar umat beragama	Peningkatan peran forum lintas umat beragama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemantauan potensi konflik umat beragama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan kelembagaan pemajuan kebudayaan	Meningkatkan peran serta lembaga dan pemangku adat dalam Kehidupan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan pelestarian seni dan permainan tradisional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi pelestarian nilai-nilai adat dan budaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak	Penyediaan dan pengembangan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial	Pembangunan dan Peningkatan ruang terbuka hijau di kawasan strategis kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan dan pengelolaan Lahan Khusus Untuk Tempat Pemakaman Umum					✓	
		Peningkatan bangunan dan fungsi sarana prasarana umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan infrastruktur strategis dan penyelesaian infrastruktur yang belum tuntas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur air baku, air minum, irigasi dan sanitasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan sanitasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara jasa konstruksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0
	Pengembangan sistem transportasi perkotaan	Pengembangan Kerja sama antar daerah dalam menjaga kontinuitas dan kualitas air baku.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penataan Parkir dan terminal di Kota Padang Panjang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan layanan transportasi publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas SDM penyedia dan pengguna layanan transportasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan koordinasi lintas sektor (infrastruktur, kepolisian, transportasi online)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Revitalisasi rekayasa lalu lintas perkotaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)		✓	✓	✓	✓	✓
		intensifikasi peningkatan aturan pemanfaatan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya akses hunian layak dan terjangkau	Pengembangan teknologi menuju efisiensi pemanfaatan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kota Padang Panjang melalui pembangunan Rusunawa (progul)			✓	✓		
		Pengembangan dan pengelolaan hunian vertikal bersama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kerja sama Pengelolaan Sampah dengan Pihak ketiga berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kali Bersih dan Vertical Garden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan lembaga pengelolaan sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana	Penguatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Koordinasi rekonstruksi pasca bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana non alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C. Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, yang dilaksanakan pada periode 2026–2030. Oleh karena itu, tema dan tahapan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026–2030 sebagai prioritas utama setiap tahunnya disusun berlandaskan tema pembangunan lima tahunan, dengan memedomani arah kebijakan serta tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045 pada tahap pertama periode 2025–2029.

Tema pembangunan pada tahap pertama tersebut adalah “Penguatan Fondasi Pembangunan Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Merujuk pada arah kebijakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045, dirumuskan tema pembangunan lima

tahunan sebagai pedoman pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029.

Rincian tema pembangunan lima tahunan tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut, yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, dan tahapan pembangunan secara menyeluruh.

Gambar 3.2
Tema Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030



Tabel 3.15
Pentahapan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur	Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang	Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan	Tema :Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan “
1. Fokus Tranformasi Sosial	1. Fokus Tranformasi Sosial	1. Fokus Tranformasi Sosial	1. Fokus Tranformasi Sosial	1. Fokus Tranformasi Sosial
Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik.	Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.	Penerapan teknologi dan metode inovatif pembelajaran.	Evaluasi dan penguatan sistem pendidikan berbasis budaya lokal.	Pendidikan berkualitas, adaptif, dan berakar pada nilai lokal.
Penyediaan beasiswa dan program pendidikan inklusif.	Peningkatan infrastruktur pendidikan	Dukungan komunitas untuk pendidikan berbasis keluarga.	Ekspansi akses digital layanan pendidikan	Akses pendidikan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
Penyediaan perangkat digital dan pelatihan dasar literasi.	Pembentukan perpustakaan digital di sekolah dan komunitas.	Integrasi perpustakaan digital dalam sistem pembelajaran.	Peningkatan peran keluarga dalam literasi digital.	Masyarakat literat digital sebagai budaya pembelajaran.
Peningkatan tenaga dan sarana kesehatan ibu dan anak.	Perluasan layanan kesehatan berbasis keluarga.	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kehamilan.	Evaluasi dan penyempurnaan sistem rujukan ibu dan bayi.	Penurunan signifikan AKI dan AKB sesuai target nasional.
Pemberian intervensi gizi dan makanan tambahan.	Edukasi konsumsi pangan lokal sehat.	Kolaborasi lintas sektor untuk perbaikan gizi.	Penerapan kawasan bebas stunting.	Gizi keluarga terjaga dan stunting menurun signifikan.
Pelaksanaan imunisasi dan edukasi kebersihan.	Pemanfaatan sistem informasi kesehatan.	Respons cepat berbasis data kesehatan daerah.	Penurunan prevalensi penyakit menular.	Eliminasi penyakit menular utama tercapai.
Kampanye perilaku sehat dan kegiatan komunitas.	Penerapan pola hidup sehat berbasis rumah tangga.	Pelibatan pemuda dan kader kesehatan.	Integrasi budaya sehat dalam pendidikan dan kerja.	Hidup sehat menjadi norma sosial masyarakat.
Pelatihan tata kelola dan manajemen rujukan.	Penguatan sistem layanan rujukan terintegrasi.	Pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan.	Integrasi layanan kesehatan daerah.	Sistem pelayanan kesehatan primer yang efektif dan efisien.
Penguatan logistik dan pelatihan tenaga darurat.	Peningkatan respons tanggap darurat kesehatan.	Simulasi dan koordinasi penanganan krisis.	Evaluasi dan penguatan jejaring ketahanan.	Daerah tangguh menghadapi krisis kesehatan.
Pembinaan dan pelatihan atlet berjenjang.	Penyelenggaraan kompetisi daerah reguler.	Kemitraan dengan lembaga olahraga profesional.	Pengembangan fasilitas olahraga prestasi.	Atlet daerah berdaya saing nasional
Pelatihan dasar kepemudaan dan kewirausahaan.	Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan pembangunan lokal.	Penguatan peran pemuda dalam inovasi daerah.	Pengembangan jaringan pemuda lintas sektor.	Pemuda sebagai aktor utama pembangunan berkelanjutan.
Penguatan manajemen pelatihan dan kompetisi.	Kolaborasi dengan klub dan lembaga pembinaan atlet.	Penjenjangan prestasi dan seleksi berbasis merit.	Fasilitasi atlet menuju tingkat nasional.	Sistem pembinaan atlet berkelanjutan berbasis daerah.
Peningkatan cakupan layanan KB dan kespro.	Integrasi layanan KB dalam posyandu dan sekolah.	Digitalisasi layanan KB dan konseling keluarga.	Keterlibatan masyarakat dalam penguatan program.	Program Bangga Kencana menjadi budaya keluarga.
Penyediaan paket layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga kurang mampu.	Intervensi lintas sektor untuk peningkatan akses layanan keluarga.	Perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas sarana layanan keluarga.	Pengembangan subsidi dan dukungan berkelanjutan bagi keluarga.	Keluarga tangguh dengan akses layanan dasar yang merata dan berkualitas.



Tahap I (2026) <i>Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur</i>	Tahap II (2027) <i>Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</i>	Tahap III (2028) <i>Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang</i>	Tahap IV (2029) <i>Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan</i>	Tahap V (2020) <i>Tema : Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan “</i>
Edukasi kesetaraan gender dalam masyarakat.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelayanan publik.	Dukungan akses perempuan terhadap layanan ekonomi dan pendidikan.	Penguatan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor.	Kesetaraan gender terwujud dalam seluruh dimensi pembangunan.
Pengembangan layanan pendampingan keluarga.	Peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan keluarga.	Integrasi layanan kesejahteraan dalam sistem daerah.	Penguatan regulasi dan SDM layanan keluarga.	Kesejahteraan keluarga menjadi prioritas pembangunan sosial.
Pembentukan pusat layanan pengaduan dan pendampingan.	Penyediaan rumah aman dan layanan hukum gratis.	Edukasi hukum di sekolah dan masyarakat.	Penguatan sistem perlindungan berbasis komunitas.	Kota ramah perempuan dan anak, bebas kekerasan.
Peningkatan cakupan bantuan sosial dan pemberdayaan	Pelatihan ekonomi produktif berbasis keluarga	Kolaborasi dengan komunitas dan CSR	Pendekatan inklusif dan adaptif untuk bantuan sosial	Kemandirian sosial berbasis pemberdayaan komunitas
2. Fokus Transformasi Ekonomi	2. Fokus Transformasi Ekonomi	2. Fokus Transformasi Ekonomi	2. Fokus Transformasi Ekonomi	2. Fokus Transformasi Ekonomi
Pelatihan usaha dagang dan penguatan manajemen.	Revitalisasi pasar dan promosi produk lokal.	Digitalisasi perdagangan dan sistem transaksi.	Integrasi produk lokal ke pasar regional.	Ekosistem perdagangan daerah kompetitif dan berkelanjutan.
Fasilitasi izin dan pelatihan tenaga industri.	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah.	Klasterisasi industri berbasis sumber daya lokal.	Promosi industri berorientasi ekspor.	Industri daerah tumbuh kompetitif dan ramah lingkungan.
Pelatihan dasar manajemen dan akses permodalan	Peningkatan kemitraan dan inkubasi usaha	Penguatan kelembagaan koperasi modern	Ekspansi pasar dan digitalisasi UKM	Koperasi dan UKM berdaya saing tinggi dan berkelanjutan
Penyiapan SDM dan infrastruktur pariwisata dasar	Promosi berbasis media sosial dan komunitas	Event pariwisata unggulan tahunan	Kerja sama promosi dengan daerah dan nasional	Ekosistem pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing
Pelatihan dan inkubasi usaha kreatif pemula	Pembentukan klaster ekonomi kreatif	Fasilitasi akses pasar dan promosi produk kreatif	Kolaborasi antar pelaku dan sektor pendukung	Ekonomi kreatif sebagai penopang ekonomi lokal
Implementasi sistem pelayanan digital	Peningkatan kapasitas SDM layanan perizinan	Promosi peluang investasi lokal	Penguatan peran DPMPSTP dalam iklim investasi	Layanan investasi dan perizinan profesional dan adaptif
Penguatan cadangan pangan pemerintah	Pengawasan harga pasar dan intervensi tepat waktu	Revitalisasi pasar tradisional dan gudang distribusi	Digitalisasi sistem logistik daerah	Ketahanan pasokan dan kestabilan harga komoditas daerah
Penyelenggaraan pelatihan dasar vokasi	Sertifikasi kompetensi dan kerja sama industri	Pengembangan BLK dan SMK berbasis kompetensi	Ekspansi program magang dan link and match	Tenaga kerja terampil, adaptif, dan siap kerja global
Kemitraan dengan lembaga penyalur kerja luar negeri	Pelatihan tenaga kerja migran berstandar internasional	Promosi tenaga kerja terampil asal daerah	Dukungan dan perlindungan TKI/TKW di luar negeri	Kota eksportir tenaga kerja profesional dan beretika
Penguatan pengawasan ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Perluasan jaminan sosial dan kesehatan pekerja	Pembentukan forum pekerja dan pengusaha harmonis	Sistem perlindungan pekerja yang adil dan berkelanjutan
Penyaluran bantuan tepat sasaran berbasis data	Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	Integrasi program lintas sektor untuk keluarga miskin	Skema perlindungan sosial berkelanjutan	Kemiskinan ekstrem tertangani dan kesejahteraan meningkat



Tahap I (2026) <i>Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur</i>	Tahap II (2027) <i>Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</i>	Tahap III (2028) <i>Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang</i>	Tahap IV (2029) <i>Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan</i>	Tahap V (2020) <i>Tema : Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan “</i>
Penyediaan sarana produksi dan penyuluhan	Inovasi teknologi budidaya dan pasca panen	Penguatan kelembagaan petani dan nelayan	Akses pembiayaan dan pasar hasil tani/ikan	Pertanian dan perikanan produktif, efisien, dan sejahtera
Peningkatan kapasitas kelompok tani-pangan lokal	Penguatan rantai nilai pangan lokal	Diversifikasi olahan pangan berbasis lokalitas	Promosi pangan lokal sebagai daya tarik ekonomi	Pangan lokal menjadi bagian ekonomi kreatif daerah
3. Fokus Transformasi Tata Kelola	3. Fokus Transformasi Tata Kelola	3. Fokus Transformasi Tata Kelola	3. Fokus Transformasi Tata Kelola	3. Fokus Transformasi Tata Kelola
Penyusunan standar pelayanan dan pelatihan petugas	Penerapan sistem layanan digital	Integrasi layanan antar sektor secara daring	Evaluasi berbasis kepuasan publik	Pelayanan publik berbasis kecerdasan buatan
Pelatihan dan literasi digital ASN	Implementasi aplikasi layanan digital terpadu	Interoperabilitas antar sistem internal pemerintah	Optimalisasi penggunaan teknologi berbasis cloud	Budaya kerja digital melekat di setiap lini birokrasi
Penguatan sistem pengelolaan data sektoral	Pelatihan tata kelola data untuk OPD	Implementasi dashboard data bersama	Pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan	Satu Data Daerah terintegrasi dan mendukung semua kebijakan
Penguatan sistem pelaporan publik daring	Pembentukan unit pelayanan informasi publik	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi	Penilaian kinerja transparansi antarsektor	Pemerintahan terbuka berbasis partisipasi warga
Sistem pelaporan pengaduan masyarakat daring	Kolaborasi pengawasan antar lembaga	Digitalisasi sistem audit dan pengawasan	Audit berbasis risiko dan nilai strategis	Pengawasan efektif berbasis partisipasi publik
Pelatihan teknis perencanaan berbasis outcome	Implementasi e-planning dan e-budgeting	Evaluasi program dan efisiensi anggaran	Transparansi penggunaan anggaran publik	Tata kelola keuangan yang responsif dan berdampak
Pelatihan teknis, kepemimpinan, dan soft skill	Penataan sistem karier dan jenjang jabatan	Penerapan sistem kinerja berbasis digital	Pemberian reward berbasis kinerja dan inovasi	ASN sebagai motor transformasi layanan publik
Digitalisasi dan penyederhanaan pemungutan PAD	Transparansi dan pelaporan berbasis sistem	Peningkatan kesadaran dan partisipasi wajib pajak	Optimalisasi pengawasan dan penegakan PAD	PAD dikelola profesional sebagai penopang fiskal daerah
Penyusunan regulasi pendukung PAD alternatif	Uji coba pemungutan dari potensi baru	Inovasi layanan untuk sektor PAD non-tradisional	Kemitraan dengan swasta dalam pengembangan PAD	PAD baru tumbuh dari sektor digital, kreatif, dan jasa modern
Pelatihan dan pembinaan sadar hukum masyarakat	Penguatan peran penegak hukum dan tokoh masyarakat	Digitalisasi sistem pelaporan dan penindakan	Kampanye kesadaran hukum berbasis komunitas	Budaya hukum melekat dalam kehidupan masyarakat
4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi	4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi	4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi	4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi	4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi
Kampanye budaya lokal melalui pendidikan dan media	Festival budaya dan religi khas Padang Panjang	Integrasi nilai-nilai keislaman dan adat dalam program publik	Promosi identitas kota dalam skala nasional	Serambi Mekah sebagai identitas global Padang Panjang
Pembentukan forum komunikasi umat beragama	Program toleransi berbasis sekolah dan komunitas	Dukungan terhadap kegiatan lintas iman	Fasilitasi penyelesaian konflik sosial berbasis musyawarah	Kota rukun dan damai berbasis nilai multikultural
Penguatan kapasitas lembaga kebudayaan	Kolaborasi antar pelaku budaya dan pemerintah	Dukungan sarana dan pendanaan kegiatan budaya	Lembaga budaya aktif dalam pelestarian dan inovasi	Kebudayaan menjadi fondasi pembangunan daerah



Tahap I (2026) <i>Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur</i>	Tahap II (2027) <i>Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</i>	Tahap III (2028) <i>Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang</i>	Tahap IV (2029) <i>Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan</i>	Tahap V (2020) <i>Tema : Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan "</i>
Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas publik	Pengelolaan fasilitas sosial berbasis komunitas	Inovasi layanan dan desain fasilitas publik ramah semua	Penyediaan fasilitas berbasis inklusi dan gender	Fasilitas publik sebagai ruang interaksi sosial dan pelayanan prima
Edukasi masyarakat tentang perilaku ramah lingkungan	Program penghijauan dan konservasi sumber daya	Inovasi teknologi pengelolaan limbah dan emisi	Penguatan peran komunitas dalam pengawasan lingkungan	Kota hijau, bersih, dan tangguh terhadap perubahan iklim
Pembentukan dan pelatihan relawan tanggap bencana	Simulasi dan edukasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat	Penguatan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi	Pengembangan teknologi prediksi dan mitigasi bencana	Ketangguhan kota terhadap bencana menjadi budaya
5. Fokus Pengembangan wilayah	5. Fokus Pengembangan wilayah	5. Fokus Pengembangan wilayah	5. Fokus Pengembangan wilayah	5. Fokus Pengembangan wilayah
Perbaikan jaringan dan armada transportasi	Penerapan sistem angkutan umum terintegrasi	Digitalisasi manajemen lalu lintas	Transportasi ramah lingkungan berbasis energi bersih	Smart mobility dan transportasi berbasis teknologi kota cerdas
Penegakan aturan pemanfaatan ruang	Pengawasan pembangunan sesuai zonasi	Sistem informasi geospasial berbasis publik	Tata ruang mendukung keberlanjutan dan inklusi	Penataan ruang adaptif terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk
Program bantuan rumah layak dan rusunawa	Revitalisasi kawasan kumuh	Skema pembiayaan kolaboratif dan CSR perumahan	Integrasi hunian dengan pusat ekonomi dan layanan dasar	Hunian layak sebagai hak dasar warga kota



3.5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2030

A. Program Prioritas Kota Padang Panjang

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030, ditetapkan program-program prioritas daerah sebagai langkah utama dalam mencapai tujuan pembangunan lima tahun ke depan.

Program prioritas ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi serta misi daerah. Rincian program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.16
Program Prioritas Kota Padang Panjang Periode Tahun 2025-2030

Visi / Misi 1	Tujuan 2	Sasaran 3	Outcome 4	Indikator 5	Program Prioritas 6	Ket. 7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia		
				Harapan Lama Sekolah		
				Rata-Rata lama Sekolah		
				Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan		
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	APK Paud (3-6 tahun) (%) APK SD sederajat (%) APK SMP sederajat (%) APS PAUD (5-6 Tahun) (%) APS SD sederajat (%) APS SMP sederajat (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio) Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Angka)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		S1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang) Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
		S1.3 : Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan		Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		
				Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Daya Saing Keolahragaan Wirausaha Pemuda (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
		S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				Tingkat Kemiskinan		
				Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Indeks Ketahanan Pangan		
				Tingkat Inflasi		
		S2.1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal		Rasio PDRB Industri Pengolahan		
				Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas SOM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)		
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)		
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)		



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya perlindungan konsumen di bidang metrologi legal	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal (%)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat dan Terkini (Alat)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		S2.2 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah		Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum		
				Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		S2.3 : Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto		
				Nilai Investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
		S2.4 Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (Koefisien Variansi Harga Antar Waktu)		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		S2.5 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat produktivitas tenaga kerja		
				Tingkat kesempatan kerja		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) (%)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah		Jumlah penduduk miskin		
				Pengeluaran Perkapita		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		S2.7 : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan		
				Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase) Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif	T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani			Indeks Reformasi Birokrasi		
		S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Pelayanan Publik Indeks Reformasi Hukum Nilai SAKIP Kota Indeks Pemerintahan Digital Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase) Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase) Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase) Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
			Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik (Angka)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	indeks aspek layanan administrasi berbasis elektronik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI)	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI (Angka)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Angka)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (Persentase)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur (%) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka) Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur (%) Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
		S3.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah		dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (%)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Indeks Pengelolaan Aset Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Penyusunan produk anggaran yg tertib efisien dan tepat waktu (%) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Penyajian laporan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu (Alat) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
		S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
			Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase kenaikan PAD Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
Misi 4 : Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya			Indeks Rasa Aman		
		S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda		
				Indeks Harmoni		
			Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan PERDA	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur (%) Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Barat (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat		Angka PPKS		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Rata-rata jumlah anak per- keluarga (Angka)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur (Angka) Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka) Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi yang Aktif (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
		S4.3 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat		Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan Persentase pemajuan objek kebudayaan		
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Meningkatnya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem berbasis kearifan lokal	Persentase cakupan fasilitasi mha terkait PPLH (Aduan)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan	T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak		IKLI KePUan		
				IKLI Perkim		
				IKLI Perhubungan		
				Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan		
			meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian kasus Pelanggaran (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase pengurangan kawasan kumuh yang di tangani (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh	persentase rumah layak huni (%)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Rencana Luas Penggunaan Tanah (%)	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase) Konektivitas Darat (Persentase) Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Indeks Kualitas Udara		
				Indeks Kualitas Air		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
		S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks Kualitas Lahan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (%)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola (%)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH (Angka)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
			Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

B. Program Unggulan Kepala Daerah

Program Unggulan Kepala Daerah merupakan inisiatif strategis yang dirumuskan untuk mewujudkan janji kampanye dan komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Program ini dirancang sebagai prioritas utama yang secara langsung dikawal oleh kepala daerah, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan tidak hanya menjadi realisasi dari janji politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Rincian Program Unggulan Kepala Daerah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Program Unggulan Kepala Daerah Kota Padang Panjang
Periode Tahun 2025-2030

NO	PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
1	Convention Hall	Audit Struktur Redesign Pembangunan+MK Pengadaan Mobiler, Partisi, Sound System, dll Perencanaan Landscape dan Taman Tematik Pembangunan Landscape dan Taman tematik ramah keluarga termasuk Pengawasan Landscape dan Taman Tematik Biaya Operasional	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Islamic Center Pusat Syiar Islam dan Wisata Religi	Perencanaan Miniatur Ka'bah Pembangunan Miniatur Ka'bah Pengawasan Miniatur Ka'bah Genset dengan daya terintegrasi dengan CH Perencanaan Miniatur Jumratul Untuk Manasik Pembangunan dan Pengawasan Lontar jumrah Perencanaan Pembenahan Basement & Drainase Interior Mesjid Sarana Prasarana (Lampu Hias Mihrab, Loker, Penyimpanan Sepatu, Kamar Mandi) Aktivitas Dakwah Islamic Center (operasional, event) Perencanaan Pembenahan Basement & Drainase Pembenahan Basement & Drainase Pengawasan Pembenahan Basement & Drainase Lighting IC Tahfiz Plus Pendidikan Calon Ulama Appraisal Pembelian tanah di samping IC Pembelian tanah di samping IC	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

NO	PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
3	Tata Kelola Pasar yang Nyaman	Kajian Penataan Pasar Pusat Konsultan Perencanaan Pasar Pusat Gedung Parkir 4 Lantai Revitalisasi Pasar Pusat Revitalisasi Pasar Sayur Busur	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
4	Revitalisasi PDIKM	Penyusunan DED Revitalisasi PDIKM Penataan taman Rehab toilet Perbaikan bak kompos Pembenahan rumah pembibitan Menambah koleksi pakaian adat Menambah koleksi buku reproduksi ulang koleksi foto Digitalisasi Naskah Kuno dan Produk2 Kebudayaan Display informasi digital Pengadaan permainan tradisional Pembenahan dan Rehab Sarana prasarana PDIKM	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Pengembangan Kota Baru (Pemanfaatan Tanah Eks Erfach)	Master Plan Pemanfaatan Tanah Erfach Pensertifikatan Tanah Erfach Land Clearing Tanah Erfach Akses jalan Perencanaan Sirkuit Balap Pembangunan dan Pengawasan Sirkuit Balap Operasional Sirkuit Balap Perencanaan Kebun Bunga Pembangunan dan Pengawasan Kebun Bunga Pemeliharaan/Operasional Kebun Bunga Perencanaan Mini Zoo Pembangunan dan Pengawasan Mini Zoo Operasional Mini Zoo Perencanaan Tempat pengolahan sampah terpadu Pembangunan dan Pengawasan Tempat pengolahan sampah terpadu Operasional Tempat pengolahan sampah terpadu Studi Kelayakan dan Perencanaan Pembangunan Rusunawa 2 dan 3 Tanah Pemakaman Umum Sekolah Rakyat Revisi RTRW KLHS RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BPKD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Sosial PPKB PPPA
6	Pembangunan LKC (Learning Knowledge Center / Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan	Revisi Perencanaan Pembangunan LKC (Lap Tennis Mifan) Pengawasan/MK LKC Pengadaan Mobiler, Partisi, Sound System, dll	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

NO	PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
	Teknologi (Wisata Edukasi Interaktif)			
7	Tungku Kapur Menyala Rakyat Sejahtera	Kajian Industri Kapur Feasibility Study Industri Kapur Pengurusan WUPR Rencana Pengelolaan Akses jalan Industri Kapur Fasilitas Perizinan, Sarana Prasarana, Pelatihan dan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM BAPPEDA
8	Padang Panjang Semarak Festival	Stimulan penyelenggaraan event Festival Serambi Makkah Pacu Kudo Burung Berkicau	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
9	Taman Kota	Penataan Wajah Kota (bibit Tanaman) Tambahan untuk pemeliharaan vertical garden	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
10	Rehabilitasi Lubuk Mata Kucing	DED Lubuk Mata Kucing Rehabilitasi Lubuk Mata Kucing Pengawasan Lubuk Mata Kucing Operasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
11	Beasiswa	Beasiswa SD-SMP Miskin dan Berprestasi Beasiswa SMA Miskin dan Berprestasi Komite Gratis Bagi Siswa SMA Melalui BKK Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Beasiswa Calon Ulama	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah BPKD
12	Atlet Berprestasi	Pembinaan Atlet dan Hibah Koni	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
13	Kota Ramah Investasi	Kajian Investasi Promosi Investasi (Bioskop, Playground, Investor PLTS, Mikro Hidro dan angin) Klinik Investasi Job Fair Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja BPJS Pekerja Rentan Kajian EBT (Surya, Mikro Hidro dan Angin)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DPMPSTP
14	Padang Panjang Youth Center	Penyediaan Tempat dan sarana Operasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

NO	PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
		Rehab Gedung dan Pelaksanaan Kegiatan		
15	Padang Panjang Kreative Hub	Penyelenggaraan Kegiatan dan Design Produk Rebranding senken (Konsultan dan Rehab)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
16	Pemanfaatan Tanah TNI	Perencanaan dan Amdal Pembangunan Alun-Alun Kota Pembangunan Alun-Alun Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	TIMISAKE (Tiga Milyar Satu Kecamatan)	2 Kecamatan (Pemberdayaan Ekonomi/ Event)-> Anggaran Musrenbang Pusat pembelajaran masyarakat kelurahan (sekolah kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
18	Pendidikan Yang Humanis	Penataan SMP 6 (Asrama, Mobiler, Saprass Pendukung, SDM Pendukung, Eksul) Seragam Gratis SD dan SMP Peningkatan Saprass SD dan SMP Pemeliharaan/Operasional SD dan SMP Peningkatan SDM Tenaga Pendidik Rehabilitasi dan Utilitas Sekolah Sistem Pembelajaran Berbasis Digital Internalisasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Adat Transportasi Gratis Kerjasama Pendidikan Menengah dan Tinggi Apraisal pengadaan tanah SMA 4 Fasilitas Pengadaan Tanah SMA 4 Land Clearing tanah SMA 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perhubungan
19	Tabungan Bersama	Subsidi Bunga Pembinaan Koperasi Merah Putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
20	Petani Maju dan Sejahtera	Rehab Irigasi Jalan Usaha tani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Bersama PT KAI	Event Gelanggang Arang Museum Kereta Api - Kerja sama pemanfaatan stasiun kereta api	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

NO	PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
22	ASN Gemilang	Peningkatan Kapasitas ASN UPT Penilaian Kompetensi (Sarpras dll)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
23	Istana Lansia	Operasional Istana Lansia (bantuan permakanan, wirid bulanan, pemeriksaan kesehatan gratis, studi dakwah) Promosi dan Sosialisasi Sekolah Lansia Penyediaan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial PPKB PPPA
24	Graha Disabilitas	Operasional Graha Disabilitas (permakanan bagi disabilitas terlantar, peringatan HDI, pelatihan bagi penyandang disabilitas (10 jenis))	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial PPKB PPPA
25	Bersama KAN	Tokoh Adat Masuk Sekolah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	RSUD Unggul (dana BLUD)	Rehabilitasi dan penambahan lahan parkir Rehabilitasi ruangan rawat inap jantung SDM medis dan paramedis untuk rujukan jantung Kerja sama referral dengan dokter spesialis jantung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD
27	Kawal Golden Ages (1000 Hari Pertama Kehidupan)/S tunting	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Pendampingan Keluarga Stunting Pelaksanaan Sekolah Ibu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Kesehatan Dinas Sosial PPKB PPPA
28	Kemiskinan	Bantuan berusaha bagi keluarga miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
29	Penyertaan Modal	Penyertaan modal Bank Nagari	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD
30	Pendirian BUMD	Kajian potensi daerah studi kelayakan koordinasi pendirian penyertaan modal BUMD seleksi direktur dan komisaris	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sekretariat Daerah BPKD

3.5.3. Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2039

A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030.

Strategi pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang Tahun 2025 secara umum masih mengacu kepada 3 strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan Arah Kebijakan Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030 mengacu kepada rencana induk pengentasan kemiskinan Badan Percepatan pengentasan kemiskinan Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dengan menerapkan konsep 5 pilar pengentasan kemiskinan yaitu :

1. **Pilar Pertama** : Sistem Penargetan Daerah, berfungsi sebagai penargetan sasaran keluarga miskin berdasarkan data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menerapkan verifikasi dan validasi data berkala :
2. **Pilar Kedua** : Pembangunan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif dan adaptif, yang mencakup di seluruh siklus kehidupan serta perlindungan dari guncangan akibat bencana alam maupun non alam.
3. **Pilar ketiga** : Graduasi kemiskinan, merupakan metode pengentasan kemiskinan dengan mendukung keluarga miskin keluar dari kemiskinan secara mandiri melalui paket intervensi multidimensi yang diberikan secara bertahap.
4. **Pilar Keempat** : Pemberdayaan ekonomi melalui ekosistem *Semi Closed-Loop Supply Chain* (SCLSC) melalui penciptaan lapangan kerja padat karya, implementasi teknologi digital, fasilitasi akses permodalan dan pelatihan tenaga kerja
5. **Pilar kelima** : Kerjasama aktif dan Partisipatif melalui membangun jejaring dana dalam pengentasan kemiskinan kepada seluruh stakeholder terkait pengentasan kemiskinan (Pemerintah Daerah maupun Pusat), instansi vertikal dan lingkungan swasta.

Berdasarkan target yang telah disusun dalam RPJMD Tahun 2025-2030 ini, bahwa angka kemiskinan tahun 2024 yang dijadikan *baseline* pada dokumen ini adalah tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 5,31 % atau 3.060 jiwa. maka untuk mencapai angka kemiskinan menjadi 1,7 % pada tahun 2030 akan dilakukan penargetan penurunan secara berkala yaitu : 4,71 % pada Tahun 2025, 4,11 % pada Tahun 2026, 3,51 % pada tahun 2027, 2,90 % pada Tahun 2028, 2,30 % pada tahun 2029 dan 1,7 % pada tahun 2030.



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Metode Graduasi kemiskinan yang akan diterapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Padang Panjang
Tahun 2025 - 2030

No.	Agenda Skema Graduasi	Rencana Intervensi	PenanggungJawab	Output
1	Assesmen Kondisi Kesejahteraan dan Penargetan			
a.	Assesment Kebutuhan Dasar		Dinas Sosial dan BPS, DisdukCapil	Tersedianya data masyarakat miskin terpilah
1)	Miskin	Bantuan Sosial Penuh (Sembako, PKH-PIP, Subsidi Energi, PBI-JKN, Rumah Layak Huni, Sanitasi, Air Bersih)	Dinas Sosial, Dinas Sosial, Dinas Perkim-LH, Dinas Pangan Pertanian, Dinas PU-PR, Kecamatan dan Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat miskin secara penuh selama 12-24 bulan
*Fase penanganan adalah 12-24 bulan				
2)	Rentan Miskin	Bantuan terbatas (PKH-PIP, PBI-JKN)	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan	Terjaminnya sebahagian kebutuhan dasar masyarakat miskin selama 12-24 bulan
			*Fase penanganan adalah 6-12 bulan	
3)	Menuju Menengah	Jaminan Sosial, JKN dan Jaminan Ketenagakerjaan	Dinas Kesehatan, DPMPPTSP, Kecamatan dan Kelurahan	Terpenuhinya akses penjaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan masyarakat selama 12-24 bulan
				*Fase penanganan adalah 6 bulan
		Pemerataan akses dan kualitas fasilitas dasar (Miskin, Rentan Miskin dan Menuju menengah)		
* Fase penanganan adalah 12-24 bulan				
2	Asesmen Karakteristik Wilayah dan Potensi tipologi penghidupan individu/rumah tangga			
a.	Penciptaan pendapatan			
1)	Pelatihan dan Pendampingan Usaha	Pelatihan dan Pendampingan Usaha menggunakan metode graduasi (Start-Up Bisnis, Medium, maju)	Dinas Perindag-Kop, Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya soft-skill masyarakat untuk pengenalan pola pikir berkembang
2)	Pelatihan Keterampilan Kerja	Peningkatan Skill masyarakat dalam menjalani usaha	Dinas Perindag-Kop, DPMPPTSP, Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kemampuan teknis masyarakat dalam menjalani usaha
3)	Akses kerja	Peningkatan Lapangan Usaha Baru sesuai potensi dan karakteristik Daerah	DPMPPTSP, Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat
b.	Pembinaan dan Pemberdayaan			
1)	Pengembangan Usaha	Pengembangan Jejaring usaha melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Perindag-KOP, DPMPPTSP, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Kecamatan dan Kelurahan	- Meningkatnya masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan tetap, - Meningkatnya Pelaku usaha yang menggunakan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
2)	Peningkatan akses permodalan	Peningkatan Omset Usaha melalui fasilitasi usaha dalam meningkatkan jumlah modal usaha	Dinas Perindag-KOP, DPMPPTSP, Dinas Sosial, Instansi Vertikal(BAZNAS, BANK dan lembaga Swasta lainnya), Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Omset pelaku usaha, terutama pelaku usaha keluarga miskin.
3)	Peningkatan Produktivitas	Penyusunan Strategi dan Pendataan Aset serta tabungan masyarakat	Dinas Perindag-KOP, DPMPPTSP, Dinas Sosial, Instansi Vertikal(BAZNAS, BANK dan lembaga Swasta lainnya), Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Aset tetap dan cadangan Tabungan masyarakat untuk menyikapi mitigasi risiko dan guncangan
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			
a.	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan pengentasan Kemiskinan	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pengentasan kemiskinan Triwulan dan Semesteran	Bappeda dan Dinas Sosial	Laporan Triwulan dan Semesteran

No.	Agenda Skema Graduasi	Rencana Intervensi	PenanggungJawab	Output
b.	Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan	Pelaksanaan Rakor Kemiskinan Semesteran	Bappeda dan Dinas Sosial	laporan Capaian penanggulangan Kemiskinan Semesteran
		Penyusunan dokumen Perencanaan penanggulangan kemiskinan	Bappeda dan Dinas Sosial	Tersusunnya Dokumen RAT Kemiskinan, laporan LP2KD serta Dokumen RPKD

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan terhadap keluarga miskin dengan dengan jenis dan intervensi sebagai berikut :

- Miskin, merupakan kondisi masyarakat miskin terendah yang membutuhkan intervensi pemenuhan kehidupan pokok seperti sandang pangan papan, Intervensi yang akan dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sandang, pangan papan serta selama maksimal 24 bulan atau 2 tahun dengan tetap memperhatikan aspek peningkatan ekonomi agar dapat keluar dari Zona miskin. dan graduasi yang akan dilakukan adalah mengangkat masyarakat miskin menjadi rentan miskin
- Rentan Miskin, merupakan kondisi masyarakat yang secara kebutuhan pokok sudah terpenuhi, akan tetapi membutuhkan peningkatan terhadap berkembangnya sektor ekonomi keluarga, intervensi yang akan dilakukan adalah dengan memberikan bantuan terbatas dan melakukan upaya peningkatan kapasitas ekonomi melalui pendampingan dan pelatihan usaha.
- Menuju Menengah, merupakan masyarakat yang sudah keluar dari zona rentan miskin dan membutuhkan peningkatan kapasitas usaha, intervensi yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas usaha melalui peningkatan akses permodalan, pendampingan serta peningkatan aset masyarakat yang dapat digunakan apabila ada guncangan bencana alam dan non alam, sehingga dengan metode ini masyarakat tidak kembali lagi menjadi rentan miskin maupun miskin.

Di samping metode graduasi ini, pengawasan dan monitoring secara berkala tetap akan dilakukan melalui Forum Komunikasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kota Padang Panjang. Upaya ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan melalui berbagai program pembangunan daerah yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan data baseline tahun 2025, berbagai indikator tingkat kemiskinan menjadi dasar penetapan target kinerja hingga tahun 2030. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang ditetapkan diarahkan untuk mencapai



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan. Rincian program pembangunan daerah untuk penurunan tingkat kemiskinan beserta target kinerja tahun 2026–2030 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.19
Program Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Padang Panjang
Tahun 2025 - 2030

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja						
		Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Paud (3-6 tahun)	%	51	53	55	57	59	59
	APK SD sederajat	%	106.10	106.30	106.50	106.70	106.90	106.90
	APK SMP sederajat	%	107.10	107.20	107.30	107.40	107.50	107.50
	APS PAUD (5-6 Tahun)	%	63	64	65	66	70	70
	APS SD sederajat	%	99.71	99.72	99.73	99.74	99.75	99.75
	APS SMP sederajat	%	97.51	97.52	97.53	97.54	97.55	97.55
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Orang	315	315	315	315	315	315
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	9.39	9.39	9.00	8.75	8.35	8.00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	89.04	89.24	89.44	89.64	89.84	89.6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	88.6	88.8	89	89.2	89.4	89.6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	89.8	90	90.2	90.4	90.6	90.8
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	%	62	62	62	62	62	62
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	13.77	14.07	14.37	14.67	14.97	15.27
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	9883	11883	13883	15883	17883	19883
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85.19	85.20	85.21	85.22	85.23	85.24
PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	752	753	754	755	756	757



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja						
		Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PERIKANAN BUDIDAYA								
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	80	81	82	85	95	100
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	80	80	80	85	95	100
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	34	38	42	46	50	54
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	62	63	64	65	66	67
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	92	97.5	98	98.5	99	99.5
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	Persentase	100	25	30	35	40	45
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	Persentase	100	25	30	35	40	45
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persentase	100	25	30	35	40	45
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	0	100	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	86.62	86.64	86.65	86.67	86.69	87
	Konektivitas Darat	Persentase	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	86.62	86.64	86.65	86.67	86.69	87
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	Persentase	19.04	20.00	21.66	22.22	22.72	23.14
	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	25.00	26.66	28.94	30.61	31.25	32.14
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Angka	39.99	40.00	40.10	40.15	40.20	40.25
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka)	Angka	39.50	39.80	40.00	41.00	42.00	43.00
	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Angka	28	28	28	28	28	28

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja						
		Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	97.26	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) UMUM	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	Persentase	87.11	87.98	87.98	87.98	87.98	87.98

B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Kota Padang Panjang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, mempercepat transformasi digital, serta mendorong kemajuan di berbagai sektor strategis. Oleh karena itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030.

Berdasarkan data tahun 2025, kondisi awal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang berada pada angka 81,5, dengan target meningkat secara bertahap hingga mencapai 86,0 pada tahun 2030. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan harapan lama sekolah dari 15,67 tahun menjadi 16,54 tahun, dan rata-rata lama sekolah dari 12,16 tahun menjadi 12,84 tahun pada periode yang sama. Di bidang kesehatan, usia harapan hidup ditargetkan meningkat dari 76,17 tahun pada 2025 menjadi 80,37 tahun pada 2030. Indeks lain seperti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (dari 97,88 menjadi 98,50), Indeks Perlindungan Anak (dari 70 menjadi 75), dan Indeks Pembangunan Gender (dari 98,25 menjadi 98,65) juga menjadi tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pembangunan SDM secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Padang Panjang akan melaksanakan serangkaian kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum lokal yang berbasis agama dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Akses pendidikan



akan diperluas dengan pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana serta pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Di bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penurunan stunting, layanan kesehatan gratis untuk deteksi dini penyakit, serta penguatan fasilitas kesehatan dan layanan unggulan di RSUD. Budaya hidup sehat juga akan didorong melalui peran aktif kader kesehatan dan masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan generasi muda, akan dibangun pusat kegiatan pemuda dan sarana olahraga, dilaksanakan pembinaan atlet sejak usia dini, dan diberikan penghargaan bagi atlet berprestasi. Partisipasi aktif organisasi kepemudaan dan sosial juga akan difasilitasi.

Dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan anak, kebijakan akan difokuskan pada layanan konseling keluarga, penguatan pengasuhan anak yang positif, pendampingan remaja, serta penyediaan layanan perlindungan anak berbasis kelurahan. Di sisi lain, komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan perempuan akan diwujudkan melalui peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pencegahan kekerasan berbasis gender, penyediaan layanan pengaduan dan perlindungan hukum, serta peningkatan kesadaran publik terhadap isu gender.

Semua kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial, serta membentuk masyarakat Kota Padang Panjang yang sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan. Tabel berikut memuat daftar program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam rangka penguatan SDM selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.20

Program Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Paud (3-6 tahun) (%)	51	53	55	57	57	59
	APK SD sederajat (%)	106.10	106.30	106.50	106.70	106.70	106.90
	APK SMP sederajat (%)	107.10	107.20	107.30	107.40	107.40	107.50
	APK SMP sederajat (%)	63	64	65	66	66	70
	APS PAUD (5-6 Tahun) (%)	99.71	99.72	99.73	99.74	99.74	99.75
	APS SD sederajat (%)	97.51	97.52	97.53	97.54	97.54	97.55
	APS SMP sederajat (%)						
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Muatan Lokal (Persentase)	20	30	40	60	80	100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	25	50	75	100	100
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	90	92	95	96	97	97



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0	100	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Angka)	74	75	76	77	78	79
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang) Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	10.93 315 9.39	10.93 315 9.39	10.93 315 9.00	10.93 315 8.75	10.93 315 8.35	10.93 315 8.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	68	68	68	68	68	68
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	25	25	25	25	25	25
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	7	8	8	8	8	8
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61.53	61.53	61.53	61.53	61.53	61.53
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	100	100	100

A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan fondasi utama pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2026–2030. Dengan baseline laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52% pada tahun 2025, ditargetkan

pertumbuhan meningkat secara bertahap hingga mencapai 7,65% pada tahun 2030. Upaya ini diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan dari 5,31% menjadi 1,70%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,94% menjadi 1,90%. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dari Rp108,50 juta per tenaga kerja menjadi Rp152,78 juta menjadi indikator penting keberhasilan transformasi ekonomi daerah. Indeks Ketahanan Pangan ditargetkan naik dari 87,05 menjadi 94,28, sedangkan inflasi mengikut ke Kota Bukittinggi pada kisaran stabil antara 2,33%–3,43%. Seluruh proses ini didukung oleh peningkatan kontribusi sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pertanian dan perikanan terhadap PDRB daerah.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan literasi digital, penguatan ekosistem usaha, dan perluasan akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. Infrastruktur pusat perdagangan dan destinasi wisata direvitalisasi, sementara pelaku UMKM, industri, dan ekonomi kreatif diperkuat melalui pelatihan, promosi, dan kemudahan perizinan. Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, diarahkan pada penguatan kapasitas petani, peningkatan produktivitas pangan lokal, pembangunan infrastruktur pertanian, dan diversifikasi konsumsi. Pemerintah juga memprioritaskan penataan data kemiskinan, pengurangan beban masyarakat miskin, dan peningkatan taraf hidup kelompok rentan melalui intervensi yang terintegrasi. Sementara itu, peningkatan investasi terus didorong melalui promosi potensi unggulan dan perbaikan tata kelola penanaman modal. Sinergi berbagai sektor pembangunan ini diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Tabel berikut memuat daftar program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam rangka penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.21
Program Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	32.25	34.60	38.46	42.3	46.15	48.71
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	-	-	26.93	33.33	39.74	46.15
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	9.09	9.09	13.33	20.00	26.67	33.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	19.04 25.00	20.00 26.66	21.66 28.94	22.22 30.61	22.72 31.25	23.14 32.14



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)						
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0.20	0.50	0.85	1.10	1.50	2.10
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	90	90	90	90	90	90
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	90	90	90	90	90	90
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal (%)	90	90	90	90	90	90
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	60	60	60	60	60	60
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	80	80	80	80	80	80
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat dan Terkini (Alat)	-	-	100	100	100	100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	60	60	60	60	60	60
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	75	80	85	90	95	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	3	3	3	8	15	25
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	37	39	40	42	44	45
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	90	90	90	90	90	90



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	90	90	90	90	90	90
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) (%)	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	13.77	14.07	14.37	14.67	14.97	15.27
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	59.45	64.45	69.45	74.45	79.45	84.45
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	9883	11883	13883	15883	17883	19883
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	85.19	85.20	85.21	85.22	85.23	85.24
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	-	60	65	70	75	80
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	752	753	754	755	756	757
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42.16	42.35	42.58	42.60	42.85	42.92
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	80 80	81 80	82 80	85 85	95 95	100 100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	80	80	80	85	95	100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	11.11	11.62	12.12	12.63	13.13	13.64
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase) Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0 100	0 100	0 100	0 100	0 100	0 100



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini secara khusus akan memaparkan mengenai Indikator Program, Target capaian, serta Pagu Indikatif Program yang direncanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2030. Rincian ini menjadi acuan penting dalam mengukur kinerja dan alokasi sumber daya guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.



TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			112.135.194.654,35		123.372.924.215,00		124.497.319.439,00		112.233.789.439,00		106.301.319.439,00		106.486.789.439,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			74.503.344.278,35		63.526.672.343,00		79.724.352.814,00		74.184.822.814,00		74.959.352.814,00		74.184.822.814,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	74.503.344.278,35	100	63.526.672.343,00	100	79.724.352.814,00	100	74.184.822.814,00	100	74.959.352.814,00	100	74.184.822.814,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			37.631.850.376,00		59.696.251.872,00		44.227.966.625,00		37.503.966.625,00		30.796.966.625,00		31.756.966.625,00	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	APK Paud (3-6 tahun) (%)	51	37.631.850.376,00	53	59.696.251.872,00	55	44.227.966.625,00	57	37.503.966.625,00	59	30.796.966.625,00	59	31.756.966.625,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
	APK SD sederajat (%)	106.10		106.30		106.50		106.70		106.90		106.90		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
	APK SMP sederajat (%)	107.10		107.20		107.30		107.40		107.50		107.50		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
	APS PAUD (5-6 Tahun) (%)	63		64		65		66		70		70		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
	APS SD sederajat (%)	99.71		99.72		99.73		99.74		99.75		99.75		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
	APS SMP sederajat (%)	97.51		97.52		97.53		97.54		97.55		97.55		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			0,00		150.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	20	0,00	30	150.000.000,00	40	350.000.000,00	60	350.000.000,00	80	350.000.000,00	100	350.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			0,00		0,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	0,00	25	0,00	50	175.000.000,00	75	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	90		92		95		96		97		97		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0,00	0	0,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			163.272.878.269,88		169.303.603.570,00		171.746.159.570,00		172.878.799.696,00		174.029.505.825,00		175.208.979.607,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			133.199.116.590,88		146.416.008.070,00		150.344.913.070,00		151.467.553.196,00		152.618.259.325,00		153.797.733.107,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	133.199.116.590,88	100	146.416.008.070,00	100	150.344.913.070,00	100	151.467.553.196,00	100	152.618.259.325,00	100	153.797.733.107,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			28.711.494.229,00		22.116.295.000,00		20.629.946.000,00		20.639.946.000,00		20.639.946.000,00		20.639.946.000,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	10.93	28.711.494.229,00	10.93	22.116.295.000,00	10.93	20.629.946.000,00	10.93	20.639.946.000,00	10.93	20.639.946.000,00	10.93	20.639.946.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	315		315		315		315		315				
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	9.39		9.39		9.00		8.75		8.35		8.00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			384.083.150,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	68	384.083.150,00	68	15.000.000,00	68	15.000.000,00	68	15.000.000,00	68	15.000.000,00	68	15.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			497.679.700,00		32.500.500,00		32.500.500,00		32.500.500,00		32.500.500,00		32.500.500,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	49.3	497.679.700,00	49.3	32.500.500,00	49.3	32.500.500,00	49.3	32.500.500,00	49.3	32.500.500,00	49.3	32.500.500,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			480.504.600,00		723.800.000,00		723.800.000,00		723.800.000,00		723.800.000,00		723.800.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	57.50	480.504.600,00	57.50	723.800.000,00	57.50	723.800.000,00	57.50	723.800.000,00	57.50	723.800.000,00	57.50	723.800.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			25.802.697.752,00		49.056.370.391,00		30.254.737.783,00		18.704.523.347,00		10.984.634.168,00		11.074.853.128,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.909.310.356,00		6.938.240.000,00		7.425.477.500,00		7.518.487.815,00		7.613.823.386,00		7.711.542.346,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	6.909.310.356,00	100	6.938.240.000,00	100	7.425.477.500,00	100	7.518.487.815,00	100	7.613.823.386,00	100	7.711.542.346,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			3.581.611.630,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	89.04	3.581.611.630,00	89.24	720.000.000,00	89.44	720.000.000,00	89.64	720.000.000,00	89.84	720.000.000,00	90.04	720.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			373.936.340,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	88.6	373.936.340,00	88.8	250.000.000,00	89	100.000.000,00	89.2	100.000.000,00	89.4	100.000.000,00	89.6	100.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			841.951.100,00		500.000.000,00		500.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	89.8	841.951.100,00	90	500.000.000,00	90.2	500.000.000,00	90.4	300.000.000,00	90.6	300.000.000,00	90.8	300.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			3.862.186.850,00		904.180.391,00		858.360.782,00		758.360.782,00		658.360.782,00		658.360.782,00	
meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	93.39	3.862.186.850,00	93.59	904.180.391,00	93.79	858.360.782,00	93.99	758.360.782,00	94.19	658.360.782,00	94.39	658.360.782,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			3.296.577.000,00		35.830.000.000,00		8.800.000.000,00		690.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	47	3.296.577.000,00	47.2	35.830.000.000,00	47.4	8.800.000.000,00	47.6	690.000.000,00	47.8	680.000.000,00	48	680.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			0,00		2.633.000.000,00		8.998.449.501,00		7.659.224.750,00		0,00		0,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0,00	0	2.633.000.000,00	0	8.998.449.501,00	0	7.659.224.750,00	0	0,00	0	0,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			6.393.694.826,00		1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dalam kota	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	89.54	6.393.694.826,00	89.74	1.000.000.000,00	89.99	2.500.000.000,00	90.14	600.000.000,00	90.34	600.000.000,00	90.54	600.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			61.460.900,00		60.000.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		80.000.000,00	
meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi (%)	20	61.460.900,00	40	60.000.000,00	60	87.500.000,00	80	87.500.000,00	100	87.500.000,00	100	80.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			481.968.750,00		220.950.000,00		264.950.000,00		270.950.000,00		224.950.000,00		224.950.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian kasus Pelanggaran (%)	75	481.968.750,00	80	220.950.000,00	82.5	264.950.000,00	90	270.950.000,00	95	224.950.000,00	100	224.950.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			18.245.858.918,00		7.745.243.070,00		8.616.408.370,00		8.203.770.246,00		8.293.316.168,00		8.385.100.738,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.929.395.532,00		6.987.810.810,00		7.312.016.110,00		7.399.377.986,00		7.488.923.908,00		7.580.708.478,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (%)	90	6.929.395.532,00	90	6.987.810.810,00	90	7.312.016.110,00	90	7.399.377.986,00	90	7.488.923.908,00	90	7.580.708.478,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			310.942.230,00		425.166.300,00		912.136.300,00		412.136.300,00		412.136.300,00		412.136.300,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani (%)	100	310.942.230,00	100	425.166.300,00	100	912.136.300,00	100	412.136.300,00	100	412.136.300,00	100	412.136.300,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			0,00		0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase pengurangan kawasan kumuh yang di tangani (%)	-	0,00	-	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			2.667.765.960,00		132.265.960,00		132.255.960,00		132.255.960,00		132.255.960,00		132.255.960,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh	persentase rumah layak huni (%)	97.26	2.667.765.960,00	89.58	132.265.960,00	89.58	132.255.960,00	89.58	132.255.960,00	89.58	132.255.960,00	89.58	132.255.960,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			8.337.755.196,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	87.11	8.337.755.196,00	87.98	200.000.000,00	87.98	200.000.000,00	87.98	200.000.000,00	87.98	200.000.000,00	87.98	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12.302.116.942,00		11.122.261.086,00		14.958.447.683,00		14.510.174.383,00		14.608.960.883,00		14.823.291.803,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.653.297.632,00		6.667.851.736,00		6.741.651.883,00		6.707.903.883,00		6.852.703.083,00		6.852.544.003,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	6.653.297.632,00	100	6.667.851.736,00	100	6.741.651.883,00	100	6.707.903.883,00	100	6.852.703.083,00	100	6.852.544.003,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.977.263.900,00		2.968.423.900,00		4.304.000.000,00		3.829.000.000,00		4.179.000.000,00		4.079.000.000,00	
Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan tranitibum linmas dan penegakan PERDA	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	3.977.263.900,00	100	2.968.423.900,00	100	4.304.000.000,00	100	3.829.000.000,00	100	4.179.000.000,00	100	4.079.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			817.577.110,00		1.144.495.300,00		1.927.795.800,00		2.188.270.500,00		2.792.257.800,00		3.106.747.800,00	
Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	100	817.577.110,00	100	1.144.495.300,00	100	1.927.795.800,00	100	2.188.270.500,00	100	2.792.257.800,00	100	3.106.747.800,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			853.978.300,00		341.490.150,00		1.985.000.000,00		1.785.000.000,00		785.000.000,00		785.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	853.978.300,00	100	341.490.150,00	100	1.985.000.000,00	100	1.785.000.000,00	100	785.000.000,00	100	785.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			8.144.876.093,00		6.772.409.134,00		7.845.284.000,00		7.845.284.000,00		7.845.284.000,00		7.845.284.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.792.358.172,00		5.905.009.134,00		5.843.224.000,00		5.843.224.000,00		5.843.224.000,00		5.843.224.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	5.792.358.172,00	100	5.905.009.134,00	100	5.843.224.000,00	100	5.843.224.000,00	100	5.843.224.000,00	100	5.843.224.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMRERDAYAAN SOSIAL			1.055.710.050,00		333.700.000,00		697.000.000,00		697.000.000,00		697.000.000,00		697.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	1.055.710.050,00	100	333.700.000,00	100	697.000.000,00	100	697.000.000,00	100	697.000.000,00	100	697.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.015.300.584,00		203.800.000,00		1.203.560.000,00		1.203.560.000,00		1.203.560.000,00		1.203.560.000,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	1.015.300.584,00	100	203.800.000,00	100	1.203.560.000,00	100	1.203.560.000,00	100	1.203.560.000,00	100	1.203.560.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			75.977.750,00		294.100.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	75.977.750,00	100	294.100.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			90.912.037,00		21.000.000,00		56.500.000,00		56.500.000,00		56.500.000,00		56.500.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	90.912.037,00	100	21.000.000,00	100	56.500.000,00	100	56.500.000,00	100	56.500.000,00	100	56.500.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			114.617.500,00		14.800.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	114.617.500,00	100	14.800.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.052.894.195,00		5.089.783.890,00		5.912.553.885,00		6.151.734.843,00		6.401.463.110,00		6.662.313.115,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.872.577.195,00		3.674.783.890,00		3.957.053.885,00		4.147.709.843,00		4.348.246.860,00		4.559.186.852,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	3.872.577.195,00	100	3.674.783.890,00	100	3.957.053.885,00	100	4.147.709.843,00	100	4.348.246.860,00	100	4.559.186.852,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			0,00		0,00		100.000.000,00		108.000.000,00		116.640.000,00		125.971.200,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) (%)	100	0,00	100	0,00	100	100.000.000,00	100	108.000.000,00	100	116.640.000,00	100	125.971.200,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			670.883.000,00		840.000.000,00		1.270.000.000,00		1.300.000.000,00		1.330.000.000,00		1.360.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	13.77	670.883.000,00	14.07	840.000.000,00	14.37	1.270.000.000,00	14.67	1.300.000.000,00	14.97	1.330.000.000,00	15.27	1.360.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			106.234.000,00		175.000.000,00		185.500.000,00		196.025.000,00		206.576.250,00		217.155.063,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	59.45	106.234.000,00	64.45	175.000.000,00	69.45	185.500.000,00	74.45	196.025.000,00	79.45	206.576.250,00	84.45	217.155.063,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			403.200.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	9883	403.200.000,00	11883	400.000.000,00	13883	400.000.000,00	15883	400.000.000,00	17883	400.000.000,00	19883	400.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			819.009.181,00		82.000.000,00		642.660.000,00		642.660.000,00		642.660.000,00		642.660.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			263.935.440,00		52.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	7	263.935.440,00	8	52.000.000,00	8	165.000.000,00	8	165.000.000,00	8	165.000.000,00	8	165.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			147.632.000,00		10.000.000,00		146.045.000,00		146.045.000,00		146.045.000,00		146.045.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	26.17	147.632.000,00	26.17	10.000.000,00	26.17	146.045.000,00	26.17	146.045.000,00	26.17	146.045.000,00	26.17	146.045.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			86.291.041,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61.53	86.291.041,00	61.53	10.000.000,00	61.53	25.000.000,00	61.53	25.000.000,00	61.53	25.000.000,00	61.53	25.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			321.150.700,00		10.000.000,00		306.615.000,00		306.615.000,00		306.615.000,00		306.615.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	321.150.700,00	100	10.000.000,00	100	306.615.000,00	100	306.615.000,00	100	306.615.000,00	100	306.615.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8.125.946.726,00		7.785.256.252,00		8.166.986.252,00		8.221.054.503,00		8.317.474.460,00		8.416.304.916,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.029.343.426,00		7.670.414.252,00		8.002.144.252,00		8.096.212.503,00		8.192.632.460,00		8.291.462.916,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	8.029.343.426,00	100	7.670.414.252,00	100	8.002.144.252,00	100	8.096.212.503,00	100	8.192.632.460,00	100	8.291.462.916,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			96.603.300,00		104.842.000,00		154.842.000,00		114.842.000,00		114.842.000,00		114.842.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	85.19	96.603.300,00	85.20	104.842.000,00	85.21	154.842.000,00	85.22	114.842.000,00	85.23	114.842.000,00	85.24	114.842.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	-	0,00	60	10.000.000,00	65	10.000.000,00	70	10.000.000,00	75	10.000.000,00	80	10.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00	
Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Rencana Luas Penggunaan Tanah (%)	-	4.050.000,00	-	4.050.000,00	-	4.050.000,00	-	4.050.000,00	-	4.050.000,00	-	4.050.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			10.795.808.749,00		9.601.245.598,00		10.807.245.598,00		10.307.245.598,00		10.807.245.598,00		10.807.245.598,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			111.067.200,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (%)	100	111.067.200,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			420.479.500,00		499.164.690,00		499.164.690,00		499.164.690,00		499.164.690,00		499.164.690,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (%)	100	420.479.500,00	100	499.164.690,00	100	499.164.690,00	100	499.164.690,00	100	499.164.690,00	100	499.164.690,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.870.363.570,00		2.192.178.770,00		2.393.178.770,00		2.893.178.770,00		2.393.178.770,00		2.393.178.770,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	10.45	1.870.363.570,00	10.49	2.192.178.770,00	10.49	2.393.178.770,00	10.49	2.893.178.770,00	10.49	2.393.178.770,00	10.49	2.393.178.770,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			28.218.360,00		31.197.760,00		31.197.760,00		31.197.760,00		31.197.760,00		31.197.760,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola (%)	32	28.218.360,00	32	31.197.760,00	32	31.197.760,00	32	31.197.760,00	32	31.197.760,00	32	31.197.760,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			17.987.420,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH (Angka)	60	17.987.420,00	62	10.000.000,00	62	10.000.000,00	62	10.000.000,00	62	10.000.000,00	62	10.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem berbasis kearifan lokal	Persentase cakupan fasilitas mha terkait pplh (Aduan)	0	0,00	0	0,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			117.395.900,00		139.754.250,00		119.754.250,00		119.754.250,00		119.754.250,00		119.754.250,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	117.395.900,00	100	139.754.250,00	100	119.754.250,00	100	119.754.250,00	100	119.754.250,00	100	119.754.250,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			78.454.650,00		78.454.650,00		78.454.650,00		78.454.650,00		78.454.650,00		78.454.650,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	78.454.650,00	100	78.454.650,00	100	78.454.650,00	100	78.454.650,00	100	78.454.650,00	100	78.454.650,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			8.536.700,00		8.536.700,00		8.536.700,00		8.536.700,00		8.536.700,00		8.536.700,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	8.536.700,00	100	8.536.700,00	100	8.536.700,00	100	8.536.700,00	100	8.536.700,00	100	8.536.700,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			8.143.305.449,00		6.640.958.778,00		7.645.958.778,00		6.645.958.778,00		7.645.958.778,00		7.645.958.778,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (point)	98	8.143.305.449,00	98	6.640.958.778,00	98	7.645.958.778,00	98	6.645.958.778,00	98	7.645.958.778,00	98	7.645.958.778,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.210.784.031,00		2.604.579.600,00		2.975.372.416,00		3.044.209.102,00		3.119.586.720,00		3.202.587.526,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.795.534.191,00		2.497.003.600,00		2.604.821.100,00		2.635.766.539,00		2.667.485.614,00		2.699.997.665,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	2.795.534.191,00	100	2.497.003.600,00	100	2.604.821.100,00	100	2.635.766.539,00	100	2.667.485.614,00	100	2.699.997.665,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			200.474.680,00		0,00		209.339.986,00		219.806.986,00		230.797.335,00		242.337.201,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	34	200.474.680,00	38	0,00	42	209.339.986,00	46	219.806.986,00	50	230.797.335,00	54	242.337.201,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	62		63		64		65		66		67		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			101.779.310,00		46.152.400,00		55.382.880,00		66.459.456,00		79.751.347,00		95.701.617,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	92	101.779.310,00	97.5	46.152.400,00	98	55.382.880,00	98.5	66.459.456,00	99	79.751.347,00	99.5	95.701.617,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	100		25		30		35		40		45		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	100		25		30		35		40		45		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	100		25		30		35		40		45		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			103.014.850,00		61.423.600,00		98.848.050,00		114.846.701,00		133.856.533,00		156.470.357,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	103.014.850,00	100	61.423.600,00	100	98.848.050,00	100	114.846.701,00	100	133.856.533,00	100	156.470.357,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			9.981.000,00		0,00		6.980.400,00		7.329.420,00		7.695.891,00		8.080.686,00	



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	9.981.000,00	0	0,00	100	6.980.400,00	100	7.329.420,00	100	7.695.891,00	100	8.080.686,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.313.179.065,00		2.038.874.866,00		2.056.960.000,00		2.056.960.000,00		2.056.960.000,00		2.056.960.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			73.344.600,00		46.000.000,00		103.200.000,00		103.200.000,00		103.200.000,00		103.200.000,00	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Rata-rata jumlah anak per-keluarga (Angka)	2.43	73.344.600,00	2.43	46.000.000,00	2.43	103.200.000,00	2.43	103.200.000,00	2.43	103.200.000,00	2.43	103.200.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.005.030.465,00		217.000.000,00		1.285.030.465,00		1.285.030.465,00		1.285.030.465,00		1.285.030.465,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	0	1.005.030.465,00	0	217.000.000,00	0	1.285.030.465,00	0	1.285.030.465,00	0	1.285.030.465,00	0	1.285.030.465,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.234.804.000,00		1.775.874.866,00		668.729.535,00		668.729.535,00		668.729.535,00		668.729.535,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	62	1.234.804.000,00	62	1.775.874.866,00	62	668.729.535,00	62	668.729.535,00	62	668.729.535,00	62	668.729.535,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			11.299.781.282,00		10.129.955.233,00		12.306.983.014,00		11.906.983.014,00		11.856.983.014,00		11.856.983.014,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.894.086.217,00		7.521.525.564,00		7.596.525.564,00		7.596.525.564,00		7.596.525.564,00		7.596.525.564,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	7.894.086.217,00	100	7.521.525.564,00	100	7.596.525.564,00	100	7.596.525.564,00	100	7.596.525.564,00	100	7.596.525.564,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			3.405.695.065,00		2.608.429.669,00		4.710.457.450,00		4.310.457.450,00		4.260.457.450,00		4.260.457.450,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	86.62	3.405.695.065,00	86.64	2.608.429.669,00	86.65	4.710.457.450,00	86.67	4.310.457.450,00	86.69	4.260.457.450,00	87	4.260.457.450,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perhubungan
	Konektivitas Darat (Persentase)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perhubungan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	86.62		86.64		86.65		86.67		86.69		87		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.496.558.153,00		6.064.899.843,00		6.530.503.327,00		6.353.503.327,00		6.390.503.327,00		6.420.503.327,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.934.313.753,00		4.547.545.400,00		4.701.967.300,00		4.701.967.300,00		4.701.967.300,00		4.701.967.300,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika (%)	100	4.934.313.753,00	100	4.547.545.400,00	100	4.701.967.300,00	100	4.701.967.300,00	100	4.701.967.300,00	100	4.701.967.300,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.202.717.400,00		962.234.600,00		1.000.515.500,00		1.010.515.500,00		1.000.515.500,00		1.000.515.500,00	
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik (Angka)	87	1.202.717.400,00	88	962.234.600,00	89	1.000.515.500,00	90	1.010.515.500,00	91	1.000.515.500,00	92	1.000.515.500,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.359.527.000,00		555.119.843,00		828.020.527,00		641.020.527,00		688.020.527,00		718.020.527,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks aspek layanan administrasi berbasis elektronik (%)	4.00	1.359.527.000,00	4	555.119.843,00	4	828.020.527,00	4	641.020.527,00	4	688.020.527,00	4	718.020.527,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			11.541.569.164,40		9.128.450.170,00		8.110.552.210,00		8.137.755.649,00		8.379.689.175,00		8.383.908.535,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.400.199.402,90		7.563.250.170,00		7.313.552.210,00		7.402.755.649,00		7.516.689.175,00		7.587.908.535,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	7.400.199.402,90	100	7.563.250.170,00	100	7.313.552.210,00	100	7.402.755.649,00	100	7.516.689.175,00	100	7.587.908.535,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1.610.000,00		40.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00		16.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	32.25	1.610.000,00	34.60	40.000.000,00	38.46	7.000.000,00	42.3	10.000.000,00	46.15	13.000.000,00	48.71	16.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			0,00		0,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SOM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	-	0,00	-	0,00	26.93	80.000.000,00	33.33	85.000.000,00	39.74	90.000.000,00	46.15	100.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			111.200.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	9.09	111.200.000,00	9.09	100.000.000,00	13.33	50.000.000,00	20.00	60.000.000,00	26.67	70.000.000,00	33.00	80.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			682.180.599,00		350.000.000,00		495.000.000,00		405.000.000,00		515.000.000,00		425.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	19.04	682.180.599,00	20.00	350.000.000,00	21.66	495.000.000,00	22.22	405.000.000,00	22.72	515.000.000,00	23.14	425.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	25.00		26.66		28.94		30.61		31.25		32.14		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			3.346.379.162,50		1.075.200.000,00		165.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0.20	3.346.379.162,50	0.50	1.075.200.000,00	0.85	165.000.000,00	1.10	175.000.000,00	1.50	175.000.000,00	2.10	175.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			98.800.000,00		360.000.000,00		215.750.000,00		221.787.500,00		228.126.875,00		234.783.219,00	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			56.000.000,00		245.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	75	56.000.000,00	80	245.000.000,00	85	95.000.000,00	90	95.000.000,00	95	95.000.000,00	100	95.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			42.300.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	3	42.300.000,00	3	100.000.000,00	3	105.000.000,00	8	110.250.000,00	15	115.762.500,00	25	121.550.625,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			500.000,00		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	500.000,00	100	15.000.000,00	100	15.750.000,00	100	16.537.500,00	100	17.364.375,00	100	18.232.594,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			8.884.012.904,31		6.854.013.809,00		7.775.009.309,00		14.826.177.392,00		7.878.624.636,00		7.932.383.082,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.315.461.618,00		4.999.418.909,00		5.320.414.409,00		5.371.582.492,00		5.424.029.736,00		5.477.788.182,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	0	5.315.461.618,00	0	4.999.418.909,00	0	5.320.414.409,00	0	5.371.582.492,00	0	5.424.029.736,00	0	5.477.788.182,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			232.512.950,00		739.999.900,00		839.999.900,00		839.999.900,00		839.999.900,00		839.999.900,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	232.512.950,00	0	739.999.900,00	0	839.999.900,00	0	839.999.900,00	0	839.999.900,00	0	839.999.900,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			3.236.038.336,31		1.014.595.000,00		1.514.595.000,00		8.514.595.000,00		1.514.595.000,00		1.514.595.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	3.236.038.336,31	0	1.014.595.000,00	0	1.514.595.000,00	0	8.514.595.000,00	0	1.514.595.000,00	0	1.514.595.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			5.505.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			5.505.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI)	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI (Angka)	1.5	5.505.000,00	1.81	10.000.000,00	1.81	15.000.000,00	2.12	30.000.000,00	2.12	15.000.000,00	2.6	30.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			3.850.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			3.850.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Angka)	2	3.850.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	140.000.000,00	0	140.000.000,00	0	140.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			633.512.000,00		1.594.168.000,00		1.210.000.000,00		1.205.000.000,00		1.275.000.000,00		1.467.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			633.512.000,00		1.594.168.000,00		1.050.000.000,00		1.055.000.000,00		1.080.000.000,00		1.235.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	75	633.512.000,00	75.10	1.594.168.000,00	75.25	1.050.000.000,00	75.35	1.055.000.000,00	75.45	1.080.000.000,00	75.55	1.235.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			0,00		0,00		160.000.000,00		150.000.000,00		195.000.000,00		232.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	-	0,00	-	0,00	55	160.000.000,00	60	150.000.000,00	65	195.000.000,00	70	232.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.199.353.368,00		4.692.828.533,00		19.064.773.885,00		5.222.275.430,00		5.324.222.575,00		5.366.658.103,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.061.613.493,00		3.692.828.533,00		3.933.327.982,00		3.980.507.232,00		4.026.865.967,00		4.063.433.665,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (%)	100	4.061.613.493,00	100	3.692.828.533,00	100	3.933.327.982,00	100	3.980.507.232,00	100	4.026.865.967,00	100	4.063.433.665,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1.036.362.825,00		898.622.950,00		15.025.000.000,00		1.130.000.000,00		1.180.000.000,00		1.180.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegembiraan membaca masyarakat (Angka)	74	1.036.362.825,00	75	898.622.950,00	76	15.025.000.000,00	77	1.130.000.000,00	78	1.180.000.000,00	79	1.180.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			101.377.050,00		101.377.050,00		106.445.903,00		111.768.198,00		117.356.608,00		123.224.438,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	5	101.377.050,00	10	101.377.050,00	15	106.445.903,00	20	111.768.198,00	25	117.356.608,00	30	123.224.438,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			15.667.850,00		0,00		2.267.500.000,00		166.125.000,00		67.881.250,00		70.775.312,50	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			15.667.850,00		0,00		2.202.500.000,00		156.125.000,00		57.881.250,00		60.775.312,50	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku (%)	62.5	15.667.850,00	66	0,00	70.8	2.202.500.000,00	75	156.125.000,00	79	57.881.250,00	83	60.775.312,50	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			0,00		0,00		65.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	-	0,00	-	0,00	75	65.000.000,00	75	10.000.000,00	75	10.000.000,00	75	10.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			390.145.900,00		164.201.725,00		164.201.725,00		164.201.725,00		164.201.725,00		164.201.725,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			345.145.900,00		89.151.725,00		89.151.725,00		89.151.725,00		89.151.725,00		89.151.725,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	752	345.145.900,00	753	89.151.725,00	754	89.151.725,00	755	89.151.725,00	756	89.151.725,00	757	89.151.725,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			45.000.000,00		75.050.000,00		75.050.000,00		75.050.000,00		75.050.000,00		75.050.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42.16	45.000.000,00	42.35	75.050.000,00	42.58	75.050.000,00	42.60	75.050.000,00	42.85	75.050.000,00	42.92	75.050.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.575.591.770,00		2.950.364.350,00		4.150.364.350,00		3.150.364.350,00		3.150.364.350,00		3.150.364.350,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			541.673.470,00		1.680.000.350,00		2.880.000.350,00		1.880.000.350,00		1.880.000.350,00		1.880.000.350,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0	541.673.470,00	0	1.680.000.350,00	0	2.880.000.350,00	0	1.880.000.350,00	0	1.880.000.350,00	0	1.880.000.350,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			262.528.150,00		100.364.000,00		100.364.000,00		100.364.000,00		100.364.000,00		100.364.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	262.528.150,00	0	100.364.000,00	0	100.364.000,00	0	100.364.000,00	0	100.364.000,00	0	100.364.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			44.175.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	44.175.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			727.215.150,00		1.130.000.000,00		1.130.000.000,00		1.130.000.000,00		1.130.000.000,00		1.130.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	727.215.150,00	0	1.130.000.000,00	0	1.130.000.000,00	0	1.130.000.000,00	0	1.130.000.000,00	0	1.130.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.078.388.260,00		445.522.000,00		1.457.522.000,00		1.957.522.000,00		2.157.522.000,00		2.157.522.000,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.595.137.880,00		141.854.000,00		741.854.000,00		1.241.854.000,00		1.741.854.000,00		1.741.854.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	80	1.595.137.880,00	81	141.854.000,00	82	741.854.000,00	85	1.241.854.000,00	95	1.741.854.000,00	100	1.741.854.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	80		80		80		85		95		100		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			69.549.780,00		56.700.000,00		456.700.000,00		456.700.000,00		156.700.000,00		156.700.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	80	69.549.780,00	80	56.700.000,00	80	456.700.000,00	85	456.700.000,00	95	156.700.000,00	100	156.700.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			105.143.200,00		155.984.000,00		217.884.000,00		217.884.000,00		217.884.000,00		217.884.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	11.11	105.143.200,00	11.62	155.984.000,00	12.12	217.884.000,00	12.63	217.884.000,00	13.13	217.884.000,00	13.64	217.884.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			7.600.000,00		11.084.000,00		11.084.000,00		11.084.000,00		11.084.000,00		11.084.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	80	7.600.000,00	80	11.084.000,00	80	11.084.000,00	85	11.084.000,00	85	11.084.000,00	85	11.084.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			300.957.400,00		79.900.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	300.957.400,00	0	79.900.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			7.731.304.960,00		5.917.410.413,00		9.792.000.000,00		9.802.000.000,00		8.832.000.000,00		8.852.000.000,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			13.397.300,00		55.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	37	13.397.300,00	39	55.000.000,00	40	22.000.000,00	42	22.000.000,00	44	22.000.000,00	45	22.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			6.719.191.560,00		5.311.596.300,00		8.800.000.000,00		8.800.000.000,00		7.800.000.000,00		7.800.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	90	6.719.191.560,00	90	5.311.596.300,00	90	8.800.000.000,00	90	8.800.000.000,00	90	7.800.000.000,00	90	7.800.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			73.986.300,00		32.600.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	90	73.986.300,00	90	32.600.000,00	90	80.000.000,00	90	80.000.000,00	90	80.000.000,00	90	80.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			59.386.100,00		193.214.113,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan konsumen di bidang metrologi legal	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal (%)	90	59.386.100,00	90	193.214.113,00	90	120.000.000,00	90	120.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			865.343.700,00		325.000.000,00		770.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	865.343.700,00	100	325.000.000,00	100	770.000.000,00	100	780.000.000,00	100	780.000.000,00	100	800.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			616.202.102,00		1.759.299.800,00		1.155.000.000,00		990.306.111,00		995.306.111,00		1.000.306.111,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			615.108.852,00		1.756.299.800,00		1.125.000.000,00		960.306.111,00		965.306.111,00		970.306.111,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	60	615.108.852,00	60	1.756.299.800,00	60	1.125.000.000,00	60	960.306.111,00	60	965.306.111,00	60	970.306.111,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			1.093.250,00		3.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	80	1.093.250,00	80	3.000.000,00	80	10.000.000,00	80	10.000.000,00	80	10.000.000,00	80	10.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat dan Terkini (Alat)	-	0,00	-	0,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			47.404.348.358,00		32.957.316.819,00		46.072.154.800,00		45.973.008.551,00		45.948.838.645,00		46.249.564.491,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.875.791.528,00		27.286.329.340,00		29.306.010.000,00		29.357.063.751,00		29.432.893.845,00		29.633.619.691,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	33.875.791.528,00	100	27.286.329.340,00	100	29.306.010.000,00	100	29.357.063.751,00	100	29.432.893.845,00	100	29.633.619.691,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			13.101.015.030,00		5.005.987.479,00		15.906.144.800,00		15.755.944.800,00		15.655.944.800,00		15.755.944.800,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	13.101.015.030,00	100	5.005.987.479,00	100	15.906.144.800,00	100	15.755.944.800,00	100	15.655.944.800,00	100	15.755.944.800,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			427.541.800,00		665.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	60	427.541.800,00	60	665.000.000,00	60	860.000.000,00	60	860.000.000,00	60	860.000.000,00	60	860.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD			31.699.437.865,00		28.487.694.743,00		29.420.643.387,00		29.300.534.700,00		29.746.523.297,00		29.401.014.731,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.453.422.960,00		16.034.631.612,00		15.879.142.812,00		15.759.034.125,00		15.705.022.722,00		15.859.514.156,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	17.453.422.960,00	100	16.034.631.612,00	100	15.879.142.812,00	100	15.759.034.125,00	100	15.705.022.722,00	100	15.859.514.156,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			14.246.014.905,00		12.453.063.131,00		13.541.500.575,00		13.541.500.575,00		14.041.500.575,00		13.541.500.575,00	
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (Persentase)	100	14.246.014.905,00	100	12.453.063.131,00	100	13.541.500.575,00	100	13.541.500.575,00	100	14.041.500.575,00	100	13.541.500.575,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN			5.247.917.999,00		14.738.213.045,00		13.029.813.218,00		12.637.813.218,00		13.094.813.218,00		12.764.813.218,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.916.245.499,00		4.708.213.045,00		5.298.509.168,00		4.926.509.168,00		5.383.509.168,00		5.033.509.168,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	4.916.245.499,00	100	4.708.213.045,00	100	5.298.509.168,00	100	4.926.509.168,00	100	5.383.509.168,00	100	5.033.509.168,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			250.691.900,00		9.925.000.000,00		7.626.304.050,00		7.606.304.050,00		7.606.304.050,00		7.626.304.050,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	250.691.900,00	100	9.925.000.000,00	100	7.626.304.050,00	100	7.606.304.050,00	100	7.606.304.050,00	100	7.626.304.050,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	85		86		87		88		89		90		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			80.980.600,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	100	80.980.600,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN			12.055.271.358,00		11.371.734.853,00		10.088.975.968,00		10.629.370.004,00		11.011.568.381,00		11.424.097.527,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.129.301.859,00		8.305.310.000,00		7.456.677.500,00		7.557.841.688,00		7.657.090.234,00		7.766.568.265,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	8.129.301.859,00	100	8.305.310.000,00	100	7.456.677.500,00	100	7.557.841.688,00	100	7.657.090.234,00	100	7.766.568.265,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			2.829.473.500,00		2.899.029.550,00		2.348.163.635,00		2.758.979.999,00		3.010.674.998,00		3.279.345.799,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Penyusunan produk anggaran yg tertib efisien dan tepat waktu (%)	100	2.829.473.500,00	100	2.899.029.550,00	100	2.348.163.635,00	100	2.758.979.999,00	100	3.010.674.998,00	100	3.279.345.799,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	30		40		40		40		40		40		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	47		40		30		30		30		30		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	20		20		20		20		20		20		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			317.781.100,00		78.912.500,00		86.803.750,00		95.484.125,00		105.032.538,00		115.535.791,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Penyajian laporan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu (Alat)	100	317.781.100,00	0	78.912.500,00	0	86.803.750,00	0	95.484.125,00	0	105.032.538,00	0	115.535.791,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10		10		10		10		10		10		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			778.714.899,00		88.482.803,00		197.331.083,00		217.064.192,00		238.770.611,00		262.647.672,00	
Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	60	778.714.899,00	60	88.482.803,00	60	197.331.083,00	60	217.064.192,00	60	238.770.611,00	60	262.647.672,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	16.28		24.83		26.53		28.25		29.99		31.81		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah (%)	2		2		2		2		2		2		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN			7.363.836.200,00		9.955.337.170,00		9.084.155.389,00		8.236.905.189,00		8.246.905.189,00		8.261.905.189,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.760.603.600,00		9.761.353.320,00		8.088.376.039,00		7.216.125.839,00		7.216.125.839,00		7.216.125.839,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	6.760.603.600,00	100	9.761.353.320,00	100	8.088.376.039,00	100	7.216.125.839,00	100	7.216.125.839,00	100	7.216.125.839,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			603.232.600,00		193.983.850,00		995.779.350,00		1.020.779.350,00		1.030.779.350,00		1.045.779.350,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	6	603.232.600,00	6	193.983.850,00	6	995.779.350,00	6	1.020.779.350,00	6	1.030.779.350,00	6	1.045.779.350,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			972.914.000,00		600.000.000,00		1.200.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			972.914.000,00		600.000.000,00		1.200.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	7.60	972.914.000,00	3.58	600.000.000,00	6.13	1.200.000.000,00	6.13	1.100.000.000,00	6.13	1.100.000.000,00	6.13	1.100.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			103.597.550,00		100.000.000,00		115.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		100.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			103.597.550,00		100.000.000,00		115.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	81.00	103.597.550,00	82.00	100.000.000,00	83.00	115.000.000,00	84.00	100.000.000,00	85.00	115.000.000,00	86.00	100.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	75		76		77		78		79		80		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			5.796.672.161,00		5.500.947.300,00		6.416.525.498,00		6.422.450.249,00		6.492.175.619,00		6.563.644.122,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.233.011.761,00		5.167.115.300,00		5.839.693.498,00		5.845.618.249,00		5.915.343.619,00		5.986.812.122,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	5.233.011.761,00	100	5.167.115.300,00	100	5.839.693.498,00	100	5.845.618.249,00	100	5.915.343.619,00	100	5.986.812.122,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			480.896.000,00		230.087.000,00		454.992.000,00		454.992.000,00		454.992.000,00		454.992.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	85	480.896.000,00	85	230.087.000,00	85	454.992.000,00	85	454.992.000,00	85	454.992.000,00	85	454.992.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			82.764.400,00		103.745.000,00		121.840.000,00		121.840.000,00		121.840.000,00		121.840.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3.035	82.764.400,00	3.035	103.745.000,00	3.035	121.840.000,00	3.035	121.840.000,00	3.035	121.840.000,00	3.035	121.840.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Inspektorat Daerah
	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	3.035		3.035		3.035		3.035		3.035		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Inspektorat Daerah		
7.01 - KECAMATAN			33.694.953.470,00		28.312.877.416,00		36.184.654.952,00		36.847.706.578,00		36.784.534.495,00		37.352.283.109,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.070.610.761,00		21.267.884.156,00		22.418.796.196,00		22.649.847.822,00		22.986.675.739,00		23.129.424.353,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	95	22.070.610.761,00	95	21.267.884.156,00	95	22.418.796.196,00	95	22.649.847.822,00	95	22.986.675.739,00	95	23.129.424.353,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.344.495.423,00		1.766.962.270,00		2.603.124.270,00		2.608.124.270,00		2.618.124.270,00		2.618.124.270,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan publik di lingkup Kecamatan	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur (%)	100	2.344.495.423,00	100	1.766.962.270,00	100	2.603.124.270,00	100	2.608.124.270,00	100	2.618.124.270,00	100	2.618.124.270,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka)	97.86		97.88		97.89		97.90		97.91		97.92		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (%)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			9.259.279.986,00		5.248.530.990,00		10.986.734.486,00		10.988.734.486,00		10.993.734.486,00		10.993.734.486,00	
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur (Angka)	39.99	9259279986	40.00	5.248.530.990,00	40.10	10.986.734.486,00	40.15	10.988.734.486,00	40.20	10.993.734.486,00	40.25	10.993.734.486,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka)	39.50		39.80		40.00		41.00		42.000		43.00		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka)	28		28		28		28		28		28		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			12.643.800,00		11.100.000,00		46.000.000,00		51.000.000,00		56.000.000,00		61.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur (%)	100	12643800	100	11.100.000,00	100	46.000.000,00	100	51.000.000,00	100	56.000.000,00	100	61.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Barat (%)	100	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7.923.500,00		18.400.000,00		130.000.000,00		550.000.000,00		130.000.000,00		550.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur (%)	100	7923500	100	18.400.000,00	100	130.000.000,00	100	550.000.000,00	100	130.000.000,00	100	550.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (%)	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7.857.533.022,00		6.890.996.106,00		10.129.620.476,00		10.787.620.476,00		18.293.674.976,00		24.148.474.976,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.635.761.556,00		4.644.847.390,00		5.626.968.726,00		5.714.968.726,00		7.571.023.226,00		8.354.023.226,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah (%)	100	4.635.761.556,00	100	4.644.847.390,00	100	5.626.968.726,00	100	5.714.968.726,00	100	7.571.023.226,00	100	8.354.023.226,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			635.440.750,00		695.151.750,00		1.722.651.750,00		1.752.651.750,00		1.722.651.750,00		1.772.651.750,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	80	635.440.750,00	80	695.151.750,00	80	1.722.651.750,00	80	1.752.651.750,00	80	1.722.651.750,00	80	1.772.651.750,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			2.333.714.716,00		1.223.154.966,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		8.330.000.000,00		13.020.000.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	2.333.714.716,00	100	1.223.154.966,00	100	2.200.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	8.330.000.000,00	100	13.020.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			0,00		0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		240.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	0	0,00	0	0,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	240.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			0,00		82.250.000,00		125.000.000,00		395.000.000,00		125.000.000,00		310.900.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	0	0,00	100	82.250.000,00	100	125.000.000,00	100	395.000.000,00	100	125.000.000,00	100	310.900.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			252.616.000,00		245.592.000,00		305.000.000,00		575.000.000,00		305.000.000,00		490.900.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	252.616.000,00	100	245.592.000,00	100	305.000.000,00	100	575.000.000,00	100	305.000.000,00	100	490.900.000,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN			579.992.019.272,94		550.295.478.000,00		566.653.387.900,00		586.038.076.779,00		606.522.245.547,00		628.929.824.302,00	

4.2. KINERJA PENYELENGGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja daerah, yang terdiri dari indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah berdasarkan aspek pemerintahan dan indikator kinerja kunci.

A. Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Indikator makro daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030

No	Nama Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81,5	82,4	83,3	84,2	85,1	86
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70
3	Tingkat Pengangguran	%	4,43	3,93	3,42	2,91	2,41	1,90
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,95	7,12	7,31	7,65	6,22
5	PDRB ADHK Per Kapita	Rp.Juta	52,52	54,96	58,15	61,63	65,53	68,69
6	PDRB ADHB Per Kapita	Rp.Juta	87,91	97,81	109,02	120,98	134,05	148,06
7	Gini Rasio	Angka	0,262	0,259	0,244	0,230	0,215	0,201
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89

B. Indikator Kinerja Sasaran Visi

Indikator sasaran visi digunakan untuk mengukur capaian visi yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja sasaran visi ini diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran visi RPJPD tahun 2025-2045 guna menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, sehingga pembangunan daerah tetap terarah dan berkelanjutan. Pencapaian visi pada RPJMD tahun 2025-2030 ini akan menjadi pondasi awal yang mendukung pencapaian visi pembangunan daerah jangka panjang melalui pelaksanaan tiga periode RPJMD selanjutnya.

Indikator kinerja sasaran visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Sasaran Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030

No	Sasaran Visi / Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	7	8	9	10	11
I Peningkatan Pendapatan Per Kapita								
1	PDRB per Kapita ADHB	Rp.Juta	80,80	84,55	89,46	94,82	100,82	105,68
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	9,54	10,73	11,93	12,12	13,32	14,51
II Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang								
1	Tingkat Kemiskinan	%	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70
2	Rasio Gini	Angka	0,262	0,259	0,244	0,230	0,215	0,201
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.15	5.95	7.12	7.31	7.65	6.13
III Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3.38	3.39	3.39	3.340	3.40	3.41
IV Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81.5	82.4	83.3	84.2	85.1	86
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	137,78	140,78	143,78	146,78	149,78	152,78
V Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89

C. Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat diukur dari kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama merupakan turunan dari tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja utama Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Target Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81,5	82,4	83,3	84,2	85,1	86
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,67	15,85	16,02	16,19	16,37	16,54
3	Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	12,16	12,30	12,43	12,57	12,70	12,84
4	Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	%	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	97,88	97,00	97,30	97,50	98,00	98,50
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,17	77,01	77,85	78,69	79,53	80,37
7	Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23
8	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86
9	Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70	71	72	73	74	75
11	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,95	7,12	7,31	7,65	6,22
14	Tingkat Kemiskinan	%	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,43	3,93	3,42	2,91	2,41	1,90
16	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,5	89,23	90	91,25	92,5	94,28
17	Tingkat Inflasi	%	2,8-3,6	2,71-3,56	2,61-3,53	2,51-3,49	2,42-3,46	2,33-3,43
18	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,54	10,73	11,93	12,12	13,32	14,51
19	Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	18,35	18,43	18,5	18,58	18,65	18,73
20	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,94	3,00	3,06	3,11	3,17	3,23
21	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,38	5,6	5,82	6,03	6,15	6,26
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,19	30,34	30,49	30,64	30,79	30,94
23	Nilai Investasi	Milyar	44,75	75	100	42,75	76,5	68,4
24	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (Koefisien Variansi Harga Antar Waktu)	%	8,8	8,74	8,68	8,62	8,56	8,5
25	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	137,78	140,78	143,78	146,78	149,78	152,78
26	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	2.714	2.368	2.023	1.671	1.325	980



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	12,017	12,200	12,389	12,585	12,787	12,997
28	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	5,2	5,26	5,32	5,38	5,44	5,5
29	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan	%	6,49	6,232	5,974	5,716	5,458	5,2
30	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79,72	81,78	83,84	85,9	87,96	90
31	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,38	3,39	3,39	3,40	3,40	3,41
32	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,2	4,22	4,24	4,26	4,28	4,3
33	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,82	97,4	97,7	98,4	98,7	98,9
34	Nilai SAKIP Kota	Angka	66,85	69,48	72,11	74,74	77,37	80
35	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	3,3	3,45	3,59	3,73	3,87	4,00
36	Indeks Inovasi Daerah	Angka	82,22 (Sangat inovatif)	82,81 (Sangat inovatif)	84,41 (Sangat inovatif)	86 (Sangat inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat inovatif)
37	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Angka	78,5	79	79,5	80	80,5	81
38	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	73	74	75	76	77	78
39	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	68,4	73,5	77,6	82,1	84,4	85,5
40	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	2	2,3	2,5	2,7	3	3,2
41	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	86,4	87,2	87,7	88,4	85,8	86,9
42	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,29	0,31	0,33	0,36	0,38	0,4
43	Persentase kenaikan PAD	%	9	10	11	12	13	15
44	Indeks Rasa Aman	Angka	86,2	86,39	89,09	91,78	91,88	92
45	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75
46	Indeks Harmoni	Angka	70	72	74	76	78	80
47	Angka PPKS	Angka	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5
48	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	88	90	93	95	98	100
49	Persentase pemajuan objek kebudayaan	%	66,60- 67,07	67,22- 67,72	67,84- 68,38	68,46- 69,03	69,08- 69,69	69,70- 70,34
50	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	95,6	95,7	95,8	95,9	96	96,1
51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89
52	IKLI KePUan	Angka	96,81	96,91	97,01	97,11	97,21	97,31
53	IKLI Perkim	Angka	96,92	96,95	97,15	97,35	97,55	97,75
54	IKLI Perhubungan	Angka	96,83	96,9	97,02	97,09	97,16	97,23
55	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	73,63	75,97	78,32	80,66	83,01	85,35

No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Indeks Kualitas Udara	Angka	78,68	78,78	78,88	78,98	79,08	79,18
57	Indeks Kualitas Air	Angka	72,47	72,62	72,77	72,92	73,07	73,22
58	Indeks Kualitas Lahan	Angka	69,51	69,58	69,65	69,71	69,78	69,85
59	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38

D. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah (IKD) merupakan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Daerah ini adalah Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD 2025-2045 yang dibagi ke dalam empat aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Selain itu, IKD juga terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator lainnya yang dianggap relevan untuk mengukur pencapaian pelaksanaan pembangunan.

IKD ini juga dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing program pada tiap-tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap perangkat daerah dapat mengukur pencapaian program yang dilaksanakan dan seberapa besar kontribusinya dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan.



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,5	89,23	90	91,25	92,5	94,28
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,49	6,23	5,97	5,72	5,46	5,2
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1.529,00	1.674,80	1.820,60	1.966,40	2.112,20	2.258,00
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	27,55	30,65	33,75	36,85	39,95	43,05
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	24,59	29,27	33,81	38,26	42,62	36,5.
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	15	19,3	23,6	27,9	32,2	36,5
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,22	1,21	1,19	1,18	1,16	1,15
10	Rasio Penduduk	%	101,54	101,55	101,56	101,57	101,58	101,59
11	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	73,63	75,97	78,32	80,66	83,01	85,35
12	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,210	0,212	0,214	0,216	0,218	0,22
13	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	%	65	66,75	68,50	70,25	72	73,8
14	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	95,6	95,7	95,8	95,9	96	96,1



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
15	IKLI KePUan	Angka	96,81	96,91	97,01	97,11	97,21	97,31
16	IKLI Perkim	Angka	96,92	96,95	97,15	97,35	97,55	97,75
17	IKLI Perhubungan	Angka	96,83	96,9	97,02	97,09	97,16	97,23
18	Indeks Kualitas Udara	Angka	78,68	78,78	78,88	78,98	79,08	79,18
19	Indeks Kualitas Air	Angka	72,47	72,62	72,77	72,92	73,07	73,22
20	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	69,51	69,58	69,65	69,71	69,78	69,85
21	Indeks Resiko Bencana	Angka	111,92	111,91 - 110,64	110,63 - 109,36	109,35 - 108,08	108,07 - 106,8	106,79 - 105,52
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,95	7,12	7,31	7,65	6,22
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	80,80	84,55	89,46	94,82	100,82	105,68
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,43	3,93	3,42	2,91	2,41	1,90
5	Indeks Gini	Angka	0,266	0,259	0,2445	0,23	0,2155	0,201
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81,5	82,4	83,3	84,2	85,1	86
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,17	77,01	77,85	78,69	79,53	80,37
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.48*	0.50	0.52	0.60	0.65	0.8
9	Prevalensi Stunting	%	13,7	12,45	11,2	9,95	8,7	7,50
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,16	12,30	12,43	12,57	12,70	12,84
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,67	15,85	16,02	16,19	16,37	16,54



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
12	Angka Literasi/Numerasi SD	Angka	89.50 dan 79	89.77 dan 79.57	90 dan 80	90.34 dan 80.37	90,57 dan 80.77	91.34 dan 81
13	Angka Literasi/Numerasi SMP	Angka	91.30 dan 86.60	91.50 dan 86.75	91.70 dan 87	91.90 dan 87.30	92 dan 86.50	92.10 dan 86.75
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	97,88	97	97,3	97,5	98	98,5
15	Indeks Literasi Digital	Angka	3,5	3,52	3,55	3,56	3,6	3,7
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	66,60-67,07	67,22-67,72	67,84-68,38	68,46-69,03	69,08-69,69	69,70-70,34
19	Indeks Perlindungan Anak	Angka	70	71	72	73	74	75
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,078	0,073	0,069	0,065	0,061	0,058
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,77	55,87	55,97	56,07	56,17	56,27
23	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
24	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	100	100	100	100	100	100
25	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	90	90	90	90	90



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
26	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Angka						
	- Literasi membaca	Angka	84,7	84,8	84,9	85	85,1	85,2
	- Numerasi (matematika)	Angka	67,97	68,43	68,89	69,35	69,81	70,27
27	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	50,43	50,63	50,83	51,03	51,23	51,43
28	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06
29	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	82,36	82,992	83,624	84,256	84,888	85,52
30	Angka PPKS	Angka	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5
31	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100
32	Indeks Harmoni	Angka	70	72	74	76	78	80
33	Indeks Rasa Aman	Angka	86,04	86,2	86,39	89,09	91,78	91,88
34	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	85	88	90	93	95	98
35	Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	%	100	100	100	100	100	100
36	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	2.714	2.368	2.023	1.671	1.325	980
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	48,87	49,48	50,09	50,70	51,31	51,32
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,54	10,734	11,928	12,122	13,316	14,51



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,94	3	3,06	3,11	3,17	3,23
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,38	5,6	5,82	6,03	6,15	6,26
5	Rasio Kewirausahaan	%	3,65	3,69	3,73	3,76	3,80	3,84
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,49	68,65	69,81	70,97	72,13	73,29
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	82,22 (Sangat inovatif)	82,81 (Sangat inovatif)	84,41 (Sangat inovatif)	86 (Sangat inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat inovatif)
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,19	30,34	30,49	30,64	30,79	30,94
9	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	4,5	47	4,9	5	5,2	5,5
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	95,6	95,7	95,8	95,9	96	96,1
11	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	76,6	79,1	81,6	84,1	85,35	86,54
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,4
13	Persentase kenaikan PAD	%	9	10	11	12	13	15
14	Tingkat Inflasi	%	2,8-3,6	2,71-3,56	2,61-3,53	2,51-3,49	2,42-3,46	2,33-3,43
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	15	15,12	15,24	15,36	15,47	15,58
16	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	74,71	75,19	75,67	76,14	76,62	77,1
17	Jumlah tamu wisatawan manca negara	ribu orang	152	156,6	161,2	165,8	170,4	175
18	Proporsi jumlah IKM non pertanian	%	1,85	1,87	1,89	1,91	1,93	1,95



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
19	Proporsi jumlah IKM	%	3,61	3,69	3,77	3,84	3,92	4
20	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,44	2,52	2,6	2,7	2,75	2,83
21	ROA BUMD	%	1,75	2,128	2,506	2,884	3,262	3,63
22	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	56,37	57,68	59	60,3	61,61	62,96
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,35- 57,73	56,66- 58,27	56,96-58,81	57,27-59,35	57,57-59,89	57,88-60,43
24	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	5,2	5,26	5,32	5,38	5,44	5,5
25	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	56,14	57,334	58,528	59,722	60,92	62,11
26	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	8,8	8,74	8,68	8,62	8,56	8,5
27	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi	%	1,43	1,432	1,434	1,436	1,438	1,44
28	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	2,88	5,58	8,28	10,98	13,68	16,38
29	Nilai transaksi saham per kapita per Kab/Kota	Rp. Juta	12.835.752	15.000.000	17.000.000	20.000.000	23.000.000	25.784.262
30	Total Kredit/PDRB	%	20,59	22,86	25,13	27,41	29,68	31,96
31	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	4,3	4,32	4,34	4,36	4,38	4,4
32	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	137,78	140,78	143,78	146,78	149,78	152,78
33	Rasio Daya Saing Olahraga	%	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2
34	Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23
35	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
36	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,95	7,12	7,31	7,65	6,22
37	Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	11.643	11.771	11.900	12.029	12.157	12.286
38	Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	18,35	18,43	18,5	18,58	18,65	18,73
39	Nilai Investasi	Milyar	44,75	75	100	42,75	76,5	68,4
40	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/orang	118,38	120,01	121,64	123,27	124,9	126,55
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,82	97,4	97,7	98,4	98,7	98,9
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,18	3,26	3,35	3,44	3,54	3,65
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,2	4,22	4,24	4,26	4,28	4,3
4	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif	Angka	77,35 (sedang)	77,482	77,614	77,746	77,878	78,01 (sedang)
6	Indeks Rasa Aman	Angka	86,2	86,39	89,09	91,78	91,88	92
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,89	3,9	3,91	3,92	3,93	3,94
8	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Angka	78,5	79	79,5	80	80,5	81
9	Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
10	Angka kriminalitas per 1000 penduduk	kasus	1,8	1,78	1,77	1,75	1,73	1,7



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase penurunan pelanggaran trantibum	%	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	3,38	3,386	3,392	3,398	3,404	3,41
13	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,38	3,386	3,392	3,398	3,404	3,41
14	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	73	74	75	76	77	78
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	68,4	73,5	77,6	82,1	84,4	85,5
16	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	3,3	3,45	3,59	3,73	3,87	4,00
17	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	86,4	87,2	87,7	88,4	85,8	86,9
18	Nilai SAKIP Kota	Angka	66,85	69,48	72,11	74,74	77,37	80
19	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	2	2,3	2,5	2,7	3	3,2
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,72	5,73	5,74	5,75	5,75	5,76
21	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
I PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	104,00	85,54	87	90	92	95
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	104,78	104,98	105	106	107	108
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	154,84	155,04	156	157	158	160



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	99,7	99,7	100	100	100	100
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15,67	15,85	16,02	16,19	16,37	16,54
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12,16	12,30	12,43	12,57	12,70	12,84
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	61	62	63	64	65	67
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99,7	99,7	100	100	100	100
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97,5	97,5	100	100	100	100
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	49	50	52	55	58	60
12	APK SD sederajat	%	106,1	106	107	108	110	112
13	APK SMP sederajat	%	107	107	107	107	107	107
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	77.37 / 76.38 / 61.71	78.37 / 77.38 / 62.71	79.37 / 78.38 / 63.71	80.37 / 79.38 / 64.71	81.37 / 80.38 / 65.71	82.37 / 81.38 / 66.71
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	73.55 / 74.81 / 61	74.15 / 75.71 / 62.82	75.15 / 76.71 / 64.82	77.15 / 78.71 / 66.82	80.15 / 80.71 / 68.82	81.15 / 81.71 / 69.82
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	89.64 dan 78.77	90 dan 79	91 dan 80	92 dan 81	93 dan 82	94 dan 83
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	92.09 dan 87.45	93 dan 88	93.5 dan 88.45	94 dan 87	94.5 dan 87.5	95 dan 88
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	59	65	70	80	90	92
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	55	60	70	80	90	92



20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	60	60	70	80	90	92

No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	65	70	80	90	100	100
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	55	65	70	80	90	92
23	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	18,89	18,91	18,4	18,95	18,97	18,97
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	12,72	12,92	12,94	12,96	12,98	12,98
II KESEHATAN								
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
13	Prevalensi Stunting	%	17,08	15,17	13,25	11,33	9,42	7,50
14	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.48*	0.50	0.52	0.60	0.65	0.8
15	Persentase UHC	%	100	100	100	100	100	100
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	41	42	43	44	45	46
17	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	55	60	65	70	75	80
18	Insiden tuberkulosis	%	254	220	190	171	154	143
19	Angka Kematian Balita	per 1000	0,6	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2
20	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21	Cakupan Imunisasi Dasar lengkap	Angka	58,6	65,9	73,2	80,5	87,8	95
22	Persentase cakupan penerima PKG	%	50	55	60	65	70	75
23	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	41	42	43	44	45	46
24	Persentase Diabetes dalam pengendalian	%	31	32	33	34	35	36
25	Persentase kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	31,25	37,5	43,75	50	56,25	62,5
26	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	%	22,1	22,4	22,7	23	23,2	23,4
27	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	per 1000	7,6	7,7	7,9	8	8,2	8,3



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
28	Persentase Puskesmas yang memenuhi rasio Puskesmas terhadap populasi	%	100	100	100	100	100	100
29	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	60	60	80	80	100	100
30	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna	%	60	60	60	80	80	80
31	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	96,3	96,63	96,96	97,29	97,62	98
32	Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif	%	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7
33	Persentase pengawasan air minum rumah tangga	%	20	22	24	26	28	30
34	Persentase sarana pengolahan pangan memenuhi syarat	%	25	30	35	40	45	50
35	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	65	70	75	80	85	90
III PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88,85	89,15	89,40	89,75	90,25	90,60
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	96,5	97	97,5	98	98,5	100
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,5	96	96,5	97	98	100
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	46,39	46,67	47	48	49	50
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	90,737	92,237	92,937	93,097	94,4	95
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	21	25	30	35	40	45



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	90	92	94	96	98	100
8	IKLI KePUan	Angka	96,81	96,91	97,01	97,11	97,21	97,31
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	83,5	84	84,5	85	85,5	86
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	79	80	81	82	83	84
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	3	3	3	3	3	3
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	40	50	55	60	65	70
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	80,46	91,96	83,46	84,96	86,46	87,8
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	62	65	67	69	70	75
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	94	94,5	95	95,5	96	96,5
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	100	100	100	100	100	100
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	81,31	82,60	83,89	85,34	86,95	88,55
18	Luas kawasan kumuh	%	2,13	2,12	2,11	2,1	2,09	2,08
IV PERUMAHAN RAKYAT								
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	95,74	100	100	100	100	100
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,74	2,1	2	1,98	1,97	1,95
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100
4	IKLI Perkim	Angka	96,92	96,95	97,15	97,35	97,55	97,75
5	Persentase permukiman layak huni	%	99,52	100	100	100	100	100



6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
V KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100	100	100	100
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	ribu orang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	ribu orang	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
11	Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
12	Respontime tanggap darurat	Menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit
VI SOSIAL								
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100



2	Angka PPKS	Angka	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5

No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
4	Angka PPKS	Angka	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5
5	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase PPKS yang tertangani	%	98	99	100	100	100	100
7	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
B URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
VII TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	0,08	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	137,78	140,78	143,78	146,78	149,78	152,78
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	58,44	58,45	58,46	58,47	58,49	58,5
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	48,00	49,00	50	51	52	53
6	Tingkat Pengangguran	%	4,43	3,93	3,42	2,91	2,41	1,90
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,49	68,65	69,81	70,97	72,13	73,29



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	2,78	3	3,2	3,5	3,8	4
VIII PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26,17	26,07	26	25,97	25,9	25,89
4	IDG	Angka	73,05	75,06	76	77	78	79
5	Predikat KLA	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20	20	20	20	20
IX PANGAN								
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	33.478	46.522	48	50	52	55
2	LPE Sektor Pertanian	%	1,15	1,2	3,15	3,5	4	4,5
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	86,2	86,3	86,4	86,5	86,7	86,8
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2400	2400	2400	2400	2400	2400
X PERTANAHAN								
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	85	87	88	89	90	91



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
XI LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89
2	Indek Kualitas Udara	Angka	78,68	78,78	78,88	78,98	79,08	79,18
3	Indek Kualitas Air	Angka	72,47	72,62	72,77	72,92	73,07	73,22
4	Indek Kualitas Lahan	Angka	69,51	69,58	69,65	69,71	69,78	69,85
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98	98	98	98	98	98
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	60	65	67	70	72	75
7	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	90	90	90	90	90	90
8	Persentase luas RTH Publik	%	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
9	Persentase pengelolaan sampah	%	98	98	98	98	98	98
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	60	65	70	75	80	85
XII ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP elektronik	%	97,85	98,05	99	100	100	100
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	98,64	98,84	99	100	100	100
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
XIII PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	64	65	66	67	68	70
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	20,41	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	72,5	75	77	78	80	82
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,3	2,25	2,43	2,43	2,43	2,43
XIII PERHUBUNGAN								
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	Angka	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
2	Rasio Konektivitas Kota	%	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77
3	Indeks Kualitas Layanan Insfrastruktur Perhubungan	Angka	96,83	96,9	97,02	97,09	97,16	97,23
4	Ratio akseptor KB	%	70	73	75	77	78	80



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
XIV KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	80	82	85	87	90	90
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	44,5	45	46	47	48	50
4	Indeks domain layanan SPBE	Angka	2,95	3,00	3,1	3,2	3,3	3,4
5	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,18	3,26	3,35	3,44	3,54	3,65
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	89,42	89,92	90	91	92	93
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100
XV KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	78,07	78,47	79	80	81	82
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3
3	Persentase koperasi aktif	%	75,81	76,19	77,00	78,00	79,00	80,00



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	40	45	50	55	60	65
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada	%	26,31	31,57	32	33	34	35
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
7	Persentase UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha	%	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	8,80	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6
XVI PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	42	45	47	49	52	53,7
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	24	26	28	30	32	35
3	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	93	95	96	97	98	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	98	98,5	98,75	99	99,5	99,75
XVII KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86
3	Rasio daya saing keolahragaan	%	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	10 prestasi nasional 34 prestasi provinsi	11 prestasi nasional 35 prestasi provinsi	12 prestasi nasional 36 prestasi provinsi	13 prestasi nasional 37 prestasi provinsi	14 prestasi nasional 38 prestasi provinsi	15 prestasi nasional 40 prestasi provinsi
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi	4 prestasi nasional 6 prestasi provinsi	5 prestasi nasional 7 prestasi provinsi	6 prestasi nasional 8 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 9 prestasi provinsi
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
XVIII STATISTIK								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	3,00	3,20	3,3	3,4	3,5	3,6
XIX PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40	43	45	47	49	50
XX KEBUDAYAAN								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	68	70	72	75	77	80
XXI PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	73	74	75	76	77	78
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	97,88	97	97,3	97,5	98	98,5



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
XXII KEARSIPAN								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	61,85	62,35	63	64	65	66
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	70,33	70,83	71	72	73	75
3	Nilai LAKE	Angka	91,7	92	92,5	93	93,5	94
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	83,5	84	84,5	85	85,5	86
C URUSAN PILIHAN								
XXIII KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	752	753	754	755	756	757
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
XXIV PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4,58	4,59	4,6	4,7	4,8	5
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50,46	50,47	50,48	50,49	50,5	5,55
3	Tingkat hunian akomodasi	%	35,00	37,00	39,00	40,00	43,00	45,00
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,90	2,91	2,92	2,95	2,97	3,00
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,44	2,45	2,46	2,47	2,48	2,5
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	8,33	8,57	8,77	9	9,39	10
7	PAD sektor pariwisata	juta rupiah	350 juta	400 juta	500 juta	600 juta	700 juta	800 juta
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	12	14	15	16	17	18



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
XXV PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	6,60	6,70	6,8	6,9	7	7,1
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	9,00	9,50	10	10,5	11	11,5
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	80	85	90	95	100	100
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	6,6	6,7	6,8	6,9	7	7,01
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter / ekor/ hari	11,85	11,90	11,95	12	12,1	12,2
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	50	60	70	80	90	100
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	9	10	11	12	13	15
XXVI PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	37,00	40,00	42	45	47	50
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	65,00	70,00	75	80	85	90
3	LPE sektor Perdagangan	%	5,33	5,86	6	6,25	6,4	6,5
XXVII PERINDUSTRIAN								
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	27	28	29	30	31	32



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	65	70	75	80	85	90
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	50	55	60	65	70	75
5	Persentase pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	%	10	15	20	25	30	35
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	20	23	25	27	30	32
7	Kenaikan volume perdagangan	%	35	40	45	50	55	60
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	35	40	45	50	55	60
D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
XXVIII SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD								
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
2	Nilai LPPD	Angka	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	93	95	97	100
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100	100	100	100	100
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	90	90	90	90
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	96,00	96,50	97	98	99	100
7	Nilai RB	Angka	79,72	81,78	83,84	85,9	87,96	90
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Angka	64,86	65,74	66	66,5	67	67,5
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	88	90	93	95	98	100
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	96	96,5	97	98	99	100
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	94,7	95	95,5	96	96,5	97
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39,5	39,8	40	40,1	40,2	40,3
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	Angka	97,82	97,83	98	98,5	99	99,5
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39,5	39,8	40	40,5	41	41,5
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	97,9	98	98	98	98	98
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	90	90	90	90	90	90
19	Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	%	77	80	82	85	87	90
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	94,5	95	95,5	96	96,5	97
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	Angka	94,5	95	95,5	96	96,5	97
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	12,82	12,83	12,84	12,85	12,86	12,87
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	69	70	71	72	73	74
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38	39	40	41	42	43
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	53	55	57	59	60	63



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
E UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
XXIX PERENCANAAN								
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	73	74	75	76	77	78
2	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	Angka	22,95	22,97	23	23,5	24	24,5
XXX KEUANGAN								
1	Rasio PAD	%	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	20
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	89,77	89,67	89,57	89,47	89,37	89,27
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	68,4	73,5	77,6	82,1	84,4	85,5
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8,902	8,802	8,702	8,602	8,502	8,402
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7,10	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
7	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	100
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,93	3,91	3,9	3,89	3,88	3,87



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
E UNSUR PENGAWASAN								
XXXI INSPEKTORAT								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	Level 3	Level 3	4 (Level 4)	4 (Level 4)	4 (Level 4)	4 (Level 4)
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	Level 3	Level 3	4 (Level 4)	4 (Level 4)	4 (Level 4)	4 (Level 4)
3	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%	97	98	99	100	100	100
4	Indeks Kualitas Pengawasan	Angka	3	4	4	4	4	4
XXXII KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,45	20,46	20,47	20,48	20,49	20,50
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,19	20,20	20,21	20,22	20,23	20,24
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,92	22,9	22,8	22,7	22,6	22,5
5	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	86,4	87,2	87,7	88,4	85,8	86,9
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Sistem Merit	Angka	325	330	335	340	345	350



No	Indikator	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
XXXIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	82,22 (Sangat inovatif)	82,81 (Sangat inovatif)	84,41 (Sangat inovatif)	86 (Sangat inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat inovatif)
F UNSUR KEWILAYAHAN								
XXXIV KECAMATAN								
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	27	28	29	30	31	32
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	39,5	39,8	40	41	42	43
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
G UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
XXXV KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	83	85	90	93	95	100
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan RPJMD.

1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjamin tercapainya visi dan misi daerah, memastikan keselarasan program dan kegiatan dengan perencanaan yang lebih tinggi (RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJPD), serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 meliputi program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD, dengan tujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, dan memastikan bahwa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program yang tercantum dalam RPJMD, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengendalian pelaksanaan RPJMD memiliki peran dalam mengidentifikasi permasalahan dan penyimpangan sejak dini, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.



Identifikasi permasalahan ini menjadi penting karena merupakan langkahantisipasi agar kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan tepat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, pengendalian pelaksanaan RPJMD diharapkan dapat menghasilkan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam periode RPJMD tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Tindakan konstruktif, untuk penyesuaian operasional tahunan guna memastikan pelaksanaan intervensi pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana. Penyesuaian operasional ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi percepatan pelaksanaan dan penyesuaian teknis lainnya.
- b. Tindakan korektif, dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode RPJMD untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD. Penyesuaian kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMD ini difokuskan pada perencanaan kebijakan antar tahun yang meliputi dan tidak terbatas pada program prioritas, penyesuaian strategi dan arah kebijakan, sasaran, serta tata kelola pelaksanaan (regulasi dan kelembagaan).

Tindak lanjut pengendalian RPJMD yang ditentukan dari hasil pemantauan dan evaluasi menggambarkan keterkaitan antar aktivitas pemantauan, evaluasi dan pengendalian sepanjang periode jangka menengah yaitu :

- a. Pemantauan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, yang mencakup pemantauan perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pemantauan ini dilakukan secara rutin dan berkala sesuai kebutuhan selama periode pelaksanaan RPJMD melalui pemantauan pelaksanaan RKPD. Hasil pemantauan ini akan menjadi dasar pengendalian operasional pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
- b. Evaluasi saat pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, mencakup evaluasi tahunan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan evaluasi kinerja daerah perangkat daerah serta kerangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta evaluasi paruh waktu RPJMD yang akan memberikan feedback bagi penyesuaian kebijakan RPJMD.

2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir RPJMD ini dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran



pembangunan daerah, serta untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode 5 tahun.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran, indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah.

Evaluasi ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMD terakhir pada triwulan pertama.

Hasil evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam kerangka RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045.

5.2 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah. Risiko itu sendiri merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengelolaan atau manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menanggapi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di suatu daerah, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam sistem pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam satu masa pemerintahan Kepala Daerah. Sedangkan tujuan pada



tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Oleh karena itu, tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Mengingat pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah bisa saja bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program prioritas pembangunan seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis dan terintegrasi. Untuk mengelola risiko program prioritas secara kolaboratif, sistematis dan terintegrasi, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Penerapan manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan efektivitas kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Salah satu upaya penerapan manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pengendalian tersebut merupakan bagian integral dari manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses manajemen risiko tidak hanya mencakup identifikasi dan penilaian risiko, tetapi juga mencakup langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko.

Pengendalian yang dilaksanakan dalam proses manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pengendalian perencanaan dan tahapan pengendalian terhadap pelaksanaan.

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup :

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan, yang meliputi konsistensi perumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan, termasuk konsistensi antar dokumen RPJPD



dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur.
- c. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, mencakup :

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah, maka manajemen risiko sudah harus diterapkan sejak penyusunan dokumen perencanaan, yang didukung dengan ketersediaan regulasi, untuk menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengelolaan risiko dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Panjang

Pemerintah Kota Padang Panjang telah berkomitmen melaksanakan Kebijakan Nasional terkait Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut di tingkat daerah, maka ditetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Daerah, yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan SDI di Kota Padang Panjang.

Penyelenggaraan Satu Data di Kota Padang Panjang diawali dengan menentukan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Statistik Sektor Kota Padang Panjang oleh Sekretariat SDI, dilanjutkan dengan melaksanakan perencanaan data, dan melakukan pengajuan pengesahan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Daftar Data. Produsen Data kemudian melaksanakan

pengumpulan data seiring dengan Pembina Data melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan Statistik Sektoral. Selanjutnya Walidata melaksanakan pemeriksaan data (kesesuaian data Statistik Sektoral terhadap Prinsip Satu Data). Jika tidak sesuai, maka Produsen Data kembali melaksanakan pengumpulan data. Jika sesuai, maka Walidata melaksanakan pengolahan dan analisis data. Produsen data melaporkan hasil pengolahan dan analisis data ke Walidata. Walidata kemudian mengelola hasil pengumpulan data, pengolah dan menganalisis untuk diintegrasikan ke Portal Satu Data Padang Panjang, serta melakukan pengajuan pengesahan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang penyebarluasan. Diakhiri dengan melaksanakan penyebarluasan data oleh Produsen Data dan Walidata.

Penyelenggaraan Satu Data di Kota Padang Panjang bertujuan agar menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi. Pelaksanaan untuk mendukung terwujudnya transformasi digital pemerintahan Daerah dan pelayanan publik yang berbasis data.

5.3.1 Komponen Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Padang Panjang

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2023, pelaksanaan SDI di Padang Panjang melibatkan empat komponen utama yaitu :

- a. Pembina Data
 - Pembina Data Statistik yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang; dan
 - Pembina Data Geospasial: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.
- b. Walidata

Penanggung Jawab Walidata yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang. Yang memiliki tugas :

 - Melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data dengan prinsip SDI.
 - Menyebarluaskan data dan Metadata melalui Portal Satu Data Padang Panjang.
 - Membantu pembinaan kepada Produsen Data.
- c. Produsen Data

Penanggung jawab: Kepala OPD/Instansi penghasil data. Dengan tugas sebagai berikut:

 - Menghasilkan data sektoral sesuai prinsip SDI.
 - Menyampaikan data dan Metadata kepada Walidata.
 - Memberikan masukan terkait standar data dan interoperabilitas.
- d. Sekretariat SDI



Merupakan perwakilan dari unsur Pembina Data, Walidata dan Forum Satu Data yang memiliki tugas;

- Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Kota Padang Panjang;
- Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Kota Padang Panjang;
- Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Kota Padang Panjang;

5.3.2 Forum Satu Data Daerah Kota Padang Panjang

Forum Satu Data merupakan tahapan dimana, proses penetapan Daftar Data dan Metadata Kota Padang Panjang dan diketahui oleh setiap Produsen Data bersama Wali Kota sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 239 tentang Forum Satu Data Kota Padang Panjang. Forum ini beranggotakan Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data, dengan Kepala Bappeda sebagai Koordinator, dan dibantu oleh Sekretariat SDI yang sebelumnya telah ditetapkan. Forum Satu Data memiliki fungsi :

- a. Sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaksana SDI
- b. Memfasilitasi perumusan daftar data, evaluasi kinerja SDI, dan fasilitasi teknis dalam verifikasi dan validasi data.

5.3.3 Sasaran Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Padang Panjang

- a. Terwujudnya integrasi dan konsistensi data sektoral antar Perangkat Daerah.
- b. Menghindari duplikasi data dan mempercepat proses perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan akses dan pemanfaatan data oleh publik melalui Portal Satu Data.
- d. Menjamin interoperabilitas sistem data, metadata, dan kode referensi.
- e. Memenuhi prinsip keterbukaan informasi, namun tetap menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan.
- f. Menjadi fondasi menuju pengembangan smart city berbasis data di Kota Padang Panjang.

Tata Kelola Satu Data Indonesia di Kota Padang Panjang menjadi instrumen strategis untuk membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang efisien, partisipatif, dan akuntabel. Melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah, dukungan teknis dari BPS, serta integrasi data yang berkelanjutan, kebijakan ini memperkuat tata kelola informasi publik dan memberikan landasan kuat untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

LAMPIRAN 1

METADATA RPJMD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA MAKRO RPJMD KOTA PADANG PANJANG

1. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan}$ = Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$ = Indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ = Indeks pengeluaran dimana $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ AHH = Angka Harapan Hidup $I_{pendidikan} = \frac{\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} + \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}}{2}$ RLS = Rata-rata lama sekolah HLS = Harapan lama sekolah $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{max}) - \ln(PPP_{min})}$ PPP = Paritas daya beli
Interpretasi	PM dihitung menggunakan rata-rata ukur (geometrik) dalam melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, Dimana IPM ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : - Kelompok “sangat tinggi” $IPM \geq 80$ - Kelompok “tinggi” $70 \leq IPM < 80$



	c. Kelompok “sedang” $60 \leq \text{IPM} < 70$ Kelompok “rendah” $\text{IPM} < 60$
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Setiap tahun

2. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : α = 0 z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. n = Jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$\% TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ Keterangan:



	TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)
	PP = Jumlah pengangguran (orang)
	PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

4. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB_{(k) t}}{PDRB_{(k) t-1}} \times 100\%$ Keterangan : K = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. PDRB ADHK Per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRP \text{ Per kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHK}}{\text{populasi}}$ Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang



	ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

6. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ADHB (Rp Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRP Per kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{populasi}}$ Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

7. Rasio Gini (Indeks)

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Keterangan : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari



	suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i> . Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali dalam setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).																		
Rumus Perhitungan	$IKLH \text{ Dengan Ekosistem Gambut} = (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,104 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,428 \times IKAL)$ $IKLH \text{ Tanpa Ekosistem Gambut} = (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ $IKLH \text{ Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	NO	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
NO	Kategori	Angka Rentang																	
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																		

INDIKATOR SASARAN VISI DALAM RPJMD KOTA PADANG PANJANG

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ADHB (Rp Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas



	dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRP Per kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{populasi}}$ Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (\%)} = \frac{\text{Proporsi PDRB Sektro Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

3. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : α = 0 z = Garis kemiskinan



	y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. n = Jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

4. Rasio Gini (Indeks)

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum^n (p_i - p_i)(Y_i - Y_i)$ Keterangan : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 4. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 5. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 6. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali dalam setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

5. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)



Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB_{(k) t}}{PDRB_{(k) t-1}} \times 100\%$ Keterangan : K = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan nilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rumus Perhitungan	$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ Keterangan : KPPD = Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah CKM = Capaian kinerja makro CKUP = Capaian kinerja urusan pemerintahan PKM = Perubahan kinerja makro
Interpretasi	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari capaian kinerja makro, urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu : a. Nilai kinerja 1,00 – 1,80 menandakan kinerja sangat rendah b. Nilai kinerja 1,81 – 2,60 menandakan kinerja rendah c. Nilai kinerja 2,61 – 3,40 menandakan kinerja sedang d. Nilai kinerja 3,41 – 4,20 menandakan kinerja tinggi e. Nilai kinerja 4,21 – 5,00 menandakan kinerja sangat tinggi
Sumber Data	Tim Daerah Provinsi yang ditugaskan Gubernur
Frekuensi	Setiap tahun

7. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak
Rumus Perhitungan	$IPM = \frac{1}{3} \left(\frac{UMR}{UMR_{max}} + \frac{PK}{PK_{max}} + \frac{IK}{IK_{max}} \right)$



	$\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$ Keterangan : $I_{kesehatan}$ = Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$ = Indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ = Indeks pengeluaran dimana $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ AHH = Angka Harapan Hidup $I_{pendidikan} = \frac{\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} + \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}}{2}$ RLS = Rata-rata lama sekolah HLS = Harapan lama sekolah $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP_{max}) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{max}) - \ln(PPP_{min})}$ PPP = Paritas daya beli
Interpretasi	PM dihitung menggunakan rata-rata ukur (geometrik) dalam melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, Dimana IPM ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : d. Kelompok “sangat tinggi” $IPM \geq 80$ e. Kelompok “tinggi” $70 \leq IPM < 80$ f. Kelompok “sedang” $60 \leq IPM < 70$ Kelompok “rendah” $IPM < 60$
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Setiap tahun

8. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB}{\text{Penduduk yang bekerja}}$
Interpretasi	- Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. - Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang



	bekerja. 3. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).																		
Rumus Perhitungan	<i>IKLH Dengan Ekosistem Gambut</i> $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,104 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,428 \times IKAL)$ <i>IKLH Tanpa Ekosistem Gambut</i> $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ <i>IKLH Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut</i> $= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	NO	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
NO	Kategori	Angka Rentang																	
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																		

INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD KOTA PADANG PANJANG

INDIKATOR TUJUAN RPJMD KOTA PADANG PANJANG

1. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak
Rumus Perhitungan	$IPM =$ _____



	$\sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$ Keterangan : $I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks kesehatan $I_{\text{pendidikan}}$ = Indeks pendidikan $I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks pengeluaran dimana $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ $AHH_{\max}$ $AHH_{\min}$ AHH = Angka Harapan Hidup $I_{\text{pendidikan}} = \frac{\frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} + \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}}{2}$ RLS = Rata-rata lama sekolah HLS = Harapan lama sekolah $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(PPP_{\max}) - \ln(PPP_{\min})}{\ln(PPP_{\max}) - \ln(PPP_{\min})}$ PPP = Paritas daya beli
Interpretasi	PM dihitung menggunakan rata-rata ukur (geometrik) dalam melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, Dimana IPM ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : g. Kelompok “sangat tinggi” $IPM \geq 80$ h. Kelompok “tinggi” $70 \leq IPM < 80$ i. Kelompok “sedang” $60 \leq IPM < 70$ Kelompok “rendah” $IPM < 60$
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Setiap tahun

2. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB_{(k) t}}{PDRB_{(k) t-1}} \times 100\%$ Keterangan : K = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)



	t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : α = 0 z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. n = Jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

4. Pengeluaran Perkapita

5. Indeks Reformasi Birokrasi

6. Indeks Rasa Aman

7. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Definisi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan diukur melalui ketersediaan fasilitas, kondisi fasilitas, kemanfaatan dari fasilitas layanan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat yang diukur melalui isian kuesioner survey oleh masyarakat/responden
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.



Sumber Data	Survey
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).																		
Rumus Perhitungan	<i>IKLH Dengan Ekosistem Gambut</i> $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,104 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,428 \times IKAL)$ <i>IKLH Tanpa Ekosistem Gambut</i> $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ <i>IKLH Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut</i> $= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	NO	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
NO	Kategori	Angka Rentang																	
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																		

INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA PADANG PANJANG

1. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)



Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

2. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; - SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas X_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

3. Indeks pembangunan literasi masyarakat

4. Usia Harapan Hidup (Tahun)



Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

5. Indeks Pembangunan Pemuda
6. Rasio Daya Saing Keolahragaan
7. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
8. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

Keterangan: *) metadata masih dalam pengembangan

9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
10. Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai tambah sektor Industri pengolahan}} = \frac{\text{Nilai tambah sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan,



	semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

11. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

12. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 sub sektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$



Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

13. Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran

14. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB merupakan persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDB}_{PKP} = \frac{\Delta PKP}{PDRB} \times 100\%$ Dimana : Rasio PDB_{PKP} merupakan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan ΔPKP = nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Interpretasi	Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

15. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB %

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	



	$PDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100 \%$ Keterangan: $PDRB_t$ = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB.

16. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan PMBT (\%PDRB)} = \frac{PMBT}{PDRB_{ADHK}} \times 100 \%$ Keterangan: - Pembentukan Modal Tetap Bruto Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB_{ADHK}$ Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

17. Indeks Ketahanan Pangan

18. Jumlah penduduk miskin

19. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$\% TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

20. Tingkat produktivitas tenaga kerja

21. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan nilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rumus Perhitungan	$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ Keterangan : KPPD = Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah CKM = Capaian kinerja makro CKUP = Capaian kinerja urusan pemerintahan PKM = Perubahan kinerja makro
Interpretasi	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari capaian kinerja makro, urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu : a. Nilai kinerja 1,00 – 1,80 menandakan kinerja sangat rendah b. Nilai kinerja 1,81 – 2,60 menandakan kinerja rendah c. Nilai kinerja 2,61 – 3,40 menandakan kinerja sedang d. Nilai kinerja 3,41 – 4,20 menandakan kinerja tinggi e. Nilai kinerja 4,21 – 5,00 menandakan kinerja sangat tinggi



Sumber Data	Tim Daerah Provinsi yang ditugaskan Gubernur
Frekuensi	Setiap tahun

22. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $= \left(\frac{\text{Nilai per indikator}}{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $= \sum \text{Nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $= \sum (\text{Nilai Indeks} \times \text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (Fairness); 2. Partisipasi (Participation); 3. Akuntabilitas (Accountability); 4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

	Range Nilai	Kategori	Makna
	0 – 1,00	F	Gagal
	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
	1,51 – 2,00	D	Buruk
	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
	2,51 – 3,00	C	Cukup
	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
	3,51 – 4,00	B	Baik
	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.		
Frekuensi	Tahunan		

23. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																																
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. 2. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. 3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%. 4. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																														
1	AA	>90 - 100	Istimewa																														
2	A	>80 - 90	Sangat Baik																														
3	BB	>70 - 80	Baik																														
4	B	>60 - 70	Cukup Baik																														
5	CC	>50 - 60	Cukup																														
6	C	>30 - 50	Buruk																														
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																



Frekuensi	Tahunan

24. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

25. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Skor total maksimum} \times 100}$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

27. Nilai SAKIP Kota

28. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks SPBE)

29. Nilai Integritas (Survey Penilaian Integritas KPK)

30. Indeks Profesionalitas ASN

31. Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan

32. Persentase pemajuan objek kebudayaan

33. Persentase penurunan pelanggaran Perda

34. Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani

Nama Indikator	Persentase Konflik Sosial yang tertangani
Definisi	Persentase dari jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani atau diselesaikan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu periode waktu tertentu. Konflik sosial mencakup ketegangan, kekerasan, atau pertentangan antar individu, kelompok, atau komunitas dalam masyarakat yang memerlukan intervensi atau penanganan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut atau mencapai perdamaian.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani/diselesaikan}}{\text{Total konflik sosial yang tercatat}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase konflik sosial yang tertangani di suatu daerah, maka semakin kondusif tingkat keamanan di daerah tersebut. Sebaliknya semakin rendah persentase konflik sosial yang tertangani, maka tingkat kerawanan sosial akan tinggikan kurang kondusif daerah tersebut untuk pembangunan atau investasi.
Sumber Data	Kesbang Pol (Kesatuan Bangsa dan Politik)



Frekuensi	Tahunan

35. Angka PPKS
36. IKLI KePUan
37. IKLI perkim
38. IKLI Perhubungan
39. Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan
40. IKU
41. IKA
42. IKL
43. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD KOTA PADANG PANJANG

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Defenisi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan tiga dimensi utama.
Rumus Perhitungan	$IKP = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot}}$ Atau jika bobot sama rata: $IKP = \frac{\text{Skor Ketersediaan} + \text{Skor Akses} + \text{Skor Pemanfaatan}}{3}$ Keterangan Rumus: Tiga Dimensi Utama IKP: 1. Ketersediaan Pangan ○ Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan. ○ Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS. 2. Akses Pangan ○ Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi. ○ Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan. 3. Pemanfaatan Pangan ○ Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi. ○ Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS. Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan.



Interpretasi	Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	- Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. - Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita KLPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan



	listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).																		
Rumus Perhitungan	$IKLH \text{ Dengan Ekosistem Gambut}$ $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,104 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,428 \times IKAL)$ $IKLH \text{ Tanpa Ekosistem Gambut}$ $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ $IKLH \text{ Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut}$ $= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	NO	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
NO	Kategori	Angka Rentang																	
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																		

5. Rumah Tangga (RT) dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan : PSA= Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman

	JRTSPAL = Jumlah rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

6. Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Nama Indikator	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbunan Sampah Timbunan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur



	Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: a. Cara 1 $SO = ST - MFPA + RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) b. Cara 2 $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari)



	TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

7. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga

	$PRTLTP = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100 \%$ Keterangan: PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: Di adaptasi dari Metadata SDGs, 2021 Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan

8. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan • Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. • Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. • Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang



	• Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

9. Laju Pertumbuhan Penduduk

10. Rasio Penduduk

11. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

12. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	-
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan

13. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga terhadap sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga terhadap sumber Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ Keterangan : PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	1. SKAM RT : Tahunan 2. Susenas KOR : Tahunan

14. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)



Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas transportasi, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$IKLI = \left(\frac{\sum (\text{Nilai Jawaban Responden})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \right) \times 100$ Keterangan: • Nilai Jawaban Responden: Penilaian tiap responden terhadap pertanyaan terkait layanan infrastruktur, biasanya dengan skala likert (misalnya 1–4 atau 1–5). • Jumlah Responden: Total individu yang mengisi survei. • Skor Maksimal: Nilai tertinggi dalam skala likert (misalnya 4 atau 5). • Hasil IKLI: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100) agar mudah dibandingkan antar wilayah atau tahun.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur
Sumber Data	Survei pengguna, Dinas PUPR, Bappeda, atau lembaga independen
Frekuensi	Tahunan / 2 Tahunan

15. IKLI KePUan

16. IKLI perkim

17. IKLI Perhubungan

18. Indeks Kualitas Udara

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi berbagai jenis polutan udara, seperti partikel debu (PM10, PM2.5), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO ₂), nitrogen dioksida (NO ₂), ozon (O ₃), dan karbon dioksida (CO ₂). Indeks ini memberikan gambaran umum mengenai seberapa bersih atau tercemarnya udara di suatu wilayah, yang penting untuk kesehatan manusia dan ekosistem.
Rumus Perhitungan	$IKU = \max \left(\frac{C_1}{S_1}, \frac{C_2}{S_2}, \dots, \frac{C_n}{S_n} \right)$ Dimana: C_i = Konsentrasi polutan ke-i (misalnya, PM10, PM2.5, CO, NO₂, SO₂, O₃) dalam satuan yang sesuai (misalnya µg/m³ atau ppm). S_i = Ambang batas standar kualitas udara untuk polutan ke-i, sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku. - Hasil $\frac{C_i}{S_i}$ menunjukkan rasio antara konsentrasi polutan dengan standar yang telah ditetapkan.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas udara yang lebih buruk dan berpotensi lebih berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Pemantauan Kualitas Udara Nasional dan Regional
Frekuensi	Harian atau lebih sering tergantung pada kebijakan dan kebutuhan monitoring kualitas udara.

19. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas air berdasarkan pengukuran beberapa parameter fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kelayakan air untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi manusia, irigasi, dan pemeliharaan ekosistem.

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
Rumus Perhitungan	$IKA = \sum (P_i \times W_i)$ Dimana: P_i = Nilai normalisasi untuk parameter ke-i (misalnya pH, DO, BOD, dll.), yang dihitung dengan membandingkan nilai parameter dengan rentang yang telah ditetapkan untuk parameter tersebut. W_i = Bobot atau pentingnya parameter ke-i dalam menentukan kualitas air (misalnya, bobot untuk BOD mungkin lebih tinggi dibandingkan pH, tergantung pada tujuan evaluasi kualitas air).
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air yang baik, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas air yang buruk.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah, serta lembaga pengelola air
Frekuensi	Tahunan atau lebih sering, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan monitoring kualitas air.

20. Indeks Kualitas Lahan

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB_{(k)t}}{PDRB_{(k)t-1}} \times 100\%$ Keterangan : K = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).



Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : α = 0 z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. n = Jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

3. PDRB ADHK Per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRP Per kapita} = \frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{populasi}}$ Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	



	$\% TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5. Indeks Gini

6. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan}$ = Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$ = Indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ = Indeks pengeluarandimana $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ AHH = Angka Harapan Hidup $I_{pendidikan} = \frac{RLS - RLS_{min} + HLS - HLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min} + HLS_{max} - HLS_{min}}$ RLS = Rata-rata lama sekolah HLS = Harapan lama sekolah $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{max}) - \ln(PPP_{min})}$ PPP = Paritas daya beli
Interpretasi	PM dihitung menggunakan rata-rata ukur (geometrik) dalam melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, Dimana IPM ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : j. Kelompok “sangat tinggi” $IPM \geq 80$ k. Kelompok “tinggi” $70 \leq IPM < 80$ l. Kelompok “sedang” $60 \leq IPM < 70$ Kelompok “rendah” $IPM < 60$
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Setiap tahun



7. Usia Harapan Hidup (Tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

8. Indeks Keluarga Sehat

9. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. Sangat pendek: Zscore < -3,0 Pendek: Zscore $\geq$ -3,0 s/d Zscore < -2,0



Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB_{(5)}stunting = \frac{JAB_{(5)}P\ stunting}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ Keterangan : $PAB_{(5)}P$: Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB_{(5)}P\ stunting$: Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB_{(5)}$: Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB_{(5)}SP\ stunting = \frac{JAB_{(5)}SP\ stunting}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ Keterangan : $PAB_{(5)}$: Prevalensi anak balita yang SP stunting menderita sangat pendek (stunting) $JAB_{(5)}SP\ stunting$: Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB_{(5)}$: Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ Stunting = PAB_{(5)}P + PAB_{(5)}SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

10. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: k. Tidak punya ijazah = 0 tahun; l. SD = 6 tahun; m. SMP = 9 tahun; n. SMA = 12 tahun; o. D1/D2 = 14 tahun; p. D3 = 15 tahun; q. D4 = 16 tahun; r. S1 = 17 tahun; s. S2 = 19 tahun; t. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 6. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 7. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1; 8. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 9. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 10. 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas X_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

11. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)



Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

12. Angka Literasi/Numerasi SD

13. Angka Literasi/Numerasi SMP

14. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

15. Indeks Literasi Digital

16. Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani

Nama Indikator	Persentase Konflik Sosial yang tertangani
Definisi	Persentase dari jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani atau diselesaikan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu periode waktu tertentu. Konflik sosial mencakup ketegangan, kekerasan, atau pertentangan antar individu, kelompok, atau komunitas dalam masyarakat yang memerlukan intervensi atau penanganan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut atau mencapai perdamaian.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani/diselesaikan}}{\text{Total konflik sosial yang tercatat}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase konflik sosial yang tertangani di suatu daerah, maka semakin kondusif tingkat keamanan di daerah tersebut. Sebaliknya semakin rendah persentase konflik sosial yang tertangani, maka tingkat kerawanan sosial akan tinggi dan kurang kondusif daerah tersebut untuk pembangunan atau investasi.
Sumber Data	Kesbang Pol (Kesatuan Bangsa dan Politik)
Frekuensi	Tahunan

17. Persentase objek pemajuan kebudayaan

18. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan alat untuk mengukur tingkat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Perlindungan khusus anak mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta untuk mempromosikan hak-hak anak secara luas. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang upaya perlindungan khusus yang dilakukan untuk anak-anak di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak.
Rumus Perhitungan	Indeks dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi perlindungan anak. Rumus perhitungan : $IPKA = \sum_{i=1}^n w_i x S_i$ di mana:



	• <i>IPKA</i> adalah indeks perlindungan khusus anak. • <i>wi</i> adalah bobot atau weight yang diberikan untuk indikator ke-i. • <i>Si</i> adalah skor atau nilai yang dihasilkan dari indikator ke-i setelah normalisasi. Formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang ada. Bobot dapat diberikan secara subjektif berdasarkan konsultasi dengan para ahli atau berdasarkan analisis statistik yang lebih mendalam.
Interpretasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat pengukuran yang menyediakan gambaran tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting seperti kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, upaya untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan promosi hak-hak anak secara umum. Interpretasi dari indeks ini dapat membantu dalam beberapa cara: Pemantauan Kemajuan: Menilai apakah upaya untuk meningkatkan perlindungan anak telah berhasil atau tidak dari tahun ke tahun. Perbandingan Antar Negara/Wilayah: Membandingkan tingkat perlindungan anak antara negara atau wilayah yang berbeda, membantu identifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan. Pengidentifikasian Kebutuhan Prioritas: Menyoroti area di mana perlindungan anak paling rentan atau kebijakan yang perlu diperkuat untuk meningkatkan perlindungan anak. Advokasi dan Kebijakan: Memberikan dasar data untuk advokasi publik dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik. Indeks ini penting karena anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga perlindungan mereka menjadi prioritas penting dalam agenda kesejahteraan dan hak asasi manusia secara global.
Sumber Data	Kementerian PP dan PA
Frekuensi	Tahunan

19. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki



	$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$
2.	Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic
	$HARM(G_p \times G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$
3.	Menghitung indeks masing – masing dimensi
	$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MPHK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$
4.	Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik
	$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$
5.	Menghitung Indeks Kesenjangan Gender
	$Indeks Kesenjangan Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$
6.	Menghitung Indeks Ketimpangan Gender
	$Indeks Ketimpangan Gender = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$
G_p	= Indeks Perempuan
G_L	= Indeks Laki-laki
MTF	= Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan
$MPHK20$	= Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun
PR_p	= Persentase perempuan di legislatif
PR_L	= Persentase laki-laki di legislatif
SE_p	= Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
SE_L	= Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
$TPAK_p$	= Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja
$TPAK_L$	= Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja
$HARM(G_p, G_L)$	= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik



	IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{P,L} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

20. Indeks Pembangunan Gender

21. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pemuda secara holistik di suatu wilayah dalam lima domain utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan nasional. IPP disusun dalam skala 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan pemuda yang lebih baik.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Domain} = \frac{\text{Skor Indikator 1} + \text{Skor Indikator 2} + \dots + \text{Skor Indikator ke-n}}{\text{Jumlah Indikator dalam Domain}}$ Keterangan : Metodologi dan rumus pasti dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak dipublikasikan secara detail.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik capaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupannya. IPP juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan kepemudaan antar daerah atau antar waktu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

22. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari



	setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \left(\frac{JKI}{JLH} \right) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

23. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek

	penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

24. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
Definisi	Persentase pasien Tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

25. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk : a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\%satdik \text{ min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n satdik \text{ min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min.SK</i>M = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan



Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

26. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{Formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ Keterangan : $\sum PD_{Formal}$: Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal $\sum AKPD$: Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

27. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan,



	dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

28. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan alat untuk mengukur tingkat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Perlindungan khusus anak mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta untuk mempromosikan hak-hak anak secara luas. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang upaya perlindungan khusus yang dilakukan untuk anak-anak di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak.
Rumus Perhitungan	Indeks dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi perlindungan anak. Rumus perhitungan : $IPKA = \sum_{i=1}^n w_i x S_i$ di mana: • <i>IPKA</i> adalah indeks perlindungan khusus anak. • <i>w_i</i> adalah bobot atau weight yang diberikan untuk indikator ke-<i>i</i>. • <i>S_i</i> adalah skor atau nilai yang dihasilkan dari indikator ke-<i>i</i> setelah normalisasi. Formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang ada. Bobot dapat diberikan secara subjektif berdasarkan konsultasi dengan para ahli atau berdasarkan analisis statistik yang lebih mendalam.
Interpretasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat pengukuran yang menyediakan gambaran tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting seperti kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, upaya untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan promosi hak-hak anak secara umum. Interpretasi dari indeks ini dapat membantu dalam beberapa cara: Pemantauan Kemajuan: Menilai apakah upaya untuk meningkatkan perlindungan anak telah berhasil atau tidak dari tahun ke tahun. Perbandingan Antar Negara/Wilayah: Membandingkan tingkat perlindungan anak antara negara atau wilayah yang berbeda, membantu identifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan. Pengidentifikasian Kebutuhan Prioritas: Menyoroti area di mana



	perlindungan anak paling rentan atau kebijakan yang perlu diperkuat untuk meningkatkan perlindungan anak. g. Advokasi dan Kebijakan: Memberikan dasar data untuk advokasi publik dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik. Indeks ini penting karena anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga perlindungan mereka menjadi prioritas penting dalam agenda kesejahteraan dan hak asasi manusia secara global.
Sumber Data	Kementerian PP dan PA
Frekuensi	Tahunan

29. Angka PPKS

30. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\% \text{ cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Angka Ketergantungan
2. Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah pengolahan terhadap PDB.



Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{}} = \frac{\text{Nilai tambah sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomamin}}{\text{}} = \frac{\text{Nilai tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 sub sektor yang termasuk: 18. Fesyen 19. Kuliner 20. Kriya 21. Film, Animasi dan Video 22. Pengembang Permainan 23. Aplikasi 24. Musik 25. Seni Pertunjukan 26. Fotografi 27. Desain Komunikasi Visual 28. Televisi dan Radio 29. Seni Rupa 30. Desain Produk 31. Periklanan 32. Penerbitan 33. Arsitektur 34. Desain Interior



Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

5. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100 \%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

7. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Skor total maksimum} \times 100}$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya



	kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

8. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan PMBT (\%PDRB)} = \frac{PMBT}{PDRB_{ADHK}} \times 100 \%$ Keterangan: - Pembentukan Modal Tetap Bruto Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB_{ADHK}$ Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

9. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis aktual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.



Rumus Perhitungan	$\text{Ekspor barang dan jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB}_{ADHK}} \times 100 \%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB_{ADHK} = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas transportasi, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{IKLI} = \left(\frac{\sum (\text{Nilai Jawaban Responden})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \right) \times 100$ Keterangan: - Nilai Jawaban Responden: Penilaian tiap responden terhadap pertanyaan terkait layanan infrastruktur, biasanya dengan skala likert (misalnya 1–4 atau 1–5). - Jumlah Responden: Total individu yang mengisi survei. - Skor Maksimal: Nilai tertinggi dalam skala likert (misalnya 4 atau 5). - Hasil IKLI: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100) agar mudah dibandingkan antar wilayah atau tahun.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur
Sumber Data	Survei pengguna, Dinas PUPR, Bappeda, atau lembaga independen
Frekuensi	Tahunan / 2 Tahunan

11. Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan



	berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: - Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, - Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ - Memiliki akses air minum layak - Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	- Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$ Keterangan : PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga - Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{JRT \times 100}$ Keterangan : PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan



Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) KOR BPS. Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota).
Frekuensi	Tahunan

12. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

13. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100 \%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the <i>Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampe IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Bulanan

14. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

15. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

16. Jumlah tamu wisatawan manca negara

17. Proporsi jumlah IKM non pertanian

18. Proporsi jumlah IKM

19. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu



	periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

20. *Return on Asset (ROA) BUMD (%)*

Nama Indikator	<i>Return on Asset (ROA) BUMD (%)</i>
Definisi	<i>Return On Asset (ROA)</i> adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. <i>Return On Asset (ROA)</i> dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	$\text{ReturnOfAsset(ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut
Frekuensi	Tahunan

21. *Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)*

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai.
Rumus Perhitungan	$\text{Tenaga Kerja Formal} = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100 \%; i = 1,2,3,\dots,7$



	Keterangan: <i>Tenaga Kerja Formal</i> = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas pertanian 6 = Pekerja bebas non pertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$\% TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100 \%$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

23. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB merupakan persentase bagian PDRB yang berkontribusi oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan



Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDB}_{PKP} = \frac{\Delta PKP}{PDRB} \times 100\%$ Dimana : Rasio PDB_{PKP} merupakan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan ΔPKP = nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Interpretasi	Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

24. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan
Rumus Perhitungan	Indeks bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya
Interpretasi	Pengukuran Indeks Masyarakat Digital digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya yang terdiri dari empat pilar penyusunan yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

25. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (Koefisien Harga Antar Waktu) (%)

Nama Indikator	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Pokok (Koefisien Variansi Harga Antar Waktu) (%).
Definisi	Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungannya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi..
Rumus Perhitungan	Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk data komoditas. Setelah itu, menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. Kemudian untuk menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas
Interpretasi	Koefisien variansi harga antar waktu menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok berbagai komoditi antar waktu dalam setahun. Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk



	persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungannya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi
Sumber Data	Dinas Koperindag Kota Padang Panjang
Frekuensi	Tahunan

26. Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum PDRB \text{ Kab / Kota}}{\sum PDRB \text{ Provinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Mempertimbangkan delineasi WM yang dapat mencakup seluruh/sebagian kecamatan dalam kabupaten, maka perhitungan PDRB WM yang dilakukan dengan menggunakan data di tingkat kabupaten/kota berpeluang bernilai lebih tinggi (overestimate).
Sumber Data	Kompilasi Data PDRB di tingkat kabupaten/kota hingga nasional
Frekuensi	Tahunan

27. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.		
Rumus Perhitungan	$\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100$		
	Keterangan:		
	Total Dana Pihak Ketiga (DPK) PDRB	=	Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi)
		=	Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai TotalDPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB		



	(%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan

28. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten /Kota (Rupiah)

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)
Definisi	Total transaksi saham perKab/Kota adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai transaksi saham/kapita} = \frac{\text{nilai transaksi saham selama setahun}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan

29. Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	Total Kredit /PDRB (%)		
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.		
Rumus Perhitungan	Total kredit provinsi / PDRB(%) = $\frac{\text{Total Kredit per provinsi}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$ Keterangan: Rtk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS terhadap PDRB Tk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)		



Interpretasi	Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian provinsi tersebut.
Sumber Data	Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Total Kredit per Provinsi = Bulanan, PDRB = Triwulanan

30. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan(%)
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Jasa Keuangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Jasa Keuangan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Jasa Keuangan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi jasa keuangan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah jasa keuangan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor jasa keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

31. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk yang bekerja}}$
Interpretasi	- Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. - Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja. - Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

32. Rasio Daya Saing Keolahragaan

33. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB_{(k) t}}{PDRB_{(k) t-1}} \times 100\%$



	Keterangan : K = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

34. Pengeluaran Perkapita
35. Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran
36. Realisasi Investasi

Nama Indikator	Realisasi Total terhadap Target Investasi
Definisi	Indeks Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi} = \frac{\text{Total Realisasi Investasi}}{\text{Total Target Investasi}} \times 100\%$ Keterangan : □ Total Realisasi Investasi: Ini adalah jumlah total investasi yang berhasil direalisasikan dalam suatu periode waktu tertentu. □ Total Target Investasi: Ini adalah jumlah total investasi yang ditargetkan untuk dicapai dalam periode waktu yang sama. □ 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

37. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan



D. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																																
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: 5. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. 6. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. 7. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. 8. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																														
1	AA	>90 - 100	Istimewa																														
2	A	>80 - 90	Sangat Baik																														
3	BB	>70 - 80	Baik																														
4	B	>60 - 70	Cukup Baik																														
5	CC	>50 - 60	Cukup																														
6	C	>30 - 50	Buruk																														
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																
Frekuensi	Tahunan																																

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:



	$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 2. Menentukan nilai untuk setiap indikator $= \left(\frac{\text{Nilai per indikator}}{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 3. Menentukan nilai setiap aspek $= \sum \text{Nilai per indikator}$ 4. Menentukan indeks $= \sum (\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 7. Keadilan (Fairness); 8. Partisipasi (Participation); 9. Akuntabilitas (Accountability); 10. Transparansi (transparency); 11. Berdayaguna (useful); 12. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik



	sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pegguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

4. Persentase Penegakan Perda %

Nama Indikator	Persentase Penegakan Perda %
Definisi	Perda (Peraturan Daerah) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah berfungsi sebagai Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintah Daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian kasus dalam penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi tertib di Kota Padang Panjang Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah : a. Respon atas laporan b. Pengecekan atas validitas laporan c. Tindak lanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS d. Pembuatan surat pernyataan untuk tidak melanggar atau e. Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan Yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari : a. Laporan masyarakat yang masuk melalui Laporan, telepon, surat, datang langsung, media masa/sosial, dll. b. Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait c. Perintah atasan dan/atau temuan petugas Satpol PP langsung di lapangan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan



5. Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif

Nama Indikator	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%)
Definisi	Persentase dari total partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik dan sosial dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang dihitung meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, kegiatan kampanye, pertemuan umum, dan kegiatan publik lainnya yang mempengaruhi kehidupan politik dan sosial.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif} = \frac{\text{Jumlah Parpol dan Ormas yang Aktif} \times 100}{\text{Jumlah Parpol dan Ormas}}$
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang aktif, maka semakin baik proses demokrasi dan partisipasi masyarakat suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah keaktifan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, maka semakin rendah tingkat partisipasi dan proses demokrasi suatu daerah.
Sumber Data	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Rasa Aman

7. Indeks Daya Saing Daerah

8. Survey penilaian integritas (SPI) KPK

9. Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Kesber} + \text{Jumlah PKS}}{25} \times 100\%$
Interpretasi	Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban. 25 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2045 berupa 24 Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepakatan Bersama dan 5 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing - Masing Provinsi Berbatasan yakni Provinsi Riau, Provinsi Sumut, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi
Sumber Data	Biro Pemerintahan Setda Prov.Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

10. Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) (Kasus)

Nama Indikator	Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)(kasus)
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun, dinyatakan sebagai jumlah kejahatan per 1000 penduduk. Ini memberikan gambaran tentang tingkat kejahatan relatif dalam populasi yang diberikan untuk menilai tingkat keamanan daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)} = \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin tidak aman suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin aman suatu daerah. Tujuannya adalah memantau dan menganalisis tren



	keriminalitas untuk keperluan kebijakan keamanan dan pencegahan kejahatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum

Nama Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum(%)
Definisi	Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n-1) - \text{Jumlah pelanggaran tahun } n}{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n-1)} \times 100$
Interpretasi	Jumlah pelanggaran tahun N-1 adalah jumlah pelanggaran pada tahun lalu (sebelumnya). Jumlah pelanggaran pada tahun N adalah jumlah pelanggaran pada tahun berjalan (tahun dimana indikatornya dihitung). Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Kota Padang Panjang
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

12. Indeks Reformasi Birokrasi

13. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan nilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rumus Perhitungan	$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ Keterangan : KPPD = Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah CKM = Capaian kinerja makro CKUP = Capaian kinerja urusan pemerintahan PKM = Perubahan kinerja makro
Interpretasi	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari capaian kinerja makro, urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu : a. Nilai kinerja 1,00 – 1,80 menandakan kinerja sangat rendah b. Nilai kinerja 1,81 – 2,60 menandakan kinerja rendah c. Nilai kinerja 2,61 – 3,40 menandakan kinerja sedang d. Nilai kinerja 3,41 – 4,20 menandakan kinerja tinggi e. Nilai kinerja 4,21 – 5,00 menandakan kinerja sangat tinggi
Sumber Data	Tim Daerah Provinsi yang ditugaskan Gubernur
Frekuensi	Setiap tahun

14. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

15. Pengelolaan keuangan daerah



Nama Indikator	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
Definisi	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja pegawai (tidak termasuk tunjangan guru) yang didanai dari Transfer ke Daerah (TKD) terhadap total belanja pegawai secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD}}{\text{Total Belanja Pegawai}} \right) \times 100$ Keterangan : • Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD: Total belanja pegawai yang tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari sumber pendanaan TKD (misalnya DAU, DAK non-fisik). • Total Belanja Pegawai: Seluruh belanja pegawai daerah, termasuk yang berasal dari PAD, DBH, maupun TKD.
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat untuk belanja pegawai non-guru
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Frekuensi	Tahunan (setiap akhir tahun anggaran)

16. Indeks Pemerintahan Digital
17. Indeks Integritas Kota
18. Indeks profesionalitas ASN

Nama Indikator	Indeks profesionalitas ASN
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Profesionalitas ASN} = \frac{\sum (\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Frekuensi	Tahunan

LAMPIRAN II: MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Identifikasi Resiko Strategis

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Sumber	C/UC(*)	Dampak	Pihak Terkena
T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi									
1	S1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah	Walikota	(1) Keterbatasan ekonomi keluarga, (2) rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, (3) keterbatasan dukungan beasiswa	Internal & Eksternal	C	Meningkatnya kesenjangan pendidikan, rendahnya kualitas SDM, turunnya daya saing	Masyarakat, Pemda
		Rata-rata Lama Sekolah	Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Walikota	(1) Angka putus sekolah tinggi, (2) fasilitas pendidikan tidak merata, (3) urbanisasi ke daerah lain	Internal & Eksternal	C	IPM tidak tercapai, daya saing kota melemah	Pemda, masyarakat
		Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	SPM Pendidikan tidak terpenuhi	Walikota	(1) Guru bersertifikat terbatas, (2) sarana prasarana sekolah kurang, (3) lemahnya koordinasi antar OPD	Internal	C	Kualitas layanan pendidikan dasar tidak sesuai standar, muncul ketidakpuasan publik	Siswa, orang tua, Pemda
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Rendahnya indeks literasi masyarakat	Walikota	(1) Budaya baca rendah, (2) fasilitas literasi digital minim, (3) dominasi konten hiburan di media sosial	Internal & Eksternal	C	Kreativitas dan inovasi masyarakat rendah, kesenjangan informasi meningkat	Masyarakat, pelajar
2	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penurunan/stagnasi Usia Harapan Hidup	Walikota	(1) Pola hidup tidak sehat, (2) keterbatasan layanan kesehatan rujukan, (3) ancaman penyakit menular & non-menular, (4) bencana/krisis lingkungan	Internal & Eksternal	UC	Angka kesakitan & kematian meningkat, biaya kesehatan daerah melonjak	Masyarakat, Pemda
3	S1.3 Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi	Walikota	(1) Akses pembiayaan usaha sulit, (2) program inkubasi bisnis terbatas, (3) keterampilan digital pemuda rendah	Internal	C	Pengangguran pemuda tinggi, bonus demografi tidak termanfaatkan	Pemuda, Pemda
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Turunnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Walikota	(1) Regenerasi kepemimpinan lemah, (2) dukungan pembinaan terbatas, (3) minat kepemimpinan menurun	Internal & Eksternal	C	Partisipasi pembangunan rendah, muncul potensi masalah sosial	Pemuda, masyarakat
		Rasio Daya Saing Keolahragaan	Prestasi olahraga daerah stagnan	Walikota	(1) Sarana prasarana olahraga terbatas, (2) kompetisi daerah minim, (3) pembinaan atlet tidak berkelanjutan	Internal	C	Daya saing olahraga daerah melemah di tingkat provinsi/nasional	Atlet, Pemuda, Pemda

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Sumber	C/UC(*)	Dampak	Pihak Terkena
4	S1.4 Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah	Walikota	(1) Kesadaran masyarakat masih rendah, (2) sistem pelaporan lemah, (3) keterbatasan shelter/layanan korban	Internal & Eksternal	UC	Anak rentan terhadap kekerasan, nilai IPA turun signifikan	Anak, keluarga, Pemda
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai Ibangga stagnan/rendah	Walikota	(1) Tingginya perceraian, (2) kualitas pola asuh rendah, (3) kerentanan ekonomi keluarga	Internal & Eksternal	C	Keluarga tidak menjadi lingkungan tumbuh kembang ideal, risiko sosial meningkat	Masyarakat, Pemda
T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat									
5	S2.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Pertumbuhan industri pengolahan stagnan	Walikota	(1) Minimnya investasi baru; (2) Keterbatasan infrastruktur pendukung produksi; (3) SDM industri kurang kompetitif	Internal & Eksternal	UC	Perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah	Masyarakat, Dunia Usaha
		Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran	Lesunya aktivitas perdagangan lokal	Walikota	(1) Daya beli masyarakat melemah; (2) Persaingan ketat dengan perdagangan daring; (3) Keterbatasan dukungan fasilitas pasar	Internal & Eksternal	UC	Penurunan kontribusi sektor perdagangan terhadap ekonomi daerah	Pelaku Usaha, Konsumen
6	S2.2 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum	Kunjungan wisatawan rendah	Walikota	(1) Promosi pariwisata lemah; (2) Fasilitas penunjang wisata kurang; (3) Isu keamanan dan bencana alam	Internal & Eksternal	C	Penurunan pendapatan sektor pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata, Masyarakat
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan subsektor kreatif tidak optimal	Walikota	(1) Akses pembiayaan terbatas; (2) Minimnya pelatihan/inkubasi usaha; (3) Pasar produk kreatif terbatas	Internal & Eksternal	C	Rendahnya kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB	UMKM, Pemuda, Pelaku Kreatif
7	S2.3 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rendahnya investasi jangka panjang	Walikota	(1) Regulasi investasi belum ramah; (2) Infrastruktur dasar terbatas; (3) Promosi peluang investasi minim	Internal & Eksternal	UC	Terhambatnya ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja	Investor, Masyarakat
		Nilai Investasi	Fluktuasi nilai investasi masuk	Walikota	(1) Ketidakpastian ekonomi nasional/global; (2) Persaingan antar daerah; (3) Proses perizinan belum efisien	Eksternal & Internal	UC	Potensi berkurangnya PAD dan tenaga kerja baru	Pemda, Masyarakat
8	S2.4 Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Harga kebutuhan pokok tidak terkendali	Walikota	(1) Distribusi logistik terganggu; (2) Ketergantungan pasokan dari luar daerah; (3) Spekulasi harga oleh pedagang	Eksternal & Internal	UC	Inflasi lokal meningkat, daya beli masyarakat turun	Rumah Tangga, Konsumen
9	S2.5 Meningkatnya kesempatan dan	Tingkat Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja terbatas	Walikota	(1) Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan angkatan kerja; (2) Keterampilan	Internal & Eksternal	UC	Peningkatan pengangguran terbuka	Pencari Kerja, Pemuda

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Sumber	C/UC(*)	Dampak	Pihak Terkena
	produktivitas tenaga kerja				tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri				
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja stagnan	Walikota	(1) Keterampilan kerja rendah; (2) Minimnya adopsi teknologi; (3) Kesehatan tenaga kerja belum optimal	Internal	C	Daya saing daerah melemah	Dunia Usaha, Masyarakat
10	S2.6 Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat kemiskinan sulit ditekan	Walikota	(1) Inflasi kebutuhan pokok; (2) Keterbatasan akses lapangan kerja; (3) Program pengentasan kemiskinan belum efektif	Internal & Eksternal	C	Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah	Rumah Tangga Miskin
		Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran rumah tangga stagnan	Walikota	(1) Pendapatan rendah; (2) Biaya hidup meningkat; (3) Dukungan bantuan sosial tidak merata	Internal & Eksternal	C	Penurunan kualitas hidup masyarakat	Rumah Tangga, Pemda
11	S2.7 Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kontribusi sektor pertanian tidak optimal	Walikota	(1) Lahan pertanian berkurang; (2) Produktivitas rendah akibat minim teknologi; (3) Luas lahan sangat minim	Internal & Eksternal	UC	Ketahanan pangan terganggu	Petani, Konsumen
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan	Walikota	(1) Distribusi pangan tidak merata; (2) Daya beli masyarakat rendah; (3) Diversifikasi pangan kurang	Internal & Eksternal	UC	Kerawanan pangan meningkat	Masyarakat, Rumah Tangga
T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani									
12	S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD rendah	Walikota	(1) Kualitas data dan laporan OPD tidak konsisten (2) Rendahnya koordinasi lintas OPD	Internal	C	Penilaian kinerja Pemda menurun	Pemerintah daerah, masyarakat
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks pelayanan publik stagnan	Walikota	(1) SDM layanan belum optimal (2) Sarana prasarana pelayanan terbatas	Internal	C	Kepuasan masyarakat menurun	Masyarakat
		Indeks Reformasi Hukum	Nilai reformasi hukum rendah	Walikota	(1) Implementasi regulasi tidak konsisten (2) Lemahnya pengawasan internal	Internal & Eksternal	C	Citra tata kelola melemah	Pemerintah daerah, masyarakat
		Nilai SAKIP Kota	Penilaian SAKIP menurun	Walikota	(1) Penyusunan perencanaan dan pelaporan tidak sinkron (2) Keterbatasan pemahaman manajemen kinerja	Internal	C	Akuntabilitas kinerja berkurang	Pemerintah daerah
		Indeks Pemerintahan Digital	Rendahnya indeks pemerintahan digital	Walikota	(1) Infrastruktur TIK terbatas (2) Literasi digital ASN rendah	Internal	C	Efisiensi birokrasi terhambat	Pemerintah, masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Sumber	C/UC(*)	Dampak	Pihak Terkena
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai indeks inovasi stagnan	Walikota	(1) Minim budaya inovasi (2) Keterbatasan dukungan anggaran	Internal	C	Daya saing daerah menurun	Pemda, masyarakat
13	S3.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai SPI (KPK) rendah	Walikota	(1) Potensi konflik kepentingan (2) Pengawasan internal kurang kuat	Internal & Eksternal	C	Risiko korupsi meningkat	Pemda, masyarakat
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah rendah	Walikota	(1) Data perencanaan tidak mutakhir (2) Sinkronisasi antar dokumen lemah	Internal	C	Kualitas pembangunan daerah menurun	Pemda
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun	Walikota	(1) SDM pengelola keuangan terbatas (2) Sistem pengawasan tidak optimal	Internal	C	Potensi temuan BPK meningkat	Pemda
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan aset tidak optimal	Walikota	(1) Inventarisasi aset belum lengkap (2) Pemanfaatan aset belum maksimal	Internal	C	Potensi kehilangan aset daerah	Pemda
14	S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN stagnan	Walikota	(1) Kedisiplinan ASN rendah (2) Keterbatasan diklat & pengembangan kapasitas	Internal	C	Pelayanan publik tidak optimal	Pemda, masyarakat
	S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio pajak daerah rendah	Walikota	(1) Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah (2) Sistem pemungutan pajak belum modern	Internal & Eksternal	C	PAD stagnan, pembangunan terhambat	Pemda, masyarakat
		Persentase kenaikan PAD	Pertumbuhan PAD tidak tercapai	Walikota	(1) Basis pajak daerah terbatas (2) Ketergantungan pada transfer pusat tinggi	Internal & Eksternal	C	Kemandirian fiskal rendah	Pemda
T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya									
15	S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Tingginya pelanggaran Perda	Walikota	(1) Kesadaran hukum masyarakat rendah (2) Kapasitas aparat penegak perda terbatas	Internal & Eksternal	UC	Gangguan ketertiban meningkat	Masyarakat, Pemda
		Indeks Harmoni	Nilai indeks harmoni rendah	Walikota	(1) Konflik sosial belum tertangani (2) Kurangnya dialog antar komunitas	Eksternal	UC	Potensi disharmoni sosial meningkat	Masyarakat
16	S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	Angka PPKS	Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi	Walikota	(1) Dukungan program perlindungan sosial terbatas (2) Ketidakmerataan akses layanan sosial	Internal & Eksternal	UC	Kerentanan sosial meningkat	Masyarakat rentan
17	S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan	Rendahnya aktivitas	Walikota	(1) Partisipasi masyarakat menurun (2) Minimnya program pembinaan masjid	Internal	UC	Nilai religius masyarakat melemah	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Sumber	C/UC(*)	Dampak	Pihak Terkena
	agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	aktifitas keagamaan	keagamaan di masjid						
		Persentase pemajuan objek kebudayaan	Pemajuan objek kebudayaan stagnan	Walikota	(1) Minim dukungan anggaran budaya (2) Kurangnya regenerasi pelaku budaya	Internal & Eksternal	C	Kelestarian budaya terancam	Masyarakat, pelaku budaya
T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan									
18	S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak	IKLI KePUan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah	Walikota	(1) Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur (2) Kesenjangan kualitas antar wilayah (3) Keterlambatan proyek strategis	Internal & Eksternal	UC	Akses layanan infrastruktur publik tidak merata	Masyarakat
		IKLI Perkim	Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah	Walikota	Backlog perumahan masih tinggi	Eksternal	UC	Ketidaklayakan tempat tinggal meningkat	Rumah tangga berpenghasilan rendah
		IKLI Perhubungan	Indeks Kualitas Layanan Perhubungan rendah	Walikota	(1) Jaringan transportasi tidak terintegrasi (2) Fasilitas transportasi umum terbatas	Internal	C	Mobilitas masyarakat terganggu	Masyarakat umum
		Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau	Walikota	(1) Keterbatasan daya beli masyarakat (2) Program subsidi perumahan terbatas (3) Lahan perumahan berkurang	Eksternal	UC	Ketimpangan sosial meningkat	Masyarakat berpenghasilan rendah
19	S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara	Walikota	Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali	Eksternal	UC	Meningkatnya penyakit pernapasan	Masyarakat
		Indeks Kualitas Air	Penurunan kualitas air	Walikota	(1) Limbah domestik tidak terkelola (2) Limbah industri melebihi baku mutu	Internal & Eksternal	UC	Kesehatan masyarakat terganggu	Rumah tangga, dunia usaha
		Indeks Kualitas Lahan	Penurunan kualitas lahan	Walikota	(1) Alih fungsi lahan tidak terkendali (2) Praktik pertanian tidak ramah lingkungan (3) Pengawasan tata ruang lemah	Eksternal	UC	Penurunan produktivitas lahan	Petani, masyarakat
20	S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah	Walikota	Kapasitas mitigasi bencana daerah terbatas	Internal	UC	Kerugian sosial ekonomi akibat bencana meningkat	Masyarakat, Pemda

*C (controllable), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko seperti risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundangundangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan, atau UC (uncontrollable) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko seperti risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

B. Hasil Analisis Risiko

No	Risiko yang Teridentifikasi	Skala Dampak	Uraian Dampak	Skala Kemungkinan	Uraian Kemungkinan	Skala Risiko
1	Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah	4	Kinerja: Pencapaian target kinerja turun, kualitas SDM melemah	4	Sering terjadi (5–7 kali/10 thn, faktor ekonomi & sosial)	16
2	Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4	Kinerja & Reputasi: IPM tidak tercapai, daya saing kota melemah	3	Kadang terjadi (3–5 kali/10 thn, terkait fasilitas & urbanisasi)	12
3	SPM Pendidikan tidak terpenuhi	4	Pelayanan: layanan pendidikan dasar tidak sesuai standar	3	Kadang terjadi (karena guru & sarpras terbatas)	12
4	Rendahnya indeks literasi masyarakat	3	Kinerja/Reputasi: kreativitas & inovasi masyarakat rendah	3	Kadang terjadi (budaya baca rendah, dominasi hiburan digital)	9
5	Penurunan/stagnasi Usia Harapan Hidup	5	Dampak sangat signifikan: kesehatan masyarakat, biaya daerah naik	3	Kadang terjadi (ancaman penyakit/bencana)	15
6	Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi	3	Kinerja: pengangguran pemuda tinggi, bonus demografi hilang	4	Sering terjadi (terkait akses modal & skill digital)	12
7	Turunnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	3	Reputasi/Kinerja: partisipasi pembangunan rendah	3	Kadang terjadi (regenerasi lemah, minat menurun)	9
8	Prestasi olahraga daerah stagnan	3	Reputasi: daya saing olahraga daerah melemah	3	Kadang terjadi (kompetisi minim, sarpras terbatas)	9
9	Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah	5	Hukum & Pelayanan: hak anak dilanggar, nilai IPA turun drastis	3	Kadang terjadi (laporan & shelter terbatas)	15
10	Nilai Ibangga stagnan/rendah	3	Kinerja/Reputasi: keluarga tidak jadi lingkungan ideal	3	Kadang terjadi (tingginya perceraian, pola asuh lemah)	9
11	Pertumbuhan industri pengolahan stagnan	4	Kinerja/Keluaran: perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah	3	Kadang terjadi (investasi dan SDM terbatas)	12
12	Lesunya aktivitas perdagangan lokal	4	Kinerja/Keluaran: kontribusi perdagangan ke PDRB menurun	3	Kadang terjadi (daya beli turun, persaingan online)	12
13	Kunjungan wisatawan rendah	3	Keluaran/Reputasi: pendapatan pariwisata menurun	3	Kadang terjadi (promosi & sarpras wisata terbatas)	9
14	Pertumbuhan subsektor kreatif tidak optimal	3	Kinerja: kontribusi ekonomi kreatif rendah	3	Kadang terjadi (pembiayaan & pasar terbatas)	9
15	Rendahnya investasi jangka panjang	4	Keluaran/Kinerja: ekspansi usaha & lapangan kerja terhambat	3	Kadang terjadi (regulasi & infrastruktur terbatas)	12
16	Fluktuasi nilai investasi masuk	4	Keluaran: PAD & penciptaan kerja berkurang	3	Kadang terjadi (faktor eksternal & perizinan lambat)	12
17	Harga kebutuhan pokok tidak terkendali	4	Pelayanan/Keluaran: inflasi lokal meningkat, daya beli turun	4	Sering terjadi (logistik & pasokan sering terganggu)	16

No	Risiko yang Teridentifikasi	Skala Dampak	Uraian Dampak	Skala Kemungkinan	Uraian Kemungkinan	Skala Risiko
18	Kesempatan kerja terbatas	4	Kinerja/Keuangan: pengangguran terbuka meningkat	4	Sering terjadi (lapangan kerja tidak seimbang dgn angkatan kerja)	16
19	Produktivitas tenaga kerja stagnan	3	Kinerja: daya saing daerah melemah	3	Kadang terjadi (skill rendah, teknologi minim)	9
20	Tingkat kemiskinan sulit ditekan	5	Kinerja/Keuangan: kesejahteraan masyarakat rendah	3	Kadang terjadi (inflasi, akses kerja & program belum efektif)	15
21	Pengeluaran rumah tangga stagnan	4	Keuangan/Kinerja: kualitas hidup menurun	3	Kadang terjadi (pendapatan rendah, biaya hidup naik)	12
22	Kontribusi sektor pertanian tidak optimal	4	Kinerja/Keuangan: ketahanan pangan terganggu	3	Kadang terjadi (lahan berkurang, produktivitas rendah)	12
23	Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan	4	Pelayanan/Kinerja: kerawanan pangan meningkat	3	Kadang terjadi (distribusi & daya beli terbatas)	12
24	Nilai EKPPD rendah	3	Reputasi/Kinerja: penilaian kinerja Pemda menurun	3	Kadang terjadi (koordinasi & data OPD lemah)	9
25	Indeks pelayanan publik stagnan	3	Pelayanan: kepuasan masyarakat menurun	3	Kadang terjadi (SDM & sarpras layanan terbatas)	9
26	Nilai reformasi hukum rendah	3	Hukum/Reputasi: citra tata kelola melemah	3	Kadang terjadi (pengawasan & implementasi regulasi lemah)	9
27	Penilaian SAKIP menurun	3	Kinerja: akuntabilitas kinerja berkurang	3	Kadang terjadi (perencanaan & pelaporan tidak sinkron)	9
28	Rendahnya indeks pemerintahan digital	3	Kinerja/Pelayanan: efisiensi birokrasi terhambat	3	Kadang terjadi (infrastruktur & literasi digital rendah)	9
29	Nilai indeks inovasi stagnan	3	Kinerja/Reputasi: daya saing daerah menurun	3	Kadang terjadi (budaya inovasi & anggaran minim)	9
30	Nilai SPI (KPK) rendah	4	Hukum/Reputasi: risiko korupsi meningkat	3	Kadang terjadi (pengawasan & konflik kepentingan)	12
31	Indeks perencanaan pembangunan daerah rendah	3	Kinerja: kualitas pembangunan daerah menurun	3	Kadang terjadi (data tidak mutakhir, sinkronisasi lemah)	9
32	Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun	4	Keuangan/Hukum: potensi temuan BPK meningkat	3	Kadang terjadi (SDM & sistem pengawasan terbatas)	12
33	Pengelolaan aset tidak optimal	4	Keuangan: potensi kehilangan aset daerah	3	Kadang terjadi (inventarisasi & pemanfaatan aset lemah)	12
34	Indeks profesionalitas ASN stagnan	3	Kinerja/Pelayanan: pelayanan publik tidak optimal	3	Kadang terjadi (disiplin rendah, diklat terbatas)	9
35	Rasio pajak daerah rendah	4	Keuangan: PAD stagnan, pembangunan terhambat	3	Kadang terjadi (kepatuhan pajak rendah, sistem belum modern)	12

No	Risiko yang Teridentifikasi	Skala Dampak	Uraian Dampak	Skala Kemungkinan	Uraian Kemungkinan	Skala Risiko
36	Pertumbuhan PAD tidak tercapai	4	Keuangan: kemandirian fiskal rendah	3	Kadang terjadi (basis pajak terbatas, ketergantungan pusat)	12
37	Tingginya pelanggaran Perda	4	Hukum/Pelayanan: gangguan ketertiban meningkat	3	Kadang terjadi (kesadaran hukum rendah, kapasitas aparat terbatas)	12
38	Nilai Indeks Harmoni rendah	4	Reputasi/Sosial: potensi disharmoni sosial meningkat	3	Kadang terjadi (konflik antar komunitas belum tertangani)	12
39	Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi	4	Kinerja/Sosial: kerentanan sosial meningkat	3	Kadang terjadi (dukungan & akses layanan sosial terbatas)	12
40	Rendahnya aktivitas keagamaan di masjid	3	Reputasi/Sosial: nilai religius masyarakat melemah	3	Kadang terjadi (partisipasi & pembinaan terbatas)	9
41	Pemajuan objek kebudayaan stagnan	3	Kelestarian budaya terancam, regenerasi pelaku budaya terhambat	3	Kadang terjadi (anggaran terbatas & minat generasi muda rendah)	9
42	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah	4	Pelayanan: akses layanan infrastruktur publik tidak merata	3	Kadang terjadi (anggaran terbatas & kesenjangan wilayah)	12
43	Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah	4	Pelayanan/Kinerja: ketidaklayakan tempat tinggal meningkat, backlog perumahan tinggi	3	Kadang terjadi (dampak keterbatasan anggaran & lahan)	12
44	Indeks Kualitas Layanan Perhubungan rendah	3	Pelayanan: mobilitas masyarakat terganggu	3	Kadang terjadi (jaringan transportasi tidak terintegrasi, fasilitas terbatas)	9
45	Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau	4	Kinerja/Sosial: ketimpangan sosial meningkat, kesejahteraan terhambat	3	Kadang terjadi (daya beli rendah, subsidi terbatas)	12
46	Penurunan kualitas udara	4	Kesehatan/Pelayanan: meningkatnya penyakit pernapasan pada masyarakat	3	Kadang terjadi (pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali)	12
47	Penurunan kualitas air	4	Kesehatan/Pelayanan: kesehatan masyarakat terganggu akibat pencemaran	3	Kadang terjadi (limbah domestik & industri tidak terkendali)	12
48	Penurunan kualitas lahan	4	Kinerja/Ekonomi: penurunan produktivitas lahan pertanian	3	Kadang terjadi (alih fungsi lahan, praktik pertanian tidak ramah lingkungan)	12
49	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah	4	Kinerja/Sosial: kerugian sosial ekonomi akibat bencana meningkat	3	Kadang terjadi (kapasitas mitigasi bencana terbatas)	12

C. Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko yang Teridentifikasi	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah	16 (Sangat Tinggi)	Walikota	(1) Keterbatasan ekonomi keluarga, (2) Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, (3) Keterbatasan dukungan beasiswa	Kesenjangan pendidikan meningkat, kualitas SDM rendah, daya saing melemah
2	Penurunan/Stagnasi Usia Harapan Hidup	15 (Sangat Tinggi)	Walikota	(1) Pola hidup tidak sehat, (2) Layanan kesehatan rujukan terbatas, (3) Ancaman penyakit menular & non-menular, (4) Bencana/krisis lingkungan	Angka kesakitan & kematian naik, biaya kesehatan daerah meningkat
3	Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah	15 (Sangat Tinggi)	Walikota	(1) Kesadaran masyarakat rendah, (2) Sistem pelaporan lemah, (3) Keterbatasan shelter/layanan korban	Anak rentan kekerasan, nilai IPA turun signifikan
4	Tingkat kemiskinan sulit ditekan	15 (Sangat Tinggi)	Walikota	(1) Inflasi kebutuhan pokok, (2) Keterbatasan akses lapangan kerja, (3) Program pengentasan kemiskinan belum efektif	Kesejahteraan masyarakat rendah
5	Harga kebutuhan pokok tidak terkendali	16 (Sangat Tinggi)	Walikota	(1) Distribusi logistik terganggu, (2) Ketergantungan pasokan luar daerah, (3) Spekulasi harga oleh pedagang	Inflasi lokal meningkat, daya beli masyarakat turun
6	Kesempatan kerja terbatas	16 (Sangat Tinggi)	Walikota	(1) Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding angkatan kerja, (2) Keterampilan tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri	Pengangguran terbuka meningkat
7	Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Angka putus sekolah tinggi, (2) Fasilitas pendidikan tidak merata, (3) Urbanisasi ke daerah lain	IPM tidak tercapai, daya saing kota melemah
8	SPM Pendidikan tidak terpenuhi	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Guru bersertifikat terbatas, (2) Sarana prasarana sekolah kurang, (3) Lemahnya koordinasi antar OPD	Layanan pendidikan dasar tidak sesuai standar, ketidakpuasan publik meningkat
9	Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Akses pembiayaan usaha sulit, (2) Inkubasi bisnis terbatas, (3) Keterampilan digital pemuda rendah	Pengangguran pemuda tinggi, bonus demografi tidak termanfaatkan
10	Pertumbuhan industri pengolahan stagnan	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Minimnya investasi baru, (2) Infrastruktur produksi terbatas, (3) SDM industri kurang kompetitif	Pertumbuhan ekonomi daerah melambat
11	Lesunya aktivitas perdagangan lokal	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Daya beli masyarakat melemah, (2) Persaingan perdagangan daring, (3) Dukungan fasilitas pasar terbatas	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB menurun
12	Rendahnya investasi jangka panjang	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Regulasi investasi belum ramah, (2) Infrastruktur dasar terbatas, (3) Promosi peluang investasi minim	Ekspansi usaha & penciptaan lapangan kerja terhambat
13	Fluktuasi nilai investasi masuk	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Ketidakpastian ekonomi nasional/global, (2) Persaingan antar daerah, (3) Perizinan belum efisien	PAD & penciptaan lapangan kerja berkurang
14	Pengeluaran rumah tangga stagnan	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Pendapatan rendah, (2) Biaya hidup meningkat, (3) Bantuan sosial tidak merata	Kualitas hidup masyarakat menurun
15	Kontribusi sektor pertanian tidak optimal	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Lahan pertanian berkurang, (2) Produktivitas rendah, (3) Teknologi minim	Ketahanan pangan terganggu
16	Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Distribusi pangan tidak merata, (2) Daya beli rendah, (3) Diversifikasi pangan kurang	Kerawanan pangan meningkat

No	Risiko yang Teridentifikasi	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
17	Nilai SPI (KPK) rendah	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Konflik kepentingan, (2) Pengawasan internal lemah	Risiko korupsi meningkat
18	Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun	12 (Tinggi)	Walikota	(1) SDM pengelola keuangan terbatas, (2) Sistem pengawasan tidak optimal	Potensi temuan BPK meningkat
19	Pengelolaan aset tidak optimal	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Inventarisasi aset belum lengkap, (2) Pemanfaatan aset belum maksimal	Potensi kehilangan aset daerah
20	Rasio pajak daerah rendah	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Kepatuhan wajib pajak rendah, (2) Sistem pemungutan belum modern	PAD stagnan, pembangunan terhambat
21	Pertumbuhan PAD tidak tercapai	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Basis pajak terbatas, (2) Ketergantungan transfer pusat tinggi	Kemandirian fiskal rendah
22	Tingginya pelanggaran Perda	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Kesadaran hukum rendah, (2) Kapasitas aparat terbatas	Gangguan ketertiban meningkat
23	Nilai Indeks Harmoni rendah	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Konflik sosial belum tertangani, (2) Minim dialog antar komunitas	Potensi disharmoni sosial meningkat
24	Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Program perlindungan sosial terbatas, (2) Akses layanan sosial tidak merata	Kerentanan sosial meningkat
25	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Anggaran terbatas, (2) Kesenjangan kualitas antar wilayah, (3) Keterlambatan proyek strategis	Akses layanan infrastruktur publik tidak merata
26	Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah	12 (Tinggi)	Walikota	Backlog perumahan tinggi, keterbatasan lahan & anggaran	Ketidaklayakan tempat tinggal meningkat
27	Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Daya beli rendah, (2) Subsidi terbatas, (3) Lahan perumahan berkurang	Ketimpangan sosial meningkat, kesejahteraan terhambat
28	Penurunan kualitas udara	12 (Tinggi)	Walikota	Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali	Penyakit pernapasan meningkat
29	Penurunan kualitas air	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Limbah domestik tidak terkelola, (2) Limbah industri melebihi baku mutu	Kesehatan masyarakat terganggu
30	Penurunan kualitas lahan	12 (Tinggi)	Walikota	(1) Alih fungsi lahan, (2) Praktik pertanian tidak ramah lingkungan, (3) Pengawasan tata ruang lemah	Produktivitas lahan pertanian menurun
31	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah	12 (Tinggi)	Walikota	Kapasitas mitigasi bencana terbatas	Kerugian sosial ekonomi akibat bencana meningkat

D. Rencana Tindak Pengendalian

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah	Program BOS, PKH, beasiswa daerah, sosialisasi pentingnya pendidikan	(a) Dukungan beasiswa belum menjangkau semua siswa miskin	Perluasan beasiswa daerah dan pemantauan anak putus sekolah berbasis data	Walikota	Tahun 2025 - 2029
2	Penurunan/Stagnasi Usia Harapan Hidup	Program JKN, puskesmas, imunisasi dasar lengkap	(a) Layanan rujukan terbatas, (d) Fasilitas kesehatan tidak sesuai standar	Pembangunan RS rujukan dan peningkatan layanan promotif-preventif	Walikota	Tahun 2025 - 2029
3	Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah	UPTD PPA, Satgas Perlindungan Anak, layanan hotline	(b) Sistem pelaporan belum berjalan efektif, (c) Prosedur perlindungan belum baku	Penyusunan SOP terpadu dan penguatan shelter dan sistem pelaporan online	Walikota	Tahun 2025 - 2029
4	Tingkat kemiskinan sulit ditekan	Program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, PKH	(a) Program belum menyentuh akar masalah kemiskinan	Peningkatan program padat karya dan UMKM berbasis komunitas	Walikota	Tahun 2025 - 2029
5	Harga kebutuhan pokok tidak terkendali	Operasi pasar, monitoring harga, koordinasi distribusi	(a) Kebijakan belum mampu mengatasi spekulasi harga, (d) Distribusi logistik belum efisien	Digitalisasi rantai distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah	Walikota	Tahun 2025 - 2029
6	Kesempatan kerja terbatas	Pelatihan kerja, BLK, fasilitasi wirausaha	(a) Program belum menyentuh semua pencari kerja, (b) Keterampilan belum sesuai industri	Peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan industri dan inkubasi wirausaha	Walikota	Tahun 2025 - 2029
7	Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pemerataan sekolah, fasilitas belajar, program motivasi siswa	(a) Fasilitas belum merata, (c) Prosedur monitoring belum baku	Peningkatan infrastruktur sekolah dan penguatan supervisi dan evaluasi	Walikota	Tahun 2025 - 2029
8	SPM Pendidikan tidak terpenuhi	Standar guru bersertifikat, sarana prasarana, supervisi OPD	(c) Koordinasi antar OPD belum optimal	Peningkatan sertifikasi guru, perbaikan sarana-prasarana dan mekanisme koordinasi	Walikota	Tahun 2025 - 2029
9	Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi	Program inkubasi bisnis, akses pembiayaan, pelatihan digital	(b) Akses modal masih terbatas, (c) Skill digital rendah	Perluasan program pembiayaan dan pelatihan digital untuk pemuda	Walikota	Tahun 2025 - 2029
10	Pertumbuhan industri pengolahan stagnan	Fasilitasi investasi, infrastruktur industri, pelatihan SDM	(a) Investasi terbatas, (c) SDM belum kompetitif	Penguatan promosi investasi, pembangunan infrastruktur dan pelatihan industri	Walikota	Tahun 2025 - 2029
11	Lesunya aktivitas perdagangan lokal	Fasilitas pasar, koordinasi perdagangan, promosi dagang	(a) Daya beli rendah, (b) Persaingan daring tinggi	Digitalisasi UMKM, revitalisasi pasar lokal, dukungan promosi dan pembinaan	Walikota	Tahun 2025 - 2029

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
12	Rendahnya investasi jangka panjang	Regulasi investasi, promosi peluang, insentif	(a) Regulasi belum ramah, (d) Promosi minim	Penyederhanaan regulasi, percepatan izin, promosi investasi jangka panjang	Walikota	Tahun 2025 - 2029
13	Fluktuasi nilai investasi masuk	Monitoring ekonomi	(a) Ketidakpastian ekonomi, (b) Proses perizinan lambat	Diversifikasi investasi, forum investor, percepatan izin, stabilisasi regulasi	Walikota	Tahun 2025 - 2029
14	Pengeluaran rumah tangga stagnan	Program bantuan sosial, subsidi energi	(a) Dukungan belum merata, (b) Biaya hidup naik cepat	Penyesuaian bantuan sosial, penguatan program padat karya dan UMKM	Walikota	Tahun 2025 - 2029
15	Kontribusi sektor pertanian tidak optimal	Penyuluhan pertanian, bantuan pupuk, alokasi lahan	(b) Produktivitas rendah, (c) Teknologi minim	Peningkatan teknologi pertanian, optimalisasi lahan, program modernisasi	Walikota	Tahun 2025 - 2029
16	Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan	Cadangan pangan, distribusi, subsidi pangan	(a) Distribusi tidak merata, (b) Daya beli rendah	Penguatan distribusi pangan, diversifikasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran	Walikota	Tahun 2025 - 2029
17	Nilai SPI (KPK) rendah	SOP pengawasan internal, audit berkala	(c) Prosedur pengawasan belum baku	Penguatan SOP audit internal dan pembinaan anti-konflik kepentingan	Walikota	Tahun 2025 - 2029
18	Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun	Sistem pengelolaan keuangan, audit internal	(a) SDM terbatas, (b) Sistem belum optimal	Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem keuangan	Walikota	Tahun 2025 - 2029
19	Pengelolaan aset tidak optimal	Inventarisasi aset, monitoring pemanfaatan	(b) Pemanfaatan aset belum maksimal	Digitalisasi aset dan audit berkala	Walikota	Tahun 2025 - 2029
20	Rasio pajak daerah rendah	Pemungutan pajak, sosialisasi	(a) Kepatuhan pajak rendah, (b) Sistem belum modern	Modernisasi sistem pajak, edukasi wajib pajak, penguatan monitoring	Walikota	Tahun 2025 - 2029
21	Pertumbuhan PAD tidak tercapai	Basis pajak, monitoring PAD	(a) Basis pajak terbatas	Perluasan basis pajak dan optimalisasi PAD	Walikota	Tahun 2025 - 2029
22	Tingginya pelanggaran Perda	Sosialisasi Perda, penegakan hukum	(a) Kesadaran hukum rendah, (b) Kapasitas aparat terbatas	Penguatan edukasi hukum dan kapasitas penegak perda	Walikota	Tahun 2025 - 2029
23	Nilai Indeks Harmoni rendah	Forum dialog komunitas, mediasi sosial	(b) Minim dialog antar komunitas	Peningkatan program mediasi, forum diskusi dan sosialisasi toleransi	Walikota	Tahun 2025 - 2029
24	Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi	Program kesejahteraan sosial, bantuan langsung	(b) Akses layanan terbatas	Peningkatan layanan sosial dan distribusi bantuan lebih merata	Walikota	Tahun 2025 - 2029

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
25	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah	Anggaran pembangunan, proyek strategis	(d) Proyek terlambat, (a) Anggaran terbatas	Percepatan proyek dan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur	Walikota	Tahun 2025 - 2029
26	Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah	Program perumahan, subsidi rumah	(a) Backlog tinggi, (d) Anggaran & lahan terbatas	Percepatan pembangunan rumah layak dan terjangkau	Walikota	Tahun 2025 - 2029
27	Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau	Subsidi perumahan, program rumah layak	(a) Daya beli rendah, (b) Subsidi terbatas	Perluasan subsidi dan pembangunan rumah layak	Walikota	Tahun 2025 - 2029
28	Penurunan kualitas udara	Monitoring emisi, pengaturan transportasi	(d) Pertumbuhan kendaraan tak terkendali	Regulasi emisi, transportasi publik dan penghijauan kota	Walikota	Tahun 2025 - 2029
29	Penurunan kualitas air	Pengelolaan limbah, regulasi industri	(b) Limbah domestik & industri tidak terkelola	Peningkatan pengawasan limbah dan sistem pengolahan air	Walikota	Tahun 2025 - 2029
30	Penurunan kualitas lahan	Pengawasan tata ruang, praktik pertanian	(b) Alih fungsi lahan, praktik tidak ramah lingkungan	Rehabilitasi lahan dan regulasi pertanian ramah lingkungan	Walikota	Tahun 2025 - 2029
31	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah	Rencana mitigasi bencana, kapasitas tanggap darurat	(b) Kapasitas mitigasi terbatas	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan koordinasi tanggap darurat	Walikota	Tahun 2025 - 2029

E. Rencana Komunikasi RTP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perluasan beasiswa daerah dan pemantauan anak putus sekolah berbasis data	Sosialisasi, website, media cetak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Masyarakat, siswa, orang tua	2025–2029	–	Memperluas jangkauan program BOS/PKH
2	Pembangunan RS rujukan dan peningkatan layanan promotif-preventif	Media sosial, brosur, forum publik	Dinas Kesehatan	Masyarakat umum	2025–2029	–	Mengatasi keterbatasan rujukan & fasilitas kesehatan
3	Penyusunan SOP terpadu dan penguatan shelter dan sistem pelaporan online	Laporan, website, hotline	UPTD PPA	Anak-anak, masyarakat, aparat	2025–2029	–	Meningkatkan efektivitas perlindungan anak
4	Peningkatan program padat karya dan UMKM berbasis komunitas	Pelatihan, media lokal, pertemuan komunitas	Dinas Perdagangan Koperasi & UKM	Masyarakat miskin	2025–2029	–	Menekan kemiskinan dari akar masalah
5	Digitalisasi rantai distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah	Sistem informasi harga, media massa	Dinas Pangan dan Pertanian	Pedagang & masyarakat	2025–2029	–	Mengendalikan harga kebutuhan pokok
6	Peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan industri dan inkubasi wirausaha	BLK, seminar, online platform	DPMPTSP	Pencari kerja & calon wirausaha	2025–2029	–	Memperluas kesempatan kerja
7	Peningkatan infrastruktur sekolah dan penguatan supervisi dan evaluasi	Rapat koordinasi, laporan, media lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Siswa, guru, orang tua	2025–2029	–	Meningkatkan RLS
8	Peningkatan sertifikasi guru, perbaikan sarana-prasarana dan mekanisme koordinasi	Workshop, forum OPD, laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru, OPD terkait	2025–2029	–	Memenuhi SPM Pendidikan
9	Perluasan program pembiayaan dan pelatihan digital untuk pemuda	Pelatihan online & offline, media sosial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pemuda	2025–2029	–	Meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda
10	Penguatan promosi investasi, pembangunan infrastruktur dan pelatihan industri	Forum investasi, brosur, website	Dinas Perdagangan Koperasi & UKM	Investor & pelaku industri	2025–2029	–	Mengatasi stagnasi industri pengolahan
11	Digitalisasi UMKM, revitalisasi pasar lokal, dukungan promosi dan pembinaan	Website, media lokal, pelatihan	Dinas Perdagangan Koperasi & UKM	Pedagang & masyarakat	2025–2029	–	Meningkatkan aktivitas perdagangan lokal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
12	Penyederhanaan regulasi, percepatan izin, promosi investasi jangka panjang	Website, seminar, brosur	DPMPTSP	Investor & publik	2025–2029	–	Menarik investasi jangka panjang
13	Diversifikasi investasi, forum investor, percepatan izin, stabilisasi regulasi	Forum & laporan ekonomi	DPMPTSP	Investor & OPD terkait	2025–2029	–	Mengurangi fluktuasi nilai investasi
14	Penyesuaian bantuan sosial, penguatan program padat karya dan UMKM	Media sosial, rapat koordinasi	Dinas Perdagangan Koperasi & UKM	Masyarakat miskin	2025–2029	–	Mengatasi stagnasi pengeluaran rumah tangga
15	Peningkatan teknologi pertanian, optimalisasi lahan, program modernisasi	Pelatihan, brosur, media cetak	Dinas Pangan dan Pertanian	Petani & kelompok tani	2025–2029	–	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian
16	Penguatan distribusi pangan, diversifikasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran	Website, forum publik	Dinas Pangan dan Pertanian	Masyarakat	2025–2029	–	Mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan
17	Penguatan SOP audit internal dan pembinaan anti-konflik kepentingan	Laporan internal, workshop	Inspektorat	OPD & pegawai	2025–2029	–	Meningkatkan nilai SPI (KPK)
18	Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem keuangan	Pelatihan, sistem online	BPKD	OPD & staf keuangan	2025–2029	–	Memperbaiki pengelolaan keuangan daerah
19	Digitalisasi aset dan audit berkala	Sistem informasi, laporan	BPKD	OPD terkait	2025–2029	–	Optimalisasi pengelolaan aset
20	Modernisasi sistem pajak, edukasi wajib pajak, penguatan monitoring	Sosialisasi, website	BPKD	Wajib pajak	2025–2029	–	Meningkatkan rasio pajak daerah
21	Perluasan basis pajak dan optimalisasi PAD	Laporan, workshop	BPKD	OPD & masyarakat	2025–2029	–	Mendukung pertumbuhan PAD
22	Penguatan edukasi hukum dan kapasitas penegak perda	Sosialisasi, pelatihan	Satpol PP	Masyarakat & aparat	2025–2029	–	Mengurangi pelanggaran Perda
23	Peningkatan program mediasi, forum diskusi dan sosialisasi toleransi	Forum komunitas, media lokal	Dinas Sosial & Kesbangpol	Masyarakat & pemuda	2025–2029	–	Meningkatkan indeks harmoni
24	Peningkatan layanan sosial dan distribusi bantuan lebih merata	Sistem online, sosialisasi	Dinas Sosial	PPKS & masyarakat	2025–2029	–	Menurunkan angka PPKS

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
25	Percepatan proyek dan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur	Laporan proyek, media internal	Dinas PUPR	OPD & masyarakat	2025–2029	–	Meningkatkan IKLI KePUan
26	Percepatan pembangunan rumah layak dan terjangkau	Sosialisasi, website, media lokal	Dinas Perkim LH	Masyarakat	2025–2029	–	Meningkatkan IKLI Perkim
27	Perluasan subsidi dan pembangunan rumah layak	Sosialisasi, media cetak	Dinas Perkim LH	Rumah tangga berpenghasilan rendah	2025–2029	–	Meningkatkan proporsi hunian layak
28	Regulasi emisi, transportasi publik dan penghijauan kota	Kampanye, media sosial	Dinas Perkim LH & Perhubungan	Masyarakat & pengemudi	2025–2029	–	Menurunkan polusi udara
29	Peningkatan pengawasan limbah dan sistem pengolahan air	Laporan, media lokal	Dinas Perkim LH	Industri & masyarakat	2025–2029	–	Memperbaiki kualitas air
30	Rehabilitasi lahan dan regulasi pertanian ramah lingkungan	Sosialisasi, pelatihan	Dinas Pangan dan Pertanian	Petani	2025–2029	–	Menjaga kualitas lahan
31	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan koordinasi tanggap darurat	Simulasi, rapat koordinasi	BPBD	Masyarakat & OPD	2025–2029	–	Meningkatkan IKD

F. Rencana Pemantauan RTP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perluasan beasiswa daerah dan pemantauan anak putus sekolah berbasis data	Laporan rutin, dashboard data siswa, sosialisasi berkala	Dinas Pendidikan	2025–2029	–	Memperluas jangkauan program BOS/PKH
2	Pembangunan RS rujukan dan peningkatan layanan promotif-preventif	Laporan progres pembangunan, monitoring layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025–2029	–	Mengatasi keterbatasan rujukan & fasilitas kesehatan
3	Penyusunan SOP terpadu dan penguatan shelter dan sistem pelaporan online	Evaluasi SOP, audit layanan, laporan hotline	UPTD PPA	2025–2029	–	Meningkatkan efektivitas perlindungan anak
4	Peningkatan program padat karya dan UMKM berbasis komunitas	Laporan pelaksanaan, kunjungan lapangan, forum komunitas	Dinas Sosial & UMKM	2025–2029	–	Menekan kemiskinan dari akar masalah
5	Digitalisasi rantai distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah	Monitoring harga, audit distribusi, laporan stok	Dinas Perdagangan & Pertanian	2025–2029	–	Mengendalikan harga kebutuhan pokok
6	Peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan industri dan inkubasi wirausaha	Laporan pelatihan, evaluasi peserta, forum industri	Dinas Tenaga Kerja	2025–2029	–	Memperluas kesempatan kerja
7	Peningkatan infrastruktur sekolah dan penguatan supervisi dan evaluasi	Monitoring pembangunan & evaluasi kinerja guru	Dinas Pendidikan	2025–2029	–	Meningkatkan RLS
8	Peningkatan sertifikasi guru, perbaikan sarana-prasarana dan mekanisme koordinasi	Laporan sertifikasi, inspeksi sarana-prasarana, rapat koordinasi OPD	Dinas Pendidikan	2025–2029	–	Memenuhi SPM Pendidikan
9	Perluasan program pembiayaan dan pelatihan digital untuk pemuda	Laporan pelatihan & pemanfaatan modal, evaluasi program	Dinas Pemuda & UMKM	2025–2029	–	Meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda
10	Penguatan promosi investasi, pembangunan infrastruktur dan pelatihan industri	Laporan investasi, monitoring proyek & pelatihan	Dinas Perindustrian & Penanaman Modal	2025–2029	–	Mengatasi stagnasi industri pengolahan
11	Digitalisasi UMKM, revitalisasi pasar lokal, dukungan promosi dan pembinaan	Laporan kegiatan & evaluasi, monitoring pedagang	Dinas Perdagangan	2025–2029	–	Meningkatkan aktivitas perdagangan lokal
12	Penyederhanaan regulasi, percepatan izin, promosi investasi jangka panjang	Evaluasi regulasi & izin, laporan forum investor	Dinas Penanaman Modal	2025–2029	–	Menarik investasi jangka panjang
13	Diversifikasi investasi, forum investor, percepatan izin, stabilisasi regulasi	Laporan forum & monitoring izin, evaluasi regulasi	Dinas Penanaman Modal	2025–2029	–	Mengurangi fluktuasi nilai investasi
14	Penyesuaian bantuan sosial, penguatan program padat karya dan UMKM	Laporan pelaksanaan & evaluasi dampak	Dinas Sosial	2025–2029	–	Mengatasi stagnasi pengeluaran rumah tangga

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
15	Peningkatan teknologi pertanian, optimalisasi lahan, program modernisasi	Monitoring penggunaan teknologi & hasil panen	Dinas Pertanian	2025–2029	–	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian
16	Penguatan distribusi pangan, diversifikasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran	Laporan distribusi & evaluasi efektivitas bantuan	Dinas Pertanian & Sosial	2025–2029	–	Mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan
17	Penguatan SOP audit internal dan pembinaan anti-konflik kepentingan	Laporan audit internal, evaluasi SOP	Inspektorat	2025–2029	–	Meningkatkan nilai SPI (KPK)
18	Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem keuangan	Monitoring pelatihan & evaluasi sistem	BPKAD	2025–2029	–	Memperbaiki pengelolaan keuangan daerah
19	Digitalisasi aset dan audit berkala	Laporan aset & audit, inspeksi berkala	BPKAD	2025–2029	–	Optimalisasi pengelolaan aset
20	Modernisasi sistem pajak, edukasi wajib pajak, penguatan monitoring	Monitoring pembayaran & kepatuhan, laporan audit	BPKAD	2025–2029	–	Meningkatkan rasio pajak daerah
21	Perluasan basis pajak dan optimalisasi PAD	Laporan basis pajak & evaluasi PAD	BPKAD	2025–2029	–	Mendukung pertumbuhan PAD
22	Penguatan edukasi hukum dan kapasitas penegak perda	Laporan sosialisasi & pelatihan, evaluasi kepatuhan	Satpol PP & Hukum	2025–2029	–	Mengurangi pelanggaran Perda
23	Peningkatan program mediasi, forum diskusi dan sosialisasi toleransi	Laporan forum & evaluasi interaksi komunitas	Dinas Sosial & Kesbangpol	2025–2029	–	Meningkatkan indeks harmoni
24	Peningkatan layanan sosial dan distribusi bantuan lebih merata	Laporan distribusi & evaluasi layanan	Dinas Sosial	2025–2029	–	Menurunkan angka PPKS
25	Percepatan proyek dan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur	Monitoring progres proyek & realisasi anggaran	Dinas PUPR	2025–2029	–	Meningkatkan IKLI KePUan
26	Percepatan pembangunan rumah layak dan terjangkau	Laporan pembangunan & evaluasi kebutuhan masyarakat	Dinas Perkim	2025–2029	–	Meningkatkan IKLI Perkim
27	Perluasan subsidi dan pembangunan rumah layak	Monitoring distribusi subsidi & pembangunan rumah	Dinas Perkim	2025–2029	–	Meningkatkan proporsi hunian layak
28	Regulasi emisi, transportasi publik dan penghijauan kota	Monitoring emisi & program penghijauan, laporan transportasi	Dinas LH & Perhubungan	2025–2029	–	Menurunkan polusi udara
29	Peningkatan pengawasan limbah dan sistem pengolahan air	Monitoring pembuangan limbah & kualitas air	Dinas LH	2025–2029	–	Memperbaiki kualitas air

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
30	Rehabilitasi lahan dan regulasi pertanian ramah lingkungan	Monitoring penggunaan lahan & praktik pertanian	Dinas Pertanian & LH	2025–2029	–	Menjaga kualitas lahan
31	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan koordinasi tanggap darurat	Simulasi & evaluasi kesiapsiagaan	BPBD	2025–2029	–	Meningkatkan IKD

G. Kriteria Penilaian Risiko

A. SKALA DAMPAK RISIKO

Kategori Dampak	Skor	Uraian				
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum	Pelayanan
Sangat Signifikan	5	Kerugian sangat besar, >Rp500 juta	Pencapaian target kinerja < 25%	Negatif, tersebar luas di semua media nasional/internasional	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari
Signifikan	4	Kerugian besar, Rp100 juta s/d Rp500 juta	Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50%	Negatif, tersebar di beberapa media nasional	Pelanggaran serius, sanksi tertulis	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari
Moderat	3	Kerugian cukup besar, Rp100 juta s/d Rp100 juta	Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80%	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari
Minor	2	Kerugian kurang material, Rp10 juta s/d Rp50 juta	Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100%	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, > 3 kali dalam satu periode	Pelanggaran biasa, sanksi teguran	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material, <Rp10 juta	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali dalam satu periode	Tidak material	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari

C. SKALA NILAI RISIKO

Matrik Analisis Penilaian Risiko (Skala 5 x 5)			Dampak				
			1	2	3	4	5
Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Tingkat Risiko	Level Risiko	Prioritas Risiko	Nilai Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	20	
		3	16	
		4	15	
4	Tinggi	5	12	
		6	10	
3	Sedang	7	9	
		8	8	
		9	6	
		10	5	
2	Rendah	11	4	
		12	3	
1	Sangat Rendah	13	2	
		14	1	

B. SKALA KEMUNGKINAN RISIKO

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat Sering Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51-70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 Tahun)
Kadang Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 Tahun)
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 Tahun)
Hampir Tidak Terjadi	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

A. KATEGORI RISIKO

No	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Kota.
2	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Kota atau perangkat daerah.
4	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Kota atau perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain.
5	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemerintah Kota, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Kota dengan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan/atau antar perangkat daerah.